



TANTANGAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID 19

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



TANTANGAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID 19

Suprapno | Fadqur | Totok | Haryanto | Moh. Nur Hidayatullah
Muhammad Hasan | Agung Wijaksono | Titin Nurhidayati
Muhammad Rafi'i | Fridiyanto | Rikawati Ginting Munthe | Muhaemin

TANTANGAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Penulis : Suprapno, Fadqur, Totok, Haryanto, Moh. Nur Hidayatullah, Muhammad Hasan, Agung Wijaksono, Titin Nurhidayati, Muhammad Rafi'i, Fridiyanto, Rikawati Ginting, Munthe, Muhaemin.

ISBN : 978-623-329-202-3

Copyright © Juni 2021

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: x + 218

Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Ahmad Ariyanto
Penyelaras aksara : Nur Azizah Rahma

Cetakan I, Juni 2021

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perumahan Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi

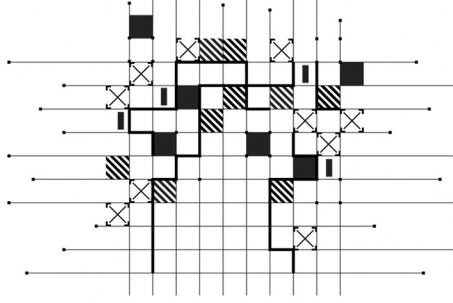
Perumahan Puncak Joyo Agung Regency Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6282233992061

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PRAKATA

Kumpulan tulisan tentang tantangan pendidikan di masa pandemi ini cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa para pengajar, siswa dan mahasiswa, bahkan wali atau orang tua peserta didik tengah kesulitan beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan itu diambil dalam rangka memfasilitasi siswa/mahasiswa di Indonesia agar tetap memperoleh pendidikan meskipun tidak secara tatap muka.

Bagi pemelajar, pembelajaran jarak jauh ini membuat mereka kesulitan memahami materi sebab tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan guru/dosen dan teman-teman lainnya. Namun melalui pembelajaran daring secara tidak langsung memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pemelajar untuk menggali materi dari berbagai sumber.

Kemudian bagi pengajar, mereka merasa terbebani oleh administrasi yang harus dilengkapi dan kesulitan memilih media, metode, dan cara mengajar yang sesuai sebab tidak ada pertemuan tatap muka dengan siswa/mahasiswanya. Khusus bagi guru senior, mereka kesulitan mengoperasikan komputer dan aplikasi online yang akan digunakannya untuk melakukan pembelajaran virtual.

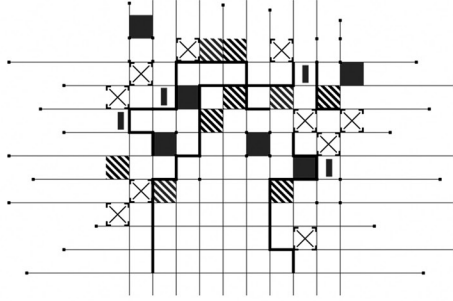
Bagi orang tua atau pendamping siswa di rumah, mereka merasa kesulitan membagi tugas antara menemani anak-anak mereka belajar dan menyelesaikan pekerjaan rumah, terlebih lagi bagi orang tua yang bekerja dari rumah. Akibat adanya perusahaan yang merumahkan karyawannya, banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan dan hal tersebut berdampak pada kondisi ekonomi keluarganya. Tuntutan untuk memenuhi fasilitas belajar di rumah seperti kuota internet, pulsa, laptop dan telepon genggam lebih dari satu untuk mereka yang mempunyai anak lebih dari satu menambah kesulitan tersendiri.

Secara umum, tantangan pendidikan di masa pandemi ini terletak pada pelaksanaan proses pembelajarannya. Terlebih lagi bagi sekolah-sekolah 3T yang belum mampu menjangkau signal internet dan teknologi. Terlepas dari

semua kesulitan yang dihadapi, pembelajaran jarak jauh ini membuat pengajar-pengajar kita lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang telah tersedia.

Demikian buku ini dibuat agar masyarakat dapat mengetahui kondisi pendidikan di masa pandemi. Kami berharap masyarakat, pemerintah, dan penggait pendidikan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan demi menciptakan generasi bangsa yang berpengetahuan, mandiri, dan pandai membaca peluang.

Selamat membaca!



DAFTAR ISI

Prakata — v

Daftar Isi — ix

Pemanfaatan Teknologi Pendidikan di Masa Pandemi — 1

Definisi Teknologi Pendidikan — 4

Berbagai Platform untuk Pembelajaran — 5

Membentuk Karakter Siswa — 8

Kendala Pembelajaran — 11

Dampak Teknologi Pendidikan — 13

Daftar Bacaan — 13

Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh — 15

Definisi — 17

PJJ di Masa Pandemi — 19

Penerapan PJJ Berdasarkan Hasil Penelitian — 23

Tantangan Penerapan PJJ — 26

Solusi Penerapan PJJ — 30

Kesimpulan dan Saran Penerapan PJJ — 32

Daftar Bacaan — 33

Bentuk Nilai-nilai, Kerja Sama, dan Kompetensi Guru — 35

Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Siswa — 42

Nilai-nilai yang Ditanamkan Selama Pembelajaran Daring — 43

Peningkatan Kompetensi Guru di Masa Pandemi — 45

Tips Mengajar Daring — 49

Daftar Bacaan — 51

Pembelajaran Mandiri — 53

- Definisi — 54
- Model Pengembangannya — 58
- Penerapan Metode Pembelajarannya — 62
- Kelebihan dan Kekurangannya — 66
- Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19 — 67
- Daftar Bacaan — 70

Akses Internet dan Demografi Indonesia — 71

- Pendidikan dan Pandemi COVID-19: Sebuah Perubahan Paradigma — 72
- Pendidikan dan Akses Internet — 74
- Pendidikan dan Demografi — 78
- Akses Internet dan Demografi: Bagaimana dengan Indonesia? — 79
- Rangkuman — 80
- Daftar Bacaan — 81

Kebijakan Merdeka Belajar — 83

- Munculnya Kebijakan Merdeka Belajar — 85
- Merdeka Belajar: Perspektif Analisis Kebijakan Pendidikan — 89
- Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Jaminan Kebebasan Akademik — 94
- Daftar Bacaan — 100

Kampus Merdeka dan Peluang Penerapan Paradigma Transintegrasi Ilmu — 103

- Filosofi — 105
- Landasan Hukum — 108
- Kegiatan Belajar — 110
- Kampus Merdeka dan Penerapan Transintegrasi Keilmuan — 117
- Simpulan — 120
- Daftar Bacaan — 120

Kesiapan Civitas Akademik — 123

- Upaya Civitas Akademik Menghadapi Kebiasaan Baru — 126
- Problematika Perkuliahan Saat Pandemi — 128
- Model Perkuliahan di Masa Pandemi — 130
- Kelebihan dan Kekurangan — 133
- Kegiatan di Masa Pandemi — 136
- Daftar Bacaan — 140

Kondisi Psikologi Peserta Didik — 141

- Kecemasan Peserta Didik — 145
- Ciri-Ciri, Gejala, dan Tingkat Kecemasan — 149
- Proses Terjadinya Kecemasan — 151
- Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecemasan — 153
- Upaya Mengelola dan Mengurangi Kecemasan — 154
- Beradaptasi dengan Kondisi Pandemi — 155
- Mengatasi Kecemasan di Masa Pandemi — 156
- Kesimpulan — 158
- Daftar Bacaan — 159

Pengaturan Jam Belajar — 161

- Dasar Pengaturan Jam Belajar — 162
- Panduan dan Respons Satuan Pendidikan di Masa Pandemi — 165
- Metode Mengatur Jam Belajar — 170
- Penyesuaian Jam Belajar — 174
- Daftar Bacaan — 176

Keterbatasan Perangkat Pembelajaran — 177

- Pengertian — 178
- Tujuan — 179
- Karakteristik dan Jenisnya — 180
- Persoalan Keterbatasan Perangkat Pembelajaran — 183
- Solusi Keterbatasan Perangkat Pembelajaran — 185
- Daftar Bacaan — 186

Biaya Operasional Sekolah dan Perguruan Tinggi — 187

- Konsep Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan — 188
- Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan — 191
- Biaya Operasional Sekolah — 198

Biaya Operasional Perguruan Tinggi — 201
Biaya Operasional Pendidikan
di Era Pandemi Covid-19 — 205
Daftar Bacaan — 206

Tentang Penulis —

An abstract graphic on the left side of the page consists of a grid of white lines on a dark background. The grid is composed of horizontal and vertical lines that intersect to form a series of squares. Some of these squares are filled with different patterns: some are solid white, some have diagonal hatching, and some have an 'X' pattern. The lines extend slightly beyond the grid boundaries, creating a sense of depth and connectivity.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI-COVID 19

-Suprapno-

Saat ini, media beramai-ramai menyiarkan informasi terkait kasus virus Corona yang semakin menjadi-jadi. Melalui media, kita juga bisa melihat dengan jelas bagaimana keresahan dan kekhawatiran masyarakat. Namun, kita harus tetap fokus pada bagaimana cara dan solusi untuk menghadapi penyebaran virus tersebut. Untuk menyikapi wabah yang sedang kita hadapi, ada baiknya kita perhatikan pesan Nabi Muhammad saw.:

الطَّاعُونَ آيَةَ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِكُمْ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

“*Tha’un* (penyakit menular/wabah) adalah suatu peringatan dari Allah Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Muslim)

Berdasarkan pesan tersebut, ada dua hal yang dapat kita petik: *pertama*, jika kita mendengar berita di suatu negeri atau tempat, maka hendaknya tidak mengunjunginya; *kedua*, jika di tempat tinggal kita terkena wabah, maka hendaknya janganlah keluar. Dua pesan ini adalah upaya yang harus kita lakukan. Di dalamnya, telah terkandung tiga disiplin ilmu, yakni ilmu Tauhid, Fiqih, dan Tasawuf. Secara akidah, lari dari wabah, bukan berarti lari dari takdir Allah, secara Fiqih wajib hukumnya menaati perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak masuk ke tempat penyakit yang sedang mewabah, dan secara Akhlak Tasawuf meskipun dalam keadaan terkena wabah, kita harus beretika dengan tidak menularkannya kepada orang lain (dengan cara isolasi diri). Itulah indahnya pesan Nabi. Lalu bagaimana praktik pesan Nabi tersebut di masa sahabat? Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab hendak berkunjung ke wilayah Syam (kini Suriah) yang baru saja jatuh ke tangan umat Islam. Namun, ketika sang khalifah dan rombongan tiba di daerah Syarh, terdengar kabar bahwa masyarakat Syam tengah menderita penyakit kolera. Mendengar informasi tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menggelar

musyawarah. Atas masukan dari para senior Quraisy Khalifah, Umar mengumumkan untuk membatalkan agenda kunjungannya ke Syam dan mereka kembali ke Madinah.

Dalam konteks ini sebagai umat yang beriman, sebaiknya kita tidak perlu mencari kambing hitam dan saling menyalahkan, koreksi atas tindakan pelaku penyimpangan dari sunatullah. Alangkah bijaknya, kita juga bisa mengambil *'itibar* atau *'ibrah* (pelajaran-pelajaran) dari kasus ini. Karena sejatinya, bagi orang-orang beriman, tak satu peristiwa yang terjadi dalam hidup ini kecuali memiliki hikmah-hikmah sebagaimana firman Allah:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS Ali Imran: 191)

Hikmah (pelajaran) dari kasus Corona ini salah satunya adalah menyingkap beberapa fakta tentang manusia itu sendiri. Adapun fakta-fakta yang dimaksud adalah: pertama, manusia itu, siapapun dan bagaimanapun dunianya, sangat terbatas dalam segala hal. Barangkali, Corona dianggap lemah, tetapi manusia yang kerap merasa hebat pun tampak tidak mampu menghadapinya. Contohnya saat ini, orang-orang China dan Amerika mungkin memiliki kekuatan terbesar di dunia, tetapi mereka pun nyatanya tidak mampu menghadapinya. Dengan ini, telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa: “dan adalah manusia itu lemah (terbatas)”.

Kedua, ilmu dan pengetahuan manusia tentang hidup dan segala yang terkait dengan hidup sangat terbatas dan sedikit. Jika memang manusia hebat dalam hal keilmuan, tentu sebelum kasus ini terjadi sudah dipersiapkan perangkat untuk menangkalnya. Buktinya setelah sekian nyawa melayang, obat dari virus ini pun belum ditemukan. Maka, Al-Qur’an mengingatkan bahwa: “Dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit”.

Ketiga, manusia itu memiliki tabiat yang cenderung “panik”. Panik adalah sikap yang disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan tanpa pertimbangan yang sehat. Reaksi tanpa pertimbangan ini membawa kepada ragam akibat yang tidak sehat, bahkan destruktif. Panik inilah yang menjadikan banyak manusia bereaksi di luar batas. Salah satu contoh sikap panik manusia di masa pandemi ini adalah memborong barang-barang kebutuhan dari pertokoan sehingga ada pihak lain yang dirugikan. Al-Qur’an mengingatkan bahwa: “Dan adalah manusia itu *'ajuuula* (tergesa-tergesa)”.

Keempat, manusia itu sangat rapuh dan labil dalam segala hal. Dengan meluasnya berita tentang Corona di media massa dari pagi hingga malam menyebabkan banyak orang yang kemudian mengalami goncangan jiwa seperti jumlah pasien di rumah sakit yang membludak akibat ketakutan yang

berlebihan. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan dua penyakit berbahaya manusia: "ketakutan dan kesedihan (khauf wa hazan)".

Kelima, manusia itu memiliki tendensi egoistik yang tinggi. Tendensi ini kemudian melahirkan berbagai manipulasi dalam hidup. Hal ini terlihat dari sebagian masyarakat yang menggunakan kesempatan "musibah" untuk meraup keuntungan pribadi dengan memanipulasi harga barang-barang keperluan dasar untuk menghadapi Corona. Masker misalnya tiba-tiba habis di pasaran dan hanya ditemukan dengan harga yang ratusan kali lipat. Al-Qur'an mengingatkan: "Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan".

Keenam, manusia itu perlu sadar zaman. Dunia kita adalah dunia global yang ditandai oleh apa yang disebut ketergantungan. Corona awalnya terjadi di China dan kini hampir semua bagian dunia ikut merasakan akibatnya, bahkan Amerika sadar bahwa kebutuhan obat-obatannya terancam krisis karena selama ini 80% diproduksi oleh China. Al-Qur'an menyebutkan, "Sungguh Kami (Tuhan) telah jadikan kamu dari seorang laki dan seorang wanita. Lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal".

Penulis berharap semoga Corona tidak saja hadir membawa seribu satu kekhawatiran dan ketakutan, tetapi juga untuk mengingatkan semua manusia dalam banyak hal. Semoga ujian Corona ini menyadarkan manusia untuk belajar rendah hati, bahkan merendahkan diri di hadapan yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Tentu harus kita ingat, apapun yang kita hadapi saat ini akan berlalu. Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Apabila kita ridho pada sesuatu yang mengecewakan hati, maka percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tak disangka-sangka. Hadiah tak semestinya berbungkus dengan bahagia, terkadang ia terbungkus dengan ujian, tetapi di dalamnya ada hikmah yang luar biasa.

Definisi Teknologi Pendidikan

Secara historis, bidang teknologi pendidikan lahir di Amerika Serikat yang pada saat itu sedang terlibat Perang Dunia II sehingga memerlukan personel militer yang terampil dalam mengoperasikan peralatan perang. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan yang efektif. Setelah itu, pelatihan dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai media dan simulator untuk meningkatkan kinerja personel militer yang kemudian dikenal dengan istilah teknologi kinerja (*performance technology*). Pada saat itu, perkembangan teknologi berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dimanfaatkan untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pada hakikatnya, teknologi pendidikan mencakup upaya-upaya yang dapat bermanfaat untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada setiap individu. Hal ini sejalan dengan definisi teknologi pendidikan terbaru yang dikemukakan oleh *The Association of Educational Communication and Technology (The AECT)* yakni, “...sebuah studi dan praktik etis yang digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan proyek, teknologi, dan sumber daya yang tepat.”

Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, teknologi pendidikan adalah “*metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran dengan memperhatikan, baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif*”. Sedangkan menurut Kandung (2014), teknologi pendidikan adalah teori dan praktik dengan maksud membantu jalannya pembelajaran serta meningkatkan performa dengan menyusun, memanfaatkan, dan mengolah terkait proses serta sumber teknologi yang memadai. Teknologi pendidikan menjadi perantara dalam membantu jalannya proses pendidikan dengan maksud mencapai efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan. (Ni Komang Suni Astini, 2020)

Ada pula Tahir (2016) mengemukakan bahwa teknologi pendidikan merupakan proses strategi terpadu dalam upaya memecahkan masalah pembelajaran. Pendapat tersebut relevan dengan pernyataan Muffoletto dalam Selwyn (2011) yang mengatakan bahwa teknologi pendidikan bukan mengenai alat, melainkan proses serta sistem yang mengarah pada hasil yang ingin dicapai. Lestari (2018) juga turut menjelaskan bahwa teknologi pendidikan merupakan sistem yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan segala upaya yang dimaksud untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait dengan pembelajaran.

Berbagai Platform untuk Pembelajaran

1. Pembelajaran daring

Menurut Dabbagh dan Ritland (dalam Arnesi dan Hamid, 2015), pembelajaran *online* adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan) yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti.

2. *E-learning*

E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa belajar di manapun dan kapanpun (Dahiya dalam Hartanto, 2016). *E-learning* memiliki dua tipe, yaitu *synchronous* dan *asynchronous*.

Synchronous learning atau yang sering disebut *virtual classroom* berarti aktivitas sekelompok siswa yang belajar pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara *online*. Dalam pelaksanaannya, *synchronous training* mengharuskan pendidik dan peserta didik mengakses internet secara bersamaan. Pendidik memberikan materi pembelajaran dalam bentuk makalah atau slide presentasi, sementara peserta didik dapat mendengarkan presentasi secara langsung melalui internet. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung ataupun melalui *chat window*. *Synchronous training* merupakan gambaran dari kelas nyata, tetapi bersifat maya (*virtual*) dan semua peserta didik terhubung melalui internet.

Sebaliknya, *asynchronous learning* berarti proses pembelajaran yang waktunya tidak dilakukan secara bersamaan. Dengan kata lain, peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda dengan pendidik memberikan materi. *Asynchronous training* populer dalam *e-learning* karena peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran di manapun dan kapanpun. Peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikannya setiap saat sesuai rentang jadwal yang sudah ditentukan. Pembelajaran yang disuguhkan dapat berbentuk bacaan, animasi, simulasi, permainan edukatif, tes, kuis, dan pengumpulan tugas.

Komponen yang membentuk *e-learning* menurut Romi Satria Wahono (dalam Hartanto, 2016) adalah infrastruktur, sistem dan aplikasi, serta konten. Infrastruktur merupakan peralatan yang digunakan dalam *e-learning* yang dapat berupa *Personal Computer* ((PC) yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi, jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, *hub*, *switch*, *router*, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Internet merupakan singkatan dari *Interconnection Networking* yang diartikan sebagai komputer-komputer yang terhubung di seluruh dunia, sementara perlengkapan multimedia adalah alat-alat media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Termasuk di dalamnya peralatan *teleconference* yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Apabila kita memberikan layanan *synchronous learning*,

maka peserta didik dan pendidik sedang belajar melalui *teleconference*.

Sistem dan aplikasi *e-learning* atau sering disebut *Learning Management System* (LMS), merupakan sistem perangkat lunak yang menggambarkan proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas dan peristiwa *online*, program *e-learning*, dan konten pelatihan, misalnya segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian daring yang semuanya diakses melalui internet.

Pelaku utama dalam pelaksanaan *e-learning* dapat dimaksudkan sama dengan proses belajar mengajar konvensional yaitu perlu adanya pendidik (dosen) sebagai pembimbing; siswa (peserta didik) yang menerima bahan ajar; dan administrator yang mengelola administrasi serta proses belajar mengajar (Hartanto, 2016).

3. Google Classroom

Menurut Afrianti dalam Yustianti dan Novita (2019), Google Classroom atau ruang kelas Google merupakan serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas (*paperless*).

4. WhatsApp

WhatsApp merupakan salah satu media yang sangat populer digunakan saat ini untuk melakukan percakapan baik menggunakan teks, suara, maupun video. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan kita untuk terhubung dengan teman dan keluarga di manapun dan kapanpun. Bahkan, WhatsApp saat ini sering kali digunakan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui *video call* ataupun membuat grup-grup tertentu, misalnya grup kelas, grup kelompok belajar, dan lain sebagainya.

Selanjutnya menurut Niken, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, WhatsApp adalah aplikasi yang paling diminati masyarakat dalam berkomunikasi melalui internet. “*Delapan puluh tiga persen dari 171 juta pengguna internet kita adalah pengguna WhatsApp yang menghubungkan antara masyarakat*”, ungkapnya dalam peluncuran program edukasi “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jakarta, Senin 18 November 2020.

5. Zoom

Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh berbagai perangkat seluler,

desktop, hingga telepon dan sistem ruang. Salah satu fitur dalam aplikasi ini adalah Zoom Meeting yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.

Pendiri aplikasi Zoom Meeting adalah Eric Yuan yang diresmikan pada 2011. Kantor pusatnya berada di San Jose, California. Aplikasi ini tidak hanya dapat digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga untuk kepentingan perkantoran ataupun lainnya. Selama 40 menit, pengguna akan diberikan kesempatan menggunakan aplikasi ini secara gratis dan jika ingin menggunakannya lebih lama lagi, maka pengguna harus menggunakan akun berbayar (Afifadiyah Rahman, 2020).

6. YouTube

Salah satu media penunjang pembelajaran berbasis internet yang dapat memvisualisasikan teknik dan materi pembelajaran yang baik adalah YouTube (Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani, 2020). YouTube adalah layanan video *sharing* populer yang para penggunanya dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Aplikasi ini menjadi salah satu media sosial yang praktis dan mudah diakses. Sebagaimana fungsinya, media sosial saat ini dapat menjadi alat pengajaran untuk menyebarkan informasi kepada siswa dan masyarakat umum (Green dan Hope, 2010). Bahkan, penggunaan video interaktif seperti YouTube ke dalam proses pembelajaran akan meningkatkan keterampilan peserta didik (Burnett dan Melissa, 2008 dalam Wijanarko, 2017). Selain itu, YouTube dapat menjadi alternatif untuk mempelajari keterampilan berbasis video sekaligus sebagai alat pengajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif antarkelompok siswa dalam rangka peningkatan pengetahuan (Herman, 2006; Carpenter dkk, 2008 dalam Suryaman, 2015).

Membentuk Karakter Siswa

Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia telah merumuskan 18 nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri warga Indonesia, khususnya siswa dalam upaya membangun dan menguatkan karakter bangsa. Nilai-nilai pendidikan yang dimaksud akan diuraikan sebagaimana berikut.

1. Religius

Sifat religius dapat dilakukan dengan menjadi individu yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contoh sehari-hari yang dapat diterapkan adalah dengan melaksanakan sholat dhuha dan membaca Al-Qur'an sebelum memulai pelajaran atau ibadah lain sesuai agama yang dianut peserta didik (Suprapno: 2019).

2. Jujur
Dengan menjadi pribadi yang jujur, akan membuat diri kita sebagai seseorang yang selalu dapat dipercaya dalam hal apapun. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan di mana saja seperti tidak menyontek tugas atau dalam tes dan selalu terbuka kepada kedua orang tua.
3. Toleransi
Sebagai masyarakat yang hidup di negara dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” maka penting adanya sifat toleransi kepada sesama warga negara. Salah satu sikap toleransi dalam perilaku sehari-hari adalah tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan.
4. Disiplin
Dengan adanya sifat disiplin, masyarakat dapat menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh sehari-hari yang bisa kita lakukan adalah dengan menaati peraturan cara berpakaian yang sopan di sekolah.
5. Kerja keras
Masyarakat Indonesia memiliki semangat dan kerja keras yang tinggi dalam hal apapun. Sifat kerja keras dapat ditunjukkan dengan selalu serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif
Pada era globalisasi ini, pemikiran kreatif sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, kita diharuskan mampu berpikir *outside of the box* sehingga kita mampu menghasilkan karya yang inovatif dan berguna bagi banyak orang.
7. Mandiri
Pada dasarnya, manusia dituntut untuk bisa melakukan semua hal secara mandiri sehingga kita tidak mudah bergantung pada orang lain. Contohnya dalam perilaku sehari-hari adalah mampu melaksanakan tugas sendiri bila masih dapat dilakukan sendiri.
8. Demokratis
Masyarakat Indonesia harus memiliki kepribadian yang demokratis. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
9. Rasa ingin tahu
Timbulnya rasa ingin tahu membuat kita selalu ingin mengetahui lebih mendalam tentang segala sesuatu yang telah dan dapat kita pelajari. Contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan terus-menerus belajar dan rajin menimba ilmu.

10. Semangat kebangsaan
Sikap semangat kebangsaan dapat ditunjukkan dengan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi. Contohnya menciptakan prestasi dalam segala bidang.
11. Cinta tanah air
Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan bersikap dan berperilaku yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa seperti dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menaati peraturan yang ada.
12. Menghargai prestasi
Sikap menghargai prestasi haruslah ditunjukkan, baik itu untuk prestasi pribadi maupun orang lain. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memberi pujian kepada orang lain atas kemenangan atau prestasi yang telah diraih.
13. Bersahabat
Kita pasti akan membutuhkan orang lain dalam segala urusan sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk selalu bersahabat dalam pertemanan serta komunikatif kepada siapapun. Contoh yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa bersikap ramah dan sopan kepada orang tua, teman, dan tetangga.
14. Cinta damai
Cinta damai adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Contoh dalam perilaku sehari-hari ialah tidak membuat ujaran kebencian dan tidak melakukan perundungan.
15. Gemar membaca
Sikap gemar membaca akan menciptakan masyarakat dengan pemikiran terbuka akan berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai sudut pandang.
16. Peduli lingkungan
Sikap peduli lingkungan dapat ditunjukkan dengan senantiasa menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kita dan memperbaikinya jika ada kerusakan. Contoh kecil dari sikap ini seperti membuang sampah pada tempatnya dan selalu membersihkan lingkungan sekolah dan sekitar kita.
17. Peduli sosial
Sikap peduli sosial sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia dalam rangka memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggung jawab

Bertanggung jawab dalam segala perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan merupakan kewajiban pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang bisa kita terapkan adalah dengan selalu amanah terhadap hal-hal yang kita lakukan (Dewi Srigati, 2020).

Kendala Pembelajaran

Belajar merupakan proses perubahan dalam diri manusia yang tampak dalam bentuk peningkatan perilaku baik secara kuantitas dan kualitas, seperti kecakapan, pengetahuan, kebiasaan, daya pikir, dan berbagai kemampuan lainnya (Thursan Hakim 2005). Pembelajaran idealnya dirancang dan diselenggarakan secara interaktif dan menyenangkan untuk mendorong kreativitas dan kemandirian anak sesuai tahapan perkembangannya. Hal tersebut dapat dilakukan jika proses pembelajaran dilaksanakan dengan adanya perencanaan dari guru dan situasi mendukung di sekitarnya. Proses pembelajaran yang berlangsung tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang kondusif akan menyebabkan munculnya berbagai kendala, termasuk dalam proses belajar di rumah selama pandemi covid-19.

Salah satu kendala yang dihadapi anak saat belajar di rumah adalah anak mengalami rasa bosan ketika mengikuti pembelajaran, malas mengerjakan tugas, sulit konsentrasi, dan tidak mendengarkan nasihat orang tua. Sari dkk (2020) mengemukakan bahwa munculnya rasa bosan berada di rumah dalam jangka waktu yang lama adalah suatu hal yang normal karena pada fitrahnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Adapun Putri dkk (2020) yang mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa salah satu kendala proses belajar di masa pandemi adalah siswa kurang bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman sebaya dan kurang disiplin dalam belajar, terutama anak di bawah kelas 4 sekolah dasar.

Berbagai gejala yang dialami dalam pembelajaran daring menyebabkan ketidakseimbangan komponen psikologis yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang disebabkan kejenuhan belajar (Dhawan 2020). Perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang mengalami kejenuhan belajar, di antaranya mudah marah, sensitif, dan rentan frustrasi yang berakibat pada penurunan konsentrasi dan kemampuan memahami intisari materi pelajaran. Kejenuhan belajar dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi dan daya serap dari materi yang diberikan (Hidayat 2016; Siti Rohimah 2020). Rahman (2007) menambahkan bahwa kejenuhan dalam belajar akan memberikan dampak negatif terhadap hasil belajar sehingga proses pembelajaran tidak berjalan optimal.

Kendala lain yang ditemui dalam proses belajar dari rumah adalah ketidakmampuan orang tua mendampingi anak secara maksimal karena orang tua merasa kelelahan. Kelelahan tersebut dipengaruhi oleh multi peran orang tua sebagai pendidik, pembimbing, pengawas, dan pengelola rumah agar rumah senantiasa nyaman dan mendukung aktivitas anggota keluarganya selama belajar (Kurniati, Nur Alfaeni, dan Andriani 2020). Akibat dari kelelahan adalah cenderung melantarkan anak ketika mereka menerima proses pembelajaran (Griffith 2020). Berbagai kendala yang terjadi selama proses belajar menyebabkan anak dan orang tua menginginkan kembali belajar di sekolah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2020) bahwa 61% anak menjadi rewel belajar di rumah karena rindu suasana belajar di sekolah bersama teman dan gurunya.

Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah dapat menumbuhkan bakat dan kreativitas anak di masa pandemi (Huda dan Munastiwi 2020). Ruangan yang tenang akan membantu seseorang dalam berkonsentrasi dan meminimalisir faktor-faktor yang dapat mengalihkan perhatian anak saat belajar (Rita Maryana dan Rachmawati, 2010). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Kurniawan (2019) bahwa pentingnya menata ruang belajar senyaman mungkin dengan selalu menjaga kebersihan ruangan, penataan warna cat ruangan yang terang, dan memajang gambar yang menarik untuk menjaga semangat belajar anak. Mengatur jadwal bermain anak juga merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi kejenuhan belajar. Pada anak usia dini, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan memegang peranan penting bagi perkembangan di usia selanjutnya sehingga anak perlu untuk mendapatkan stimulasi yang tepat. Stimulasi dapat dilakukan melalui bermain, hal ini penting dan tidak bisa dipisahkan dari dunia anak karena melalui bermain anak dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan dalam dirinya. Berbagai kendala yang dihadapi oleh orang tua harus bisa segera diatasi karena orang tua memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas (Putri dkk, 2020).

Kendala selanjutnya adalah minimnya fasilitas yang mendukung pembelajaran daring. Delapan belas persen kendala pembelajaran daring di rumah adalah jaringan internet yang kurang lancar, pembiayaan untuk membeli kuota, dan ketersediaan perangkat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak lebih dari satu. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Dhawan (2020) bahwa pembelajaran daring yang dilakukan di masa pandemi merupakan solusi yang tepat agar proses pembelajaran dapat terus berlangsung karena bersifat fleksibel dalam hal waktu dan lokasi. Namun demikian, pembelajaran daring masih mengalami beberapa kendala seperti gangguan dalam instalasi, gangguan *login*, audio, video, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian Sadikin dan Hamidah (2020) yang dilakukan pada jenjang perguruan tinggi

juga mengungkapkan bahwa ketersediaan layanan internet yang masih kurang optimal di berbagai wilayah Indonesia dan pembiayaan internet yang mahal masih menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran daring yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah untuk bisa segera diatasi.

Dampak Teknologi Pendidikan

Berkembangnya teknologi pendidikan sampai saat ini memberikan warna dalam proses pembelajaran. Dampak teknologi pendidikan di masa pandemi yang pertama adalah terciptanya berbagai platform pembelajaran. Hal ini memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Hadirnya berbagai platform, baik aplikasi, web/blog, video, podcast ataupun yang lainnya dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada peserta didik mengenai perkembangan teknologi. Selain itu adanya bimbingan pembelajaran jarak jauh seperti ruang guru, zenius, dan lain-lain dapat menjadi jembatan peserta didik dalam belajar.

Manfaat kedua ialah teknologi pendidikan memudahkan peserta didik dalam mencari sumber belajar. Melihat dari media pembelajaran yang digunakan saat pandemi, peserta didik lebih leluasa mencari dan mengakses sumber belajar yang mereka butuhkan. Namun, apabila internet tidak digunakan dengan baik, peserta didik akan dapat mengakses hal-hal yang tidak dibutuhkan ataupun merusak moral.

Manfaat ketiga adalah memberi kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan adanya teknologi pendidikan, pembelajaran lebih luwes dilakukan tanpa harus bertatap muka (Unik Hanifah Salsabila dkk 2020).

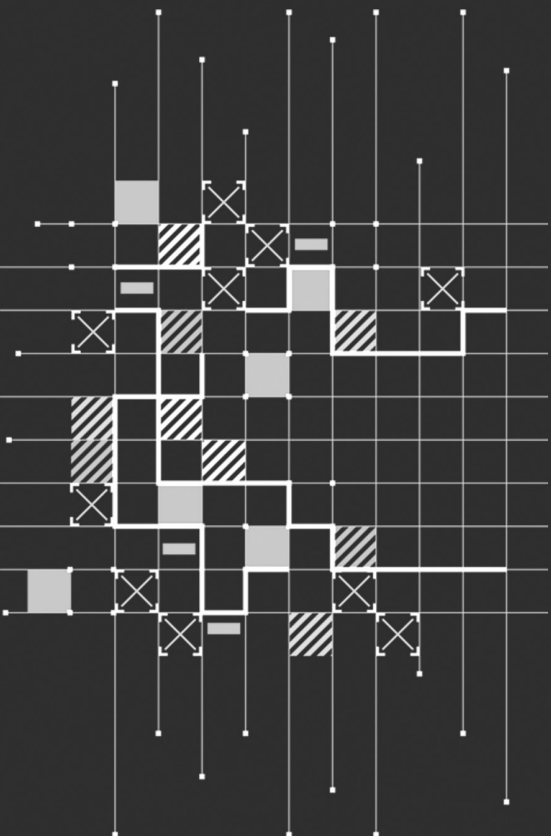
Daftar Bacaan

- Dhawan, S. "Online Learning: a Panacea in the Time of COVID-19 Crisi", *Journal of Educational Technology Systems*, 49(1), Juni 2020.
- Edy, Chandra. "Youtube, Citra Media Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(2), Oktober 2017.
- Green, B. dan A. Hope. "Promoting Clinical Competence Using Social Media". *Nurse Educator Journal*, 35(3), Mei 2010.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara; 2011
- Hartanto, W. "Penggunaan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran". *Jurnal UNEJ*, 10(1), November 2016.
- Hutami, Annisa Setya. "Kominfo: 83% Pengguna Internet adalah Pengguna Whatsapp." <<https://www.gatra.com/detail/news/457263/teknologi/>

- kominfo-83-pengguna-internet-adalah-pengguna-whatsapp>. November 2019.
- Lestari, Sudarsri. “Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi”. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2). Desember 2018.
- Novita, Arnesi dan Hamid Abdul. “Penggunaan Media Pembelajaran Online-Offline dan Komunikasi Interpersonal terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris”. *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Pendidikan*, 2(1), Juni 2015.
- Suprapno. *Budaya Religius sebagai Sarana Kecerdasan Spiritual*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Suryaman, Maman. “Penggunaan Youtube sebagai Media Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Pada Kurikulum 2013”. < <https://sites.google.com/site/lamaneducasimaman/artikel/penggunaan-youtube-sebagai-media-pengajaran-bahasa-dan-sastra-indonesia-pada-kurikulum-2013>>. 2015.
- Syamil Qur’an. *Al Qur’anul Karim Terjemah Tafsir per-Kata*. Bandung: Sygma Creative Media Grup, 2010.
- Tahir, M. Yusuf. “Peranan Teknologi Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan”. Prosiding SIDKUN University Utara Malaysia, 2016.
- Wijanarko. “Pemanfaatan Web Youtube Dalam Pembelajaran PAI”. *E-Jurnal Program Pascasarjana Universitas Ganेशha*, Vol 4, 2017.



literasi
nusantara



TANTANGAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

- Al Ikhwan Fadqur Rohqim-

Secara global, pandemi Covid-19 dimulai sejak munculnya kasus terkonfirmasi positif corona virus yang semakin meluas pada Februari 2021 saat naskah ini ditulis. Semua aspek kehidupan terdampak secara nyata dan mengubah berbagai aktivitas serta kebiasaan masyarakat di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat kegiatan pendidikan belum bisa kembali berjalan normal. Penerapan *social* dan *physical distancing* mengharuskan semua kegiatan pendidikan dari tingkat pra-sekolah sampai Perguruan Tinggi dilaksanakan tanpa tatap muka. Berdasar pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menetapkan dan menginstruksikan penggunaan pembelajaran jarak jauh sebagai model pembelajaran selama pandemi dan *new normal* (Kemendikbud, 2020). Kebijakan tersebut direspons secara positif oleh Kementerian Agama (Kemendikbud) sebagai kementerian yang berwenang mengawasi Madrasah dan mengikuti himbauan Mendikbud dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-686.1/DJ.II/PP.00/03/2020.

Dampak dari pembatasan kegiatan dan *physical distancing* dilaporkan oleh UNESCO per 17 April 2020 bahwa kurang lebih 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat masuk sekolah. Ini berarti, ada sekitar 45 juta siswa di Indonesia atau sekitar 3% dari jumlah populasi siswa di dunia yang juga harus belajar dari rumah. Berdasar pada besar dan luasnya dampak pandemi ini, khususnya dalam dunia Pendidikan, maka sebagai bentuk monitoring dan evaluasi, perlu kiranya dituliskan secara ilmiah pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Indonesia. Ulasan kritis terkait pelaksanaan PJJ di semua tingkatan Pendidikan diharapkan dapat memberikan gambaran nyata pelaksanaan PJJ dan menemukan permasalahan mendasarnya. Solusi PJJ ini tentu merugikan peserta didik yang berasal dari keluarga prasejahtera di daerah pelosok sebab dalam keadaan normal pun mereka cukup kesulitan melaksanakan proses pembelajaran. Kesulitan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial atau finansial dan saat ini faktor kesulitan juga datang dari tidak adanya infrastruktur teknologi.

Pada bagian ini, penulis akan mengulas secara kritis sejumlah penelitian dengan topik tantangan PJJ di Indonesia baik pada pra-pandemi Covid-19, saat pandemi, dan era kebiasaan baru. Meskipun penelitian yang akan diulas berasal dari beragam tingkat Pendidikan (pra-sekolah sampai perguruan tinggi), tetapi subbagian yang akan diuraikan mungkin hanya mewakili sebagian kecil populasi siswa, guru, dan aspek pendukung kegiatan pendidikan yang lain. Hasil diskusi penelitian terkait PJJ kemudian akan dipetakan berdasarkan prioritas masalah dan tingkat pendidikan. Dari hasil pemetaan, dengan mempertimbangkan aspek sosial dan akademis maka beberapa solusi praktis jangka pendek, menengah, dan panjang akan diusulkan.

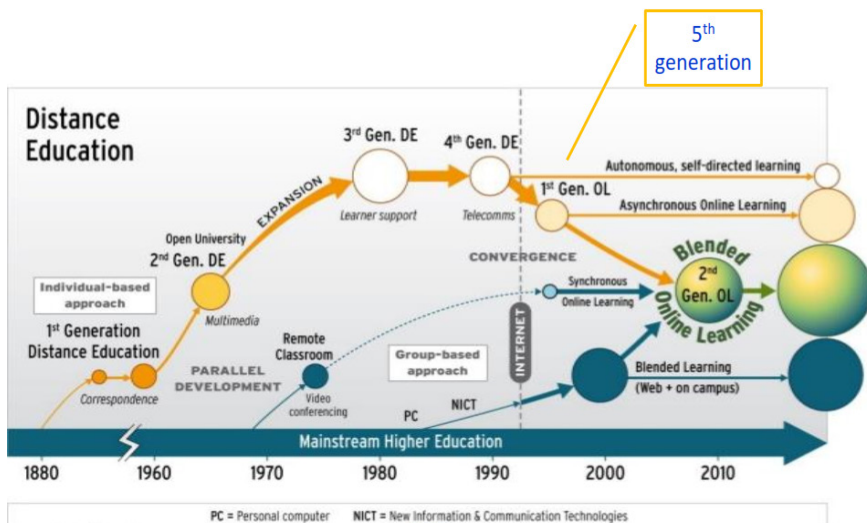
Definisi

Pembelajaran jarak jauh berhubungan erat dengan pendidikan jarak jauh yang tujuannya untuk memberikan solusi terhadap belum meratanya kesempatan mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Keterbatasan waktu, dana, dan usia untuk mengikuti pendidikan konvensional tatap muka menjadikan mereka tertinggal dan kehilangan banyak kesempatan. Dengan adanya pendidikan jarak jauh, maka siapapun dapat memperoleh pendidikan di perguruan tinggi dengan lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan.

Permendikbud (2003) telah menguraikan arti PJJ yakni kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan berbagai media komunikasi, baik tertulis maupun elektronik. Pada masa awal pengembangan PJJ, penggunaan modul cetak dan pengiriman materi belajar melalui pos adalah salah satu contoh media komunikasi. Lebih lanjut Seok (2008) menyatakan bahwa "*E-learning is the 21st century new form of pedagogy which assigns e-teacher as an instructional designer, facilitator of interaction, and subject matter expert*". Artinya, PJJ melibatkan teknologi dan tutor (guru) dalam usahanya menyediakan program pembelajaran, interaksi, dan sumber materi. Sumber lain menyebutkan bahwa *e-learning* adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media jaringan komputer lain (Pannen, 2016). Dalam hal ini, jaringan komputer dan internet merupakan salah satu persyaratan terlaksananya PJJ. Secara lebih rinci Cisco dalam Suyanto (2005) menjelaskan bahwa *e-learning* adalah penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara daring. Perangkat alat yang digunakan memberi nilai tambah dan selaras dengan perkembangan globalisasi. *E-learning* tidak bertujuan untuk menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar yang telah ada atau sebagai pengayaan.

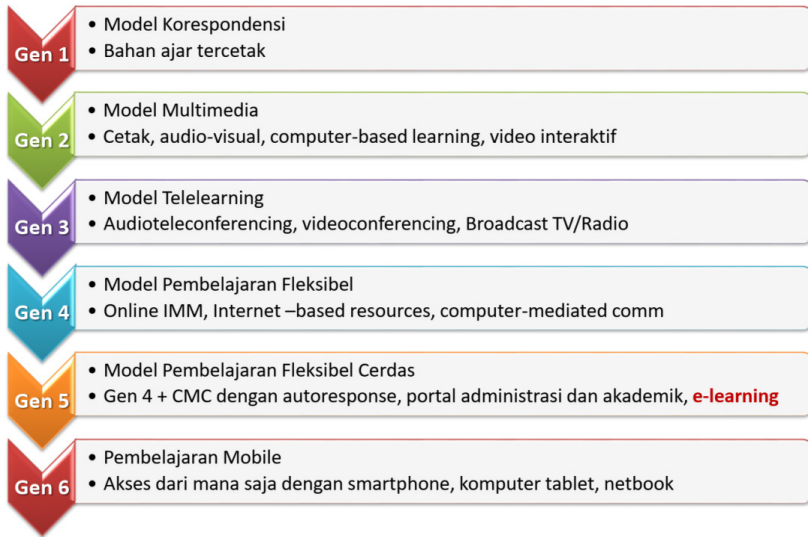
Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PJJ sangat terkait dengan alat elektronik dan sangat responsif terhadap perkembangan

teknologi. Definisi PJJ lebih mengarah pada *e-learning* yang berarti akan selalu melibatkan media elektronik (dalam hal ini) internet. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Darin E. Hartley (Wahono, 2003) bahwa *e-learning* merupakan jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer. Berikut penulis sajikan bagan sejarah perkembangan PJJ secara global dan nasional serta states perkembangannya terkait dengan media yang digunakan dalam interaksi dan penyampaian materi pembelajaran.



Secara global, PJJ dimulai jauh sebelum abad 20, sekitar tahun 1880. Sedangkan *e-learning* dimulai sejak 1970-an (Walson dan Wilson, 2001). Pendidikan jarak jauh berevolusi dari bentuk pendidikan koresponden sampai pendidikan melalui *e-learning* lintas ruang dan waktu. Secara nasional, PJJ di Indonesia dimulai pada 1950 dengan program pelatihan bagi guru (dalam bentuk korespondensi tertulis). Sedangkan *e-learning* program pertama yaitu Jardiknas yang mulai diluncurkan pada 2007.

Ada pula tahapan perkembangan generasi PJJ sebagaimana dirincikan pada bagan berikut.



Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa PJJ pada awal perkembangannya (generasi 1–3) menggunakan model korespondensi dan alat elektronik *not internet*. Ini juga seiring dengan perkembangan teknologi internet secara umum yang juga mulai banyak digunakan pada akhir 1990-an. Selain itu, dengan adanya beragam modus PJJ yaitu modus tunggal, ganda, dan konsorsium, semakin menambah pilihan model pengaplikasian PJJ sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, mulai generasi 5, PJJ *e-learning* dengan portal administrasi akademik memungkinkan kita untuk beralih dari PJJ *online* penuh, *blended*, atau campuran dalam kaitannya dengan PJJ pada masa sekarang ini, langsung atau sinkron, maya maupun tidak langsung atau *asinkron* maya.

Dengan memahami definisi dasar dan trend perubahannya, sejarah pengembangan PJJ, serta beragam tahapannya diharapkan pelaku pendidikan dapat merespons perubahan karakteristik pemelajar, kebutuhannya, dan kondisi mereka untuk memaksimalkan penggunaan PJJ sebagai model pembelajaran yang solutif.

PJJ di Masa Pandemi

Merujuk pada definisi dan karakteristik dasar PJJ yang hampir meniadakan tatap muka dan sejak awal mensyaratkan adanya keterlibatan aktif dari pemelajar dengan bantuan media elektronik, keputusan menerapkan PJJ untuk mengurangi penyebaran Covid-19 merupakan keputusan yang tepat. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, ada hal-hal yang dikorbankan dengan

penerapan PJJ. PJJ yang tepat mensyaratkan penyesuaian terhadap karakteristik, kebutuhan, dan kondisi pemelajar. Kondisi pandemi menjadikan semua diseragamkan atau dianggap sama. Permasalahan dasar yang dalam keadaan normal sudah harus diantisipasi, dihindari, atau dicarikan solusi menjadi tambahan masalah baru pada masa darurat pandemi Covid-19. Permasalahan yang dimaksud adalah tidak tersedianya jaringan internet atau kuota bagi siswa. Maka, fasilitas yang seharusnya terlebih dahulu dipersiapkan adalah ketersediaan jaringan internet yang memadai dan stabil.

Dengan ragam fitur dan modus pembelajaran yang beragam, PJJ mensyaratkan pemelajar yang penuh motivasi dan mandiri, sedangkan pada masa pandemi PJJ seakan-akan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian dan motivasi pelajar. Jika kemudian siswa tidak termotivasi, maka kegiatan PJJ dianggap belum berhasil. Perbedaan pemahaman atas PJJ ini bukanlah salah dari guru maupun siswa karena keputusan darurat ini mencari alternatif model pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebijakan *social* dan *physical distancing*. Namun demikian, pemahaman atas definisi dan prinsip dasar PJJ tetap perlu ditekankan.

Ada pula prinsip dasar PJJ yang agak dikesampingkan ialah tujuan awal program PJJ yakni untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan terisolir yang warganya mungkin tidak mampu membayar biaya perjalanan untuk menempuh pendidikan tinggi. Namun disayangkan, penerapan PJJ di masa pandemi menyebutkan bahwa kerugian terbesar dirasakan oleh kelompok masyarakat terpencil ini. Mereka yang dalam keadaan normal mampu menempuh pendidikan dasar melalui tatap muka, terpaksa merasakan kesulitan karena pendidikan dasar dan menengah berubah menjadi PJJ. Jika hal ini terus dipertahankan, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan untuk meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Dari segi pembiayaan, *distance education* dengan model PJJ mempunyai kelebihan dibanding pendidikan konvensional karena lebih terjangkau. Namun dalam situasi pandemi, masyarakat dengan kemampuan finansial lemah adalah yang paling dirugikan karena ketidaksetaraan dalam kesempatan mengakses internet, kuota, dan ketersediaan jaringan. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kuota data internet atau membeli gawai sebagai media dari PJJ.

Secara umum peningkatan pengguna internet di Indonesia cukup signifikan yakni 62,41% orang memiliki telepon seluler (data pada 2018) dan 20,05% telah memiliki komputer di rumahnya (BPS, 2019). Namun dengan munculnya kasus seperti di atas pada PJJ selama pandemi ini, maka perlu adanya ringkasan singkat untuk memberikan kejelasan atas perbedaan PJJ (normal) dan PJJ selama pandemi sebagaimana uraian berikut ini.

Tabel 1. Penerapan PJJ pada masa normal dan masa pandemi

Aspek dan Prinsip Dasar	PJJ (di Masa Pandemi)	PJJ (normal)
Pemerataan kesempatan belajar	Pemelajar minoritas (tidak mempunyai sarana individu seperti gawai atau paket data internet) kehilangan kesempatan belajar.	Pemelajar minoritas (tidak mampu menempuh perjalanan dan membayar biaya) mendapat manfaat dari PJJ.
Penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik	Kondisi, kebutuhan, dan karakteristik pemelajar disamakan atau diseragamkan.	Kondisi, kebutuhan, dan karakteristik pemelajar dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama pengembangan PJJ.
Motivasi belajar siswa	Menjadi salah satu isu yang dikeluhkan karena siswa dilaporkan kurang termotivasi dengan PJJ.	Motivasi tinggi adalah salah satu persyaratan utama siswa memulai PJJ dan siswa menyadari hal ini sebelum mereka memulai mengikuti PJJ.
Jaringan internet maupun sarana fisik pendukung yang lain	Dikeluhkan sebagai salah satu penyebab utama ketidاكلancaran PJJ.	Penyedia program PJJ telah mengantisipasi kemungkinan gangguan jaringan dan siswa telah memahami kewajiban mereka untuk menyediakan jaringan internet yang baik dan stabil.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat kita pahami bahwa model PJJ saat ini bukanlah model pembelajaran paling ideal, tetapi paling tepat untuk merespons pembelajaran di masa pandemi. Pemetaan masalah dan solusi juga harus memperhatikan fakta-fakta di atas. Dengan demikian, tetap terdapat hal baru yang penting untuk dieksplorasi demi peningkatan pengetahuan dalam bidang PJJ.

Selain itu, pada kenyataannya perbedaan juga mungkin terjadi pada implementasi pembelajaran *e-learning* misalnya apakah hanya sebatas berbagi bahan ajar di internet, tanya jawab di internet, diskusi melalui internet, atau benar-benar pengganti tatap muka di kelas, atau bahkan digunakan sebagai pelengkap tatap muka di kelas (Azzahra, 2020). Jika kita lihat secara umum,

PJJ selama pandemi berfungsi sebagai pengganti tatap yang memang belum bisa dilaksanakan terkait *physical distancing*. Fakta ini mendasari perlunya mengkaji lebih mendalam perbedaan mendasar antara pembelajaran tatap muka dan *e-learning* secara teori.

Tabel 2. Perbedaan Pembelajaran Tatap Muka dan *E-Learning*

Pembelajaran Tatap Muka	Pembelajaran <i>E-Learning</i>
1. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka.	1. Menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh.
2. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara tatap muka.	2. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui media dalam konsep maya.
3. Peran dosen sangat dominan.	3. Terfokus pada mahasiswa.
4. Kemajuan belajar bergantung pada dosen.	4. Mahasiswa sangat berperan dalam kemajuan atau keberhasilan belajarnya.
5. Dosen dan mahasiswa harus bertemu pada saat atau waktu yang sama.	5. Dosen dan mahasiswa tidak harus bertemu di saat yang bersamaan.
6. Dosen sangat berperan dalam proses belajar mahasiswa.	6. Menerapkan konsep belajar mandiri.
7. Dosen dan mahasiswa harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam konteks tatap muka.	7. Dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa tulis.
8. Bagi dosen, khususnya harus memiliki kemampuan berbicara di depan kelas.	8. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan media/komputer dan jaringan komputer/internet.

Dengan demikian, diketahui bahwa PJJ pada masa pandemi secara mendasar telah mempunyai permasalahan sejak awal diberlakukan. PJJ dengan penekanan model pembelajaran *e-learning* bukan hanya bermasalah pada teknis pelaksanaannya, melainkan juga secara konsep dasar mengalami pergeseran. Dua hal tersebut menjadi sumber utama tantangan PJJ di masa pandemi.

Salah satu hasil penelitian pada akhir 2019 menyebutkan bahwa pada level perguruan tinggi, PJJ belum mampu memberikan atmosfer pembelajaran yang positif dan ketidaksiapan tutor pada pembelajaran daring menjadi salah satu dari sekian penyebab kegagalan siswa dalam belajar khususnya di perguruan tinggi (Yustika, Subagyo, & Iswati, 2019). Masalah sejenis juga telah muncul bahkan sebelum pandemi sehingga saat PJJ di masa pandemi dilaksanakan, masalah yang muncul terkait dengan kebutuhan guru berkualitas, kemampuan bidang TIK, dan kesetaraan akses internet bagi siswa.

Penerapan PJJ Berdasarkan Hasil Penelitian

Pada Tingkat Pra-Sekolah dan Sekolah Dasar

Pada tingkat ini, pengetahuan orang tua yang terbatas untuk mendampingi, peran guru yang kurang efektif, serta perlunya peran orang tua untuk lebih memotivasi anak menjadi beberapa hal negatif yang dilaporkan terkait penerapan PJJ selama pandemi (Yana dan Mahanani, 2020). Namun ada juga hal positif yang bisa dilaporkan terkait PJJ selama pandemi yaitu meningkatnya kompetensi guru dalam bidang TIK, semakin beragamnya media dan produk pembelajaran khususnya dalam bentuk digital, dan adanya kemungkinan meningkatnya karakter peserta didik dalam hal kemandirian (Suwangsih, Rohman, dan Farida, 2020).

Fakta lain dilaporkan bahwa sejak 16 Maret 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 213 pengaduan dari orang tua dan siswa terkait pembelajaran jarak jauh (Kompas, 2020). Secara detail pengaduan ini meliputi penugasan yang dinilai terlalu memberatkan bagi siswa, terlalu banyaknya jenis tugas merangkum dan menyalin dari buku, dan masih kurang fleksibelnya jam belajar bagi siswa. Selain itu, ketidaktersediaan gawai dan keterbatasan kuota internet untuk mengikuti PJJ secara *online* juga menjadi topik aduan (Basar, 2021).

Beberapa permasalahan lain yang juga dihadapi guru selama mengajar, di antaranya terkait proses penyampaian materi pembelajaran, proses interaksi dengan siswa, dan kualitas pemberdayaan sarana serta elemen dalam pembelajaran. Kendala dalam pengelolaan dan penyusunan perangkat kurikulum juga menjadi kendala dalam PJJ (Putra, 2020). Mendukung temuan di atas, meskipun pembelajaran pada tingkat sekolah dasar dilaporkan mengalami banyak masalah khususnya terkait keterbatasan waktu dan pengetahuan sebagian orang tua dalam mendampingi anak untuk belajar di rumah dan penyediaan sarana pendukung, tetapi ada pula manfaat PJJ yaitu adanya peningkatan kualitas hubungan antara orang tua dan anak serta kemampuan guru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (Anugrahana, 2020). Dari beberapa hasil penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwa masalah yang timbul pada PJJ di tingkat pra-sekolah dan sekolah dasar lebih banyak berkaitan dengan masih kurangnya peran guru dan orang tua dalam menciptakan PJJ yang efektif dan efisien di rumah.

Pada Tingkat Sekolah Menengah

Pembelajaran jarak jauh di sekolah menengah (SMP dan SMA) juga mengalami kendala terkait bagaimana sekolah dan guru mewujudkan PJJ yang efektif sebagai pengganti tatap muka. Meskipun peran orang tua telah

berkurang karena anak usia menengah lebih mandiri, tetapi aktivitas belajar di rumah sangat memerlukan peran orang tua untuk memonitor anak-anaknya. Beberapa hasil penelitian berikut akan memberikan gambaran lebih jelas terkait situasi PJJ di sekolah menengah selama pandemi.

Masalah terkait teknis seperti tidak tersedianya kuota data atau jaringan internet masih menjadi tantangan terbesar dan ditengarai menjadi penyebab kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran. Selain itu, dilaporkan bahkan ada sekelompok siswa yang tidak mengakses materi pembelajaran. Selain kendala teknis jaringan dan kuota, siswa juga dilaporkan mengalami kebosanan. Penyebab utamanya adalah belum meratanya kemampuan guru untuk melaksanakan PJJ dengan menyediakan konten dan metode pembelajaran yang menarik (Basar, 2021). Meskipun beberapa daerah sudah mewajibkan kepala sekolah untuk secara berkala melaporkan perkembangan pembelajaran jarak jauh mereka, tetapi sebagian besar pemerintah daerah belum memberi arahan yang jelas terkait pelaksanaan PJJ di masing-masing daerah karena instruksi dari pusat perlu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendikbud (2020) telah memberikan panduan mengenai PJJ di sekolah. Panduan ini meliputi teknis pelaksanaan PJJ secara umum, pilihan penyesuaian kurikulum, dan aspek-aspek penting PJJ terkait pembelajaran non-tatap muka yang bermakna. Berdasarkan hal tersebut, sekolah dan khususnya guru dituntut untuk mengutamakan esensi pembelajaran yang bermakna dan tentunya membutuhkan pelatihan serta monitoring. Pelatihan dan monitoring inilah yang dirasakan masih kurang pada PJJ di sekolah menengah, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah. Dengan demikian, kurangnya keterlibatan orang tua dalam PJJ dapat digantikan oleh monitoring yang terstruktur dari guru dan pihak sekolah lainnya.

Pada Tingkat Perguruan Tinggi

Jika dibandingkan dengan PJJ pada level sekolah, secara umum PJJ pada Perguruan Tinggi (selanjutnya PT) relatif lebih siap. Dari *info grafis* pada subbab PJJ di masa pandemi terlihat bahwa pada tahun 2000, PT di Indonesia telah menggunakan *e-learning* sebagai model pembelajarannya. Meskipun belum diterapkan di semua PT, tetapi secara umum mahasiswa telah memiliki kemampuan TIK dan kesadaran teknologi yang cukup tinggi. Beberapa PT menyelenggarakan PJJ dengan tiga modus, yakni modus tunggal, ganda, dan konsorsium. PJJ modus tunggal diselenggarakan oleh satu PT secara mandiri tanpa kerja sama dengan PT lainnya. Hal-hal terkait materi, *learning management system*, dan teknis pelaksanaannya telah diatur oleh PT penyelenggara.

Sedangkan PJJ modus ganda, dua PT bekerja sama untuk menyelenggarakan PJJ (dalam satu program Pendidikan Jarak jauh) yang dikelola bersama. Contohnya beberapa mata kuliah mungkin diselenggarakan oleh PT A

dan mata kuliah lain diselenggarakan oleh PT B. Jenis PJJ modus ganda ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pajanan yang beragam dalam hal pembelajaran. Sebagai pihak penyelenggara, PT yang menjalin kerja sama PJJ modus ganda mendapat keuntungan praktis karena mereka tidak harus mengupayakan seluruh pembelajaran secara mandiri. Pada kenyataannya PJJ modus ganda paling memungkinkan untuk dilaksanakan dan lebih mudah untuk dilakukan monitoring. Skema kerja sama antara dua PT ini juga bisa berbentuk kerja sama sejajar yang berarti mereka adalah dua PT yang mempunyai level kemampuan teknis yang sama. Skema lain bisa berbentuk kerja sama binaan. Ini berarti salah satu dari dua PT yang menyelenggarakan PJJ modus ganda adalah PT dengan kemampuan teknis yang lebih bagus. Secara teori, jenis skema kedua ini memungkinkan dan sangat baik untuk dilaksanakan, tetapi pada kenyataannya akan memerlukan sistem kerja sama yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sementara modus PJJ konsorsium memungkinkan beberapa PT untuk bergabung dan menyelenggarakan PJJ bersama-sama. Jenis PJJ ini sangat bermanfaat bagi PT yang sedang mengembangkan PJJ modus tunggal mereka. SPADA Indonesia merupakan contoh PJJ modus konsorsium. Meskipun tidak semua PT di Indonesia bisa bergabung sebagai operator, tetapi semua mahasiswa aktif pada semua PT di Indonesia bisa mengambil mata kuliah yang disediakan. Dosen pada PT di Indonesia juga bisa membuat mata kuliah *online* dan menyajikannya pada LMS SPADA.

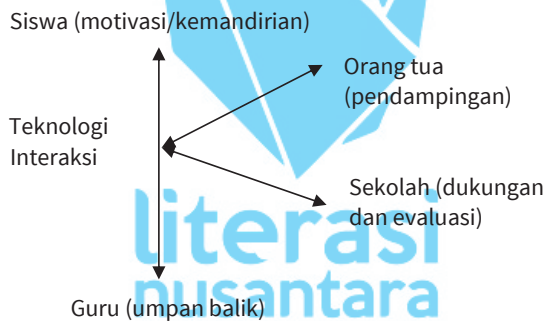
Sejalan dengan pengertian *e-learning* yaitu proses pembelajaran yang terorganisasi dan memanfaatkan teknologi untuk menjembatani keterpisahan antara siswa, pendidik, dengan jumlah tatap muka yang minimal. PJJ memfasilitasi siswa untuk memperoleh fleksibilitas belajar dan bisa diselenggarakan secara masif. Sadikin dan Hamidah (2020) melaporkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring yang telah menunjukkan efektivitasnya. Selain hal tersebut, ditemukan hasil penelitian yang unik dari penelitian ini yaitu mahasiswa merasa lebih nyaman dalam mengemukakan gagasan dan pertanyaan selama PJJ. Belajar dari rumah membuat mereka tidak merasakan tekanan psikologis dari teman sebaya yang biasa mereka alami ketika mengikuti pembelajaran tatap muka; ketidakhadiran dosen secara langsung atau fisik juga menyebabkan mahasiswa merasa tidak canggung dalam mengutarakan gagasan; dan ketiadaan penghambat fisik serta batasan ruang dan waktu menyebabkan peserta didik lebih nyaman dalam berkomunikasi.

Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan yakni mampu menumbuhkan kemandirian belajar (*selfregulated learning*) sebab aktivitas belajar dilakukan melalui berbagai platform. Pembelajaran daring cenderung bersifat terpusat pada siswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung

jawab dan otonomi dalam belajar (*learning autonomy*). Selain itu, belajar secara daring menuntut mahasiswa untuk mampu mempersiapkan sendiri pembelajarannya, mengevaluasi, mengatur, dan secara simultan mempertahankan motivasi belajar (Arifa, 2020).

Tantangan Penerapan PJJ Bagi Guru dan Dosen

Berdasarkan beberapa penelitian terkait pelaksanaan PJJ di tingkat sekolah dan PT, guru dan dosen sebagai pelaksana menghadapi beberapa masalah yang secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu masalah teknis dan non-teknis. Masalah teknis seperti tidak tersedianya kuota secara merata bagi seluruh siswa dan mahasiswa di tanah air mungkin telah diantisipasi dengan pemberian bantuan paket internet dari pemerintah. Namun, untuk jaringan internet yang stabil tidak serta-merta diusahakan karena melibatkan pihak ketiga yaitu penyedia layanan telekomunikasi. Khusus peran guru dalam PJJ di sekolah, diagram di bawah ini merangkum tantangan terbesar tenaga pendidik dalam pelaksanaan PJJ.



Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui bahwa kelancaran kegiatan pembelajaran secara daring sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang dimiliki siswa maupun guru. Jika memang faktor internet tidak memiliki hambatan, maka interaksi antara dua komponen pelaku pembelajaran (siswa dan guru) akan sangat terbatas sehingga dapat mengurangi kebermaknaan pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas interaksi dan ketersediaan sarana teknologi, sekolah perlu memberikan dukungan dan evaluasi. Dukungan sekolah bisa berbentuk kebijakan pemberian bantuan dana bagi guru dan siswa untuk penyediaan kuota internet. Secara khusus peraturan Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenag Nomor B-699/ Dt.II/ PP.03/03/2020 mengizinkan penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan

pembelajaran jarak jauh. Termasuk untuk biaya koneksi internet bagi siswa dan guru serta pembelian perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh.

Adapun evaluasi PJJ harus dilakukan pada masing-masing kelas dan sekolah. Evaluasi ini tidak hanya menilai pelaksanaan kegiatan secara teknis, tetapi juga respons siswa dan *well-being* mereka selama pandemi. Dalam interaksi pembelajaran daring pemberian umpan balik guru juga akan mengalami kendala, tidak saja secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Tidak beradanya mereka pada satu ruangan dan waktu yang sama menjadikan umpan balik berkurang efektivitasnya atau tidak tepat sasaran.

Diagram di atas juga menjelaskan betapa pentingnya peran sekolah dalam melakukan evaluasi dan dukungan, khususnya kepada guru agar kegiatan PJJ berjalan lancar. Guru perlu memberikan umpan balik yang bermakna dan tepat sasaran supaya interaksi mereka di kelas *online* dapat dijaga kualitasnya.

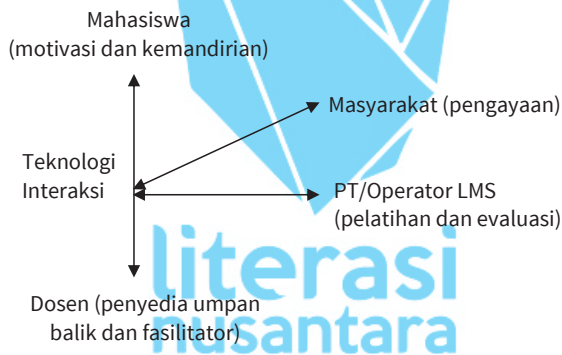
Dengan demikian, PJJ diharapkan mampu menjadikan siswa termotivasi untuk belajar. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak sekolah maupun guru meskipun dalam suasana normal, PJJ memang mensyaratkan siswa untuk mempunyai motivasi intrinsik tinggi. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa guru sekolah menengah juga perlu melatih siswa untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pembelajarannya.

Khusus untuk tingkat pendidikan pra-sekolah dan sekolah dasar yang hampir keseluruhan aktivitas belajarnya dilaksanakan di rumah, maka pendampingan dari orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua dan sekolah harus bekerja sama untuk menyelenggarakan pembelajaran yang terintegrasi. Ini berarti, sekolah perlu menyiapkan rancangan pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan oleh orang tua supaya pembelajaran tetap bermakna dan menarik minat siswa. Sebagai contoh, bagi anak usia taman kanak-kanak, untuk melatih keterampilan dan pengetahuan mereka tentang tanaman, mereka dilatih untuk menanam tomat. Sekolah perlu menyediakan biji, media penyemaian dan lembar observasi, serta petunjuk kegiatan agar orang tua di rumah bisa mendampingi anaknya belajar secara terstruktur. Hal ini memang tidak mudah, tetapi dengan kerja sama aktif antara orang tua dan sekolah (guru), maka pembelajaran yang menarik dan bermakna tetap mungkin bisa diselenggarakan selama pandemi.

Adapun PJJ di tingkat PT, diagram berikut dapat mendeskripsikan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Salah satu aspek yang membedakan antara PJJ pada tingkat sekolah dan PT adalah kesiapan mahasiswa dan dosen secara umum terkait teknologi dan penggunaannya. Selain itu, mahasiswa juga sudah pada tahapan kemandirian yang mencukupi untuk belajar dengan model PJJ. Sebagai pengajar, dosen biasanya tidak perlu menyediakan LMS secara mandiri (berbeda dengan sebagian besar PJJ di sekolah yang LMS belum disediakan oleh sekolah). Meskipun LMS pada PT sudah tersedia,

tetapi pelatihan dan evaluasi terkait penggunaan LMS perlu dilakukan secara berkelanjutan. Interaksi selama proses PJJ di PT mungkin lebih lancar dengan bantuan perangkat teknologi yang lebih baik, tetapi perlu diketahui bahwa PT di Indonesia tersebar dari sabang hingga merauke yang fasilitas dan SDM-nya juga beragam.

Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka setiap PT di Indonesia perlu mengevaluasi PJJ pada masing-masing institusi dan mengambil tindakan-tindakan khusus untuk menyikapi setiap situasi yang mungkin berbeda dari institusi yang lain. Sebagai contoh, jika PT tersebut belum mempunyai LMS, maka bisa menggunakan LMS yang telah disediakan oleh pihak lain. Pada situasi normal PJJ, mensyaratkan adanya LMS yang memadai dan jaringan internet yang stabil. Sehingga secara teori pelaku PJJ baik pembelajar maupun fasilitator (dosen) tidak lagi mempunyai masalah teknis terkait jaringan dan LMS. Mengingat PJJ yang dibahas adalah PJJ di masa pandemi, maka fasilitator perlu menekankan efektivitas interaksi dan proses pembelajaran serta mengesampingkan kekurangan hal teknis. Hanya fokus pada pemenuhan hal teknis, akan mengurangi makna pembelajaran dan memungkinkan memengaruhi motivasi pemelajar.



Hal lain yang mungkin kurang diharapkan perannya dalam PJJ pada tingkat sekolah adalah masyarakat (misalnya pelaku bisnis, penggiat pendidikan, institusi pendukung pendidikan, maupun organisasi keilmuan dan profesi). Karena PJJ lebih banyak diselenggarakan dalam jaringan, maka praktik langsung pembelajaran sangat sulit untuk diwujudkan. Pendidikan vokasi menjadi salah satu jenis PT yang mungkin mengalami kerugian pembelajaran paling besar selama pandemi. Komponen masyarakat yang disebutkan di atas dapat membantu mengurangi kekurangan PJJ dengan membantu mahasiswa untuk terlibat secara virtual pada beberapa kegiatan terkait bidang yang mereka pelajari. Misalnya mahasiswa fakultas hukum mungkin bisa mengikuti persidangan secara virtual yang diselenggarakan oleh pihak pengadilan.

Bagi Pemangku Kebijakan

Lembaga pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia membutuhkan beberapa kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai contoh, Kemendikbud (2020) memberikan kebebasan bagi setiap sekolah untuk memilih platform belajar daring mereka. Untuk mendukung proses berbagi pengetahuan, Kemendikbud juga menyediakan platform belajar daring gratis bernama “Rumah Belajar” dan “Program Guru Berbagi”. “Rumah Belajar” menyediakan bahan mengajar dan fitur komunikasi untuk para penggunanya, sedangkan “Program Guru Berbagi” berguna untuk membagikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Platform ini dapat diakses oleh guru di seluruh Indonesia. Sedangkan kebijakan untuk daerah yang koneksi internetnya tidak terlalu bagus, pemerintah bekerja sama dengan TVRI untuk menyampaikan materi belajar yang ada di dalam program belajar di rumah (Putra, 2020).



**MEDIA DAN SUMBER BELAJAR DARING
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**



- 1** Portal Bersama Hadapi Korona
<https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id>
- 2** Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud
<https://belajar.kemdikbud.go.id>
- 3** TV Edukasi Kemendikbud
<https://tve.kemdikbud.go.id>
- 4** Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC Kemendikbud
<http://rumahbelajar.id>
- 5** Laman Guru Berbagi
<https://guruberbagi.kemdikbud.go.id>
- 6** SIAJAR oleh SEAMOLEC Kemendikbud
<https://lms.seamolec.org>
- 7** Aplikasi Daring untuk Paket A,B,C
<http://setara.kemdikbud.go.id>
- 8** Membaca Digital
<http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/>
- 9** Suara Edukasi
<http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id>
- 10** Tatap Muka Daring Melalui Program SAPA Duta Rumah Belajar
Pusdatin Kemendikbud, melalui
Pusdatin.webex.com
- 11** Program Belajar dari Rumah TVRI

Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pengaturan PJJ. Dinas Pendidikan menyediakan informasi pada situs mereka terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, laman tersebut juga menyediakan panduan untuk menggunakan “Si Pintar by Simak” yang merupakan sistem informasi sekolah terintegrasi di DKI Jakarta, di mana modul-modul pembelajaran daring dapat diakses. Situs tersebut juga menyediakan tutorial Google Classroom untuk para guru, program terjadwal untuk “Belajar di Rumah” di TVRI, dan platform belajar untuk siswa SMK bernama “WeKiddo SMK Bisa” (Andriani, 2020). Sebagai tambahan informasi terkait kebijakan PJJ, Kemendikbud menyediakan laman terkait media dan sumber belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sebagaimana gambar di atas.

Solusi Penerapan PJJ

Meskipun PJJ pada masa pandemi ini adalah langkah darurat untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 yang bersifat temporer, tetapi penerapan PJJ akan memberikan dampak jangka panjang. Permasalahan yang timbul pada setiap tingkat pendidikan berbeda-beda dan mempunyai dampak yang beragam. Dampak dan solusi PJJ selama pandemi ini dapat dikelompokkan pada kategori jangka pendek dan panjang. Dampak jangka pendek misalnya tidak tuntasnya capaian pembelajaran karena kegiatan pembelajaran belum berjalan efektif, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah adanya perubahan mendasar pada model pembelajaran secara umum.

Sebelum membahas lebih lanjut dampak PJJ di masa pandemi dan solusinya, terlebih dahulu kita perlu memahami prinsip PJJ yang dijelaskan dalam panduan PJJ Kemendikbud. Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan PJJ. Pertama, guru harus mengutamakan keselamatan siswa (*well being/ kesehatan jiwa*). Hal ini sangat penting karena pada masa pandemi semua orang mengalami stres dan tekanan. Jika di awal masa pandemi, mungkin kita takut tertular virus, maka saat ini kita juga sedang berusaha mengatasi masalah kebosanan. Hal ini juga dirasakan siswa yang mengikuti PJJ. Ini berarti bahwa PJJ pada tingkat sekolah hanyalah pengganti sementara tatap muka sehingga penekanannya bukan pada kesempurnaan pelaksanaan PJJ dengan beragam LMS dan media digital, tetapi pada bagaimana siswa tetap bisa belajar secara bermakna dengan model PJJ. Oleh karena itu, capaian pembelajaran pada masing-masing pertemuan atau topik pembelajaran harus disesuaikan secara bijaksana. Kedua, menekankan pada tugas utama guru yakni memperhatikan apa yang diajarkan, siapa yang belajar, apa kebutuhannya, bagaimana kondisinya, serta bagaimana cara menyampaikan materi dan kegiatannya.

Khusus penyesuaian kurikulum, Kemendikbud memberikan panduan skenario PJJ, yaitu 1) lengkap, mengikuti kurikulum standar, 2) lengkap dan fokus pada pengetahuan serta keterampilan inti, dan 3) konten dan kegiatan fokus pada usaha membantu siswa mengatasi krisis saat ini. Dengan memperhatikan tugas utama PJJ di masa pandemi dan skenario PJJ, maka tantangan dan dampak paling besar terletak pada guru. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu memfasilitasi siswa untuk tetap belajar dengan semangat dan mencapai tujuan kebutuhan dan keadaan.

Solusi jangka pendek yang bisa ditawarkan adalah melakukan PJJ skenario yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa kelas akan mempunyai skenario yang berbeda untuk beberapa pokok bahasan yang berbeda pula. Misalnya sekolah A di kota besar mungkin akan membutuhkan skenario yang berbeda jika dibandingkan dengan sekolah B di kota kecil. Fleksibilitas guru dan kemampuannya untuk beradaptasi akan membantu siswa menghadapi pandemi dan mengikuti PJJ.

Sedangkan untuk PJJ pada tingkat PT, dampak dan solusi akan lebih mengarah pada solusi jangka menengah dan panjang. Hal ini karena PJJ sebenarnya sudah secara legal diselenggarakan di PT dengan beragam modus dan jenis kegiatannya. Institusi yang telah menjalankan PJJ sebagai bagian dari pendidikan jarak jauh mereka telah mempersiapkan dengan matang melalui tahap persiapan, uji coba, serta pelaksanaan. Persyaratan awal tentang pemenuhan operator dan LMS yang memadai harus dipenuhi terlebih dahulu. Selain itu mahasiswa yang mengambil program pendidikan jarak jauh sejak awal sudah paham bahwa mereka akan belajar secara daring sehingga persiapan jaringan yang stabil dan ketersediaan kuota sudah menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Hal ini sangat berbeda dengan PJJ di masa pandemi karena mahasiswa 'terpaksa' belajar secara daring sehingga hal-hal teknis pun masih menjadi masalah utama.

Untuk lebih memahami perbedaan PJJ normal dan PJJ di masa pandemi ini, maka perlu kita memahami perbedaan mendasar paradigma lama dan baru pendidikan tinggi. Paradigma baru ini sangat mendukung pembelajaran dengan model PJJ karena selain sistem pendidikannya yang bersifat maya, pembelajaran yang fleksibel di manapun dan kapanpun, juga menggunakan teknologi sebagai unsur pembeda. PJJ dalam kondisi normal bukan hanya berfungsi sebagai suplemen dan komplemen, melainkan juga sebagai substitusi murni (Seok, 2008).

Tabel 3. Paradigma Lama dan Baru Pendidikan Tinggi

Paradigma Lama	Paradigma Baru
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mata kuliah sesuai dengan yang diberikan. 2. Registrasi dan kegiatan akademik sangat bergantung pada kalender akademik. 3. Letak universitas berada di lokasi tertentu. 4. Lama kuliah dibatasi perolehan gelar. 5. Umur berkisar antara 18–25 tahun. 6. Bergantung pada kegiatan institusinya. 7. Keluaran produknya bersifat tunggal. 8. Mahasiswa diperlakukan sebagai objek. 9. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas. 10. Bersifat multikultur. 11. Konsepnya merupakan satu kesatuan yang besar. 12. <i>Single discipline</i>. 13. Terfokus pada institusi. 14. Dibiayai pemerintah. 15. Teknologi merupakan investasi yang mahal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih mata kuliah sesuai keinginan. 2. Registrasi dan kegiatan akademik terbuka sepanjang tahun. 3. Universitas bersifat maya. 4. Belajar sepanjang hayat. 5. Umur mulai dari 18 tahun hingga sepanjang hayat. 6. Tergantung penilaian pasar. 7. Informasi yang diperoleh dapat digunakan ulang. 8. Mahasiswa dianggap sebagai konsumen. 9. Pembelajaran dapat dilakukan di mana pun. 10. Bersifat global. 11. Konsepnya kecil dan terpilah-pilah. 12. Terfokus pada pasar. 13. Dibiayai oleh dana masyarakat. 14. Teknologi sebagai unsur pembeda.

Faktor sumber daya manusia tetap menjadi hal utama yang perlu diperhatikan baik selama PJJ di masa pandemi maupun pasca pandemi. Tugas dosen tidak hanya untuk transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi pemelajar. Pelatihan secara berkelanjutan baik terkait TIK, pengembangan PJJ, evaluasi, dan monitoring yang transparan serta akuntabel sangat diperlukan.

Kesimpulan dan Saran Penerapan PJJ

Tantangan terbesar PJJ pada masa pandemi adalah bagaimana menjadikan PJJ sebagai solusi pendidikan yang fleksibel, adaptif, berkelanjutan, berorientasi target, dan bisa menjadi pilihan yang tepat. Teknologi hanyalah alat, sedangkan komitmen, kreativitas, dan kepedulian guru yang akan menunjukkan

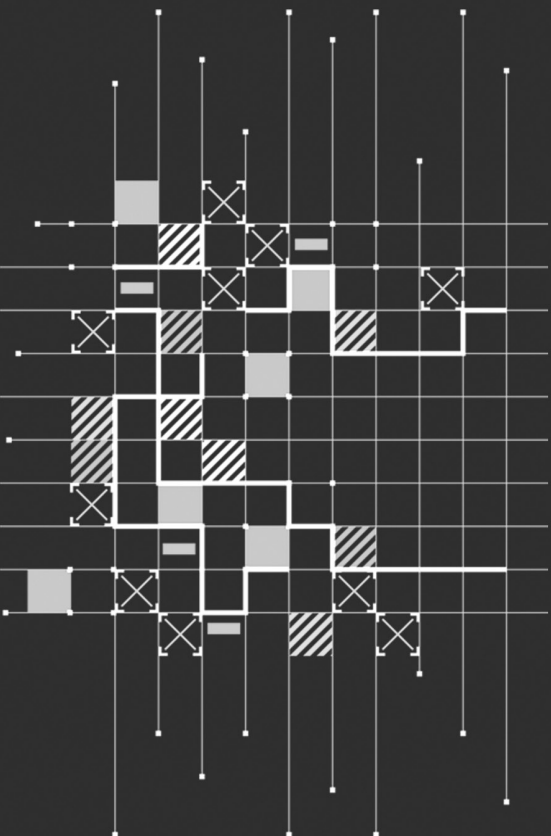
perbedaan dalam pengalaman belajar jarak jauh bagi siswa. Bagi PJJ di tingkat pra sekolah hingga sekolah menengah haruslah selalu realistis adaptif. Ini berarti tujuan pembelajaran harus selalu diadaptasi sesuai kebutuhan dan keadaan serta tetap realistis. Sedangkan untuk tingkat PT, diperlukan usaha menuju PJJ yang ideal dengan pelatihan dan kebijakan yang mendukung.

Selain itu, dalam upaya peningkatan kualitas PJJ ada beberapa hal utama yang harus diupayakan. *Pertama*, lembaga pendidikan harus meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana pendukung pembelajaran daring, seperti infrastruktur, *Learning Management System* (LMS), dan repositori yang memadai. *Kedua*, peningkatan SDM pendidik yang mendukung pelaksanaan PJJ, misalnya peningkatan kompetensi dalam menyiapkan media dan konektivitas serta pengelolaan pembelajaran secara daring. *Ketiga*, perluasan dukungan platform teknologi secara berkesinambungan. Dengan terpenuhinya beberapa hal di atas, maka diharapkan PJJ masa pandemi dapat terlaksana dengan lebih baik dan dapat terus ditingkatkan sehingga kualitas PJJ terus meningkat hingga masa pasca pandemi dan seterusnya.

Daftar Bacaan

- Andriani, D. (2020). *Sistem Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Tantangan Perguruan Tinggi Menjamin Tercapainya Learning Outcome*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anugrahana, A. (2020). “Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 oleh Guru Sekolah Dasar”. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(3), pp. 282–289.
- Arifa, F. N. (2020). “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Covid-19”. Info singkat: Kajian aktual tentang info singkat dan strategis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII, No. 7/I/Puslit, pp. 14–18.
- Azzahra, N. F. (2020). *Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: CIPS Center For Indonesian Policy Studies.
- Basar, A. M. (2021). “Problematika Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri – Cikarang Barat – Bekasi)”. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), pp. 208–218.
- Darmayanti, T., Setiani, M. Y., dan Oetojo, B. (2007). “E-Learning Pada Pendidikan Jarak Jauh: Konsep Yang Mengubah Metode Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 8(2), pp. 99–113.
- Hendrastomo, G. (2008). “Dilema dan Tantangan Pembelajaran E-learning”. *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 4(1), pp. 1–13.

- Kemendikbud. (2020). *Panduan Pembelajaran Jarak Jauh*. Jakarta: Jenderal pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Munir. (2009). *Pembelajaran Jarak jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Pannen, P. (2016). *Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh dan E-Learning di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Putra, R. A. (2020). *Kendala Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam Masa Pandemi*. Diperoleh dari <<https://www.researchgate.net/>>; <<https://www.researchgate.net/publication/340917125>>
- Rahmawati, S. D. (2009). *Kendala Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Melalui Internet Pada Mahasiswa PJJ S1 PGSD Universitas Negeri Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sadikin, A. dan A. Hamidah. (2020). “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”. *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(2), pp. 214–224.
- Seok, S. (2008). “The Aspect of E-learning”. *International Journal on E-learning. Proquest*, pp. 725–741.
- Suwangsih, A., Rohman, C., & Farida, I. (2020). “Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Bagi Guru Raudlatul Athfal”. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education Ijiece*, 5(2), pp. 1–5.
- Taradisa, N., Nida Jarmita, dan Emalfida. (2020). “Kendala yang Dihadapi Guru Mengajar Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di MIN 5 Banda Aceh”. Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam.
- Waller, Vaughan and Wilson, Jim. 2001. “A Definition for E-Learning” in *Newsletter of Open and Distance Learning Quality Control*. October 2001. (sumber dari internet: <http://www.odlqc.org.uk/odlqc/n19-e.html>) diakses pada 26/2/2020
- Yana, W., dan Mahanani, P. A. (2020). “Tantangan Pembelajaran Virtual Di Tengah Pandemi Covid-19 Bagi Siswa Sekolah Dasar”. *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(2), pp. 57–61.
- Yustika, G. P., Subagyo, A., dan Iswati, S. (2019). “Masalah yang Dihadapi Dunia Pendidikan dengan Tutorial Online: Sebuah Short Review”. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), pp. 187–198.



**BENTUK NILAI-NILAI,
KERJA SAMA, DAN
KOMPETENSI GURU**

-Totok Haryanto-

Saat ini, *Corona Virus Disease* atau Covid-19 menjadi perbincangan yang aktual dan menjadi perhatian khusus dan serius. Di berbagai negara, Covid-19 masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi *trending* topik, dibicarakan semua orang, dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Meskipun lebih banyak menyerang orang-orang lansia, virus ini sebenarnya juga bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Covid-19 ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan secara khusus.

Menurut informasi yang dirilis oleh BBC NEWS Indonesia (2020), China melaporkan secara resmi adanya *Corona Virus Disease* (Covid-19) kepada *World Health Organization* (WHO) pada 31 Desember 2019. Namun tim dari *Harvard University* dengan menganalisis foto-foto satelit lalu lintas di sekitar sejumlah rumah sakit di Wuhan, mengatakan warga di sana mungkin telah mulai terinfeksi sejak akhir Agustus 2019.

Pandemi Covid-19 terus menerpa banyak negara yang berada di berbagai belahan bumi. Penyebarannya sangat masif dan cepat karena penularannya dapat terjadi dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat. Penyebaran virus ini serupa dengan penyakit pernapasan lainnya seperti penyakit *flu*. Penularannya dapat melalui *droplet* atau percikan air ludah atau ingus orang yang terinfeksi ketika bersin atau batuk tanpa ditutup mulut atau hidungnya. Maka, cara yang aman adalah dengan menutup bagian mulut dan hidung dengan masker, baik bagi yang terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi.

Di Indonesia sendiri, pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, seorang pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebutkan bahwa virus corona merupakan jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari (kompas, 2020). Akhirnya, pemerintah Indonesia mengharuskan berbagai sektor untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas, baik di sektor bisnis, layanan umum di pemerintahan maupun swasta, dan sektor

lainnya. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dikurangi bahkan hingga tahap peniadaan, sampai kasus Covid-19 menurun.

Sektor lain yang sangat terpuuk adalah sektor pendidikan sebab infrastruktur pendidikan di Indonesia belum merata. Banyak daerah dengan kategori 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang kewalahan menghadapi pandemi ini. Mereka harus siap dengan pembelajaran jarak jauh yang mekanismenya sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Masalah pendidikan yang terjadi selama pandemi ini adalah terbatasnya perangkat, baik *software* maupun *hardware*, bahkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) atau guru yang mengajar. Belum lagi permasalahan yang dihadapi para siswa yang masih membutuhkan pemahaman khusus mengenai sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut pembelajaran secara daring (dalam jaringan) atau *online*. Masalah lainnya adalah adanya keterbatasan *Base Transceiver Station* (BTS) dari operator telekomunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau di seluruh Indonesia. Ataupun jika sudah merata, terdapat permasalahan kontur wilayah geografis yang menyebabkan adanya gangguan sinyal.

Beberapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan kebijakan dengan meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar daring atau *online*. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Namun, kebijakan ini belum berlaku untuk beberapa sekolah di daerah-daerah tertentu yang belum siap dengan pembelajaran daring yang membutuhkan media pembelajaran seperti *smartphone*, *laptop*, atau komputer.

Namun, sistem pembelajaran *online* dinilai kurang efektif karena banyak kendala dalam proses pelaksanaannya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan jaringan koneksi internet di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada proses pemantauan sikap dan perilaku siswa karena kurangnya interaksi dan bertatap muka antara guru dan siswa. Sistem pendidikan yang menekankan pada pendidikan akhlak perlu mendapatkan perhatian khusus, ketika dunia pendidikan sedang dihadapi kemerosotan moral.

Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengambil sikap tegas melalui beberapa surat edaran berkaitan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Salah satunya adalah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease*

(Covid-19). Dalam surat edaran tersebut dituliskan bahwa berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di jajaran satuan pendidikan seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran juga menyebutkan bahwa proses belajar dilaksanakan secara *online* dengan ketentuan bahwa belajar dari rumah atau daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kemudian, belajar secara daring juga difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain dalam menghadapi dan menyikapi adanya pandemi Covid-19. Selain itu, dalam pembelajaran secara daring segala aktivitas dan tugas pembelajaran dapat beragam antar-siswa yang disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan adanya kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Sebagai bentuk bukti atau produk kegiatan belajar daring, diberikan umpan baik (*feedback*) yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan untuk memberikan nilai kuantitatifnya.

Proses belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan dalam jangka pendek dan menengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya manusia, pengaturan penyelenggaraan, kurikulum, maupun sarana belajar. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat *personal computer* (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama dalam waktu yang sama dengan menggunakan media grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Google Meet dan Zoom Meeting ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda.

Permasalahan yang terjadi bukan hanya pada sistem media pembelajaran, melainkan juga ketersediaan kuota (paket data) yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa dan guru. Paket data yang dibeli untuk kebutuhan internet meningkat dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap dan sebagian kurang mampu menambah anggaran biaya dalam menyediakan jaringan internet guna pembelajaran daring putra-putrinya. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa, jam berapa mereka harus belajar, dan bagaimana paket data yang mereka miliki, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah. Hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring.

Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Oleh karena itu, koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala bagi siswa yang tempat tinggalnya sulit dijangkau untuk mengakses internet. Walaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga pelaksanaannya kurang optimal.

Banyak informasi di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Seperti misalnya ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik ternyata tidaklah mudah, diperlukan ilmu, dan kesabaran yang sangat besar. Dengan kejadian ini, orang tua seharusnya menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak-anak mereka dalam belajar. Setelah mendapat pengalaman ini, diharapkan para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah.

Perlu disadari juga bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Konversi sistem pembelajaran konvensional atau luring (luar jaringan) ke sistem daring amat mendadak dan banyak yang menilai kurang persiapan yang matang. Namun, semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi. Kegagalan pembelajaran daring tampak terlihat di hadapan kita, tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti jaringan internet yang stabil, *gadget*, komputer yang mumpuni, aplikasi dengan platform yang mudah dipahami dan diaplikasikan (*user friendly*). Selain itu sosialisasi pembelajaran daring juga harus efisien, efektif, berkelanjutan, dan integratif kepada seluruh stakeholder pendidikan yang ada di setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka layanan aplikasi daring gratis yang dapat bekerja sama dengan *provider internet* dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan rencana pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah, perlu untuk melakukan bimbingan teknik mengenai proses pelaksanaan pembelajaran daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Dalam proses pembelajaran

daring, sangat penting untuk ditambahkan pesan-pesan moral dan edukatif kepada orang tua dan siswa atau peserta didik tentang wabah pandemi Covid-19. Dengan demikian, dapat dirasakan bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan sama esensinya dengan tatap muka.

Pelajaran yang dapat kita petik dari kondisi pendidikan di masa pandemi ini salah satunya kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif daripada pembelajaran secara daring. Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Aulia Luqman Aziz, pakar pendidikan Universitas Brawijaya, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2020 bahwa selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Menurutnya, pembelajaran penuh secara daring banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Masalah yang timbul tidak hanya berkaitan dengan pengoperasian aplikasi pembelajaran daring, tetapi juga kekurangsiapan orang tua dalam mendidik dan membimbing anaknya terkait dengan proses belajar selama di rumah. Banyak orang tua yang kewalahan pada saat menjelaskan mata pelajaran tertentu, apalagi bagi orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan anaknya.

Di sisi lain, beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran tatap muka karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap, apalagi mata pelajaran tertentu membutuhkan praktikum di laboratorium. Selain itu materi yang disampaikan secara daring belum tentu dipahami semua siswa dengan baik. Bahkan ada beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam proses pembelajarannya sehingga mengandalkan orang tuanya untuk membantu menjelaskan. Namun, berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan. Dengan demikian ada kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk dan kemungkinan tugas-tugas mereka akan menumpuk.

Adanya pengalaman dari beberapa guru tersebut menuntut guru lainnya untuk memiliki kesiapan dalam menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangannya di zaman sekarang. Seorang guru harus mampu membuat dan menyusun model serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa.

Dengan demikian, guru harus mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif serta memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain itu, disesuaikan pula dengan kemampuan siswa dan orang tua. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam

mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, tetapi guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan sehingga tujuan dari pembelajaran dapat dicapai.

Namun, perlu diketahui bahwa aplikasi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa serta orang tua yang mendampingi selama proses belajar di rumah. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring dapat digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dengan demikian, harus dipertimbangkan kesesuaian aplikasi tersebut dengan materi dan keterbatasan infrastruktur perangkat seperti jaringan. Pembelajaran akan sangat tidak efektif dan efisien manakala guru mengajar dengan menggunakan aplikasi di internet (Google Meeting atau Zoom Meeting), sedangkan jaringan atau sinyal di wilayah siswa tersebut tinggal tidaklah bagus dan tidak memadai.

Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring di situasi pandemi ini terletak pada kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan menyusun materi, aplikasi yang sesuai dengan materi, dan metode yang digunakan. Kreativitas dan kemampuan komunikasi merupakan salah satu kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya belajar secara daring dan tidak menjadi beban psikologis. Sehingga siswa dapat menerima materi pelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik.

Selain itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa Covid-19 ini juga bergantung pada kedisiplinan dan kerja sama semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah harus membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun jadwal yang sistematis, komprehensif, dan terstruktur untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah.

Dengan demikian, pembelajaran daring dapat dijadikan solusi yang efektif selama pembelajaran siswa di rumah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, penerapan protokol kesehatan (prokes) yaitu menjaga jarak aman (*physical distancing*) juga menjadi salah satu pertimbangan dipilihnya pembelajaran daring. Kerja sama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif.

Dengan kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran daring, terdapat satu hal yang sangat esensial dalam pembelajaran sekolah yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan karakter bagi siswa. Nilai-nilai tersebut, di antaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan sosial. Dalam proses menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter siswa tersebut tidaklah mudah, apalagi dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring. Hal ini karena tidak adanya intensitas komunikasi yang kurang tervisualisasikan selama pembelajaran daring. Misalnya, pada saat memberikan penjelasan mengenai nilai toleransi, kemudian memberikan contoh peragaan dengan cara membuat drama pendek di depan kelas (sebagaimana saat pembelajaran luring). Akhirnya, guru akan sangat kesulitan memberikan simulasi di ruang daring karena adanya berbagai macam keterbatasan, baik secara teknis pada platform yang digunakan maupun teknis simulasi yang harus diperagakan.

Dalam proses pembelajaran, penanaman nilai-nilai pendidikan karakter menjadi tujuan penting dalam pendidikan siswa selama di sekolah. Pentingnya membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan karakter yang merupakan upaya untuk kembali membangkitkan serta membekali peserta didik agar memiliki karakter yang baik dengan cara menumbuhkan keterampilan gerakan literasi yang tinggi, mampu memiliki kemampuan dalam berfikir kritis dan aktif, kreatif walaupun harus belajar di rumah. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan orang tua yang mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran daring.

Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Siswa

Pendidikan karakter bagi siswa adalah usaha yang dilakukan sekolah melalui guru yang secara sadar dan terencana ditujukan untuk mendidik dan memberdayakan potensi siswa atau peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan sekitarnya, dan bangsa pada umumnya. Pendidikan karakter merupakan sistem pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada siswa atau peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral yang tujuannya membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik dan memiliki kemampuan akademik yang mumpuni sekaligus memiliki budi pekerti luhur.

Pendidikan karakter di sekolah sangat berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam berbagai aktivitas di sekolah. Namun saat ini, penanaman pendidikan karakter tersebut harus dilakukan secara daring. Pendidikan karakter yang dapat dilakukan

oleh orang tua dalam membantu peserta didik saat belajar di rumah sangat penting karena pendidikan dari orang tua adalah paling utama. Orang tua dapat membantu anak menumbuhkan rasa percaya diri dan sikap toleransi, serta rasa kasih sayang terhadap sesama saat bersosialisasi.

Peran guru yang masih dapat dilakukan selama pembelajaran daring adalah menyusun dan menyiapkan materi pembelajaran, mengajarkan, serta melakukan evaluasi pembelajaran, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian seorang guru juga harus melakukan *upgrade* pengetahuan untuk meningkatkan kreativitas untuk pembelajaran daring agar siswa tidak terlalu bosan, termasuk gurunya. Peran guru saat ini yang telah digantikan oleh orang tua yaitu membimbing keteraturan anak dan kedisiplinan ketika proses belajar dan menjadi fasilitator yang baik bagi putra-putrinya selama pembelajaran daring. Apalagi terkait dengan pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter.

Sebagai salah satu contoh adalah pembelajaran daring di sekolah dasar (SD). Hal ini mengingatkan bahwa siswa SD belum cukup umur untuk menggunakan *gadget* (*laptop, tablet, atau smartphone*). Sehingga dengan adanya tugas dari guru yang disampaikan melalui pembelajaran daring, siswa SD diminta untuk membiasakan hidup mandiri. Tugas yang dapat diberikan kepada siswa SD, di antaranya kegiatan rumah sehari-hari yang meliputi aktivitas pribadi di kamar mandi, merapikan tempat tidur, menyapu lantai rumah, menyirami tanaman, dan membantu orang tua saat di dapur. Pemberian tugas tersebut merupakan salah satu penanaman karakter mandiri yang sangat baik. Jika di sekolah mereka lebih intens dalam belajar akademik, kemudian ketika di rumah diberi tugas yang berkaitan dengan akademik, maka siswa akan merasa bosan dan tidak tertarik belajar di rumah. Dengan demikian, penanaman karakter dengan model tersebut tidak membuat siswa jenuh ketika belajar di rumah.

Nilai-Nilai yang Ditanamkan Selama Pembelajaran Daring

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai generasi penerus yang berkarakter, berkepribadian baik, berbudi pekerti luhur, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional spiritual yang baik. Pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan para guru untuk menciptakan generasi muda yang handal dan memiliki tata nilai serta karakter yang baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini, target pencapaian kurikulum bukanlah harga mati sebab kompetensi dasar (KD) yang ada pun disederhanakan menjadi kurikulum darurat. Meskipun demikian, nilai-nilai Pancasila dan religiusitas tetap harus ditanamkan kepada siswa yang sedang menjalani pembelajaran dari rumah secara daring. Kemendikbud meminta

para orang tua yang saat ini mengambil alih peran guru, dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang sekiranya dapat dilakukan secara realistis dan nyata kepada putra-putrinya selama pembelajaran daring maupun selanjutnya. Misalnya, melaksanakan shalat tepat waktu, menyelesaikan tugas dari guru sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mau bergantian menggunakan *gadget* dengan saudara-saudaranya jika *gadget* terbatas, hingga membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Adapun pendekatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain menyadarkan, memahami, bergabung, dan mengajak orang lain berbuat yang sama. Upaya-upaya tersebut penting dilakukan guna membentuk sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, berkompentensi global, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, Kemendikbud juga berharap agar siswa beriman kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, kebhinekaan global, menerapkan gotong royong, dan kreatif. Dengan demikian, tantangan seperti perubahan teknologi, sosio, dan lingkungan bisa mereka hadapi.

Pentingnya membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan karakter merupakan upaya untuk kembali membangkitkan serta membekali siswa atau peserta didik agar mempunyai karakter yang baik dengan cara menumbuhkan keterampilan gerakan literasi yang tinggi, mampu memiliki kemampuan dalam berfikir kritis dan aktif, kreatif walaupun harus belajar di rumah atau pembelajaran secara daring. Hal ini bertujuan agar siswa tetap memiliki nilai-nilai karakter yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ir. Hendarman, M.Sc, Ph.D bahwa kondisi anak zaman 'now' kebanyakan sudah menggunakan *gadget* bahkan lebih modern dan canggih jika dibandingkan dengan orang tuanya. Pada umumnya, anak-anak menggunakan *gadget* untuk sosial media, *game*, dan YouTube. Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah mengeluarkan *classification of disease* yang menyebutkan bahwa kecanduan main *game* sebagai gangguan kesehatan jiwa. Oleh karena itu, Kemendikbud mengeluarkan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter. Strategi kebijakan tersebut tertuang dalam habituasi (kebiasaan), yaitu diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Strategi ini dapat diterapkan mulai dari rumah, kelas, sekolah, dan masyarakat.

Nilai karakter yang dapat diciptakan saat pembelajaran daring meliputi nilai kemandirian, gotong royong, dan kreativitas. Selama masa pandemi, semua pihak di sektor pendidikan harus mampu untuk berinovasi guna menciptakan kreativitas, harus melakukan adaptasi yang lebih dengan penggunaan teknologi, dan harus menyadari peranan penting teknologi dalam mendukung pembelajaran.

Adanya perubahan metode pembelajaran pada masa pandemi yang dilakukan di rumah dengan metode daring, semestinya oleh guru tidak hanya dipahami untuk menyelesaikan kurikulum pembelajaran dengan *transfer knowledge* ataupun memberikan tugas, tetapi juga menanamkan, membangun, dan mengembangkan nilai-nilai pada siswa. Seorang guru harus tetap melakukan fungsi *monitoring* terhadap perilaku keseharian siswa-siswinya. Bahkan, untuk sekolah dasar (SD), guru juga dapat melakukan pengecekan aktivitas siswa, mulai dari jam bangun tidur pagi, perilaku mandi sebelum belajar, sarapan, tidur siang, jam belajar malam, cara belajar, atau perilaku siswa saat belajar, apakah benar-benar serius dalam belajarnya atautkah sambil bermain atau menonton televisi.

Kegiatan *monitoring* memang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh guru. Namun dapat dilakukan melalui kerja sama yang harmonis antara orang tua siswa dan guru. Sehingga dalam membangun perilaku karakter siswa dapat dilakukan secara langsung oleh orang tua dan dilakukan evaluasi oleh guru. Guru juga dapat menyusun dan membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) pada awal pembelajaran dan saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya dengan melakukan *checklist* mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh siswa selama pembelajaran daring.

Peningkatan Kompetensi Guru di Masa Pandemi

Guru harus memiliki kompetensi yang semakin progresif agar proses pembelajaran daring dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Peran guru di masa pandemi ini sangat luar biasa untuk tetap dapat memberikan pembelajaran dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Saat ini, guru harus memiliki dan dituntut melaksanakan banyak peran tambahan, antara lain

1. Memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademik dan non-akademik, mempersiapkan materi, dan hasil evaluasi pembelajaran.
2. Guru harus memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis.
3. Memberikan penguatan aktif dan pemahaman kepada siswa guna menaati semua protokol kesehatan.
4. Dengan tetap memprioritaskan fasilitasi terhadap pembelajaran siswa, guru kini harus senantiasa memberikan dukungan emosional bagi siswa, orang tua, dan keluarga.
5. Guru harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerja sama yang baik dengan kepala sekolah dan orang tua/keluarga siswa untuk membangun kepercayaan serta mendukung proses pendidikan.

Dalam proses pembelajaran daring, guru menempati posisi yang strategis untuk mendukung keefektifan proses pembelajaran. Terlebih lagi, guru juga harus meningkatkan kompetensinya agar tetap aktif dan inovatif dalam mengelola pembelajaran secara daring. Seorang guru harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang relevan dengan proses pembelajaran daring sehingga proses pembelajaran akan tetap berjalan dengan baik dan lancar meskipun kualitasnya tidak akan sama dengan pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung. Menurut Subhi (2020), secara formal, kompetensi guru memiliki empat kategori. Namun, mengingat kondisi pandemi seperti ini, maka sekurang-kurangnya seorang guru harus mampu memahami dan menerapkan hal-hal berikut.

1. Penyederhanaan target pembelajaran

Target pembelajaran pendidikan wajib berpedoman pada kurikulum yang sudah dirancang oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuannya untuk memudahkan ukuran ketercapaian dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sejalan dengan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, terdapat empat pokok utama strategi yang dapat dilakukan oleh guru adalah

- a. Pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non-interaktif. Hal ini perlu dilakukan meskipun tidak semua siswa dapat melakukannya karena faktor infrastruktur.
- b. Tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada siswa tentang kecakapan hidup yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang Covid-19, karakteristiknya, cara menghindarinya, dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit.
- c. Pembelajaran daring harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing siswa, tidak boleh disamaratakan, dan harus memperhatikan kondisi lingkungan siswa, termasuk akses internet.
- d. Tenaga pengajar atau guru, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya di sekolah, akan tetapi penilaian lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada siswa.

2. Pemilihan media

Dalam proses pembelajaran, terdapat dua unsur yang sangat penting dan berkaitan, yakni metode mengajar dan media pembelajaran. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan memengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada aspek lain yang harus diperhatikan. Media sangat membantu keefektifan pembelajaran daring. Namun, seorang guru juga harus memiliki kepekaan terhadap situasi yang melatarbelakangi, paling tidak mempertimbangkan beberapa hal seperti keterjangkauan dari segi biaya.

Menurut Mitchell Steward dalam Agus Harjana, pemberdayaan memungkinkan organisasi untuk mencapai pelanggan dan tuntutan pasar secara cepat, fleksibel, dan efisien (Susanto, 2016). Dalam hal ini yang dimaksud adalah organisasi sekolah. Dengan pemberdayaan guru diharapkan sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik seperti ketika pembelajaran di sekolah sebelum daring. Sekolah perlu melatih para guru untuk memiliki beberapa kompetensi berikut.

1. Kompetensi penguasaan literasi dan IPTEK

Kebijakan sekolah yang menerapkan pembelajaran daring membutuhkan keterampilan di bidang IPTEK. Sekolah dan guru perlu melakukan eksplorasi atau pengembangan terhadap teknologi digital yang akan digunakan dalam pembelajaran selama masa pandemi, diperkenalkan, diintegrasikan, atau dimasukkan dalam kebijakan dan praktik pendidikan di sekolah tersebut (Komalasari, 2020).

Sosialisasi dan simulasi penggunaan model pembelajaran daring juga perlu dilakukan agar siswa dan orang tua siap menjalankan perannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, guru sepatutnya perlu mempertimbangkan: a) memperkuat peran esensi guru; b) meningkatkan wawasan literasi pembelajaran daring; dan c) membuat pola pembelajaran campuran antara daring dan luring (*blended learning*).

2. Kompetensi keterampilan pengelolaan kelas

Keterampilan pengelolaan kelas sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ketika sekarang pembelajaran beralih ke daring, maka guru perlu mengolah beberapa hal yang sebelumnya dapat dilakukan secara luring. Namun saat ini diperkirakan akan sulit dilakukan karena tidak bertatap muka secara langsung. Menurut Batubara dan Batubara (2020), beberapa hal berkaitan dengan materi pelajaran yang membutuhkan eksperimen dapat dilakukan dengan memberikan video tutorial.

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang adaptif untuk mendukung pembelajaran daring dapat dilakukan dengan mempertimbangkan model SECTIONS yang ditawarkan oleh Bates (2019) yang meliputi:

- a. S yaitu *student* (siswa)
- b. E yaitu *ease of use* (mudah digunakan)
- c. C yaitu *cost/time* (biaya/waktu)
- d. T yaitu *teaching* (kegiatan pembelajaran)
- e. I yaitu *interaction* (interaksi)
- f. O yaitu *organizational issue* (pengelolaan masalah)
- g. N yaitu *networking* (memperluas jaringan)
- h. S yaitu *security and privacy* (keamanan dan privasi)

Adanya internet harus dipandang sebagai kemudahan yang menolong siswa dalam pembelajaran di era modern (Setiyani, 2010). Konsep kemandirian perlu diajarkan kepada semua siswa melalui peran guru sebagai motivator, simulator, dan pembimbing. Pembelajaran mandiri akan memberikan pengalaman baru bagi siswa dan akan menghasilkan: pertama, hasil belajar yang lebih bermutu, oriental, dan tahan lama karena siswa mengalami secara langsung, aktif, dan partisipatif dengan melibatkan perasaan, pikiran, dan keterampilan; kedua, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, maka apa yang dipelajari siswa saat ini akan cepat ketinggalan zaman sehingga ia harus siap belajar sepanjang hayat; dan ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa (Handayani dkk, 2013).

3. Kompetensi komunikasi dan sosial

Pembelajaran daring tentu akan menuntut guru untuk lebih komunikatif terhadap siswanya dengan memanfaatkan *gadget*. Perlunya alat bantu dalam pembelajaran karena guru tidak dapat memantau secara langsung proses belajar siswa ketika mengerjakan tugas. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan kompetensi komunikasinya dalam memberikan arahan dan pendampingan belajar. Selanjutnya, guru perlu bekerja sama dengan orang tua siswa untuk ikut berperan aktif memberikan bimbingan dalam proses belajar dalam hal akademik. Dalam hal inilah orang tua sebagai mitra guru dalam mendidik akademik anak sangat dibutuhkan.

Guru juga dituntut untuk mempunyai kompetensi lainnya yang harus diadaptasi pada masa pandemi, yaitu

1. Kemampuan berinovasi, memanfaatkan bermacam *digital-tools*, menyelenggarakan pembelajaran daring, penerapan kurikulum yang memperkuat model multidisiplin ilmu, dan kolaboratif dalam proses belajar mengajar.
2. Kemampuan menata ulang akuntabilitas dan menentukan metode dalam proses penilaian selama pembelajaran daring.
3. Kemampuan menyelenggarakan pendidikan yang dapat membantu siswa berkembang secara akademis, fisiologis, dan psikologis, serta emosional dan spiritual dengan menyeimbangkan antara sistem pengejaran konvensional dengan mekanisme digital.
4. Kemampuan menyajikan pendidikan dan pengajaran yang merata, termasuk bagi yang siswa yang paling rentan.
5. Kemampuan komunikasi untuk menyinergikan pandangan dan visi dalam proses pembelajaran dan pendidikan kepada siswa dengan sekolah serta guru, termasuk orang tua/keluarga yang memiliki peran sentral.

Dengan mempertimbangkan kompetensi tersebut, guru dapat membantu siswa untuk lebih menikmati proses belajarnya. Penggunaan sumber belajar dari internet dan pembelajaran melalui daring yang berlaku sejatinya membuat siswa dapat berekspressi dalam mengerjakan tugas, mencari inspirasi melalui sumber bacaan, dan waktu belajar yang tidak terbatas ruang dan waktu.

Tips Mengajar Daring

Mengutip dari pernyataan Kemendikbud, terdapat tujuh tips mengajar daring selama masa pandemi (Tedy Rizkha Heryansyah, 2020).

1. Jangan stres
Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembelajaran secara daring sering kali membuat guru mengalami stres. Pasalnya, guru yang sudah terbiasa dengan tatap muka, kini dituntut dengan beragam pembaruan baik di sisi teknologi maupun metode. Agar guru dapat mengelola stres dengan baik, maka guru dapat mencari metode belajar terbaru yang sudah banyak dibagikan di laman internet.
2. Mencoba untuk membagi kelompok belajar menjadi kelompok kecil
Supaya lebih mudah dalam penyampaian pelajaran, guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kompetensi agar sistem belajar menjadi lebih efektif dan dapat mengantisipasi kemampuan siswa yang tidak sama.
3. Mencoba untuk *project-based learning*
Dengan *group project assignment*, diharapkan siswa mampu bertanggung jawab terhadap tugas kelompok mereka; mampu mengampu apa yang sudah menjadi tugasnya; dan dapat merealisasikannya dengan baik. Maka, sistem *project-based learning* ini bisa dikaitkan dengan pembagian kelompok kecil sehingga siswa mampu bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Harapannya, dengan melakukan pembagian kelompok kecil siswa juga dapat termotivasi dari teman-temannya yang lain.
4. Alokasikan waktu yang lebih banyak bagi yang tertinggal
Tidak menutup kemungkinan bahwa akan banyak siswa yang ketinggalan pelajaran. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kegiatan sekolah dapat menyebabkan siswa tersebut tertinggal. Tidak hanya itu, ketertinggalan materi di sekolah juga disebabkan oleh kemampuan siswa yang kurang. Untuk itu, peran serta orang tua dalam pembelajaran ini juga sangat dibutuhkan oleh siswa. Dengan membagi waktu untuk mengajar secara rata, guru dan orang tua diharapkan bisa berkolaborasi untuk mengejar ketinggalan para siswa tersebut.

5. Fokus terhadap waktu yang paling penting
Selain melakukan eksperimentasi pada alokasi waktu, guru juga bisa membagi konsep dasar yang tertinggal. Kemudian menggarisbawahi materi yang paling penting diharapkan dapat membantu siswa agar mampu mengejar ketertinggalan mereka di sekolah. Selain itu, diharapkan siswa juga dapat sukses dalam menghadapi kemampuan yang sudah mereka miliki.
6. Saling berinteraksi dengan sesama guru
Di masa pandemi ini, guru perlu berbagi saran kepada guru lainnya terkait metode pembelajaran yang digunakan. Dengan melakukan hal tersebut, antara guru yang satu dengan yang lainnya dapat saling mengoreksi pembelajaran yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, guru bisa memasuki kelas yang diajar guru lain saat melakukan *virtual class*. Inilah yang bisa membantu guru agar bisa memiliki inovasi lebih jauh dalam bidang teknologi. Selain itu, metode ini dapat membuat guru menyampaikan materi dengan inovasi yang selalu baru.
7. Bersenang-senang
Guru dan orang tua harus mampu membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan. Tujuannya adalah untuk membuat materi yang disampaikan kepada siswa lebih efektif. Untuk itu, apabila diaplikasikan dengan baik, diharapkan siswa mampu menghadapi semua tugas dan materi yang mereka dapat.

Tips lain dalam pembelajaran daring adalah membuat perencanaan awal dengan pola yang dapat diaplikasikan di beberapa mata pelajaran yang memiliki kesamaan rumpun.

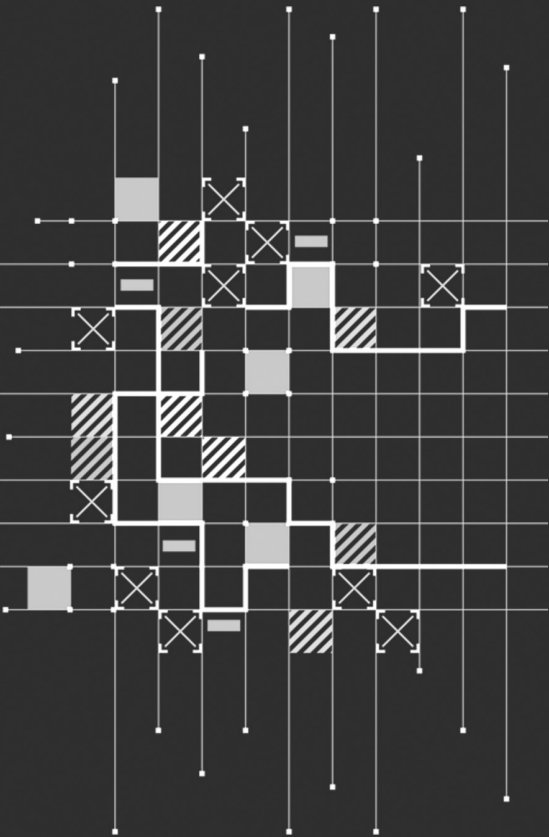
1. Membuat rancangan awal di setiap mata pelajaran
Tahap ini dirancang sesuai dengan rencana pembelajaran mata pelajaran menggunakan alur bagan tertentu.
Misalnya:
 - a. Mata pelajaran.
 - b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
 - c. Alat peraga yang dibutuhkan (aplikasi yang mendukung mata pelajaran, misalnya Kahoot, mentimeter.com, dan lainnya).
 - d. Peralatan dan perlengkapan lainnya yang mendukung.
2. Memulai kelas daring dengan melakukan komunikasi interaktif (dua arah)
Pada tahap ini, guru dapat menyapa siswa dengan sapaan yang biasa dilakukan secara luring.
 - a. Sapaan dengan salam, dilanjutkan agar siswa mengaktifkan kamera dan guru mengonfirmasi apakah suara dapat terdengar dengan baik.
 - b. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran.

- c. Diadakan *class yelling* yang sudah disepakati sebelumnya.
 - d. Diberikan pertanyaan dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot atau mentimeter atau aplikasi lainnya.
 - e. Baru dimulai dengan menyampaikan topik materi mata pelajaran pada hari itu.
3. Di pertengahan penyampaian materi, jangan lupa memberikan pertanyaan kepada siswa dengan berbagai teknik, misalnya memberikan kuis secara spontan atau membuat teka-teki dengan menyatukan puzzle yang relevan dengan mata pelajaran.
 4. Pada akhir sesi kelas, guru dapat memberikan pesan moral dan pesan khusus terkait dengan mata pelajaran.

Daftar Bacaan

- Bates, A. (2019). *Teaching in a Digital Age*. Edisi Kedua. Tony Bates Associates Ltd.
- Batubara, H., dan Batubara, D. S. (2020). "Penggunaan Video Tutorial untuk Mendukung Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Virus Corona". *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 21.
- Handayani, N. N., Dantes, N., dan Suastra, W. (2013). "Pengaruh Model Pembelajaran Mandiri terhadap Kemandirian Belajar dan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas VIII SMP N 3 Singaraja". *Jurnal Pendidikan Dasar E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganeba*, 2, 1–10.
- Komalasari, R. (2020). "Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19". *TEMATIK - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(1), 38–50.
- Setiyani, R. (2010). "Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar". *Dinamika Pendidikan*, 5(2), 117–133.
- Sri Harnani. (2020). "Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19". <bdkjakarta.kemendiknas.go.id: <https://bdkjakarta.kemendiknas.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19>>.
- Subhi, I. (2020). "Urgensi Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Intelegensia*, 8(1), 1–8.
- Susanto, A. (2016). *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru Konsep Strategi dan Implementasinya*. Cimanggis: Prenada Media Group.
- Tedy Rizkha Heryansyah. (2020, September 17). "7 Tips Mengajar yang Efektif Selama Pandemi". <www.ruangguru.com: <https://www.ruangguru.com/blog/7-tips-mengajar-yang-efektif-selama-pandemi>>.





PEMBELAJARAN MANDIRI

-Moh. Nur Hidayatullah-

Definisi

Kegiatan belajar mandiri dapat diawali dengan kesadaran adanya masalah sehingga menimbulkan niat melakukan kegiatan belajar secara sengaja untuk menguasai kompetensi yang diperlukan. Kegiatan belajar mandiri tersebut tetap akan berlangsung ataupun tanpa bantuan orang lain. Maka belajar mandiri secara fisik dapat berupa belajar sendiri atau bersama orang lain atau tanpa bantuan tenaga pengajar profesional.

Menurut Wedemeyer, belajar mandiri adalah cara belajar yang memberikan derajat kebebasan, tanggung jawab, dan kewenangan yang lebih besar kepada peserta didik dalam melaksanakan dan merencanakan kegiatan-kegiatan belajarnya. Adapun Stephen Brookfield (2000: 130) mengemukakan bahwa kemandirian belajar merupakan kesadaran diri, digerakkan oleh diri sendiri, kemampuan belajar untuk mencapai tujuannya—*Independent learning is self-awareness, driven by oneself, the ability to learn to achieve its goals.*

Dalam pengertian lain, belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna menyelesaikan masalah. Hal tersebut dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Menurut Kirkman (2007: 180), pembelajaran mandiri adalah proses yang melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasi apa yang perlu dipelajari dan menjadi pemegang kendali dalam menemukan dan mengorganisir jawaban. Tentu hal ini berbeda dengan belajar sendiri. Dengan kata lain, belajar mandiri adalah usaha yang dilakukan peserta didik tanpa bantuan tenaga pengajar atau orang lain dalam menyelesaikan persoalan pembelajarannya sendiri sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi yang dimilikinya dan mampu memecahkan persoalan dalam pembelajaran, baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Terdapat beberapa ciri-ciri lain yang menandai belajar mandiri sebagaimana berikut.

1. Piramid tujuan

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa semakin kuat motivasi belajar, maka semakin tinggi kemampuan belajar dan semakin banyak serta tersedianya sumber belajar. Secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan ini menunjukkan kemungkinan semakin tingginya kualitas kegiatan belajar dan semakin banyaknya kompetensi yang diperoleh.

2. Sumber belajar
3. Media belajar antara lain berupa paket-paket belajar yang berisi *self instructional* material, buku teks, hingga teknologi informasi lanjut. Ketersediaan sumber dan media belajar turut menentukan kekuatan motivasi belajar. Apabila sumber dan bahan belajar tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup di dalam masyarakat, maka kegiatan belajar mandiri semakin terdukung.
4. Belajar mandiri dapat dilakukan di mana pun
Belajar mandiri dapat dilakukan di tempat yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar serta dapat dilaksanakan setiap waktu. Hal tersebut memberikan otonomi kepada peserta didik dalam menentukan arah atau tujuan belajarnya, sumber belajar, program belajar, dan materi yang dipelajarinya.
5. Peserta didik memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri sesuai dengan kehendak dirinya dalam menangkap hasil yang dipelajarinya.
6. Belajar mandiri juga dapat dijalankan dalam sistem pendidikan formal, non-formal, ataupun bentuk-bentuk belajar campuran.
7. Pembelajaran mandiri tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan pun, dan di mana pun ia mau belajar.
8. Kegiatan belajar aktif memiliki ciri keaktifan pemelajar, persistensi, keterarahan, dan kreativitas untuk mencapai tujuan.
9. Motif atau niat untuk menguasai suatu kompetensi adalah kekuatan pendorong kegiatan belajar secara intensif, konsisten, terarah, dan kreatif.
10. Kompetensi adalah pengetahuan atau keterampilan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
11. Dengan pengetahuan yang telah dimiliki, pemelajar mengolah informasi dari sumber belajar sehingga menjadi pengetahuan ataupun keterampilan baru yang dibutuhkan.
12. Tujuan belajar hingga evaluasi hasil belajar ditetapkan sendiri oleh pemelajar sehingga mereka sepenuhnya menjadi pengendali kegiatan belajar.
13. Wujud fisik belajar mandiri dapat berupa ketergantungan peserta didik terhadap tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang berlaku.

Seseorang yang sedang menjalankan kegiatan belajar mandiri ditandai dan ditentukan oleh keinginan untuk belajar, bukan dipengaruhi oleh kemampuan fisik kegiatan belajarnya. Peserta didik dapat belajar sendiri, kelompok, atau sedang dalam kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas. Apabila motif yang mendorong kegiatan belajar adalah untuk menguasai kompetensi yang diinginkan, maka peserta didik dapat dikatakan sedang menjalankan belajar mandiri. Belajar mandiri jenis ini disebut sebagai *self-motivated learning*.

Saat ini para pakar pendidikan, orang tua, ataupun masyarakat secara luas mulai menyadari bahwa pendidikan tidaklah cukup hanya dengan model tatap muka sehingga paradigma pendidikan semakin bergeser pada filosofi bahwa peserta didik mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap maksud dalam materi pembelajaran yang mereka terima, mampu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya, serta mampu mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata. Paradigma pendidikan tentu saja tidak hanya berorientasi pada hasil akhir yang pada akhirnya mengarah kepada pencapaian prestasi akademik berupa skor tinggi dalam ujian atau nilai yang baik dalam ujian tes. Pembelajaran kepada seorang peserta didik tidak hanya ditekankan pada transfer pengetahuan dari seorang tenaga pengajar kepada peserta didik, tetapi juga pada sejauh mana peserta didik dapat memaknai pengetahuan yang didapatkannya. Lebih jauh, peserta didik pun dapat lebih mandiri dengan kehidupannya dan dapat membangun kerja sama dengan orang lain untuk kesuksesannya.

Dalam pola belajar mandiri, peserta didik diajak untuk mengaitkan tugas sekolah mereka dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah kehidupan seorang peserta didik di rumah, sekolah, di antara teman-teman sebaya, dan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah situasi “nyata”, lingkungan “nyata”, “kehidupan nyata” peserta didik. Pembelajaran mandiri memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menemukan bagaimana kehidupan akademik sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Proses penemuan ini tentu saja membutuhkan waktu, tetapi hasilnya sebanding dengan waktu yang dihabiskan.

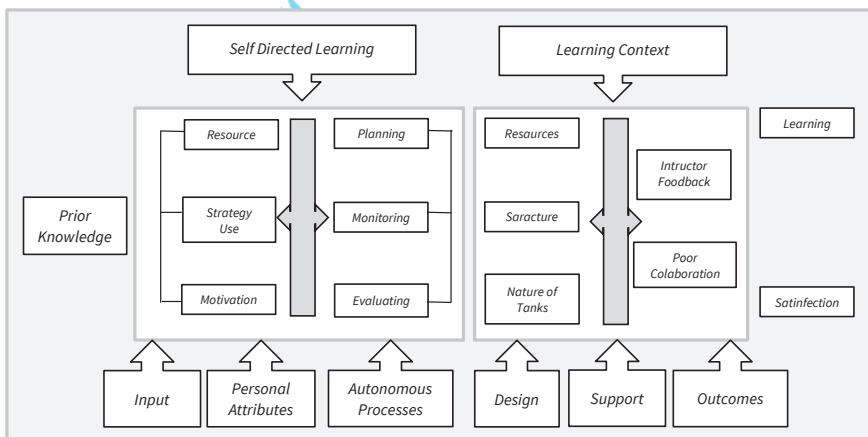
Pembelajaran mandiri menuntut adanya kesadaran memperoleh pengetahuan dan pengalaman peserta didik untuk senantiasa belajar hal-hal baru. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut peserta didik dapat belajar dengan bantuan orang lain atau dapat belajar secara mandiri. Pengetahuan dan kemandirian peserta didik dalam belajar dapat dikembangkan di lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 4 Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat dasar dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berfikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri.

Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang tadinya berpusat pada tenaga pengajar menjadi berpusat pada peserta didik (*student centered learning/SCL*) diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses SCL, maka peserta didik memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk belajar secara mandiri dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas peserta didik.

Sesuai dengan konsep belajar mandiri, seorang peserta didik diharapkan dapat:

1. menyadari bahwa hubungan antara tenaga pengajar dengan dirinya tetap ada, tetapi hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar atau media belajar;
2. mengetahui konsep belajar mandiri;
3. mengetahui kapan ia harus minta tolong dan kapan ia membutuhkan bantuan atau dukungan; dan
4. mengetahui kepada siapa dan dari mana ia dapat atau harus memperoleh bantuan/dukungan.

Bagian terpenting dari konsep belajar mandiri adalah setiap peserta didik harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber informasi untuk memperlancar kegiatan belajarnya. Berikut adalah konsep belajar mandiri:



Pada *self directed learning*, *personal attributes* di atas dimaksudkan sebagai motivasi untuk belajar dan kapasitas diri untuk tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Selain itu juga meliputi kemampuan menggunakan sumber pembelajaran dan kemampuan melakukan strategi berpikir (belajar). *Personal attributes* harus disertai dengan sudah memiliki pengetahuan sebelumnya (*prior knowledge*). Sedangkan proses menunjukkan bagaimana peserta didik belajar diwujudkan dalam tahap perencanaan, pada tahap pertama yakni ketika peserta didik merencanakan aktivitas pada tempat dan waktu di mana peserta didik merasa nyaman untuk belajar. Peserta didik juga merencanakan komponen belajar yang diinginkan dan menentukan target belajar yang ingin dicapai.

Tahap kedua adalah pemantauan. Pada tahap ini peserta didik mengamati dan mengobservasi pembelajaran mereka. Banyak tantangan belajar yang dapat ditemukan oleh peserta didik ketika ia memonitoring pembelajaran

mereka sehingga akan menjadikan proses belajar yang lebih bermakna. Tahap ketiga ialah evaluasi. Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi pembelajarannya dan pengetahuan yang dimiliki, kemudian pendidik memberikan umpan balik serta mengolaborasi pengetahuan antarpeserta didik untuk mencapai pemahaman yang benar.

Sementara *learning context* menunjukkan bahwa belajar mandiri dipengaruhi oleh faktor rancangan pengajaran, bentuk, dan jenis pengajaran hingga tempat pembelajaran yang akan berlangsung. *Learning context* yang dimaksud adalah dalam konteks sosial yang meliputi norma, budaya, dan kultur lingkungan sosial. Dengan demikian, konsep belajar mandiri yang dijelaskan di atas bermakna bahwa belajar mandiri merupakan *collaborative learning* antarteman untuk mendapatkan umpan balik. Dengan kata lain, belajar mandiri diartikan sebagai interaksi dengan tenaga pengajar yang diberikan sebagai panduan dan pemberi umpan balik yang bersifat membangun.

Pelaksanaan belajar mandiri memberikan beberapa manfaat bagi peserta didik: peserta didik dapat belajar sesuai dengan keinginan, harapan, dan motivasinya; peserta didik dapat mendalami topik penting dengan lebih baik sehingga akan meningkatkan proses pembelajarannya; peserta didik dapat merencanakan dan menilai sendiri hasil pembelajarannya; dan peserta didik akan lebih aktif dalam belajar sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih mendalam. Di era ini, peserta didik didorong untuk berpikir, bukan sekadar menghafal apa yang telah mereka pelajari sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis; meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik atas proses pembelajaran; dan dapat mengevaluasi pencapaian pembelajarannya. Dengan demikian, semakin cepat seseorang memiliki kemampuan belajar mandiri, maka semakin mudah peserta didik menjalankan pembelajaran. Maka, dengan belajar mandiri peserta didik dapat meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dapat mengambil keputusan, inovatif, dan percaya diri, dapat meningkatkan hubungan antarpeserta didik dan menghasilkan hubungan yang saling bergantung, serta menghormati tenaga pengajar dan peserta didik. Aspek-aspek tersebut tentu menjadi hal penting yang harus dimiliki.

Model Pengembangannya

Salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar peserta didik adalah dengan menerapkan model pembelajaran mandiri. Pembelajaran tersebut membuat peserta didik memiliki inisiatif untuk menganalisis hasil belajarnya sendiri dengan bantuan orang lain, merumuskan tujuan belajarnya sendiri, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memiliki dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, serta mengevaluasi prestasi belajarnya sendiri.

Model pembelajaran mandiri lebih menekankan pada keterampilan, proses, dan sistem dibandingkan pemenuhan isi dan tes. Melalui penerapan pembelajaran mandiri, peserta didik diberikan otonomi dalam mengelola belajarnya yang nantinya mengarah pada kemandirian belajar. Kemandirian belajar (*self-direction in learning*) dapat diartikan sebagai sifat dan sikap serta kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai kompetensi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata.

Model pembelajaran mandiri akan memberdayakan siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri sedangkan tenaga pengajar hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar yang dilakukan juga optimal yang berimbas pada peningkatan kemandirian belajar dan prestasi belajar peserta didik. Sementara model pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh seorang tenaga pengajar untuk menunjang proses belajar peserta didik dengan pola dan kegiatan bertahap. Semua model pembelajaran yang bertujuan meningkatkan motivasi belajar dapat dianggap sebagai model pembelajaran mandiri. Menurut Surbakti (2017: 7), *self directed learning* (SDL) adalah proses penerapan gagasan yang dimiliki dengan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. Individu akan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan secara mandiri, menentukan kebutuhan belajar, tujuan, sumber, dan tujuan belajar serta menilai hasil belajar.

Dalam pembelajaran mandiri, pengajar bertindak sebagai fasilitator. Ia hanya menstimulasikan dan mengarahkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Ia tidak memberikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik, akan tetapi menganalisis dan menilai sejauh mana peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan dimilikinya. Untuk mengetahui hal tersebut, pengajar perlu mengevaluasi pembelajaran di akhir waktu.

Harsono (2013: 2) mengemukakan beberapa hal yang harus diketahui tentang *self-directed learning* sebagaimana berikut.

1. Peserta didik memutuskan sendiri perihal belajar (mencakup: apa, untuk apa, bagaimana, di mana, dan kapan) yang mereka anggap penting dan bermanfaat.
2. Peserta didik dituntut untuk melakukan identifikasi masalah yang perlu diinvestigasi.
3. Peserta didik harus mencari sumber belajar yang relevan.
4. Peserta didik mampu menentukan prioritas dan merancang penelusuran sumber belajar.
5. Peserta didik mampu mempelajari materi yang ada di dalam sumber belajar.

6. Peserta didik mampu menghubungkan informasi yang telah terkumpul dengan topik bahasan yang dipelajari.
7. Peserta didik dapat mengambil tanggung jawab lebih untuk berbagai keputusan yang terkait dengan usaha belajar.
8. Peserta didik yang tampak sendiri mampu mentransfer pembelajaran, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan belajar dan dari satu situasi yang satu ke situasi lain.

Self directed learning adalah upaya mengembangkan kebebasan peserta didik dalam mendapat informasi dan pengetahuan yang tidak dikendalikan oleh orang lain, menentukan arah/tujuan belajar, sumber belajar, program belajar, materi yang dipelajarinya, dan bagaimana mempelajarinya tanpa diatur secara ketat oleh peraturan. *Self directed learning* dapat terjadi ketika peserta didik berupaya menghindari instruksi/perintah, membentuk tujuan yang nyata, melatih apa yang mereka pelajari, mengintegrasikan pengetahuan, dan mengembangkan kepercayaan yang positif terhadap kemampuan yang dirasakannya untuk pembelajaran dan hasil belajar. Cazen dan Schiopca dalam Kim dan Han (2015) menemukan bahwa *self directed learning* dan kemampuan interpersonal saling berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap nilai akademik peserta didik.

Model proses belajar mandiri lebih mengutamakan satu proses penyadaran diri individu berdasarkan pengalaman belajar yang dialami. Salah satu faktor penting dalam pengembangan kemampuan belajar mandiri adalah menarik perhatian dan keinginan peserta didik untuk belajar. Seseorang akan termotivasi untuk belajar apabila aktivitas belajar memiliki makna karena pengetahuan atau keterampilan yang diperolehnya dapat dirasakan manfaatnya dan sesuai dengan keinginannya. Proses belajar mandiri memberikan dorongan pengembangan secara bebas sesuai dengan kepribadian anak, memberikan kepercayaan penuh dan penguatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri melalui serangkaian pengalaman belajar.

Adapun model pembelajaran mandiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Model SAVI
Model ini menekankan pembelajaran yang memanfaatkan semua alat indra peserta didik.
2. Model MASTER
Model ini merupakan langkah dalam Cara Belajar Cepat (CBC) untuk membuat suasana pembelajaran terasa menyenangkan dan jauh dari kesan kaku.

Di sisi lain, ada beberapa model pembelajaran yang dijadikan pembandingan dalam mengembangkan kemampuan belajar mandiri sebagai berikut.

1. Model pembelajaran partisipatif

Model ini mengembangkan langkah-langkah: (a) menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri, (b) menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif, (c) diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik, (d) merumuskan pola pengalaman belajar, (e) melakukan dan menggunakan pengalaman belajar dengan metode dan teknik yang memadai, dan (f) mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan-kebutuhan belajar.

2. Model pembelajaran *learning self control*

Kunci utama model ini ialah pengendalian rangsangan yang berbentuk mengubah lingkungan. Model ini memiliki beberapa tahapan: (a) memperkenalkan prinsip perilaku, (b) membangun landasan berpijak, (c) menyusun program pengontrol diri, dan (d) memantau serta memperbaiki program.

3. Model pembelajaran individual dengan prinsip *mastery learning*

Model ini dikembangkan dengan memperhatikan prinsip bahwa segala strategi pembelajaran yang dikembangkan tenaga pengajar dalam rangka mengembangkan penguasaan kompetensi secara tuntas senantiasa perlu memperhatikan perbedaan individual dari peserta didik. Model ini memiliki enam tahapan, yaitu: (a) tes diagnostik untuk mengetahui kesulitan belajar, (b) bantuan untuk mengatasi masalah belajar, (c) menetapkan tujuan pembelajaran, (d) pengorganisasian materi dan strategi pembelajaran, (e) tes formatif, dan (f) tes sumatif.

4. Model kemandirian aktif pembelajaran praktik kesenian

Model ini menitikberatkan pada keaktifan peserta didik untuk kreatif terhadap materi ajar sehingga mampu menghasilkan kemandirian peserta didik dalam mewujudkan praktik kesenian (musik, tari, teater, pedalangan, dll) secara memuaskan.

Secara garis besar, proses pembelajaran dalam *self directed learning* dibagi menjadi tiga, yaitu *planning*, *monitoring*, dan *evaluating*. Pada tahap perencanaan (*planning*), peserta didik merencanakan aktivitas pada tempat dan waktu di mana peserta didik merasa nyaman untuk belajar. Peserta didik juga dapat merencanakan komponen belajar yang diinginkan dan menentukan target belajar yang ingin dicapai. Kemudian, pada tahap monitoring, peserta didik mengamati dan mengobservasi pembelajaran mereka. Banyak tantangan belajar yang dapat ditemukan oleh peserta didik ketika pengajar memonitor pelajaran mereka sehingga akan menjadikan proses belajar yang lebih bermakna. Adapun pada tahap evaluasi, peserta didik mengevaluasi pelajaran dan pengetahuan yang dimiliki kemudian pengajar memberikan

umpan balik serta mengolaborasikan pengetahuan peserta didik yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai pemahaman yang benar.

Tenaga pengajar tidak dapat mengevaluasi peserta didik secara langsung karena keragaman dari proses belajar masing-masing peserta didik sehingga langkah evaluasi yang diterapkan mengacu terhadap nilai ketuntasan minimum/standar penilaian yang diinginkan pengajar sesuai tingkat kesulitan mata pelajaran yang diajarkannya. Pengajar membutuhkan waktu untuk menyiapkan evaluasi dan umpan balik bagi masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran mandiri bersifat fleksibel, tetapi tetap berorientasi pada *planning*, *monitoring*, dan *evaluating* bergantung pada kemampuan peserta didik dalam mengelola pembelajaran sesuai otonomi yang dimilikinya.

Mok dan Lung menemukan tiga fenomena utama dalam pembelajaran mandiri (*self-directed*), yaitu manajemen sumber, melihat perlunya bantuan, dan kontrol pelajar. *Self directed learning* menuntut peserta didik untuk dapat memajemen sumber belajar yang ada sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran. Dengan *self directed learning*, maka peserta didik akan berusaha keras memecahkan masalahnya, jika dalam prosesnya mengalami kesulitan, maka tenaga pengajar dapat bertanya kepada pengajar lainnya atau ia menginvestigasi solusi dan perspektif lain yang diterima.

Menurut Hiemstra (Sunarto, 2008), langkah-langkah pembelajaran *self directed learning* terbagi menjadi enam langkah, yaitu:

1. *preplanning* (aktivitas awal proses pembelajaran);
2. menciptakan lingkungan belajar yang positif;
3. mengembangkan rencana pembelajaran;
4. mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai;
5. melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring; dan
6. mengevaluasi hasil belajar individu.

Penerapan Metode Pembelajarannya

Dalam penerapan metode pembelajaran mandiri, peserta didik ditekankan untuk mampu mengekspresikan pemahamannya secara mandiri dengan cara membaca buku, rajin belajar, dan berinteraksi bersama temannya tanpa ada pendampingan dari tenaga pengajar. Penerapan belajar mandiri dapat dilakukan dengan cara: evaluasi dan refleksi, berbagi, bertanya, memberi apresiasi/penghargaan atas pendapat peserta didik, membangun kepercayaan diri peserta didik dan tenaga pengajar, peserta didik sebagai pusat, dan perencanaan diri.

Secara umum, peningkatan minat belajar peserta didik dipengaruhi oleh media yang digunakan yaitu modul belajar *web offline*. Modul tersebut

memberikan peserta didik suasana baru dalam belajar dan tentunya berdampak pada minat belajar mereka. Peserta didik akan merasa tertarik, senang saat belajar tanpa paksaan; peserta didik memiliki perhatian tertentu saat belajar menggunakan media; peserta didik ikut terlibat mengakses materi belajar pada media yang disediakan serta memiliki pengalaman belajar tersendiri saat mereka mempelajari materi secara teori dan mempraktikkannya langsung.

Dahulu, minat peserta didik terbentuk karena pembelajaran yang diterapkan berbeda dengan metode yang digunakan oleh tenaga pengajar sebelumnya yaitu metode ceramah dengan buku paket sebagai sumber belajar. Namun, saat ini minat belajar peserta didik terbentuk setelah metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran mandiri dengan media modul belajar *web offline*. Modul ini membuat sumber belajar peserta didik lebih bervariasi. Para peserta didik akan meningkatkan minatnya untuk belajar ketika menemukan hal baru dalam pembelajaran seperti penggunaan metode pembelajaran dan media yang baru sehingga mereka lebih mudah menangkap materi yang diajarkan pengajar sebagai fasilitator baik dalam pembelajaran daring maupun luring.

Menurut Dimiyati dan Mudjiono (2009), prinsip-prinsip pembelajaran berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Dalam hal ini, perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Sedangkan Gage dan Berliner mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian teori belajar pengolahan informasi, tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya.

Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil sebagaimana yang diungkapkan Gage dan Berliner "*Motivation is the concept we use when we describe the force action on or within an organism to initiate and direct behavior.*" Demikian pula menurut H.L Petri, motivasi dapat merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar.

Sementara pada model SDL, peserta didik diharapkan memiliki inisiatif, tanpa bantuan orang lain untuk menganalisis kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan belajarnya sendiri, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai serta mengevaluasi

hasil belajarnya sendiri. Peserta didik diberikan kebebasan dalam mengelola belajarnya yang nantinya mengarah pada kemandirian belajar. Pembelajaran ini mampu menyadarkan dan memberdayakan peserta didik sebagai pelajar usia dewasa yaitu belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri sehingga proses belajar yang dilakukan juga optimal yang berimbas pada peningkatan hasil belajar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sunarto (2008) bahwa jika seseorang memiliki peluang untuk mengembangkan kemandirian belajarnya secara maksimal, maka dia akan dapat mengelola belajarnya dengan baik sehingga hasil yang nantinya didapatkan akan optimal. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pembelajarannya adalah:

1. Mengambil tindakan
Peserta didik yang menghimpun, menyentuh, dan mengumpulkan pengetahuan memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan dengan peserta didik yang hanya menonton, mendengar, dan menyerap informasi.
2. Mengajukan pertanyaan
Untuk menjadi mandiri, peserta didik harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan menarik dan tajam yang dapat menyempurnakan keyakinan dan menjelaskan kejadian.
3. Membuat pilihan
Peserta didik memilih untuk berpartisipasi dalam rencana kerja yang paling sesuai dengan minat pribadi dan bakat mereka serta gaya belajar yang paling tepat bagi mereka sembari mencari keterkaitan antara tugas sekolah dengan kehidupan keseharian mereka.
4. Membangun kesadaran diri
Kesadaran diri meliputi pengetahuan tentang keterbatasan dan kekuatan kita, mengetahui bagaimana pandangan orang lain kepada kita, dan pengendalian emosi.
5. Kerja sama
Membantu peserta didik untuk menemukan bahwa ternyata cara pandang mereka hanyalah satu di antara cara pandang yang lain dan bahwa cara mereka melakukan sesuatu hanyalah satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan lain. Melalui kerja sama, bukan persaingan atau kompetisi, peserta didik menyerap kebijaksanaan orang lain.

Dalam kesehariannya, peserta didik sering dihadapkan pada permasalahan yang menuntutnya untuk mandiri dan menghasilkan keputusan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan kreatif dalam mengembangkan belajarnya. Dalam hal ini, Song and Hill (2007: 31–32) menyebutkan kemandirian yang terdiri dari beberapa aspek berikut.

1. *Personal attributes*
Aspek ini berkenaan dengan motivasi dari peserta didik, penggunaan sumber belajar, dan strategi belajar. Motivasi belajar merupakan keinginan

yang ada pada diri seseorang untuk merangsang peserta didik melakukan kegiatan belajar. Adapun ciri-ciri motivasi, yaitu: (a) tanggung jawab. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan merasa bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakannya dan tidak meninggalkan tugasnya sebelum berhasil menyelesaikannya, (b) tekun terhadap tugas. Peserta didik fokus menyelesaikan tugas dan tidak mudah menyerah, (c) waktu penyelesaian tugas. Peserta didik berusaha menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien, dan (d) menetapkan tujuan yang realistis. Peserta didik mampu menetapkan tujuan realistis sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, mampu berkonsentrasi terhadap setiap langkah untuk mencapai tujuan, dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai.

2. *Process*

Aspek ini berkenaan dengan otonomi proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan meliputi: (a) mengelola waktu secara efektif. Kegiatan ini meliputi pembuatan jadwal belajar, menyusun kalender studi untuk menulis, atau menandai tanggal-tanggal penting dalam studi, tanggal penyerahan tugas makalah, PR, dan tanggal penting lainnya, mempersiapkan buku, alat tulis, dan peralatan belajar lainnya; dan (b) menentukan prioritas dan menata diri. Mencari tahu hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu dan kapan harus dilakukan.

Sementara kegiatan monitoring dalam pembelajaran dengan menggunakan model *cooperative learning* tipe kepala bernomor terstruktur, antara lain: (a) aktif melakukan diskusi dalam kelompok, (b) berani mengemukakan pendapat pada saat diskusi berlangsung, (c) aktif bertanya saat menemui kesulitan baik terhadap teman maupun tenaga pengajar, (d) membuat catatan apabila diperlukan, (e) tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun tenaga pengajar tidak hadir.

Sedangkan yang termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran, antara lain: (a) memperhatikan umpan balik dari tugas yang telah dilaksanakan sehingga dapat diketahui letak kesalahannya, (b) mengerjakan kembali soal/tes di rumah, dan (c) berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

3. *Learning context*

Aspek ini terkait faktor lingkungan yang sangat memengaruhi tingkat kemandirian peserta didik dalam belajar mandiri. Ada beberapa faktor dalam konteks pembelajaran yang dapat memengaruhi pengalaman mandiri peserta didik, di antaranya *structure* dan *nature of task*.

Kelebihan dan Kekurangannya

Dalam proses belajar mandiri, peserta didik mempunyai tanggung jawab yang besar atas proses belajarnya sehingga belajar mandiri mengharuskan peserta didik untuk menyelesaikan tugas atau masalah melalui praktik pengalaman, teori yang didapatkan di bangku sekolah, dan evaluasi yang disampaikan oleh tenaga pengajar, baik yang dilihat dari nilai ujian maupun nilai sikap dalam menerima materi. Selain itu, peserta didik akan memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam hal penelusuran literatur buku dan pemecahan masalah.

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitupun dengan pembelajaran mandiri. Secara rinci, pembelajaran mandiri memiliki kelebihan-kelebihan berikut.

1. Membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab.
2. Peserta didik mendapatkan kepuasan belajar melalui tugas-tugas yang diselesaikannya.
3. Peserta didik mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam hal penelusuran literatur dan pemecahan masalah.
4. Peserta didik dapat menjadi tenaga pengajar bagi dirinya sendiri.

Selain itu, belajar mandiri memberikan sejumlah keunggulan unik sebagai metode pengajaran, di antaranya: 1) pola ini memberikan kesempatan, baik kepada peserta didik yang lamban maupun yang cepat untuk menyelesaikan pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing dalam kondisi belajar yang tepat; 2) rasa percaya diri dan tanggung jawab pribadi yang dituntut dari peserta didik oleh program belajar mandiri mungkin dapat berlanjut sebagai kebiasaan dalam kegiatan pendidikan lain; 3) program belajar mandiri membuat peserta didik mendapatkan perhatian sekaligus kesempatan yang lebih luas; 4) kegiatan dan tanggung jawab pengajar yang terlibat dalam program belajar mandiri berubah karena waktu untuk penyajian menjadi berkurang dan ia mempunyai waktu lebih banyak untuk memantau peserta didik dalam pertemuan kelompok dan untuk konsultasi perseorangan; dan 5) peserta didik lebih menyukai metode belajar mandiri daripada metode tradisional karena sejumlah keunggulan yang dinyatakan di atas.

Sedangkan kelemahannya pembelajaran mandiri ialah: 1) apabila diterapkan kepada peserta didik yang belum dewasa, ia belum bisa belajar secara mandiri (masih memerlukan bimbingan); dan 2) apa yang didapat dalam pembelajaran mandiri masih belum tentu benar, maka perlu melakukan pertanyaan atau diskusi. Ada pula faktor yang menyebabkan lemahnya pembelajaran mandiri yang dilaksanakan di luar sekolah adalah

1. Keterbatasan akses internet

Salah satu kekurangan metode pembelajaran *e-learning* adalah terbatasnya akses internet. Jika Anda berada di daerah yang tidak

- mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit untuk mengakses layanan *e-learning*. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia mengingat beberapa daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih belum terjangkau akses internet.
2. Berkurangnya interaksi dengan pengajar
Beberapa metode pembelajaran *e-learning* bersifat satu arah. Hal tersebut menyebabkan interaksi pengajar dan peserta didik menjadi berkurang sehingga akan sulit bagi peserta didik untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar dipahami.
 3. Pemahaman terhadap materi
Materi yang diajarkan dalam *e-learning* direspons berdasarkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tergantung pada kemampuan si pengguna. Beberapa orang mungkin dapat menangkap materi dengan lebih cepat hanya dengan membaca, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Bahkan ada juga yang membutuhkan penjelasan dari orang lain agar dapat memahami materi yang dipelajari.
 4. Minimnya pengawasan dalam belajar
Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna *e-learning* kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari diri sendiri agar proses belajar dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan.

Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19

Masa pandemi Covid-19 yang mewabah dunia khususnya di Indonesia berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Pasalnya proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh, ujian nasional ditiadakan, dan peserta didik dihimbau untuk belajar dari rumahnya masing-masing dengan sistem daring. Kondisi demikian mengejutkan sekaligus menimbulkan kegelapan. Pada akhirnya, muncul tantangan yang harus dihadapi tenaga pengajar, orang tua, dan peserta didik. Tenaga pengajar harus mengubah pola pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring sehingga mau tidak mau penggunaan teknologi menjadi satu-satunya cara untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun nyatanya tenaga pengajar dan peserta didik kita belum terbiasa dengan perkembangan teknologi yang mengalami banyak kendala. Selain itu, orang tua juga mengalami tantangan ketika mereka mendampingi anak-anaknya belajar. Ditambah sebagian dari mereka tidak memiliki telepon genggam dan paket internet yang menunjang.

Di samping itu ada kondisi baru yang awalnya semua aktivitas dilakukan di luar rumah menjadi dikerjakan di dalam rumah. Faktanya, ketika semua aktivitas dilakukan di rumah ternyata banyak permasalahan juga yang harus dibawa ke rumah. Tidak sedikit orang tua yang bekerja lebih keras karena kondisi ekonominya menurun, orang tua mengalami pemutusan hubungan kerja, dan ada anggota keluarga yang sakit. Di sisi lain orang tua yang sebelumnya mempercayakan pendidikan anak kepada tenaga pengajar dan sekolah harus turut ambil peran dalam membantu anak menyelesaikan tugas pembelajarannya. Orang tua akhirnya juga merasakan kesulitan karena harus berperan sebagai tenaga pengajar dan pemimpin di rumah. Kondisi demikian tentu sangat memengaruhi segala aspek kehidupan dalam keluarga. Demikian juga yang dialami oleh peserta didik. Mereka merasa sulit karena tidak terbiasa belajar secara mandiri.

PJJ yang sudah berjalan belum menemukan kondisi ideal bagi peserta didik. Tentu karena hal ini dipengaruhi oleh beragam faktor. Bahkan dari persepsi peserta didik yang beragam permasalahannya, model PJJ yang dilakukan selama masa pandemi tidak membuat mereka nyaman dan bahagia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tingkat persepsi peserta didik terhadap PJJ yang dilakukan pada tanggal 13 s/d 20 April 2020 terhadap 1.700 peserta didik di berbagai jenjang. Hasilnya, sekitar 76,7% mengaku tidak senang mengikuti PJJ; 81,8% peserta didik menyatakan bahwa selama empat pekan PJJ hanya diberi tugas oleh tenaga pengajar tanpa adanya diskusi ataupun penjelasan materi; dan 73,2% peserta didik merasa mendapat tugas berat dari tenaga pengajar (Kompas, 2020).

Beragam permasalahan tentu sangat berpengaruh pada pola pengasuhan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat agar proses PJJ dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Kemampuan dalam strategi belajar mandiri yang diperkenalkan oleh tenaga pengajar terhadap peserta didik yaitu kemampuan untuk berinisiatif dalam mengatur (*regulate*), mengelola dan mengontrol proses belajarnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam belajar dengan mempergunakan berbagai alternatif atau strategi belajar, *self-regulation* memfokuskan pada bagaimana pemelajar menggerakkan, mengubah, dan mempertahankan kegiatan belajar baik secara sendiri maupun pada lingkungan sosialnya dalam konteks instruksional informal maupun formal.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan anak belajar seperti halnya pada saat belajar di sekolah. Dalam arti, anak tetap dibiasakan memiliki disiplin belajar dengan menyediakan ruang dan waktu belajar secara khusus. Jika memungkinkan orang tua dapat menyediakan sudut belajar di rumah dengan beragam alat belajar yang dimiliki. Agar proses belajar di rumah berjalan efektif, maka dibutuhkan kolaborasi. Belajar pada kondisi saat

ini memang tidak mudah. Namun, jika semua memiliki kesadaran bersama maka akan dapat berjalan lebih mudah. Kondisi yang demikian semakin membuka kesadaran bahwa pendidikan ternyata tidak hanya dapat dilakukan di sekolah.

Pandemi ini sangat berdampak terutama terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas akhir yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka merasa kesulitan dalam belajar karena ingin masuk ke jenjang perguruan tinggi favorit yang membutuhkan banyak peningkatan belajar. Alhasil, pihak sekolah bisa melaksanakan tatap muka secara berkala tentu dengan persetujuan dari Satgas covid 19 yang dibentuk oleh tiap-tiap kecamatan sesuai aturan yang berlaku. Sesuai harapan Nadiem Makarim bahwa sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu, Nadiem mengharapkan sekolah mulai mempersiapkan diri dari sekarang hingga akhir tahun untuk pergantian model pembelajaran. *“Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang kalau siap melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,”* jelas Nadiem pada Jumat (20/11/2020) melalui akun YouTube Kemendikbud RI.

Sejumlah madrasah yang telah mendapat izin dari dinas terkait telah menerapkan pembelajaran tatap muka pada 11 Januari 2021. Namun madrasah maupun sekolah harus mematuhi SOP (*Standar Operasional Prosedur*) sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dengan mengacu kepada surat edaran dari wilayah masing-masing. Adapun teknis pelaksanaan pembelajaran di masa Covid-19, kegiatan tatap muka menggunakan sistem *on-off* kecuali peserta didik kurang dari 20 anak dalam satu rombel sistem *on*. Setelah satu minggu pelaksanaan kegiatan tatap muka menggunakan sistem di atas, madrasah dapat menggunakan sistem selain dari di atas dengan cara mengajukan ke dinas pendidikan. Kegiatan tatap muka dilakukan dari Senin sampai dengan Sabtu Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.30 (secara bertahap), satu jam pembelajaran dilaksanakan selama 30 menit, dan jumlah jam pembelajaran per hari adalah 4 JP, kantin tidak diperkenankan untuk dibuka, tidak ada waktu jeda istirahat, dan kegiatan olahraga yang bersifat praktik di lapangan ditiadakan.

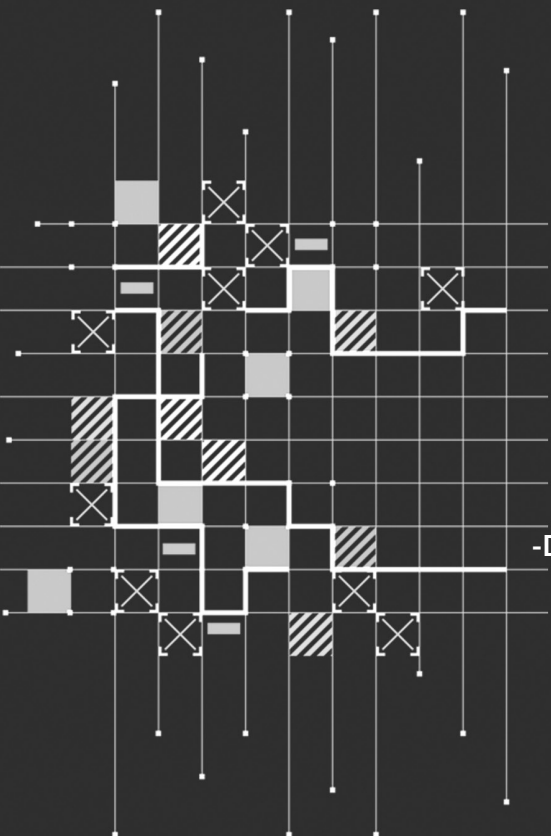
Protokol kesehatan bagi lembaga pendidikan madrasah sebelum pembelajaran harus melakukan disinfeksi sarana dan prasana, memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan air bersih, memastikan ketersediaan masker, memastikan *thermogun* berfungsi dengan baik, dan melakukan pemantauan kesehatan warga sekolah. Selanjutnya, setelah pembelajaran bisa dilaksanakan maka pihak sekolah atau madrasah melaporkan hasil pemantauan kepada dinas pendidikan melalui pengawas sekolah.

Daftar Bacaan

- Brookfield, S. D. 2000. *Understanding and Facilitating Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Darmayanti, Tri. 2005. "Self-Directed Learning Readiness Scale: Adaptasi Instrumen Penelitian Belajar Mandiri". *Jurnal Pendidikan Terbuka Jarak Jauh*, 2(2).
- Dimiyati dan Mujiono. 1999. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Cipta.
- Mok, M. M. C. dan Lung, C. L. 2005. "Developing Self-Directed Learning in Student Teachers". *International Society for Self-Directed Learning*, 2(1), pp. 18–39.
- Mudjiman, Haris. 2008. *Belajar Mandiri*. Surakarta: UNS Press.
- Song, Liyan dan Jannere R. 2007. "A Conceptual Model for Understanding Self-Directed Learning in Online environments". *Journal of Interactive Online Learning*, 6(1).
- Sunarto. 2008. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Depdikbud dan Rineka Cipta.
- Trianto. 2007. *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.



literasi
nusantara

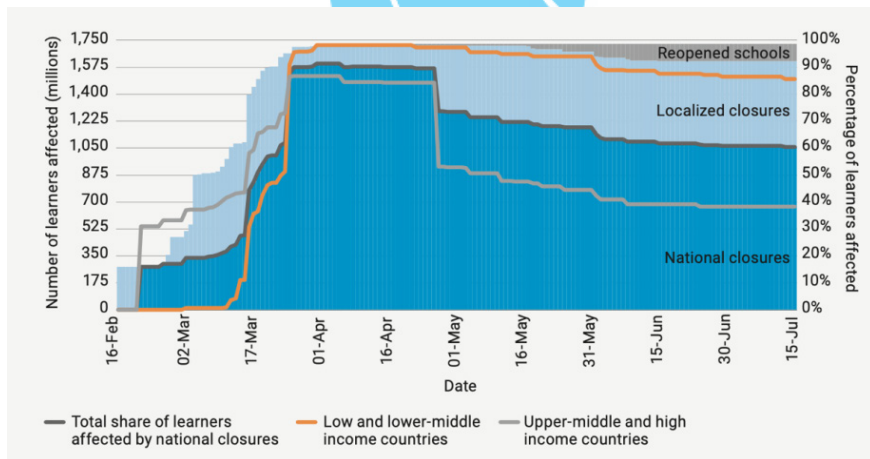


AKSES INTERNET DAN DEMOGRAFI INDONESIA

-Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd-

Pendidikan dan Pandemi COVID-19: Sebuah Perubahan Paradigma

Sebelum terjadi pandemi COVID-19, dunia telah menghadapi tantangan berat dalam memenuhi janji pendidikan sebagai hak asasi manusia. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya gangguan pendidikan terbesar dalam sejarah yang telah memberikan dampak global bagi peserta didik dan pendidik di seluruh dunia, dari pra-sekolah hingga perguruan tinggi serta pendidikan dan pelatihan vokasi. Bahkan, di berbagai negara terjadi penutupan sekolah dan perguruan tinggi untuk diganti dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring.

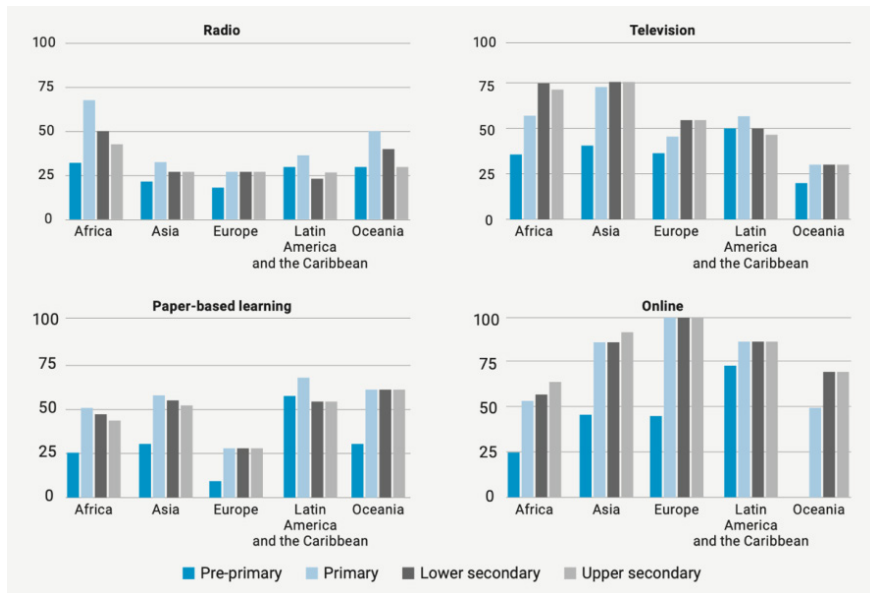


Sumber: United Nations, 2020

Gambar 1. Jumlah Peserta Didik yang Terdampak Akibat Penutupan Sekolah

Memastikan terlaksananya proses pembelajaran selama penutupan lembaga pendidikan menjadi prioritas utama bagi pemerintah di seluruh dunia. Banyak lembaga pendidikan yang beralih ke pemanfaatan teknologi,

informasi, dan komunikasi yang mengharuskan pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Beberapa negara di dunia melaporkan bahwa ada media dan sarana pembelajaran yang digunakan sebagai dampak dari ditutupnya lembaga pendidikan.



Sumber: United Nations, 2020

Gambar 2. Pilihan Media dan Sarana Pembelajaran di Negara-Negara yang Terdampak oleh Penutupan Sekolah

Pembelajaran jarak jauh tradisional merupakan kombinasi antara program televisi dan radio serta distribusi materi cetak. Terjadinya kesenjangan dalam pemanfaatan media dan sumber belajar tersebut disebabkan oleh kesenjangan digital atas akses yang terbatas ke layanan dasar rumah tangga, seperti listrik, kurangnya infrastruktur teknologi, dan rendahnya tingkat literasi digital peserta didik, orang tua, dan pendidik. Selain hal tersebut, faktor lain yang juga dihadapi adalah persoalan demografi.

Jelas sekali bahwa pandemi benar-benar mengganggu sistem pendidikan yang menurut banyak orang telah kehilangan relevansinya. Dalam bukunya, *21 Lessons for the 21st Century*, Yuval Noah Harari (2019) menguraikan bagaimana sekolah terus fokus pada keterampilan akademis tradisional dan pembelajaran hafalan daripada keterampilan seperti berpikir kritis dan kemampuan beradaptasi yang akan lebih penting untuk sukses di masa depan. Dapatkah perpindahan ke pembelajaran daring menjadi katalisator

untuk menciptakan metode baru yang lebih efektif dalam mendidik siswa? Sementara beberapa orang khawatir bahwa transisi *online* yang terburu-buru mungkin telah menghalangi tujuan ini dan sebagian lain berencana untuk menjadikan *e-learning* sebagai bagian dari “new normal” setelah mereka merasakan manfaatnya secara langsung.

Pendidikan dan Akses Internet

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan elemen inti dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah adanya upaya untuk memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil serta menyediakan kesempatan belajar seumur hidup (*long life learning*) untuk semua. Pendidikan memungkinkan setiap individu untuk membangun kehidupan dan masyarakat yang lebih sejahtera dengan tujuan akhir mencapai kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam banyak hal, sangatlah sulit untuk membahas aspek masyarakat kontemporer, khususnya yang terkait dengan pencapaian kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial tanpa mempertimbangkan internet. Kehidupan banyak orang sepenuhnya sangat dipengaruhi oleh tersedianya teknologi digital sehingga adanya teknologi digital tersebut membuat perbedaan yang dulunya terlihat jelas antara *online* atau *offline*, kini gagal memberikan keadilan bagi situasi internet yang secara implisit selalu aktif.

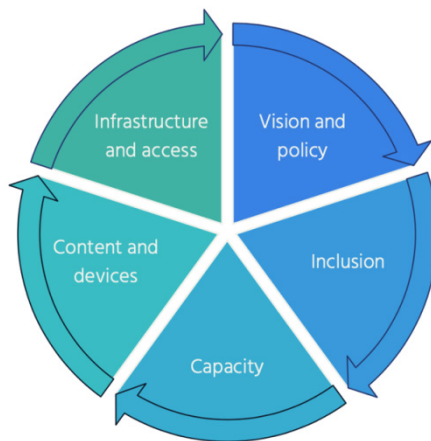
Jika diamati secara spesifik, generasi muda saat ini tidak dapat dipisahkan dari internet sebab ia seolah-olah menjadi bagian dari hidupnya. Praktik *online* telah menjadi bagian dasar dari kehidupan generasi muda saat ini sejak lahir, sama halnya seperti oksigen, air, atau listrik yang dianggap sebagai kondisi dasar kehidupan modern. Bagi generasi muda, teknologi itu seperti udara (Tapscott, 2009). Jadi, jika berbicara tentang internet dan pendidikan, maka kita juga berbicara tentang pendidikan yang sifatnya kontemporer. Internet sudah menjadi elemen integral dari pendidikan di negara maju dan kontribusi signifikan internet sebagai elemen integral dari pendidikan di seluruh dunia akan terus mengalami peningkatan, khususnya di masa pandemi covid-19 seperti saat ini.

Akses internet sangat penting untuk meningkatkan kontribusi pendidikan dalam upaya memakmurkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, akses internet juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan banyak cara. Bahkan, akses internet dapat membuka banyak informasi, pengetahuan dan sumber daya pendidikan, serta meningkatkan kesempatan untuk belajar di dalam dan di luar kelas. Pendidik dapat menggunakan materi *online* untuk mempersiapkan pembelajaran, sementara peserta didik dapat

memperluas jangkauan mereka terhadap proses pembelajaran. Model dan metode pembelajaran interaktif yang didukung oleh internet memungkinkan pendidik untuk lebih memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik dalam upaya mendukung pembelajaran bersama. Hal tersebut dapat membantu memperbaiki ketidaksetaraan dalam pendidikan. Akses ke internet juga akan membantu administrator pendidikan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas sekolah dan pendidikan tinggi.

Meskipun demikian, dampak peningkatan kualitas pendidikan sebagai akses terhadap internet merupakan dampak yang sifatnya tidak langsung. Pada tingkat dasar, penting untuk diingat bahwa lebih dari separuh populasi dunia sama sekali tidak memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan internet. Meskipun hal ini kemungkinan besar akan mengalami perubahan seiring dengan ekspansi global dari telepon seluler, masalah kesenjangan dalam akses terhadap penggunaan internet merupakan hal yang paling utama.

Terdapat lima prioritas bagi pembuat kebijakan yang terkait dengan peningkatan dampak internet bagi pendidikan yang meliputi: (1) prioritas yang berkaitan dengan infrastruktur dan akses; (2) visi dan kebijakan; (3) inklusi; (4) kapasitas; dan (5) konten dan perangkat (*Internet Society*, 2017).



Gambar 3. Prioritas Peningkatan Dampak Internet Bagi Pendidikan

Prioritas pertama adalah infrastruktur dan akses. Dampak internet dalam pendidikan tidak dapat dirasakan tanpa adanya infrastruktur yang memadai dan akses ke sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya investasi infrastruktur, keterampilan, dan kewirausahaan bersama dengan tata kelola yang mendukung ekosistem pemanfaatan internet. Namun saat ini, akses *broadband* tidak merata. Orang-orang di negara maju empat kali lebih

memungkinkan untuk berlangganan *broadband* seluler daripada mereka yang berada di negara kurang berkembang. Infrastruktur *broadband* sangat penting jika pendidik dan peserta didik ingin memanfaatkan sepenuhnya berbagai hal yang terdapat di dalam internet. Namun, banyak daerah pedesaan di negara berkembang yang masih kekurangan jaringan *broadband* atau konektivitas yang terjangkau. Padahal, sekolah membutuhkan komputer, tablet, dan perangkat TIK lainnya yang terintegrasi secara cerdas dalam lingkungan pendidikan untuk memanfaatkan pembelajaran yang didukung internet dengan sebaik-baiknya. Sekolah juga membutuhkan tenaga listrik yang baik. Gedung sekolah mungkin perlu didesain ulang untuk menggunakan pembelajaran yang didukung Internet secara efektif. Ini juga merupakan aspek penting dalam memungkinkan akses.

Prioritas kedua adalah visi dan kebijakan. Pembuat kebijakan yang peduli dengan dampak internet bagi pendidikan memiliki kesempatan untuk mengembangkan visi masa depan yang memungkinkan teknologi untuk memberi manfaat bagi peserta didik dan pembangunan nasional. Mereka harus bekerja sama untuk mengembangkan visi dan merancang kebijakan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk sektor pembangunan di bidang pendidikan. Kebijakan untuk internet dalam pendidikan harus memusatkan perhatian dan sumber daya pada prioritas pembangunan nasional. Kebijakan untuk akses dan penggunaan internet harus mencakup seluruh sistem pendidikan, mulai dari pra-sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi, hingga pembelajaran seumur hidup. Tujuannya adalah meningkatkan literasi digital dan keterampilan semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Prioritas ketiga adalah inklusi. Agenda 2030 pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong peluang belajar seumur hidup untuk seluruh masyarakat. Jika internet ingin berkontribusi secara efektif dalam pembelajaran, maka akses internet harus tersedia di semua tingkat pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Internet dapat membantu semua orang di setiap tahap kehidupan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan peluang kerja mereka. Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup untuk orang dewasa, termasuk keaksaraan orang dewasa, memiliki peran penting dalam pendidikan yang saling berkorelasi dengan internet. Kebijakan harus secara eksplisit menangani ketidaksetaraan struktural dalam pendidikan, terutama ketidaksetaraan gender. Anak perempuan di banyak negara memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas daripada anak laki-laki karena berbagai alasan ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan harus mendorong kesetaraan yang lebih besar dalam akses ke sumber belajar untuk kelompok yang kurang

beruntung dalam masyarakat, seperti mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau dalam kemiskinan, etnis minoritas dan penutur bahasa minoritas, serta mereka yang menyandang disabilitas.

Prioritas keempat adalah kapasitas. Pendidikan adalah inti dari pengembangan kapasitas. Melalui pendidikan, seseorang akan memperoleh keterampilan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan, memulai bisnis, menjalani kehidupan yang sejahtera, dan menafkahi diri sendiri serta keluarga. Pendidikan membangun kemampuan yang juga dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai pertumbuhan ekonomi, untuk mengelola layanan kesehatan dan sosial, serta untuk berperan penuh dalam komunitas bangsa-bangsa global. Semua aspek ekonomi dan masyarakat kita sedang diubah oleh internet. Dengan meningkatkan akses ke informasi, pengetahuan dan pendidikan, internet dapat membantu individu mencapai hasil pendidikan yang lebih baik secara keseluruhan serta mengembangkan keterampilan yang mereka dan masyarakat butuhkan.

Sukses di era digital membutuhkan keterampilan digital. Saat memasuki dunia kerja, individu harus dapat menggunakan komputer dan peralatan digital lainnya. Literasi digital dapat diukur dengan kemampuan untuk menggunakan aplikasi *online*, menemukan informasi secara *online*, menilai kualitas dan nilainya, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sangat penting untuk hidup di dunia digital, terutama bagi orang-orang yang bekerja di sektor industri. Peserta didik di sekolah maupun orang dewasa sama-sama perlu mempelajari cara menggunakan internet untuk melakukan transaksi dan cara melindungi diri mereka dari kejahatan dunia maya. Mengembangkan keterampilan ini merupakan bagian dari kurikulum. Pendidik juga perlu mempelajari keterampilan baru untuk menggunakan sumber daya internet secara efektif. Pengalaman global telah menunjukkan pentingnya pengembangan profesional dalam membangun kemampuan pendidik dalam menggunakan internet dan memperkenalkan jenis pembelajaran baru di kelas. Membangun kemampuan ini sangat penting untuk memaksimalkan nilai Internet untuk pendidikan.

Prioritas kelima adalah konten dan perangkat. Salah satu perbedaan paling dramatis yang dapat dibuat oleh internet terletak pada pembukaan akses ke konten yang lebih luas untuk pendidikan dan pembelajaran. Pendidik dapat mengarahkan peserta didik ke berbagai sumber dan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan penelitian dengan menjelajahi konten *online* sendiri. Internet telah menghasilkan inovasi penting dalam konten pendidikan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mencari cara untuk mengintegrasikan kekayaan sumber daya baru ke dalam pendidikan berbasis kearifan. Sampai saat ini, internet pada dasarnya diakses melalui komputer yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang di negara-negara tertentu. Namun,

akses ke telepon seluler yang dapat digunakan untuk mengakses internet telah memainkan peran penting dalam memperluas akses internet dan sebagai sarana baru untuk menumbuhkan kreativitas. Bahkan, perangkat seluler saat ini menyumbang setengah dari total lalu lintas web.

Pendidikan dan Demografi

Beberapa hasil kajian tentang pendidikan di seluruh dunia berpandangan bahwa perilaku dan hasil pendidikan individu serta dinamika agregatnya di tingkat populasi dapat dipelajari sebagai peristiwa dan karakteristik demografis. Pendidikan adalah untuk rakyat dan pengembangan akhirnya ditujukan untuk memaksimalkan kapasitas demi mencapai kesejahteraan penduduk secara penuh. Perencana pendidikan serta administrator secara konstan terlibat dalam kegiatan untuk dan bersama masyarakat. Dalam hal ini, timbul pertanyaan yang penting untuk dikaji bersama terkait aspek demografis. Sangat penting bagi perencana dan pengambil keputusan untuk mengetahui struktur dan distribusi penduduk serta perubahannya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, perencanaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang dinamika penduduk karena berkaitan dengan populasi sasaran yang terus berubah dalam jumlah, komposisi usia dan jenis kelamin, serta sebaran geografis.

Pertumbuhan penduduk menghasilkan variasi yang signifikan dalam komposisi usia dan jenis kelamin penduduk selain peningkatan numerik. Laju pertumbuhan penduduk memiliki implikasi luas pada semua bidang aktivitas manusia. Migrasi orang menentukan distribusi geografis mereka dan ini juga berdampak signifikan pada kebutuhan masyarakat. Semuanya akan memengaruhi perkembangan pendidikan secara langsung. Faktanya, temuan demografi adalah salah satu fondasi di mana rencana pendidikan dibangun dan untuk alasan ini, perencana harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang metode dan konsep demografis, makna, serta batasannya.

Mempelajari struktur populasi berarti mempelajari komposisinya yaitu distribusinya menurut kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Perencana pendidikan mungkin peduli dengan distribusi penduduk karena berbagai alasan. Pertama, mereka mungkin tertarik pada distribusinya menurut usia dan jenis kelamin. Hal ini memungkinkan mereka untuk menilai ukuran relatif dari populasi usia sekolah yang merupakan dasar dan titik tolak untuk setiap kebijakan pendidikan. Kedua, mereka mungkin peduli dengan distribusi penduduk menurut sektor kegiatan ekonomi. Tanpa pengetahuan yang akurat tentang distribusi menurut sektor dan pekerjaan, tidak mungkin memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan menentukan target untuk pendidikan teknis, kejuruan, dan tinggi. Ketiga, perencana mungkin peduli dengan

distribusi geografis penduduk yang memengaruhi biaya pendidikan dan pilihan jenis serta ukuran dan lokasi sekolah.

Akses Internet dan Demografi: Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang serba digital, khususnya di bidang pendidikan. Kehadiran teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul.

Situasi pandemi ini seketika mengubah sendi kehidupan masyarakat dunia dan menjadi ancaman bagi sektor kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan lainnya. Indonesia pun tak luput dalam tantangan besar penanganan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan menelan korban jiwa yang lebih besar. Salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19 adalah pendidikan yang melibatkan begitu banyak aktivitas fisik bersifat rutin, seperti pertemuan tatap muka di kelas, proses pembimbingan akademik, pertemuan formal dalam forum seminar, dan lain sebagainya. Namun demikian, berbagai aktivitas rutin ini terhambat oleh kebijakan *physical distancing* dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Melihat fenomena di atas, maka penerapan *e-learning* menjadi keniscayaan dan pilihan terbaik bagi dunia pendidikan. Berbagai institusi pendidikan saat ini mulai memanfaatkan teknologi dan menerapkan sistem pembelajaran *online* untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Penyajian sistem pembelajaran *online* (*e-learning*) berbasis web ini lebih interaktif dan bersifat *borderless*, inilah yang memungkinkan aktivitas pembelajaran dan perkuliahan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Penggunaan teknologi digital telah memberikan kemudahan beraktivitas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan. Masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang kesulitan mengakses teknologi digital karena keterbatasannya terhadap layanan internet.

Indonesia dengan negara yang cukup luas, akses internet yang beragam menjadi tantangan tersendiri. Akses internet hingga kenyamanan bagi beberapa orang yang tinggal di wilayah-wilayah yang jauh dari kota membuat beberapa golongan masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital. Saat sekolah *online* untuk memenuhi kebutuhan siswa di masa pembatasan sosial, tidak semua siswa memiliki akses internet atau perangkat seluler.

Sistem pembelajaran jarak jauh yang menggunakan jaringan internet harus melakukan prosedur persiapan yang matang dan tidak boleh meninggalkan sistem *online*. Sistem pembelajaran jarak jauh memiliki tingkat pengembangan media yang luar biasa karena merupakan salah satu bagian dari faktor pemilihan media pembelajaran yang baik dalam meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik. Terdapat beberapa faktor yang harus menjadi perhatian adalah karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok besar, alokasi waktu, sumber dana, serta prosedur penilaian. Sedangkan, penggunaan media khususnya untuk peningkatan pembelajaran sangat bergantung pada kesesuaian media dengan tujuan pengajaran, kesesuaian dengan tingkat kemampuan, kemudahan memperoleh media, dan keterampilan dalam menggunakannya.

Adanya pembelajaran jarak jauh sebagai media sumber belajar yang memaksimalkan fungsi teknologi serta alat komunikasi yang modern berbasis internet dan dilakukan secara daring atau *online* merupakan sistem pembelajaran yang terfokus pada individu atau sekelompok kecil siswa yang menitikberatkan pada keaktifan siswa dengan dipandu oleh seorang guru secara jarak jauh tanpa tatap muka sehingga kegiatan belajar mengajar sepenuhnya dilakukan secara daring.

Rangkuman

Akses internet memberikan peluang besar bagi para pembuat kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi nasional. Cara baru untuk belajar dan mengajar membutuhkan akses internet yang baik untuk mengulik berbagai informasi dan sumber daya serta keterampilan baru. Di era digital ini, cara tersebut dapat mengubah kehidupan serta membantu mencapai pendidikan dan tujuan pembangunan lainnya.

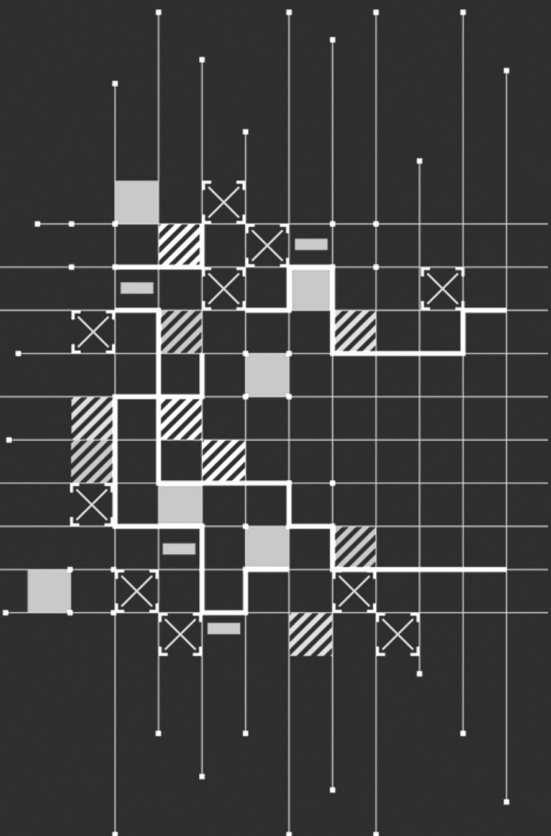
Pembelajaran jarak jauh memang bukan hal baru bagi Indonesia, tetapi untuk pengajar dan pelajar Indonesia adalah kebiasaan baru. Oleh karena itu, pelaku pendidikan perlu beradaptasi terkait penggunaan metode baru. Untuk kondisi seperti ini, memang pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh merupakan metode pembelajaran yang efektif. Namun pembelajaran ini memunculkan berbagai kendala seperti koneksi internet, pemborosan kuota, dan lainnya sebagainya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19.

Daftar Bacaan

- Harari, Y. 2019. *21 Lessons for the 21st Century*. London, England: Vintage.
- Internet Society. 2017. “*A Policy Framework for Enabling Internet Access*”.
<<https://www.internetsociety.org/sites/default/files/bp-Enabling-Environment-20170411-en.pdf>.>
- Tapscott, Don. 2009. *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. New York: McGraw Hill.
- United Nations. 2020. “Policy Brief: Education During COVID-19 and Beyond”.







Kebijakan Merdeka Belajar

-Muhammad Rafi'i, S.Hum., M.Ag-

Kebijakan merdeka belajar memiliki legal-formal yang kuat dan telah diakui pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020. Kebijakan di bidang pendidikan tentu harus berdasarkan pada konstitusi yang berlaku di setiap pemerintahan sehingga kebijakan yang diterbitkan memiliki legitimasi yang kuat (Madjid, 2018). Merdeka belajar adalah solusi yang disahkan oleh Nadiem Makarim untuk menghadapi pembelajaran di tengah-tengah pandemi Covid-19, khususnya Indonesia. Kebijakan ini dianggap kebijakan besar dalam rangka menjadikan pendidikan lebih baik dan semakin maju. Perkembangan dunia di era digital menuntut perubahan sistemik di dunia pendidikan agar dapat bersaing secara sehat dan dapat berkompetisi di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan yang semula menyebarkan dan menjadi beban bagi peserta didik berubah menjadi pencerah bagi potensi dan bakat generasi mendatang (peta jalan pendidikan Indonesia).

Berbagai perubahan dan era digital membawa arus segar di satu sisi bagi kehidupan pendidikan, sosial, dan politik di Indonesia. Bahkan nalar dan pola pikir masyarakat terus mengalami perbaikan dan pergeseran yang signifikan. Sehingga pembelajaran sejatinya dapat dipahami tidak hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga memberi efek terdalam pada mental dan era baru dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri kebijakan merdeka belajar harus dicari formulasi yang kuat dan memiliki akar tradisi Indonesia atau rekam sejarah di negeri ini sebab bangsa Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang turut berkontribusi bagi dunia. Berbagai pemikiran dilahirkan dalam konteks keindonesiaan sebagai upaya menjaga dan merawat tradisi yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia. Meskipun demikian sebagai sebuah bangsa dan manusia tentu mengalami perubahan dan pergeseran yang besar seperti halnya kebijakan merdeka belajar. Di satu sisi kita dapat mempelajari kembali aktivitas belajar-mengajar di era awal kemerdekaan Indonesia, sebaliknya kegiatan pembelajaran tersebut diuji dengan relevansinya bagi kehidupan manusia di zaman berbeda, terkhusus Indonesia.

Munculnya Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan merdeka belajar hadir karena berbagai latar pendidikan, sosial, politik, dan kemajuan teknologi. Kebijakan pendidikan tidak mungkin dikeluarkan tanpa tujuan dan pertimbangan strategis yang penting dilakukan, baik dalam waktu dekat maupun proyeksi panjang. Pada dasarnya kebijakan sangat dekat dengan pihak yang berwenang ataupun pejabat pemerintahan. Implikasi kebijakan adalah (Us dan Kompri 2017, 2):

1. Kebijakan mempunyai tujuan dan diarahkan pada tujuan tersebut.
2. Kebijakan memuat tindakan pejabat pemerintahan.
3. Kebijakan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah secara apa adanya.
4. Kebijakan dapat menghasilkan hal yang positif dan negatif. Artinya, positif dalam hal tindakan pemerintah terhadap suatu persoalan, sementara negatif dalam mengambil keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka tidak melakukan suatu apapun.
5. Kebijakan secara positif dilandaskan pada perundang-undangan dan otoritatif atau bersifat memaksa.

Ancaman di dunia pendidikan semakin terlihat dengan tampilan mutu pendidikan Indonesia saat ini. Kualitas pendidikan kita terus diuji dengan berbagai tantangan dan ancaman yang kompleks. Kondisi tersebut membuat pemerintah untuk merespons dengan membuat strategi pengembangan di bidang pendidikan dalam menyikapi persoalan global dan kehidupan keindonesiaan hari ini. Pendidikan kemudian diarahkan pada arus globalisasi yang berorientasi pada lembaga pendidikan dan sumber pengetahuan, pasaran kerja, pengembangan budaya, pembelajaran terbuka, maupun wahana kerja sama internasional (Tresna Dermawan Kunaefi 2008, 2).

Pendidikan saat ini difokuskan untuk mempersiapkan mahasiswa atau peserta didik dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, budaya, kemajuan teknologi, dunia kerja, dan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan zaman. Pada konteks ini perguruan tinggi mendapat tuntutan strategis dalam merancang, melaksanakan, dan merealisasikan pembelajaran inovatif sehingga mampu memperoleh sikap, pengetahuan, dan aspek keterampilan yang optimal dan relevan. Kebijakan kampus merdeka menjadi harapan bersama dalam menjawab tuntutan tersebut.

Merdeka belajar atau kemerdekaan belajar dalam penjelasan Nadiem Makarim, "*Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.*" Pernyataan tersebut dimaknai sebagai pemberian hak asasi bagi setiap individu dan kewenangan bagi kelembagaan di bidang pendidikan untuk

melakukan, menjalankan, dan memilih sesuai kebutuhan setiap orang dan yang disukai oleh perseorangan. Kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, pembelajaran, dan luaran atau lulusan di dunia pendidikan tinggi.

Merdeka belajar mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Desa; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNl; 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Kebijakan pendidikan adalah sejumlah perangkat prosedur yang dimiliki oleh pihak pemerintah dalam rangka menciptakan pendidikan berdasarkan cita-cita dan mencapai tujuan pendidikan. Keberpihakan pemerintah yang dimaksud adalah politik, pemberdayaan, anggaran, aturan, dan lain sebagainya (Madjid, 2018). Oleh karena itu, berbagai pihak pemerintah adalah aktor penting dalam mewujudkan hasil dari kebijakan merdeka belajar. Aktor yang terlibat dalam merumuskan kebijakan pendidikan ialah individu, kelompok, dan praktisi pendidikan yang bersentuhan dengan berbagai realitas sistem pendidikan. Selain itu, tentu ada pihak yang bekerja secara strategis seperti pemerintah, kementerian, dan lembaga legislatif. Adapun pihak berkepentingan non-pemerintahan dalam suatu kebijakan, di antaranya partai politik, organisasi penelitian, serikat guru, media komunikasi, asosiasi penyelenggara pendidikan, asosiasi pemimpin perguruan tinggi, asosiasi peserta didik, dan asosiasi orang tua siswa serta masyarakat. Mereka berperan dalam menyuplai informasi, mampu menekan, dan memberi pengaruh (A. S. Arwildayanto 2018, 66).

Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari kebijakan yang diambil oleh pemimpin lembaga atau pemerintah. Oleh karena itu, dalam membangun pendidikan memerlukan beberapa pilar. Kemudian, dapat dilakukan analisis terhadap kebijakan yang telah dibuat sebagaimana bagan berikut (Khaidir 2017, 148).

Secara khusus, pendidikan tinggi di Indonesia memiliki harapan besar yakni dapat setara dengan berbagai universitas di dunia dan mampu merealisasikan bonus demografi serta memberi jalan keluar dari jeratan negara yang berpendapatan menengah. Hal ini mungkin akan terjadi apabila hubungan antarmanusia di tengah masyarakat dapat berinteraksi secara dinamis. Perubahan dan kemajuan didorong dengan inovasi di bidang sains dan teknologi di pendidikan tinggi (Oey-Gardiner dkk, 2017). Sejalan dengan kebijakan merdeka belajar:

“Tujuan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, program ‘hak belajar tiga semester di luar program studi’ adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya” (RI 2020, 3).

Perubahan kebijakan di tengah-tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi era modernisme menjadi peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia untuk menangkap kesempatan tersebut. Perubahan sistem pendidikan semakin dibutuhkan dengan membawa inovasi internal ke dalam wilayah pendidikan dengan mendatangkan kreativitas, intuisi, dan imajinasi (As’ad, 2020, p. 70). Dengan demikian, pelaku kebijakan dapat menerapkan ide dan pengetahuan yang mengeluarkan produk serta proses baru menjadi keharusan di tengah persaingan yang ketat.

Pendidikan dapat memberi pencerahan dan mencerdaskan generasi di masa mendatang. Pemikiran bernas dan kreativitas unggul menjadi warisan dan khazanah bagi peradaban Indonesia. Harapan dan cita-cita mulia bangsa dan negara semakin mungkin dicapai dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam mewujudkan bangsa yang cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Semangat ini dapat digunakan dalam rangka menjawab tantangan utama pendidikan, yaitu: 1) mempertahankan capaian dari hasil pendidikan yang telah dibangun; 2) mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global dan kompeten di bidangnya; 3) melakukan perubahan dan adaptasi sistem pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis, mendorong keterlibatan masyarakat, dan memperhatikan keadaan peserta didik (Syafaruddin 2012, 20).

Hal ini semakin menegaskan bahwa pendidikan dapat memberi semangat berkompetisi bangsa. Pengaruh pendidikan di berbagai aspek terlihat signifikan karena keluarga, sekolah, dan lembaga sosial, menanam nilai maupun pengetahuan melalui pendidikan. Maka, pendidikan dikelola

melalui sistem yang kuat, terarah, dan responsif terhadap tuntutan realitas (Syafaruddin 2012, 4).

Kecakapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dan realitas masa depan adalah bagian penting yang diperhatikan dalam kebijakan merdeka belajar. Kesadaran akan dunia yang kompleks dan tiada batas membuat kehidupan akademik di perguruan tinggi mendapat tantangan positif bagi kemajuan dan perubahan strategis. Abad 21 menuntut kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, penguasaan teknologi informasi modern yang integratif.

Perguruan tinggi adalah satu lembaga pendidikan penting dan berpengaruh bagi perkembangan dan dinamika masyarakat yang dinamis. Berbagai studi dan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi diharapkan mampu memberi sumbangan penting bagi realitas kehidupan manusia. Maka tidak heran bila kampus adalah lembaga yang paling berdampak terhadap dinamika masyarakat, dunia usaha, industri, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, Indonesia harus membenahi berbagai persoalan yang menimpa dunia pendidikan tinggi. Pembenahan sumber daya manusia tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan secara serius dan ketat dalam mewujudkan cita dan citra perguruan tinggi sebagaimana dalam kutipan berikut:

“Tanpa pembenahan kualitas sumber daya manusia secara revolusioner, Indonesia akan semakin sulit bersaing dengan negara-negara lain.” (Helmy 2020, 47)

Proyeksi demikian tidak mungkin dapat diproses secara instan dan tanpa kualifikasi yang ketat. Persaingan yang tidak dapat ditawar menuntut sumber daya dan setiap orang untuk melewati aktivitas akademik serta proses pencarian serius. Pada konteks ini pendidikan dapat dimaknai sebagai investasi yang terus mengalami perkembangan demikian pesat. Konsep tersebut semakin kuat jika masyarakat dan negara meyakini bahwa pembangunan pendidikan adalah prasyarat utama dalam menumbuhkan sekaligus mengembangkan sektor yang lain (Ruihartono Ismail 2018, 24).

Kampus merdeka adalah turunan dari konsep merdeka belajar yang diupayakan dapat dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan. Konsekuensinya, kampus harus siap menyediakan dan memfasilitasi mahasiswa untuk menempuh studi di luar jurusannya dalam waktu tiga semester. Dengan ini, mahasiswa dan institusi dapat berinovasi dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian (Nurhayati Siregar 2020, 146). Hal ini dapat diterapkan dalam sistem pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 15 ayat (1), yakni: 1) pertukaran pelajar, 2) magang atau praktik kerja, 3) asisten mengajar pada satuan pendidikan, 4) riset atau penelitian, 5) proyeksi kemanusiaan, 6) kewirausahaan, 7) studi independen, dan 8) pembangunan

desa (Sudaryanto 2020, 89). Dalam konteks ini perguruan tinggi akan dapat berkontribusi dengan masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan.

Merdeka Belajar: Perspektif Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan akan menampilkan dan menerbitkan informasi yang nantinya digunakan sebagai landasan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan keputusan. Secara umum analisis kebijakan tidak diciptakan untuk menguji dan membangun teori deskriptifm sehingga ia melampaui analisis yang dihasilkan disiplin studi tradisional (Dunn 2003, 97). Dalam perspektif teoretis, kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang mengatur tentang penyerapan anggaran, distribusi sumber, ketertiban pendidikan, dan alokasi sumber daya. Maka dari itu banyak pihak yang memahami bahwa kebijakan pendidikan adalah akumulasi hukum tentang pelaksanaan sistem pendidikan, yang mana di dalamnya mencakup proses, evaluasi, tindak lanjut, dan tujuan pendidikan (A. S. Arwildayanto 2018, 13).

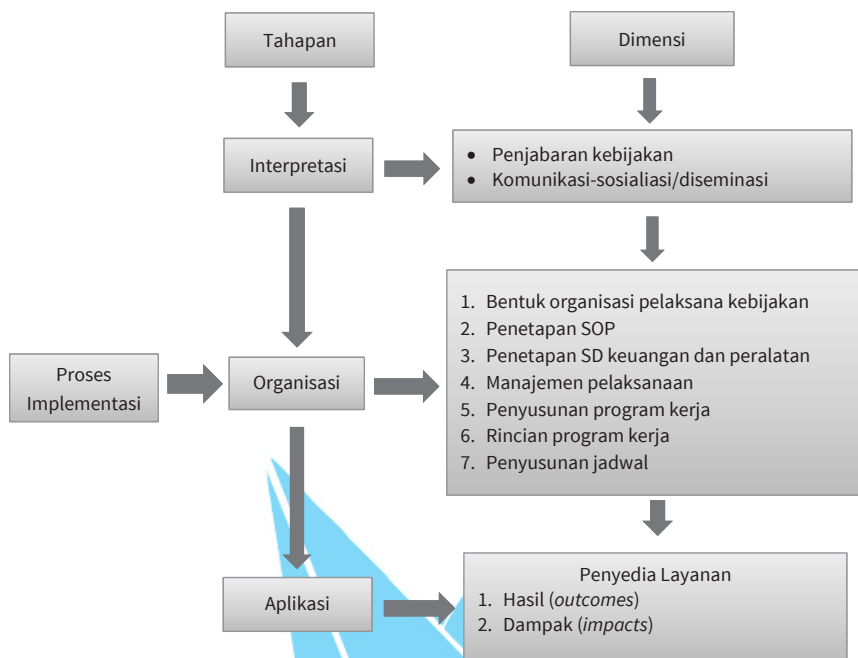
Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka belajar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perguruan tinggi mencakup berbagai persoalan, yakni

1. Perguruan tinggi dituntut untuk merevisi kurikulum agar disesuaikan dengan kebijakan merdeka belajar bagi mahasiswa.
2. Susunan pedoman akademik yang di dalamnya memuat kalender akademik dirumuskan sesuai gambaran teori dan praktik.
3. Perguruan tinggi melakukan kerja sama atau MoU dengan pihak tertentu, misalnya bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam ataupun luar negeri, pemerintah, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemanusiaan dan berbagai pihak yang dianggap penting.
4. Memilah dan mengelompokkan 2 semester dengan mata kuliah yang berbobot setara 40 SKS sehingga secara teoretis berkolerasi pada dunia kerja yang dibingkai dalam pengalaman keprofesian selama di kampus.
5. Memberi alternatif pembelajaran di luar kampus sesuai mata kuliah yang telah dikolaborasikan.
6. Berbagai hambatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu berkenaan dengan kerja sama antara perusahaan tertentu karena ia memiliki orientasi berbeda.
7. Kebijakan pemerintah terkait merdeka belajar harus disosialisasikan kepada pihak yang menjadi mitra institusi sehingga mereka dapat mendukung kebijakan pemerintah.
8. Melakukan penyesuaian instrumen dalam pembelajaran yang mendeskripsikan target capaian dari proses belajar mengajar.

9. Menyesuaikan dokumen seperti Kartu Hasil Studi, Kartu Rencana Studi, supervisi, dan sebagainya.
10. Perguruan tinggi diharuskan mengevaluasi sistem nilai, format, dan evaluasi sebagaimana kebijakan merdeka belajar dilaksanakan (Muslikh 2020, 44).

Kebijakan yang telah diimplementasikan secara umum dianalisis dengan dua pendekatan, yaitu *top-down* dan *bottom up*. *Top-down* ialah pendekatan alternatif yang diturunkan secara makro kemudian dijadikan konkret atau mikro. Peran pemerintah dalam menerapkan pendekatan ini sangat besar karena ia merupakan aktor yang menjadi kunci agar implementasi yang dilakukan dapat berhasil. Analisis dengan pendekatan ini bekerja di wilayah strategis dan bersentuhan langsung terhadap keselamatan negara, misalnya kebijakan tentang anti terorisme, kurikulum dan pembiayaan pendidikan, nasionalisme, dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan *bottom-up* ialah kebijakan yang dilakukan berdasarkan pada aspiran masyarakat lapisan bawah, baik berbentuk permintaan maupun dukungan sehingga masyarakat dapat menyampaikan harapan dan persoalan di tengah-tengah masyarakat (A. S. Arwildayanto 2018, 85).

Tahapan yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan adalah sesuatu yang kompleks. Namun dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu a) memiliki rumusan yang jelas dari tujuan kebijakan pendidikan, seperti sasaran, siapa yang akan berperan, dan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan, dan b) mempunyai dana dukungan secara proporsional sebab tanpa pendanaan kebijakan tentu sulit untuk dilakukan sepenuhnya dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Misalnya tahapan utama dimulai dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Kegiatan penerapan kebijakan pendidikan tentu diawali dengan organisasi yang sistematis. Sedangkan dalam interpretasi, memberi penjelasan substansi dari kebijakan makro yang dikeluarkan pimpinan menjadi bahasa operasional, teknis, mudah dipahami sehingga dapat dilakukan dengan mudah oleh pelaku dan sasaran kebijakan tersebut. Terakhir, tahap penerapan yaitu melaksanakan atau menyediakan pelayanan yang rutin berdasarkan tujuan dan sasaran tertentu. Tahap ini biasa disebut tahap menerapkan rencana kebijakan pendidikan menuju target atau sasaran yang ditentukan (A. S. Arwildayanto 2018, 84). Untuk lebih jelasnya, tahapan pelaksanaan kebijakan terlihat pada bagan berikut.



Gambar 4. Tahapan Implementasi Kebijakan

Kebijakan pemerintah yang bersifat makro harus diterjemahkan serta dimaknai oleh setiap pelaksana berdasarkan aturan dan rambu-rambu yang telah ditentukan. Maka, tidak heran jika berbagai perguruan tinggi telah memfasilitasi dan menyediakan kerangka operasional dalam setiap institusi (Hadi, 2020). Kebijakan merdeka belajar telah menjadi perhatian khusus bagi setiap perguruan tinggi, berbagai kampus, bahkan fakultas dan program studi telah mempersiapkan buku pedoman terkait pembelajaran merdeka belajar. Hal ini menjadi lampu hijau bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mengakomodir dan menerima kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka.

Kebijakan ini dinilai visioner sehingga patut diberi apresiasi dan gebrakannya dirasakan mampu memajukan perguruan tinggi di Indonesia (Syamsul Arifin 2020, 9). Pola pembelajaran seperti Rhenald Kasali (Kasali, 2017, p. 68).menjadi keniscayaan untuk diikuti setiap dosen ketika mengajar sebagaimana yang ia katakan:

“Di kampus, saya sering memberi mereka assignment dengan memberi kata kunci, lalu membiarkan mahasiswa berselancar dan memberikan interpretasi dari apa yang mereka temukan dalam hitungan menit, lalu diperkaya rekan-rekan lainnya. Kuliah menjadi lebih hidup, lebih fun ketimbang dosen sendirian presentasi dan mereka menyimak.”

Aktivitas di dalam ruang perkuliahan tersebut membuat mahasiswa lebih mudah beradaptasi terhadap situasi. Konsekuensinya pendidikan dapat membentuk manusia untuk berani berbicara persoalan lingkungan dan ikut serta secara langsung ke dunia lingkungan mereka. Pada konteks ini, pendidikan dapat memperingatkan berbagai tantangan dan ancaman zaman sehingga mahasiswa tidak mudah patuh terhadap keputusan-keputusan pihak lain (Freire, 2001: 48).

Diskursus merdeka belajar akhirnya menjadi arena aktualisasi demokrasi. Kebijakan merdeka belajar dapat dimaknai sebagai upaya merefleksikan pengembangan pembelajaran demokratis sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pendidikan demokratis dapat ditinjau dengan pendekatan yang berbeda. *Pertama*, pendidikan untuk demokrasi. Pendekatan ini menafsirkan sistem pendidikan demokratis yang merupakan keharusan normatif universalistik dan pendidikan adalah media dalam mewujudkan tujuan tersebut. *Kedua*, pendidikan dalam demokrasi mengandung pengertian bahwa demokratis memberi legitimasi kontrol atas pendidikan demokrasi dengan situasi tertentu. Pada pendekatan ini pendidikan dan demokrasi hanya bersifat instrumental, tidak normatif. *Ketiga*, pendidikan melalui demokrasi. Pendekatan ini disukai oleh sebagian besar sebagai kerangka kerja pendidik demokratis. Para akademisi, intelektual, dan mahasiswa terlibat pada setiap aktivitas partisipatif, multikultural, musyawarah, agonistik kritis, dan memilih paham yang sama (Sari, 2020, p. 119).

Kebijakan merdeka belajar pada ranah filosofis dapat diwujudkan dengan menerapkan tiga pendekatan di atas. Namun, perlu adanya persamaan pemahaman terkait konsep politik dan pendidikan yang dihasilkan dari rumusan pada wilayah kebebasan dengan tetap berpijak atas tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kebijakan merdeka belajar harus dimaknai secara komprehensif agar mampu mewujudkan inovasi serta eksperimen pada setiap kebijakan pendidikan yang ditetapkan (Sari, 2020).

Kebijakan merdeka belajar ialah kerangka filosofi dalam menghadapi perubahan dari metode pembelajaran yang dilakukan selama ini. Landasan filosofis yang relevan digunakan pada kebijakan ini adalah dua kandungan filsafat Ki Hadjar Dewantara yang menjadi inspirasi kebijakan tersebut ditetapkan yakni yang pertama, kemerdekaan dan kedua, kemandirian (Kamil 2020).

Kebijakan merdeka belajar mempunyai konsekuensi luas bagi perguruan tinggi yang harus turut diperhatikan, direncanakan, dan diimplementasikan yakni

1. Kebijakan kurikulum mengandung unsur fleksibilitas di dalam kampus, *e-learning*, dan di luar kampus.
2. Kebijakan administrasi kurikulum yang fleksibel sesama dan lintas prodi, fakultas, perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

3. Kebijakan penganggaran dan tindak lanjut dari kerja sama.
4. Kebijakan terkait kerja sama, antara dan lintas prodi, fakultas maupun perguruan tinggi.
5. Kebijakan berkenaan dengan kerja sama antara dan lintas dunia usaha, industri, maupun dunia kerja.
6. Kebijakan tentang kerja sama antara dan lintas negara (Munadi, 2020).

Keenam poin di atas menjadi pertimbangan strategis karena ia dapat menyeimbangkan keinginan dunia akademik dan dunia kerja. Secara lebih luas kebijakan demikian serius dan sangat penting untuk diorbitkan di Indonesia. Namun, tidak berarti kebijakan merdeka belajar harus segera diterapkan secara detail karena berbagai perubahan secara mendasar dan menyangkut seluruh elemen perguruan tinggi, tentu tidak dapat dilakukan secara bersamaan dan di waktu yang singkat. Selain itu, kesadaran dan konsistensi yang kukuh serta berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri dan di luar perguruan tinggi dalam menerapkan kampus merdeka dan merdeka belajar (Munadi, 2020).

Kebijakan merdeka belajar mendapat respons dan pandangan sinis seperti pernyataan bahwa kebijakan tersebut lebih ditekankan pada orientasi persiapan kerja, sedangkan jati diri mahasiswa sebagai insan justru semakin liberal (Nurlinda, 2019). Kebijakan merdeka belajar dinilai bertujuan sederhana, teknis, dan pragmatis. Meskipun demikian, harus diketahui bahwa kebijakan tersebut sesungguhnya memberi hak kepada mahasiswa untuk memilih sesuai kebutuhannya dan yang berguna di masa depan baginya.

Merdeka belajar–kampus merdeka harus dipahami sebagai langkah menemukan rumusan yang relevan dan tepat terhadap perubahan dan perkembangan realitas manusia. Hal ini tentu untuk mengarahkan sistem pendidikan ke dalam tujuan-tujuan strategisnya. Kebijakan pendidikan sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat luas, yaitu 1) tujuan kebijakan dari tingkatan masyarakat, 2) di tingkatan politisi, 3) dan dari aspek tingkatan ekonomi (Madjid, 2018: 15).

Implikasi kebijakan merdeka belajar memang sangat luas dan mendapat tuntutan di tengah arus teknologi dan persaingan yang semakin ketat. Maka, mau tidak mau, suka atau tidak, kebijakan merdeka belajar sudah seharusnya dilakukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang yang tidak pasti (Suyanto 2020). Program tersebut merupakan inovasi dalam bidang pelayanan pembelajaran yang setara sehingga dapat menjadi alternasi moda pembelajaran yang fleksibel. Tentu dalam rangka menanggapi revolusi industri. Pada era ini teknologi adalah tren yang dalam mendukung dan membantu aktivitas manusia (Sudarto 2020).

Kebijakan merdeka belajar dikeluarkan pemerintah atau dari pimpinan menuju ke seluruh bawahan. Kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana keadaan Indonesia di masa lalu, di masa sekarang, dan yang diharapkan di masa mendatang. Melalui kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka generasi mendatang mendapat berbagai pengalaman penting di dalam kehidupan kampus. Tentu kedewasaan seseorang diperlukan untuk menentukan hal yang penting maupun tidak penting sehingga dapat melakukan dan menggunakan fasilitas di perguruan tinggi untuk menempah keahlian yang dapat bermanfaat di masa mendatang, bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Maka kebijakan merdeka belajar ini tidak final, ia dinamis dan dapat berubah sesuai zamannya. Generasi di abad 21 tentu harus dibekali ilmu pengetahuan sejalan dengan zaman milenial. Berbagai keterampilan yang diperlukan pada abad ini adalah *critical thinking, creativity, collaboration and communication* (4 C). Namun, harus dipersiapkan keterampilan di bidang stabilisator berupa kekuatan karakter yang baik (Baisa, 2020).

Merdeka belajar dapat dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu prosedur yang digunakan untuk penelitian di dalam ilmu pengetahuan. Pendekatan ini mampu mengemukakan penafsiran secara ilmiah dengan benar terkait persoalan masyarakat untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang disoroti (Rusdiana 2015, 73). Kebijakan yang dikeluarkan menteri pendidikan saat ini menjadi perbincangan serius karena berdampak pada setiap lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkatan tertinggi. Kebijakan tersebut menekankan pada aspek rasional dalam menciptakan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung masyarakat. Dengan kata lain istilah pendekatan ini adalah *Man-Power Approach* yang akan mempertimbangkan hal-hal rasional dan visioner dari perspektif pemangku kebijakan (Rusdiana 2015, 26). Pendekatan *man-power approach* sifatnya lebih dekat pada otoriter dan tidak begitu menghargai demokratisasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Hal tersebut disebabkan karena tidak mengawali kebijakan dari aspirasi masyarakat, akan tetapi berdasarkan tuntutan zaman dalam pandangan pemimpin. Namun, pendekatan ini lebih efisien dalam merumuskannya serta berdimensi strategis dan berjangka panjang

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Jaminan Kebebasan Akademik

“Merdeka belajar hanya akan jadi jargon saat ia gagal mempersiapkan ruang-ruang bagi pembelajaran kemerdekaan. Merdeka belajar hidup dalam konteks yang dihidupi para guru dalam mengekspresikan kemerdekaan dan kreativitas.” (Doni Koesoema, 2020).

Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana harapan dibebankan kepada kebijakan merdeka belajar yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat memberi warna baru dalam sistem pendidikan dan pembelajaran selama ini. Memang banyak yang dapat disaksikan dari berbagai fakta pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia tidak memuaskan bagi mahasiswa atau tidak sesuai harapan mereka. Kebijakan merdeka belajar memfasilitasi pembelajaran yang dapat dilakukan, baik dalam program studi yang dipilih ataupun di luarnya meliputi:



Gambar 5. Implementasi Kegiatan Merdeka Belajar

Aktivitas pembelajaran mahasiswa sebagaimana terlihat pada gambar di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga tema dalam tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan belajar mahasiswa tidak hanya terfokus pada program studi yang kaku dan pengetahuan terbatas pada pilihannya. Dengan mengikuti pembelajaran di berbagai program yang diminati dan dianggap berguna di masa depan akan meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dan menambah pengetahuan dari berbagai studi yang diikuti. Konsekuensinya mahasiswa harus mampu membuka diri terhadap berbagai disiplin ilmu, bahkan dapat memperkaya perspektif dengan keragaman sumber ilmu yang digunakan dalam memandang satu persoalan sehingga kesimpulan yang dihasilkan komprehensif dan mendalam.

Dinamika kehidupan kampus akan menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa dalam perjalanan intelektual selama menempuh studi dengan berbagai disiplin. Maka, mahasiswa memiliki kekhasan tersendiri dalam memperoleh kelulusan berkualitas dan berkompeten sebagaimana dinyatakan pada kutipan berikut:

“Setiap mahasiswa akan memiliki program yang khas, unik, dan pengembangan diri masih tetap dalam bingkai profil dan kompetensi yang ditetapkan (terkualifikasi).” (Santoso, 2020)

Maka, mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih mempelajari sesuatu di luar program studi tertentu. Kemerdekaan yang dimaksud ialah ia memilih, menentukan, dan melakukan sesuai keinginannya dalam menetapkan disiplin dan program yang hendak ia tempuh selama studi di perguruan tinggi. Kampus menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa dalam rangka memperjuangkan proyeksi pendidikan unggul dan berkualitas.

Tantangan yang terus dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak akan habis dan akan terus menemukan perubahan serta persoalan yang harus dihadapi dan disikapi secara produktif dan proaktif. Perguruan tinggi diberi amanah oleh negara untuk ikut mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia dan memberi berbagai tawaran yang dapat dilakukan di masa mendatang. Era disrupsi telah hadir di hadapan negara, rakyat dan kaum intelektual menuntut kampus untuk mengubah secara berkala dan strategis dalam berbagai aspek. Berikut gambaran tantangan Indonesia di abad ini.



Gambar 6. Tantangan Abad 21 dari sisi sistem pendidikan dan kebutuhan mahasiswa

Abad 21 banyak mengalami perubahan yang signifikan di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, politik, teknologi, dan akses informasi. Seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus segera melakukan negosiasi dan beradaptasi terhadap pergeseran dan perkembangan kehidupan sosial umat manusia karena Indonesia turut menanggapi secara serius kemajuan yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Perhatian pemerintah dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka adalah upaya yang harus diapresiasi dan diperhatikan untuk tetap terselenggara dalam segala bidang. Kebijakan yang menasar dunia pendidikan seperti perguruan tinggi telah direncanakan dan disusun secara berkala dalam berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar agar dapat terlaksana sebagaimana tujuannya.

Program yang diberikan di luar kampus adalah aktivitas penting harus disosialisasikan kepada seluruh elemen sivitas akademika dalam rangka menjalankan program kebijakan merdeka belajar secara sistematis, terukur dan tepat sasaran. Kriteria aktivitas di luar kampus sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk Memperoleh 20 SKS
1.	Magang/praktik kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA ke bawah). 2. Mahasiswa menjadi bagian dari tim yang secara aktif terlibat di dalamnya. 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. 4. Mahasiswa harus memberikan presentasi di akhir kepada salah satu pimpinan perusahaan.
2.	Asistensi mengajar di satuan pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. 2. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.

4.	Proyek kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah-daerah tertentu dan sanitasi yang tidak memadai). b. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana. 4. Menghasilkan dampak nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
5.	Kegiatan wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal. 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.
6.	Studi independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. 2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini. 3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lain sebagainya yang harus dicapai di akhir studi.
7.	Membangun desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa. b. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa dan pembangunan sanitasi yang tidak memadai). 2. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak, dan lain sebagainya).

8.	Pertukaran pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, persyaratan kuliah umum, dan memenuhi persyaratan <i>electives</i> , dan lain sebagainya).
----	--------------------	--

Mahasiswa di dalam kelas harus diajak untuk mengamati dan melihat secara langsung fenomena sosial, dibimbing dalam merumuskan masalah, mengajukan persoalan, dan memberi jawaban. Langkah tersebut harus dilakukan demi membebaskan diri dari kebodohan. Pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan merupakan praktik dalam menjamin kebebasan akademik, berpikir, dan berpendapat. Mahasiswa mempelajari persoalan yang dihadapi sebagai pembelajaran dan menjadi bekal hidup di masa mendatang (Yamin 2012, 151).

Kampus merdeka-merdeka belajar adalah bagian dari praksis yang memerdekakan setiap individu dan membebaskan hak akademik mahasiswa yang berdiri sendiri. Dengan demikian, ketika mahasiswa turun ke lapangan dapat beradaptasi terhadap persoalan dan mengajukan gagasan serta lompatan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Hal ini terlihat bahwa perguruan tinggi diwajibkan memberi hak untuk kuliah atau belajar di luar perguruan tinggi pada waktu tertentu. Kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil perkuliahan di perguruan tinggi yang sama dengan bobot studi maksimal.

Aktivitas pembelajaran mahasiswa dan program kegiatan yang ditentukan di dalam maupun di luar kampus merupakan upaya memberi pembelajaran bagi mahasiswa secara empiris dan natural. Jika dirujuk dalam prinsip pendidikan dalam aliran progresivisme, kita dapat melihat titik temu dengan tujuan merdeka belajar dan kampus merdeka yang sedang diwacanakan di Indonesia. Prinsip pendidikan progresivisme diuraikan pada rincian di bawah ini (Mustaghfiroh 2020, 144-145):

1. Peserta didik berkembang dan bebas secara natural.
2. Pengalaman secara langsung merupakan stimulus dalam pembelajaran.
3. Guru dan dosen harus menjadi pemandu dan fasilitator yang baik.
4. Lembaga pendidikan adalah laboratorium ilmu pengetahuan untuk perubahan.
5. Kegiatan di rumah dan institusi pendidikan harus bekerja sama.

Pendidikan progresif yang luwes dengan disiplin ilmu tertentu memberi keluasan bagi peserta didik untuk memilih dan menentukan pembelajaran yang diinginkan sesuai kebutuhan mahasiswa tersebut. Kebijakan merdeka belajar secara umum telah memberi kesempatan atau peluang yang besar bagi

mahasiswa dan siswa untuk memperdalam, memperluas, dan mematangkan pembelajaran serta pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas, lalu diaplikasikan ke tengah masyarakat dalam bentuk pengabdian, bimbingan atau sosialisasi.

Kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka harus dipahami sebagai langkah reformasi dalam sistem pendidikan, adaptasi terhadap realitas, serta berbagai pertimbangan dan kebutuhan manusia dalam menempuh studi atau pembelajaran. Sehingga dalam menjawab dan menuju proyeksi pendidikan yang sangat luas, pembelajaran dan pendidikan harus diselenggarakan secara dinamis, sistematis, dan komprehensif.

Memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan proyek pengabdian, kemanusiaan, dan peningkatan potensi serta wawasan adalah bagian dari apresiasi terhadap kebebasan akademik. Dengan demikian, mahasiswa mampu lantang dan berani dalam berpendapat serta kukuh dalam berpikir karena sudah dipenuhi dan diisi dengan berbagai paham ilmu dan perspektif yang kolaboratif. Pembelajaran lintas prodi, fakultas, atau bahkan perguruan tinggi adalah penguat terhadap jaminan kebebasan akademik di dalam penjejajahan ilmu pengetahuan setiap individu.

Konsekuensi kebijakan merdeka belajar tidak lagi dikotak-kotakkan dalam program studi dan perguruan tinggi. Citra prodi yang selama ini dinilai negatif dapat dicegah dan diperbaiki ke hadapan publik bahwa setiap disiplin memiliki kontribusi yang sama, besar ataupun kecil, di dalam satu persoalan sosial, politik maupun pendidikan. Artinya semua ilmu itu sama, memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan ikut menyumbang jawaban dalam menyelesaikan persoalan manusia.

literasi nusantara

Daftar Bacaan

- A, Doni Koesoema. 2020. “Belajar Merdeka”. Februari 25. <https://www.kompas.id>.
- Arifin, Syamsul dan Moh. Muslim. 2020. “Tantangan Implementasi Kebijakan ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka’ pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia”. *Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan Islam*, pp. 1–11.
- Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: CV Cendekian Press.
- As’ad, Fridiyanto. 2020. *Manajemen Strategik Visionary Leadership, Dinamika Organisasi, dan Keunggulan Kompetitif (Dilengkapi Hasil Penelitian di Perguruan Tinggi Islam)*. Batu: Literasi Nusantara.
- Baisa, Idi Rathomy. 2020. “Merdeka Belajar untuk SDM Unggul?” Agustus 22. <https://www.jawapos.com>.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Freire, Paulo. 2001. *Pendidikan yang Membebaskan*. Jakarta Timur: MELIBAS (Media Lintas Batas).
- Hadi, Lukman. 2020. "Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2), pp. 812–818.
- Helmy, Berlian. 2020. *Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul adalah Koentji*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Ismail, Ruihartono dan Helmawati. 2018. *Meningkatkan SDM Berkualitas Melalui Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasali, Rhenald. 2017. *Strawberry Generation Anak-Anak Kita Berhak Keluar dari Perangkap yang Bisa Membuat Mereka Rapuh*. Jakarta Selatan: Mizan.
- Kemendikbud. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Khaidir, Afriva. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik dan Implementasinya dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Kemenristek.
- Kunaefi, Tresna Dermawan dkk. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis*. Jakarta: Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal.
- Madjid, Abd. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Muslikh. 2020. "Landasan Filosofis dan Analisis terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka". *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3), pp. 40–46.
- Mustaghfiroh, Siti. 2020. "Konsep 'Merdeka Belajar' Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey". *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(1), pp. 141–147.
- Nurlinda. 2019. "Merdeka Belajar Berarti Merdeka Berfikir". <https://makassar.terkini.id>.
- Rusdiana, Ahmad. 2015. *Kebijakan Pendidikan "dari Filosofi ke Implementasi"*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Santoso, Agus Muji. 2020. *Model Implementasi Konsep Merdeka Belajar*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Sari, Maya Mustika Kartika. 2020. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi Melalui Praktik Pengajaran yang Berwawasan Demokratis". *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Pendidikan Karakter Pada Era Merdeka Belajar*. Surabaya: Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, Universitas Negeri Surabaya, pp. 117–121.
- Siregar, Nurhayati, Rafidatun Sahirah, dan Arsikal Amsal Harahap. 2020. "Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0". *Fitrah*:

- Journal of Islamic Education (FJIE)*, 1(1), pp. 141–157.
- Sudarto, Subi. 2020. “Membumikan Merdeka Belajar lewat Setara Daring”. <https://mediaindonesia.com>.
- Sudaryanto, Wahyu Widayati, dan Risza Amalia. 2020. “Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia”. *Kode: Jurnal Bahasa*, 9(2), pp. 78–93.
- Suyanto. 2020. “Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar”. <https://www.kompas.id>.
- Syafaruddin. 2012. *Inovasi Pendidikan (Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan)*. Medan: Perdana Publishing.
- Tim Penyusun. 2020. *Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Bandung: UPI.
- _____. 2020b. *Strategi Implementasi BKP Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yamin, Moh. 2012. *Sekolah yang Membebaskan Perspektif Teori dan Praktik Membangun Pendidikan Yang Berkarakter dan Humanis*. Malang: Madani.





**KAMPUS MERDEKA
DAN PELUANG
PENERAPAN PARADIGMA
TRANSINTEGRASI ILMU**

-Dr. Fridiyanto, M.Pd.I-

Perguruan tinggi sebagai tempat pengembangan dan perekayasaan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak bisa terjebak dalam rutinitas yang statis dan *status quo*. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang dinamis dan progresif untuk menyikapi perubahan yang sangat cepat, terutama di era digital yang akan berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Maka, perguruan tinggi harus beradaptasi dengan dinamika perubahan dan mempersiapkan alumni perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Saat ini perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memunculkan inovasi, kreativitas, dan mengembangkannya dengan prinsip *entrepreneurship* sehingga proses yang ada di perguruan tinggi dapat aplikatif dan mendorong kesejahteraan lulusan serta kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu, perguruan tinggi dalam proses pendidikannya harus bisa mengadakan proses belajar yang bertujuan mempersiapkan lulusan yang ulet dalam bekerja, dinamis, berkarakter sosial, mandiri, dan inovatif. Hal inilah yang menjadi semangat kebijakan kampus merdeka.

Kampus merdeka merupakan kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan. Hadirnya kampus merdeka cukup mendapat respons positif di kalangan perguruan tinggi, baik dari mahasiswa maupun alumninya. Kampus merdeka adalah upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan abad 21 yang akan menjadi megatren dunia hingga 2045: demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, dan perubahan geoekonomi (Nizam, 2020). Perguruan tinggi Indonesia juga perlu menyesuaikan diri dengan *sustainable development goals* sebagai berikut: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan kesejahteraan, kualitas pendidikan, air bersih dan sanitasi, energi bersih yang terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan (Nizam, 2020). Selain visi yang diturunkan dari “visi global” tersebut, perguruan tinggi

di Indonesia juga merumuskan turunan program nasional yang bersumber dari UUD 1945 dan berbagai perundangan hingga visi dan misi presiden terpilih. Kebijakan kampus merdeka merupakan salah satu turunan dari visi politik pendidikan Joko Widodo yang terpilih pada masa Pemilihan Umum Presiden tahun 2019.

Kebijakan kampus merdeka dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya kompetensi mahasiswa saat berhadapan dengan dunia kerja dan dunia industri. Selain itu, kampus merdeka dinilai dapat mendobrak batas kekakuan disiplin ilmu yang sudah sangat lama diterapkan perguruan tinggi di Indonesia yang dianggap dapat mematikan kreatifitas dan potensi mahasiswa. Melalui kampus merdeka, mahasiswa dapat mempelajari hal-hal yang mereka minati dan mendukung keilmuan serta keahlian tetapi tidak tersedia di program studi yang sedang ia tekuni.

Persoalan teknis yang muncul akibat penerapan kampus merdeka menjadi permasalahan tersendiri bagi pengelola perguruan tinggi dan mahasiswa, misalnya bagaimana mengatur sekian banyak jumlah mahasiswa untuk dapat belajar di kampus lain ataupun bentuk implementasi tujuh kegiatan di luar kampus lainnya. Terlepas dari kendala teknis dalam menjalankan kampus merdeka, para pengelola perguruan tinggi diberikan ruang untuk menerapkan transdiploin. Artinya, mahasiswa akan memiliki wawasan dan keahlian yang tidak hanya dalam satu bidang saja.

Kebijakan kampus merdeka merupakan peluang bagi perguruan tinggi Islam untuk menerapkan paradigma ilmu yang dalam beberapa tahun ini dikenal dengan integrasi ilmu. Namun, setiap PTKIN memiliki istilah yang berbeda, contohnya di UIN Sunan Kalijaga dikenal dengan “Integrasi-Interkoneksi”, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengistilahkan dengan “Reintegrasi Ilmu”, di UIN Maliki Malang dinamakan “Integrasi Ilmu”, dan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menggunakan paradigma “Transintegrasi Ilmu”.

Besarnya peluang paradigma perguruan tinggi Islam dalam kampus merdeka perlu dibahas secara mendalam agar dapat terjadi sinkronisasi antara paradigma PTKIN dengan kampus merdeka. Pada bab ini, penulis akan menggunakan “Paradigma Transintegrasi Ilmu” yang digunakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk membahas bagaimana relevansinya dengan kampus merdeka.

Filosofi

Sejarah filosofi perguruan tinggi jika merujuk pada kisah 500 tahun yang lalu dan pada dasarnya ia merupakan komunitas serta tempat yang merdeka bagi orang-orang di berbagai negara (kosmopolis) yang mempelajari apa saja hal-hal

yang ingin mereka pelajari. Belum lagi jika merujuk tradisi keilmuan di masa Yunani Kuno yang pada masa itu, orang-orang dapat belajar apa saja dengan para filsuf. Belajar pada masa tersebut merupakan aktivitas mengisi waktu luang yang kemudian diistilahkan dengan sekolah. Begitu juga jika ditarik ke sejarah intelektual Islam klasik, seorang ilmuwan Islam dapat menguasai berbagai bidang ilmu mulai dari ilmu musik hingga kedokteran. Fakta sejarah ini mencerminkan bahwa kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka telah memiliki akar praktik dalam sejarah peradaban manusia. Namun, dinamika waktu dan berbagai sosial politik masyarakat kampus yang kosmopolis akhirnya terfragmentasi ke dalam sistem nasional yang mempersiapkan dan melayani elit nasional, serta memperkuat kepentingan nasional sehingga kurikulum universitas yang kosmopolis menjadi karakter yang unik (Forest, 2007).

Kebijakan kampus merdeka hadir untuk mengatasi spesialisasi yang kaku terkait keilmuan di perguruan tinggi. Kekakuan dalam spesifikasi ini membuat alumni perguruan tinggi seakan-akan terperangkap dalam pagar keilmuan yang tinggi, kokoh, dan seolah-olah keahlian lain tidak memiliki relevansi dengan program studi yang sedang ditekuni mahasiswa. Misalnya, selama ini mahasiswa program studi di Fakultas Pendidikan hanya mempelajari ilmu pedagogi, padahal pendidikan sangat terkait dengan banyak aspek kehidupan, maka seorang alumni jurusan pendidikan seharusnya juga memahami bagaimana Sosiologi, Antropologi, Politik dan Kebijakan, serta Teknologi Informasi dengan berupaya mencari kaitannya dengan ilmu pendidikan.

Secara filosofis, kebijakan kampus merdeka dapat dilihat dengan berbagai paradigma berikut.

1. Integrasi ilmu merupakan paradigma keilmuan yang mencoba mengaitkan keilmuan dengan satu atau beberapa bidang ilmu lain. Paradigma ini berupaya menjembatani struktur keilmuan dikotomis, meskipun hanya level permukaan (Kementerian Agama, 2019).
2. Monodisipliner adalah cara pandang yang fokus pada satu disiplin akademik dan keilmuan untuk satu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Syam, 2020).
3. Interdisipliner adalah cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam interdisipliner, antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya dapat bercampur, tetapi tidak terjadi peleburan (Syam, 2020).
4. Multidisipliner adalah kerja sama antara ilmu pengetahuan yang lebih dari dua jenis ilmu, yang masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metode tersendiri pula (Kementerian Agama, 2019).

5. Transdisipliner adalah cara pandang atau pendekatan holistik untuk menyelesaikan masalah kompleks yang dapat menghasilkan disiplin/ ilmu baru melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta melibatkan semua komponen dan pemangku kepentingan baik *expert* maupun *non-expert* (non akademisi) (Syam, 2020). Dengan arti lain, transdisiplin adalah bentuk sintesis yang melibatkan lebih dari dua jenis disiplin ilmu, diikuti metode tersendiri, dan akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri (Kementerian Agama, 2019)

Kelima pendekatan tersebut dalam konteks kampus merdeka menjadi metode yang selama ini digunakan sehingga istilah-istilahnya sering disebut bersamaan dalam pembahasan perguruan tinggi. Misalnya di kalangan perguruan tinggi Islam yang sangat familiar adalah istilah transdisiplin, interkoneksi, dan integrasi.

Penerapan filosofi merdeka belajar di dalam kampus merdeka dapat dilihat dengan terbukanya peluang bagi mahasiswa untuk mengambil jumlah SKS di luar perguruan tinggi yakni 2 semester sebanyak 40 SKS. Kemudian mahasiswa juga dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi tempat ia belajar sebanyak 1 semester yang senilai dengan 20 SKS. Bentuk belajar mahasiswa di kampus merdeka didefinisikan sebagai kegiatan yang dapat berbentuk belajar di kelas, magang, pertukaran pelajar, proyek desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Dengan beragam kegiatan ini, maka mahasiswa akan memiliki dinamika yang tinggi untuk banyak belajar dan mempraktikkan berbagai pengalaman dan konsep keilmuan. Dengan demikian, filosofi merdeka belajar menjadi aplikatif untuk mendekatkan mahasiswa dengan beragam realitas masyarakat dan dunia kerja ataupun wirausaha yang dianggap relevan dengan karakter generasi milenial. Karakter-karakter yang dimaksud adalah

1. generasi yang paham teknologi informasi;
2. menyukai kebebasan;
3. senang melakukan personalisasi;
4. mengandalkan kecepatan informasi yang instan;
5. bekerja dengan lingkungan inovatif;
6. aktif berkolaborasi;
7. *hyper technology*;
8. kritis, berpikir *out of the box*, kaya ide dan gagasan;
9. sangat percaya diri dan berani mengemukakan pendapat;
10. terhubung, artinya generasi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitas yang mereka ikuti; dan
11. Berselancar di media sosial dan internet (Syam, 2020).

Sebelas karakter di atas membuat pemerintah dan pengelola perguruan tinggi harus memodifikasi model belajar sehingga perguruan tinggi tidak tertinggal jauh dari harapan generasi milenial ketika memilih perguruan tinggi.

Landasan Hukum

Kampus merdeka memiliki beberapa landasan hukum berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Kemendikbud, 2020: 2).

Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dilihat bahwa kebijakan kampus merdeka dilandaskan pada empat peraturan tentang Desa. Hal ini mencerminkan bahwa kampus merdeka diharapkan dapat menerapkan beragam keilmuan di perguruan tinggi dalam kehidupan masyarakat desa sehingga sains dan teknologi yang dipelajari di kampus dapat langsung diaplikasikan bagi masyarakat desa khususnya. Adapun tujuan kampus merdeka yang dimaksud oleh Dirjen Pendidikan Tinggi yaitu agar dapat membangun proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga perguruan tinggi dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Selain itu kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat menghubungkan dunia perguruan tinggi dengan dunia usaha atau industri. Maka dengan kampus merdeka, mahasiswa telah dipersiapkan sejak dari awal kuliah.

Dalam *Buku Panduan Kampus Merdeka*, tujuan Kampus Merdeka adalah

“Tujuan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, program ‘hak belajar tiga semester di luar program studi’ adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.” (Kemendikbud, 2020: 3).

Berdasarkan tujuan tersebut terlihat bahwa mahasiswa memiliki hak belajar di luar bidang keilmuan yang sedang dipelajarinya dalam program studi. Melalui kemerdekaan untuk belajar sesuai minat, diharapkan mahasiswa dapat menggali potensi yang mungkin selama ini dibelenggu oleh keakuan linier keilmuan yang dipagar dalam program studi.

Kampus merdeka merupakan turunan dari kebijakan merdeka belajar yang poin-poinnya terdiri atas hal-hal berikut.

1. Terkait program studi
 - a. Kebijakan pembukaan program studi baru di perguruan tinggi negeri dan swasta diberikan kebebasan atau otonomi dengan memenuhi standar berikut: 1) kampus telah berakreditasi A atau B; 2) program studi dapat diajukan jika memiliki kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, dan universitas top 100 ranking QS; dan 3) program studi bukan bidang kesehatan dan pendidikan.
 - b. Kerja sama dengan beragam organisasi meliputi penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja serta akan dilakukan pengawasan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Program studi baru bisa mendapatkan akreditasi C oleh BAN PT.
 - d. Dilakukan *tracer* studi yang dilakukan setiap tahun.
2. Sistem akreditasi
 - a. Akreditasi yang telah ditetapkan BAN PT akan berlaku lima tahun dan dapat diperbarui. Sedangkan yang berakreditasi B dan C dapat mengajukan kenaikan akreditasi.
 - b. BAN PT akan melakukan peninjauan jika terdapat penurunan mutu.
 - c. Jika terdapat pengaduan masyarakat yang disertai bukti-bukti, maka akan dilakukan peninjauan.
 - d. Jika ada penurunan pendaftar pada program studi, maka akan dilakukan peninjauan ulang. Sedangkan akreditasi A diberikan ke program studi yang diakui secara internasional dan pengakuan

- tersebut diterapkan oleh Kemendikbud.
- e. Pengajuan akreditasi ulang dan program studi dibatasi setidaknya selama 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir.
3. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum
 - a. Syarat menjadi badan hukum akan dipermudah bagi perguruan tinggi negeri yang sudah memiliki status “Badan Layanan Umum dan satuan kerja”.
 - b. Perguruan tinggi badan layanan umum dan satuan kerja dapat mengajukan diri menjadi badan hukum tanpa ada akreditasi minimum.
 - c. Perguruan tinggi negeri dapat mengajukan permohonan menjadi badan hukum dengan waktu kapan saja jika lembaga sudah siap.
 4. Hak belajar tiga semester di luar program studi
 - a. Perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa agar sukarela memilih untuk mengambil atau tidak mata kuliah atau kegiatan.
 - b. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester yang setara dengan 40 sks.
 - c. Mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 sks.
 - d. Mahasiswa hanya wajib mengambil SKS di program studi sebanyak lima semester, tetapi tidak berlaku untuk program studi kesehatan (Siregar, 2020).

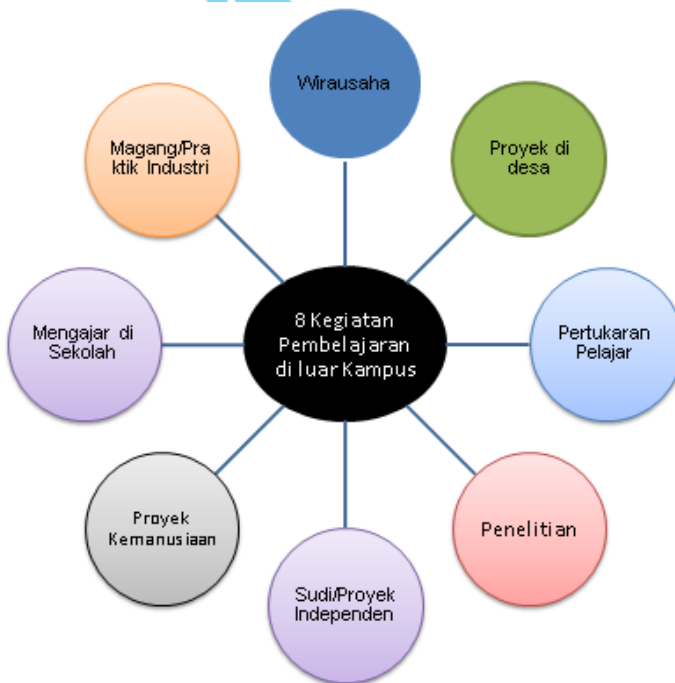
Kampus merdeka akan memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk membekali diri mereka dengan mata kuliah yang dipilihnya. Pernyataan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, “*Mahasiswa memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya, dengan kemerdekaan meramu mata kuliah yang benar-benar dibutuhkan.*” Menurutnya, kampus merdeka akan membuka peluang secara luas kepada mahasiswa untuk mengalami dan merasakan langsung apa yang terjadi di masyarakat melalui program-program yang dapat diterapkan, seperti program desa, magang, dan sebagainya. Tentu program-program tersebut akan menambah pengetahuan, keahlian, dan menunjang sikap mahasiswa menuju arah yang lebih baik.

Kegiatan Belajar

Di banyak negara, sektor pendidikan tinggi berhadapan dengan kebutuhan ekonomi mahasiswa dan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri. Di awal 1960 dan 1970-an, beberapa negara dikembangkan lembaga khusus yang mempersiapkan tenaga kerja agar memiliki kecakapan teknis yang

merupakan *non-university*. Hal ini terjadi di negara khusus yang memiliki lembaga khusus terkait dunia industri, seperti Austria, Jerman, Switserland terdapat *Fachhochschulen*, di Belanda terdapat *hoger beroepsopleiding* (HBO), di Prancis menyiapkan jenjang *the baccalaureate* dengan keragaman periode waktu belajar misalnya *maitrise baccauylerate* plus empat tahun (Latuca, 2007).

Dalam konteks perguruan tinggi dan vokasional ini, kebijakan kampus merdeka lebih berorientasi pada dunia industri dan perlu mendapat pertanyaan kritis seperti apakah universitas memang harus terkait dengan dunia industri atau harusnya mempersiapkan para ilmuwan? Karena *link and match* cenderung pada kerja teknis yang telah dipersiapkan oleh pendidikan tinggi semacam politeknik. Dalam konteks orientasi dunia industri atau dunia ilmuwan ini perlu pembahasan lebih lanjut dari banyak pihak. Gambar di bawah ini adalah delapan kegiatan mahasiswa di luar kampus yang merupakan kebijakan kampus merdeka.



Berdasarkan delapan kegiatan mahasiswa di luar kampus tersebut dapat dilihat bahwa Kemendikbud masih menggunakan konsep *link and match* yang sebetulnya merupakan konsep pada era orde baru. Oleh karena itu, konsep antara dunia kerja dan perguruan tinggi perlu mendapatkan rumusan baru sehingga tesis yang menyatakan perguruan tinggi adalah pabrik yang

mempersiapkan buruh dan karyawan *an sich* tidak dapat dibuktikan. Maka, perguruan tinggi harus melampaui konsep *link and match*. Capaian dan luaran kampus merdeka harus melebihi sekadar menyiapkan buruh atau pekerja bagi dunia industri. Rincian delapan kegiatan mahasiswa di luar kampus tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Delapan Kegiatan Belajar di Luar Kampus

Kegiatan Pembelajaran di luar kampus	Bentuk dan Tempat	Keterangan
Magang/praktik industri	Kegiatan magang di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintahan, dan <i>startup</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib dibimbing dosen. 2. Satu SKS setara dengan 2.720 menit. 3. Penilaian magang dilakukan oleh perguruan tinggi dan tempat kegiatan.
Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain sebagainya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib dibimbing oleh seorang dosen. 2. Satu SKS setara dengan 2.720 menit. 3. Penilaian kegiatan dilakukan oleh perguruan tinggi dan supervisor desa.
Pertukaran Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan pemerintah. 2. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampus. 2. Perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai kontrak kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan mahasiswa.

	<p>3. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> di perguruan tinggi lain.</p>	
Penelitian	<p>1. Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>2. Dapat dilakukan untuk lembaga riset, seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, dan Perguruan Tinggi.</p>	<p>1. Wajib dibimbing seorang dosen.</p> <p>2. Satu SKS setara dengan 2.720 menit.</p> <p>3. Penilaian kegiatan dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga/laboratorium.</p> <p>4. Luaran penelitian dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek mahasiswa.</p>
Wirausaha	<p>Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dengan dibuktikan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p>	<p>1. Wajib dibimbing oleh seorang dosen.</p> <p>2. Satu SKS setara dengan 2.720 menit.</p> <p>3. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa, seperti besarnya keuntungan, besaran modal, dan jangkauan pasar.</p>

Studi/proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan dengan mahasiswa lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib dibimbing oleh seorang dosen. 2. Satu SKS setara dengan 2.720 menit. 3. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/ pembimbing dengan mengutamakan luaran yang dihasilkan dari kegiatan proyek mandiri mahasiswa.
Proyek kemanusiaan	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kemanusiaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. 2. Mentor penyelenggara atau lembaga. 3. Hasil yang diperoleh. 4. Kompleksitas isu kemanusiaan.
Mengajar di sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan, sekolah dapat berada di lokasi kota atau terpencil. 2. Program akan difasilitasi oleh Kemendikbud. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu SKS setara dengan 2.720 menit. 2. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar. 3. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan acuan program dirancang oleh mahasiswa.

Selain menguraikan kegiatan di luar kampus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020: 31) juga menetapkan standar mutu agar hak belajar di luar program studi memiliki jaminan mutu dalam aspek kompetensi peserta, pelaksanaan, proses bimbingan internal dan eksternal, sarana dan prasarana, pelaporan, dan penilaian.

Tabel 6. Standar Jaminan Mutu Kegiatan Kampus Merdeka

Kegiatan	Standar Mutu
Magang/praktik kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus harus memiliki standar atau selevel dengan kualifikasi sarjana.2. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan yang telah diajukan.3. Memiliki laporan kinerja selama dua bulan.4. Wajib melaporkan dan mempresentasikan hasil magang kerja kepada pimpinan lembaga/ perusahaan.
Mengajar di satuan pendidikan	Wajib menetapkan hasil belajar yang ingin dicapai, misalnya meningkatkan kemampuan membaca siswa yang harus dilaporkan dalam kinerja dua bulan.
Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Standar kompetensi penelitian yang dirancang harus sesuai standar kualifikasi dan kompetensi yang diperoleh level sarjana.2. Wajib terlibat aktif dalam proses, pelaporan, dan presentasi penelitian.
Proyek kemanusiaan	Berkomitemen dan berdedikasi dalam menyelesaikan persoalan sosial, misalnya memberantas kemiskinan, memiliki dampak konkret, dan terlibat aktif dalam pencegahan pandemi Covid-19.
Kegiatan wirausaha	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa memiliki rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang.2. Berhasil mencapai target penjualan yang dinyatakan dalam rencana bisnis.3. Berkembangnya potensi sumber daya manusia sebagaimana dituangkan dalam rencana bisnis.
Studi independen	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat studi yang dikerjakan mahasiswa disesuaikan dengan level kompetensi mahasiswa sarjana.2. Topik studi independen tidak ditawarkan dalam kurikulum program studi dimana mahasiswa menempuh studi.3. Mahasiswa secara mandiri mengembangkan studi yang harus dicapai pada akhir studi.

Membangun desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkomitmen, loyal, dan berdedikasi dalam mengembangkan program di desa sebagaimana yang diajukan, misalnya UMKM, BUM Desa, program ekonomi desa, kesehatan desa, serta pengembangan seni dan kebudayaan desa. 2. Mahasiswa berkontribusi dengan adanya dampak nyata seperti peningkatan minat jumlah masyarakat yang terlibat dalam industri rumahan.
Pertukaran pelajar	Mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dan telah ditetapkan oleh program studi.

Sumber: Buku Panduan Kampus Merdeka

Merujuk ke pengelolaan perguruan tinggi di Singapore bahwa pendidikan tinggi merupakan persiapan bagi warga negara untuk bekerja di era digital. Dengan demikian, dirumuskan konsep *skill future* dan *smart nation*.

“*Skills Future is a national movement to provide Singaporeans with the opportunities to develop their fullest potential throughout life, regardless of their starting points. Through this movement, the skills, passion and contributions of every individual will drive Singapore’s next phase of development towards an advanced economy and inclusive society. ... Skills mastery is more than having the right paper qualifications and being good at what you do currently; it is a mindset of continually striving towards greater excellence through knowledge, application and experience.*”

Melalui kebijakan *skills future*, pemerintah membantu warga Singapore membentuk pola pikir dan kapasitas mereka bagi *automation economy*. Hal ini penting karena saat ini perekonomian berkembang secara robotik untuk mencapai efisiensi. Kebijakan *skills future* ini didasarkan pada empat prinsip, yakni: 1) intens membantu individu membuat keputusan mengenai pendidikan, pelatihan, dan bagaimana mengembangkan karir mereka yang disebut dengan *Individual Learning Portofolio* (ILP); 2) mengintegrasikan sistem kualitas pendidikan dan pengajaran dengan dunia kerja industri digital; 3) menjamin penghargaan dan kompensasi untuk para ahli; dan 4) mendorong akses pembelajaran seumur hidup di Singapore (Gleason, 2018). Sementara kebijakan *smart nation* adalah upaya negara dalam membantu warga negaranya untuk menghadapi *automation economy*. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempersiapkan tenaga ahli dan siap kerja di era digital yang memiliki pemahaman di bidang kewargaan.

Jika belajar dari kebijakan pendidikan tinggi di Singapore, maka dapat dilihat bahwa *core bussinees* dalam pengembangan perguruan tinggi di

Singapore selalu terkoneksi dengan *automation economy* yang sangat terkait dengan revolusi digital. Jika dibandingkan dengan kebijakan kampus merdeka, Kemendikbud belum menjadikan era digital sebagai inti kegiatan dalam pendidikan tinggi.

Kampus Merdeka dan Penerapan Transintegrasi Keilmuan

Di lingkungan Kementerian Agama, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, terutama Universitas Islam Negeri, konsep merdeka belajar secara filosofis dikenal dengan konsep integrasi ilmu. Pada bab ini, penulis menggunakan paradigma transintegrasi ilmu yang sedang dikembangkan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Paradigmanya sangat relevan dengan visi kampus merdeka sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim.

“Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada dua poin penting kebijakan kampus merdeka, yakni debirokratisasi dan kebebasan intelektual dalam memilih bidang yang diminati. Jika dilihat relevansi kampus merdeka dengan mandat Universitas Islam Negeri, maka melahirkan poin-poin berikut. Namun, pada poin 5 terdapat kerancuan bahwa mahasiswa S-1 yang menggunakan pendekatan monodisipliner tidak konsisten dengan paradigma integrasi ilmu.

1. Mengembangkan ilmu umum berbasis keagamaan.
2. Mengembangkan ilmu keagamaan (keislaman), sosial, dan humaniora serta sains dan teknologi.
3. Mengembangkan program pendidikan berbasis integrasi ilmu.
4. Secara akademik mengembangkan program pendidikan berbasis pada relasi antara ilmu keislaman dengan sosial dan humaniora serta sains dan teknologi.
5. Bagi mahasiswa S-1 tetap mengkaji ilmu berbasis pendekatan monodisipliner.
6. Mahasiswa S-2 dan S-3 mengkaji ilmu berbasis pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

Pendidikan tinggi di era revolusi digital 4.0 tidak cukup hanya mengembangkan dan menyelesaikan persoalan mekanis, sains, dan teknologi. Namun juga harus memiliki visi interkoneksi di antara beragam permasalahan skala

global dan adanya inter-relasi, misalnya antara fisika, kimia, dan dimensi masalah ekonomi. Maka, perlu adanya sistem interkoneksi kompleks, misalnya antara ekologi, konservasi hutan, iklim global, dan dampak terhadap *biosphere* (Penprase, 2018). Ilmuwan saat ini tidak lagi dapat bekerja individualis, konsep transintegrasi-interkoneksi dan transintegratif antarbidang ilmu menjadi upaya untuk menyelesaikan beragam persoalan keilmuan dan kemanusiaan.

Paradigma transintegrasi ilmu merupakan ciri khas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang diterapkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Paradigma transintegrasi ilmu berupaya melampaui paradigma PTKIN, khususnya UIN.

“Transintegrasi adalah paradigma ilmu yang dibangun dari semangat filsafat transmodernisme yang kembali memberi tempat bagi nilai tradisi dan agama ke ruang publik untuk bersama-sama dengan sains menciptakan masa depan umat manusia yang lebih baik. Paradigma baru ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah unik dan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, dikembangkan berdasarkan worldview Islam, serta diikat oleh nilai universal yang dipahami secara terbuka sehingga mampu memberikan ruang eksplorasi kebenaran dari berbagai sumber yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dihubungkan dengan perspektif transmodernitas, sains islami akan mengakomodasi cahaya-cahaya yang terdapat dalam khazanah keilmuan Islam, lokalitas, dan dinamika perkembangan zaman sehingga dapat diterima secara umum dan memberikan nilai guna teoretis, praktis, dan etis terhadap kemajuan peradaban manusia.” (UIN STS Jambi, 2020).

Konsep paradigma transintegrasi ilmu yang diterapkan UIN STS Jambi berupaya membuka ruang dikotomi yang ada di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam negeri dan swasta. Melalui paradigma tersebut, perguruan tinggi akan memfasilitasi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengkaji beragam ilmu dan teknologi sehingga mahasiswa dapat keluar dari pagar disiplin ilmu yang sangat ketat, kaku, dan menghambat potensi inovasi dan kreativitas.

Dalam praktiknya, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan paradigmanya masih diartikulasikan ke dalam Mata Kuliah Pengantar Transintegrasi Ilmu yang diklasifikasi menjadi mata kuliah: 1) Pengantar Transintegrasi Ilmu (umum ke kajian keislaman); 2) Pengantar Transintegrasi Ilmu (kajian keislaman ke umum); dan 3) Pengantar Transintegrasi Ilmu (kajian humaniora). Melalui mata kuliah Pengantar Transintegrasi tersebut, diharapkan mahasiswa akan melebur dan melekat dalam setiap mata kuliah keahlian yang diajarkan di program studi

masing-masing. Dengan ini, mahasiswa telah dipersiapkan untuk memiliki kecakapan dalam merekayasa bidang keilmuan yang ditekuninya dengan berbagai ilmu lain yang relevan. Penerapan paradigma transintegrasi ilmu adalah bidang keilmuan dan keahlian, tetapi bukan berarti tidak memiliki identitas spesifikasi dan spesialisasi. Namun ia merupakan *worldview* yang holistik, artinya seorang intelektual tidak hanya mampu berdialog dan saling menyapa dengan ilmu lainnya, tetapi mampu menjadikannya dalam kesetupaduan dan perekayasaan dalam setiap kegiatan keilmuan yang dilakukannya.

Paradigma transintegrasi ilmu yang diterapkan di UIN STS Jambi ini sangat memiliki relevansi dan peluang dengan adanya kebijakan kampus merdeka, terutama terkait mahasiswa yang dapat mengambil SKS kuliah di luar keahlian program studi dan mengikuti kegiatan di luar perguruan tinggi. Paradigma ini merupakan ijtihad pengelola PTKIN untuk mengeluarkan alumni perguruan tinggi Islam yang holistik yaitu ulama yang saintis dan saintis yang ulama. Sehingga nantinya alumni perguruan tinggi Islam di bidang kajian keislaman dan tidak tertutup kemungkinan juga akan terampil menggunakan teknologi informasi untuk menerapkan keahlian dan keilmuannya. Begitu pula mahasiswa yang menekuni ilmu umum seperti teknologi informasi juga akan menjadi sosok sarjana (ilmuwan) ataupun praktisi yang memiliki akar tauhid yang kukuh serta didukung dengan filsafat ilmu, ushul fiqih, tafsir, dan hadis tematik. Tentunya pekerjaan paradigmatis yang berusaha menembus batas dikotomi yang dilakukan, khususnya perguruan tinggi Islam bukanlah pekerjaan gampang dan dapat dicapai dalam waktu singkat, memerlukan periode waktu yang cukup panjang sembari membenahi, dan merevisi konseptual yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Kebijakan kampus merdeka yang diterapkan di perguruan tinggi umum jika dipelajari secara rinci masih memiliki proyeksi bahwa alumni perguruan tinggi yang berorientasi hanya pada keahlian dan tenaga profesional di dunia kerja dan industri. Persoalan profil alumni yang humanis religius sesuai dengan agama yang dianut oleh mahasiswa di perguruan tinggi umum belum mendapat perhatian serius. Corak mekanis industrialis ini akan berdampak pada pandangan positif serta melahirkan generasi yang sekuler kering dengan aspek spiritual dan humanisme. Pengelola perguruan tinggi umum juga perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi paradigma transintegrasi yang memiliki visi mempersiapkan generasi muda Indonesia yang holistik.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan terkait kampus merdeka di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, kebijakan kampus merdeka berupaya menghapuskan spesialisasi keilmuan yang kaku dan telah berlangsung lama di

perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam. Kebijakan kampus merdeka berupaya memproduksi alumni yang dapat beradaptasi dengan beragam dinamika yang terjadi di luar kampus seperti yang berkembang di dunia industri dan berbagai fenomena yang ada di masyarakat. *Kedua*, paradigma transintegrasi ilmu sebagai upaya dari pengelola perguruan tinggi Islam untuk mempersiapkan generasi dan alumni yang holistik “ulama yang saintis dan saintis yang ulama” memiliki peluang besar untuk menerapkan paradigmanya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi karena sangat bersesuaian dengan kebijakan kampus merdeka. *Ketiga*, perguruan tinggi umum dengan kebijakan kampus merdeka masih memiliki orientasi yang sangat mekanis dan industrialis, belum mengarah pada mempersiapkan sosok alumni yang humanis religius sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Penulis merekomendasikan sebagaimana PTKIN yang banyak mengadopsi prinsip dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di lingkungan universitas, maka perlu pula pihak perguruan tinggi umum untuk mengadopsi paradigma ilmu di PTKIN, misalnya Paradigma Transintegrasi Ilmu.

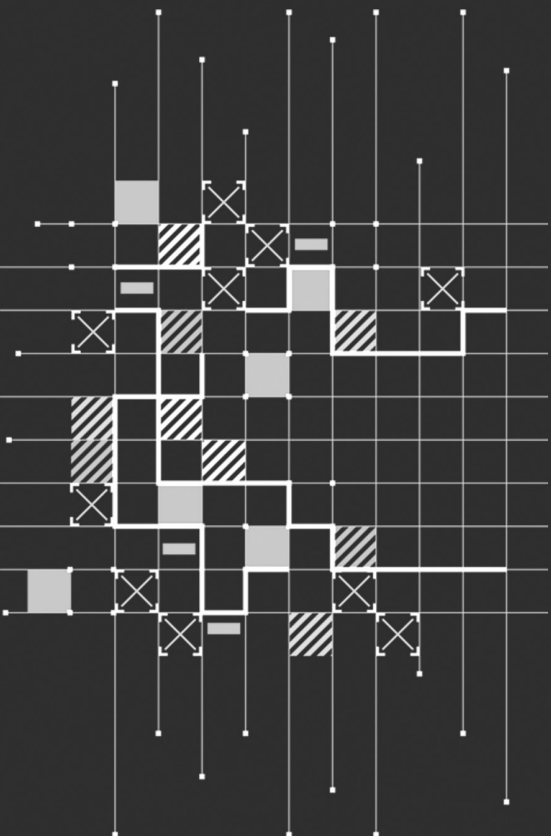
Daftar Bacaan

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Forest, James J. F. dan Altbach, Philip G. (2007). *International Handbook of Higher Education Part I*. Jerman: Springer.
- Gleason, Nancy W. (2018). *Singapore's Higher Education Systems in the Era of the Fourth Industrial Revolution: Preparing Lifelong Learners*. In *Higher Education in the Era of the Industrial Revolution*. Palgrave Macmillan.
- Kementerian Agama. (2019). *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Latuca, Lisa R. (2007). *Curricula in International Perspective*. In *International Handbook of Higher Education*. Jerman: Springer.
- Nizam. (2020). *Kampus Merdeka*. PPT Unpublished
- Penprase, Bryan Edward. (2018). *The Fourth Industrial Revolution and Higher Education*. In *Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution*. Palgrave Macmillan.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). “Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0”. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), pp. 141–157.
- Syam, N. (2020). *Kampus Merdeka dan Pengembangan PTKIN*. PPT Unpublished

Tim Penyusun. (2020). *Pedoman Transintegrasi Ilmu*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.







KESIAPAN CIVITAS AKADEMIK

-Agung Wijaksono, M.Pd-

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia beberapa tahun ini. Upaya-upaya manusia untuk selamat dari pandemi ini menjadi hal yang biasa terlihat di kehidupan masyarakat saat ini. Berbagai peristiwa mulai dari gejala, dampak, cara penanganan dan pencegahan, berita kematian, hingga pasien yang sembuh dari Covid-19 selalu ramai diberitakan oleh media. Tentu banyak pihak yang pro-kontra dengan berita pandemi Covid-19 ini, sebagian masyarakat setuju jika Covid-19 menjadi berita utama sebagai cara pemerintah untuk mengingatkan keselamatan bersama, sebab tidak semua yang diberitakan adalah hal yang menakutkan. Namun, pihak-pihak yang kontra menganggap bahwa berita tersebut hanya akan membuat masyarakat semakin resah, bahkan menurut mereka, berita yang berkaitan dengan Covid-19 sebaiknya ditiadakan.

Pandemi ini tentunya memberi dampak besar bagi banyak bidang, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Adanya himbauan *social distancing* dan WFH (*Work From Home*) untuk menghindari kerumunan, membuat sekolah dan kampus ditutup sementara, pengajian, acara keagamaan, dan perayaan hari besar lainnya ditiadakan sementara, dan rapat-rapat di instansi perusahaan yang menimbulkan kerumunan pun ditiadakan. Bahkan, semua proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara *offline*/luring (luar jaringan) pada akhirnya dilakukan secara *online*/daring (dalam jaringan) atau biasa disebut *e-learning*.

Aplikasi layanan komunikasi video, konferensi jarak jauh seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, hingga situs web berbagi video seperti YouTube dijadikan alternatif untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bahkan dengan dilaksanakannya pembelajaran daring, Zoom Meeting menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh dan hal ini diketahui dari data bahwa ada 131 juta unduhan pada April 2020 (Mochamad Wahyu, 2020). Mengetahui hal ini, perusahaan Google merasa tersaingi dan pada akhirnya mereka mengembangkan aplikasi pertemuan Google Meet dengan menambahkan fitur-fitur baru di dalamnya (Evi Sapitri, 2020).

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pandemi bukan hanya memberikan dampak negatif bagi banyak bidang, melainkan juga dampak positif terhadap kemajuan teknologi. Pandemi secara tidak langsung memaksa manusia

untuk berpikir kritis agar dapat melanjutkan aktivitas yang membutuhkan diskusi, sosialisasi, dan rapat koordinasi. Kegiatan tersebut tentu dapat diatasi jika kita memanfaatkan teknologi. Hal inilah yang membuat teknologi semakin didorong untuk maju. Rapat, pertemuan, dan aktivitas belajar daring atau *e-learning* yang sebelumnya hanya menjadi prediksi ternyata menjadi tren sebab munculnya pandemi.

Pembelajaran daring memunculkan tantangan tersendiri bagi banyak pihak. Mereka mengkhawatirkan dampak bagi peserta didik jika sekolah dan kampus terlalu lama ditutup akan membuat mereka merasa bosan dan tidak semangat menjalani proses belajar. Pada kondisi inilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Pendidikan karakter yang selama ini dianggap sebagai tanggung jawab guru, kini menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan guru. Dalam hal ini, guru dan dosen wajib memberikan dan menjadi contoh yang baik bagi anak didik mereka. Begitu pula orang tua juga memberikan dan menjadi contoh yang baik serta bertanggung jawab memilihkan atau bahkan menyediakan lingkungan yang baik untuk perkembangan karakter anak-anak mereka. Hartono dan Rindi Andika (2018) dalam artikelnya menegaskan bahwa dasar pendidikan karakter peserta didik ada pada keluarganya. Jika peserta didik berada dalam keluarga yang berkarakter baik, maka ia akan berkarakter baik pula.

Terlepas dari masalah pendidikan karakter yang masih memiliki pertanyaan dapat diimplementasikan pada saat pembelajaran *online* atau tidak, pada hakikatnya penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dapat menarik minat peserta didik itu sendiri. Saat mereka jenuh dan sulit memahami materi tertentu, peserta didik dapat menggunakan menu rekam layar pada ponsel mereka sehingga salah satu sisi positifnya, peserta didik dapat mendengarkan atau menyimak berulang-ulang materi pembelajaran tersebut. Metode ini tepat jika diaplikasikan terhadap peserta didik yang memiliki kelambanan belajar (Wijaksono, 2020).

Sebelum kita berbicara tentang civitas akademik, hendaknya kita harus memahami terlebih dahulu definisi civitas akademik. Civitas akademik adalah semua personal yang terkait dengan segala aspek pendidikan di kampus, baik mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga non-pendidik. Melalui definisi inilah kita tahu bahwa civitas akademik meliputi hampir semua penghuni kampus. Sebagaimana yang telah kita bahas, pandemi memberi dampak luar biasa dalam banyak bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan tinggi yang memaksa semua pihak civitas akademik untuk berpikir keras agar dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran.

Upaya Civitas Akademik Menghadapi Kebiasaan Baru

Civitas akademik dituntut untuk mampu mencari solusi dalam menghadapi kebiasaan baru. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, banyak kampus membentuk Tim Satgas Covid-19 sebagai bentuk kesiapan menghadapi perkuliahan di era pandemi. Tim Satgas ini selanjutnya merekrut anggota yang terdiri dari berbagai elemen civitas akademik yang fungsinya untuk mendisiplinkan seluruh warga kampus dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Disiplin yang dimaksud ialah menertibkan tenaga pendidikan dan non-kependidikan hingga mahasiswa. Dosen juga dihimbau untuk mendisiplinkan mahasiswanya dalam menjaga jarak, penggunaan *hand sanitizer*, dan masker.

Namun, ada pula tenaga non-kependidikan dan kependidikan yang masih abai menjaga kedisiplinan tersebut. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab bersama semua warga kampus untuk saling mengingatkan, khususnya pihak-pihak yang menjadi bagian dari Tim Satgas Covid-19. Ada pula *security* kampus juga difungsikan di gerbang-gerbang masuk maupun keluar untuk mendisiplinkan mahasiswa, dosen, maupun tenaga non-kependidikan saat memasuki kampus maupun keluar dari kampus agar mematuhi protokol kesehatan. Tim Satgas juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa terkait gejala jika terpapar Covid-19, penanganan awal, kebiasaan baru hingga model perkuliahan yang akan ditempuh oleh pihak kampus.

Adapun pelaksanaan pengabdian masyarakat seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang biasanya terjun langsung ke masyarakat dan berinteraksi sosial secara langsung dengan masyarakat berubah menjadi tiga model pengabdian masyarakat, yaitu

1. KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah)

KKN-DR adalah program kampus yang mengupayakan agar KKN tetap terlaksana walau dengan banyak keterbatasan. Program ini mengupayakan agar mahasiswa melakukan KKN dari daerah atau rumahnya masing-masing dengan mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, seperti edukasi dan sosialisasi tentang kepedulian terhadap pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga menugaskan mahasiswa untuk membentuk komunitas *online* yang anggotanya adalah masyarakat tersebut untuk membentuk sistem kaderisasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan

mahasiswa sehingga setelah tugas mahasiswa selesai program yang telah dibuat dapat dilanjutkan oleh komunitas yang telah dibentuk.

Kegiatan ini biasanya berbasis riset sesuai prodi dan keilmuan setiap mahasiswa KKN-DR. Pengabdian model ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkreasi dengan pengetahuannya dalam bidang informasi teknologi, baik melalui situs web yang telah disediakan oleh kampus, bekerja sama dengan pemerintah desa, membuat animasi, flyer, atau video-video yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat atau dakwah agama bagi perguruan tinggi Islam dan menyebarkannya melalui media sosial Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp maupun media sosial lainnya yang banyak dijangkau oleh masyarakat sekitar. KKN-DR juga dapat diterapkan dengan meningkatkan produktivitas mahasiswa dalam menulis karya ilmiah berupa artikel, jurnal pengabdian masyarakat, maupun buku.

2. KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial)

KKN model ini dikhususkan untuk mahasiswa dengan bidang jurusan ilmu terapan, seperti sains dan ilmu kesehatan. Mereka dilibatkan dalam penanganan maupun pencegahan Covid-19 melalui kerja sama dengan pihak yang berwenang, baik pemerintah maupun instansi terkait.

3. KKN-RW (Kuliah Kerja Nyata Relawan Wilayah)

Model KKN ini bertujuan selayaknya relawan yaitu membantu masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, seperti santunan *dhuafa* dan anak yatim serta membagikan sembako, masker, jamu herbal, handsanitizer atau bahan-bahan antisipasi pencegahan Covid-19 lainnya. KKN model ini bisa berdiri sendiri maupun bergabung dengan relawan dan aktivis sosial setempat. Dengan dukungan pemerintah desa maupun daerah, KKN model ini bisa mencapai tujuan maksimal dalam setiap proses pengabdian. Tentu semua kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan.

Bentuk pelayanan masyarakat hendaknya juga disesuaikan dengan prodi masing-masing peserta KKN, mahasiswa dalam bidang pendidikan misalnya hendaknya membantu relawan maupun praktisi pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran di era pandemi; mahasiswa ekonomi membantu masyarakat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat; mahasiswa agroteknologi membantu mengenalkan inovasi-inovasi teknologi pertanian kepada masyarakat; dan lain sebagainya.

4. New KKN (Kuliah Kerja Nyata Baru)

Prof. Dr. Yus Mochamad Cholily, M.si. pada radarmalang.jawapos.com mengungkapkan bahwa PMM (Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa) dengan sistem New KKN memiliki perbedaan dengan KKN terdahulu.

Sistem KKN terdahulu mewajibkan mahasiswa datang ke suatu daerah untuk melakukan observasi dan kemudian mencari solusi dari masalah yang ditemukan, sedangkan PMM yakni mahasiswa observasi terlebih dahulu baru mengajukan proposal KKN. Menurutnya, *bottom-up* pada New KKN lebih efektif daripada sistem *top-down* (Imam, 2020).

Secara teknis, hampir semua model KKN memiliki persamaan yaitu posko/posdaya/pondok pintar sebagai lokasi tujuan pengabdian atau KKN tidak lagi dipikirkan oleh pihak kampus, akan tetapi mahasiswa memilih sendiri atau mengajukan sendiri lokasi yang ada, biasanya lokasi tersebut adalah daerah asal mahasiswa tersebut sehingga dampak positifnya, mahasiswa mengabdikan, menggali potensi, dan mengembangkan daerahnya sendiri. Hal ini selaras dengan program gerakan mantan Gubernur Jawa Timur periode 1993—1998 yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn.) Moch. Basofi Sudirman tentang “back to village” atau kembali ke desa. Hal ini tentu berdampak positif bagi desa asal atau kampung halaman mahasiswa sebab biasanya banyak orang setelah menimba ilmu dan menguasai banyak keahlian mereka pergi ke kota dan memilih untuk tinggal di kota tersebut sehingga kota semakin maju, akan tetapi desa tetap stagnan dan berkembang dengan lambat.

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa melakukan KKN sendiri-sendiri dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) juga tidak diwajibkan mengunjungi posko lokasi KKN, akan tetapi cukup melakukan bimbingan secara virtual atau *online* baik menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet ataupun hanya melalui *chat* dan *video call* via aplikasi seperti WhatsApp. Pembimbingan tersebut dilakukan karena pandemi membatasi kerumunan dan kunjungan ke luar daerah serta berupaya mematuhi protokol kesehatan tanpa mengurangi program pendidikan yang seharusnya didapat oleh mahasiswa.

Problematika Perkuliahan Saat Pandemi

Pada masa pandemi yang hampir semuanya dituntut untuk menggunakan teknologi sebagai pengganti pertemuan tatap muka, civitas akademik dituntut untuk mampu berbuat lebih, dosen yang dulunya hanya sebagai penyampai ilmu dan sumber wawasan, sumber keilmuan, dan ahli di bidangnya kini juga menjadi fasilitator pembelajaran, kolaborator, navigator pengetahuan, trainer, hingga mitra belajar mahasiswa (Purwanti, E. dan Krisnadi, I. 2020). Perubahan model perkuliahan tatap muka menjadi *online* memiliki problematika tersendiri dalam pengimplementasiannya. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) civitas akademik, yaitu dosen, tenaga non-pendidikan, hingga mahasiswa menjadi penentu utama pembelajaran *online* tersebut atau biasa disebut *e-learning*. Mereka dituntut agar dapat menguasai teknologi

sebab akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran itu sendiri. Dosen yang ahli dalam informasi teknologi akan lebih inovatif dalam proses pembelajaran menggunakan *e-learning*, sedangkan dosen yang kurang ahli dalam ilmu teknologi informasi dituntut untuk berkembang lebih keras dalam situasi ini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga turut berinovasi walaupun membutuhkan pembelajaran lebih lanjut melalui bantuan orang lain.

Adapun problematika yang banyak terjadi dalam pembelajaran *e-learning* adalah semakin banyaknya tugas dosen yang dahulu saat pembelajaran konvensional hanya cukup persiapan seperti biasa dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, sedangkan dalam pembelajaran *e-learning* dosen lebih banyak mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Dengan kata lain, dosen yang biasanya cukup mempersiapkan materi yang akan dibahas dan didiskusikan, kini juga harus menyiapkan peralatan dan perangkat yang dibutuhkan, seperti laptop, kuota internet yang memadai, listrik, camera webcam, aplikasi *e-learning* hingga jaringan internet yang kuat agar pembelajaran tidak terganggu atau bahkan terputus yang disebabkan buruknya sinyal internet.

Persiapan-persiapan baru dalam *e-learning* tentu bukan masalah besar bagi dosen muda yang sudah terbiasa dengan informasi teknologi, akan tetapi menjadi kendala besar bagi dosen-dosen senior yang belum terbiasa dengan teknologi informasi yang kini lebih kompleks dan rumit. Hal ini terjadi bukan disebabkan bukan karena kecerdasan para senior yang lemah, akan tetapi karena faktor perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat sebab mereka adalah generasi yang mengalami loncatan teknologi yaitu perubahan drastis atau kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi dengan kondisi yang sangat berbeda antara zaman saat mereka masih belia dengan kondisi informasi teknologi saat ini. Kelemahan banyak senior dalam hal teknologi menjadi fenomena yang dimaklumi oleh banyak pihak dan fenomena ini sama sekali tidak mendistorsikan kecerdasan mereka. Para senior tetaplah seorang ahli yang harus terus kita belajar pada mereka dalam banyak bidang keilmuan lain. Mereka tetaplah dosen profesional yang menjadi sumber keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa maupun bagi dosen-dosen muda.

Sedangkan permasalahan yang terjadi pada mahasiswa saat penerapan kelas virtual atau *e-learning* adalah kejenuhan berlama-lama di depan komputer. Pembelajaran konvensional atau tatap muka lebih meminimalisir adanya kejenuhan bagi mahasiswa sebab terkadang ada selingan candaan dari dosen, baik melalui perkataan maupun secara gestur tubuh hingga *ice breaking*. Pembelajaran tatap muka juga lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami materi tertentu. Selingan hiburan dalam proses pembelajaran inilah yang nyaris hilang saat *e-learning*, candaan dosen sebagai pemecah kejenuhan bisa saja terjadi dalam kelas virtual akan tetapi hampir tidak pernah maksimal, belum lagi terkadang komunikasi menjadi buruk karena jaringan

internet yang terkadang *trouble*. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, untuk saat ini pembelajaran daring semakin disukai mayoritas mahasiswa, sebab pembelajaran tidak terikat waktu dan tempat bergantung kesepakatan bersama. Namun, responden juga mengakui rindu untuk masuk kelas dan melaksanakan pembelajaran luring seperti sebelum pandemi.

Dosen mungkin mampu menyediakan jaringan internet yang stabil sebagai panggilan hati untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, tetapi untuk mahasiswa, menyediakan jaringan yang stabil merupakan hal yang sulit. Meskipun beberapa kampus telah memfasilitasi kuota internet untuk seluruh mahasiswa, akan tetapi kampus belum tentu memastikan semua mahasiswanya berada dalam lokasi yang memiliki jaringan internet baik dan stabil. Kesadaran mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan menjadi tantangan terbesar bagi dosen apakah mahasiswa akan benar-benar menyimak dengan baik atau tidak ketika pembelajaran virtual berlangsung.

Model Perkuliahan di Masa Pandemi

Membahas kesiapan civitas akademik dalam menghadapi tantangan proses perkuliahan di era pandemi ini, maka penulis membagi model-model perkuliahan ke dalam beberapa tipe.

1. Model perkuliahan daring tipe pertama

Model perkuliahan ini biasanya banyak diterapkan oleh kampus-kampus maju yang memiliki aspek-aspek penunjang seperti sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai. Kesiapan civitas akademik untuk melakukan model perkuliahan ini adalah menyiapkan aplikasi pertemuan *online* khusus yang telah disepakati dan biasanya telah membeli akun *meeting online* yang premium sehingga tidak lagi dibatasi oleh durasi waktu dan kuantitas peserta kuliah *online*. Pihak kampus memfasilitasi dengan memberikan anggaran khusus untuk tagihan pascabayar maupun prabayar data internet untuk staff, tenaga kependidikan, dan non-kependidikan, bahkan beberapa kampus juga menyediakan untuk mahasiswa. Adapun dosen perlu mendapatkan sosialisasi tentang tatacara penggunaan perangkat-perangkat lunak perkuliahan *online*, baik melalui laptop maupun melalui *smartphone*. Selain itu, dosen juga dituntut untuk membuat soal maupun tugas yang dapat dikirim menggunakan jaringan internet. Proses perkuliahan harus seimbang antara pemberian tugas dengan penjelasan dari dosen.

2. Model perkuliahan daring tipe kedua

Model perkuliahan ini biasanya banyak diterapkan kampus-kampus yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tetapi memiliki cukup SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melaksanakan perkuliahan

layaknya model *full online* tipe pertama. Kesiapan civitas akademik untuk melakukan model perkuliahan ini adalah menyiapkan aplikasi *meeting online* tertentu, tetapi belum memiliki akun premium sehingga masih dibatasi oleh durasi waktu dan kuantitas peserta kuliah *online* atau menggunakan aplikasi *meeting online* yang *full* gratis. Pada tipe ini, pihak kampus hanya menyiapkan anggaran khusus tagihan pascabayar maupun prabayar data internet untuk dosen. Dosen mempelajari tatacara penggunaan perangkat lunak/*software* perkuliahan *online* di laptop maupun melalui *smartphone* secara otodidak. Selain itu, dosen juga dituntut menguasai pembuatan soal maupun jenis tugas yang bisa dikerjakan dan dikirim melalui jaringan internet.

3. Model perkuliahan *full online* tipe ketiga

Model perkuliahan ini biasanya banyak diterapkan oleh kampus-kampus yang kurang memiliki sarana prasarana dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk melaksanakan perkuliahan layaknya model *full online* tipe pertama atau kedua. Kesiapan civitas akademik pada tipe ini sama seperti tipe kedua. Bahkan, pada tipe ini kampus tidak menyediakan aplikasi yang akan digunakan untuk proses pembelajaran sehingga dosen harus mencari sendiri. Pihak kampus memang menyediakan anggaran khusus untuk tagihan pascabayar maupun prabayar data internet, tetapi masih kurang maksimal. Pada tipe ini perkuliahan lebih banyak dilakukan melalui aplikasi *chatting* dan sangat jarang melakukan tatap muka secara *online* serta dosen hanya memberikan tugas-tugas pada mahasiswa.

4. Model perkuliahan campuran

Model perkuliahan ini biasanya banyak diterapkan oleh kampus-kampus yang memiliki sarana, prasarana, dan SDM (Sumber Daya Manusia) terbatas sehingga terkadang mereka melakukan kuliah *online* atau kuliah tatap muka. Model perkuliahan campuran ini juga dilaksanakan oleh kampus maju, sebab mereka mampu memfasilitasi dan melakukan persiapan yang matang untuk perkuliahan tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Kesiapan civitas akademik untuk melakukan model perkuliahan ini adalah dosen menyiapkan aplikasi *meeting online* khusus yang telah disepakati baik yang bersifat premium yang tidak dibatasi durasi waktu dan jumlah peserta maupun yang non-premium yang dibatasi durasi dan peserta. Kuliah *online* biasanya dilaksanakan saat membahas materi-materi tertentu yang kurang memungkinkan atau kesulitan dilakukan secara *online*. Sedangkan untuk materi-materi tertentu seperti pemberian soal maupun mata kuliah yang ringan dan tidak membutuhkan banyak praktik dilakukan secara tatap muka langsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dipersiapkan oleh pihak kampus, baik cek suhu

tubuh sebelum masuk kampus, penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan dan sudut-sudut kampus, penyemprotan pada civitas akademik saat memasuki kampus, penggunaan masker, *hand sanitizer*, *face shield*, menjaga jarak, dan protokol kesehatan lainnya. Mahasiswa menunggu ketentuan dari dosen via grup di aplikasi *chatting* terkait jadwal atau mata kuliah tertentu atau bahkan materi tertentu untuk kuliah tatap muka dan kuliah *online*.

5. Model perkuliahan *online* pondok pesantren/sekolah asrama

Pondok pesantren/sekolah asrama melakukan *lockdown* total sejak mewabahnya pandemi Covid-19 demi menjaga keselamatan seluruh santri/siswa dan warga internal pondok pesantren/sekolah asrama. Banyak pondok pesantren/sekolah asrama di Indonesia yang membatasi interaksi santri/siswa/penghuni/warga asrama dengan orang-orang di luar warga pondok pesantren/sekolah asrama. Mereka benar-benar dibatasi dengan disiplin ketat, hal ini terbukti bahwa sejak awal liburan dan kembalinya siswa ke pondok pesantren diwajibkan untuk isolasi mandiri terlebih dahulu minimal 2 minggu dan telah melakukan rapid tes dan hanya yang *non-reaktif* yang boleh kembali ke lingkungan pondok pesantren/sekolah asrama.

Begitu pula guru dan dosen yang berdomisili di luar pesantren hanya diperbolehkan mengajar melalui virtual versi pondok pesantren. Faktor keterbatasan fasilitas bukan mendasari dipilihnya model perkuliahan ini, akan tetapi adanya disiplin khusus pada mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren maupun sekolah asrama yang membuat harus digunakannya model perkuliahan ini. Kampus yang berada di pondok pesantren yang sebagian besar mahasiswanya tinggal di dalam pesantren dengan disiplin khusus bahwa mereka tidak boleh menggunakan *handphone* apalagi *smartphone*.

Perkuliahan *online* ala pesantren dilakukan dengan cara pihak kampus menunjuk petugas khusus dari mahasiswa, sedangkan dosen yang berdomisili dalam lingkungan pesantren maupun tenaga non-pendidikan lainnya bertugas sebagai operator yakni mempersiapkan ruangan khusus yang dilengkapi beberapa perangkat untuk melaksanakan *e-learning*/kelas virtual atau kuliah *online* seperti *LCD proyektor*, *sound aktif*, dan *microfon*. *Microfon* adalah satu-satunya alat yang diletakkan di meja mahasiswa di laboratorium bahasa, bisa juga satu *microfon* digunakan bergantian saat sesi tanya jawab.

Bentuk perkuliahan ini adalah berkumpulnya mahasiswa dalam satu ruangan, lalu dosen yang tidak bisa hadir ke kelas melakukan perkuliahan *online*. Dengan kata lain, perkuliahan tatap muka antarmahasiswa tetap terjadi, akan tetapi dosen tidak melakukannya. Dalam model

perkuliahan ini sangat mungkin terjadinya diskusi antarmahasiswa, mengingat mahasiswa masih melakukan perkuliahan tatap muka dan dosen mengawasi secara virtual. Meskipun, perkuliahan dilaksanakan tatap muka, mahasiswa dan dosen tetap patuh pada protokol kesehatan, mengingat mahasiswa yang kuliah adalah warga internal pesantren/sekolah asrama yang memang tidak berinteraksi dengan warga di luar pondok pesantren/sekolah asrama.

6. Model perkuliahan tatap muka

Pada masa pandemi model perkuliahan ini bisa dibilang cukup berisiko, akan tetapi kondisi memaksa kampus ini untuk tetap melakukan perkuliahan tatap muka. Model perkuliahan tatap muka saat pandemi ini diambil dan ditempuh karena banyak faktor, salah satunya karena kampus bukan berada di daerah kota yaitu biasanya berada di pedesaan terpencil dan bukan termasuk kategori zona merah. Model perkuliahan ini biasanya banyak diterapkan kampus-kampus yang memiliki sarana, prasarana, dan SDM (Sumber Daya Manusia) terbatas sehingga kampus terpaksa melakukan kuliah tatap muka dengan tetap memenuhi protokol kesehatan walaupun kurang maksimal. Kesiapan civitas akademik untuk melakukan model perkuliahan ini adalah dosen menyiapkan perangkat pembelajaran seperti sebelum pandemi, akan tetapi harus menjaga jarak serta menghindari salaman antara dosen dan mahasiswa menjadi kewajiban mutlak di kampus ini. Mahasiswa juga tidak diperkenankan berkerumun di dalam maupun di luar ruangan kuliah sebelum maupun setelah perkuliahan berlangsung.

Kelebihan dan Kekurangan

Model perkuliahan di atas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, akan tetapi pada hakikatnya semua pihak civitas akademik berusaha mengupayakan yang terbaik dalam memberikan perkuliahan.

Model perkuliahan *full online* tipe pertama memiliki banyak kelebihan, seperti proses perkuliahan tetap berjalan tanpa terhalang oleh pandemi, meningkatkan SDM civitas akademik, baik dari dosen maupun mahasiswa dalam bidang teknologi, waktu belajar yang lebih fleksibel, mahasiswa dan dosen tidak memerlukan anggaran transportasi untuk ke kampus, dan dapat mengikuti kelas virtual/*e-learning* di manapun selama tempat tersebut memiliki jaringan internet yang stabil. Sedangkan kekurangannya adalah: model perkuliahan ini membutuhkan anggaran untuk perangkat teknologi yang cukup besar, kesiapan SDM yang mumpuni untuk mengaplikasikan dan menerapkan teknologi pembelajaran, kurangnya interaksi langsung mahasiswa dengan dosen sehingga mahasiswa kurang memahami materi yang

disampaikan, minimnya pengawasan saat proses pembelajaran sehingga dosen tidak mengetahui dengan pasti apakah mahasiswa memahami atau setidaknya mengikuti dan menyimak perkuliahan dengan baik atau tidak, dan lebih sulit mendisiplinkan mahasiswa. Selain itu, adanya perbedaan pendapat di kalangan akademisi terkait penjelasan jawaban dari pertanyaan “Dapatkah pembelajaran *online* membangun karakter?” harus segera diselesaikan.

Model perkuliahan *full online* tipe kedua memiliki kelebihan yang tidak jauh berbeda dengan tipe pertama. Namun pada tipe ini, dosen dan mahasiswa dituntut untuk menguasai sendiri ilmu tentang teknologi dalam belajar dan pembelajaran sehingga semua bergantung pada individu itu sendiri dan secara tidak langsung kelebihan model perkuliahan ini membuat civitas akademik lebih kreatif dalam keterbatasan dan piawai mencari solusi. Memang jika dilihat secara sepintas, model perkuliahan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan model tipe pertama. Namun, model ini membutuhkan anggaran yang lebih sedikit daripada model tipe pertama. Adapun kekurangan model tipe pertama ini adalah kurang maksimalnya teknologi yang digunakan sehingga akan berimbas pada terbatasnya penggunaan teknologi belajar dan pembelajaran karena banyak dari aplikasi tersebut yang digunakan adalah versi non-premium atau tidak berbayar. Hal ini akan berdampak pada masalah durasi belajar, kuantitas peserta didik atau peserta dalam aplikasi yang juga terbatas, maupun tampilan media pembelajaran yang kurang maksimal.

Model perkuliahan *full online* tipe ketiga memiliki kelebihan: sederhana dan praktis dalam belajar serta dosen dan mahasiswa tidak perlu belajar teknologi pembelajaran yang baru sebab perkuliahan hanya menggunakan aplikasi *chatting* yang sudah sering digunakan oleh civitas akademik, seperti *WhatsApp group*, *Telegram*, maupun *Signal App*. Adapun kekurangannya adalah tidak terpenuhinya gaya belajar yang menurut para ahli belajar harus memenuhi gaya belajar anak, baik VAK (visual, auditori, dan kinestetik) maupun VARK (visual, auditori, kinestetik, dan *read/write*) atau yang biasa disebut gaya belajar multisensorik dengan melibatkan empat unsur gaya belajar (Agusriandi, 2020). Hal yang banyak terjadi jika menggunakan model ini dosen hanya memberi instruksi untuk mengerjakan tugas dan mengirim *link* yang berisi soal-soal atau tugas tertentu yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Terkadang dosen juga hanya mengirimkan video pembelajaran berupa video *non-live* atau *recorded video* yang pada akhirnya tidak semua mahasiswa akan mengunduh dan menyimaknya dengan lengkap. Dengan kata lain, bisa saja mahasiswa mengabaikan video yang telah diberikan dosen.

Model perkuliahan campuran memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimiliki model pembelajaran daring (*online*) dan luring (*offline*) sekaligus. Model perkuliahan ini akan membuat mahasiswa membanding-bandingkan nyaman atau tidaknya kuliah daring atau luring dalam setiap mata kuliah.

Walaupun demikian perkuliahan model campuran memiliki dampak positif yakni menjaga hal-hal baik dalam perkuliahan luring tanpa menafikan kemudahan yang tidak terhalang jarak dalam perkuliahan daring.

Model perkuliahan *online* ala pesantren/sekolah asrama memiliki kelebihan: model ini tidak mengganggu kedisiplinan pesantren/sekolah asrama yang memang secara dominan di Indonesia dilarang menggunakan barang elektronik seperti ponsel maupun laptop; beberapa pesantren memperbolehkan penggunaan laptop untuk santri/siswa yang telah berada pada tingkatan mahasiswa dengan izin penggunaan yang ketat serta dalam pengawasan khusus saat mengakses jaringan internet; mahasiswa diberi kemudahan dalam mengikuti kuliah *online* karena semuanya telah disediakan oleh petugas khusus; mahasiswa tidak dibebani penggunaan kuota internet karena internet yang digunakan adalah milik kampus/pesantren/sekolah/asrama; dan mahasiswa tetap berada dalam koridor disiplin karena perkuliahan tetap diawasi oleh petugas kampus, hanya dosennya saja yang melakukan perkuliahan *online* dari jauh. Model ini juga tidak terlepas dari kekurangan, seperti kurangnya interaksi langsung mahasiswa dengan dosen yang dapat menyebabkan pemahaman materi yang kurang maksimal dan membutuhkan petugas khusus yang disiplin sesuai jadwal untuk mempersiapkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk terlaksananya kelas virtual ini.

Model terakhir adalah model perkuliahan tatap muka dengan kelebihanannya: komunikasi dan interaksi lebih jelas dan mudah, tidak membutuhkan jaringan internet sehingga juga tidak membutuhkan anggaran untuk membeli kuota internet, lebih mudah menilai dan mendidik karakter mahasiswa, belajar bisa lebih fokus, terkontrol, dan lebih mudah, efisien, serta efektif. Sedangkan kekurangan belajar tatap muka adalah waktu belajar yang tidak fleksibel, harus belajar di tempat yang telah ditentukan, dibutuhkannya biaya lebih untuk transportasi mahasiswa menuju kampus dan dikekang oleh jarak, artinya dosen dan mahasiswa harus berkumpul dalam satu tempat yang sama. Kekurangan lainnya adalah rentan terpapar Covid-19.

Dalam hal ini penulis tidak sedang ingin menghakimi apalagi menyudutkan perguruan tinggi manapun dalam memilih model perkuliahan. Walaupun banyak kampus yang melakukan pembelajaran daring, akan tetapi masih ada yang melaksanakan proses perkuliahan tatap muka tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak ada alasan bagi penulis untuk menyudutkan lembaga dan perguruan tinggi manapun sebab setiap permasalahan yang ada dalam setiap perguruan tinggi berbeda-beda, kebutuhan dan kemampuan setiap kampus juga berbeda sehingga tidak heran jika banyak ditemukan perbedaan dalam mengambil kebijakan model perkuliahan di masa pandemi, sebab pada hakikatnya civitas akademik khususnya dosen atau pihak yang bertugas dan pengampu kebijakan di setiap kampus jauh lebih mengerti dalam

memecahkan masalah dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di kampus mereka sendiri untuk tetap selalu memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi mahasiswa walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Kegiatan di Masa Pandemi

Seminar to Webinar



Sumber: Dokumentasi pribadi di STAINH Situbondo, 2019

Gambar 7. Seminar sebelum pandemi Covid-19.

Masa pandemi menuntut semua civitas akademik beradaptasi dengan kondisi dunia. Dahulu, semua orang bebas berinteraksi dan mengadakan berbagai acara, tetapi kini semuanya terbatas. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kelas-kelas dan pengabdian masyarakat mengalami peralihan bentuk yang cukup signifikan. Sebuah bentuk atau model kegiatan yang didesain agar mampu untuk terus melangsungkan kegiatan-kegiatan akademik dengan cara beradaptasi dengan situasi. Seminar adalah salah satu kegiatan akademik yang juga harus beradaptasi dengan situasi pandemi. Berbeda dengan kegiatan lain yang cukup terhambat, seminar justru seakan-akan menjadi kegiatan yang mendapat “berkah” dari kondisi pandemi ini. Jika sebelum pandemi Covid 19 seminar menjadi salah satu kegiatan yang tidak terlalu sering diagendakan, kini seminar justru menjadi kegiatan yang sangat sering dilaksanakan. Mulai dari universitas besar dan terkenal hingga universitas yang masih berkembang berlomba-lomba mengadakan webinar.

Webinar ini biasanya dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Calon peserta webinar diwajibkan mendaftar terlebih lebih dulu melalui link *google form* yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara sebelum mengikuti acara webinar. Setelah melakukan pendaftaran setiap anggota akan masuk kedalam grup WhatsApp untuk kemudahan dalam koordinasi, baik untuk sekedar mengingatkan waktu acara maupun untuk memperoleh informasi penting lainnya hingga pembagian *link* absensi untuk syarat mendapatkan sertifikat. *Link* absensi sertifikat terkadang hanya ditampilkan dalam slide materi di tengah-tengah acara atau di-*share* di *chatting* aplikasi Zoom. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecurangan dari oknum peserta, mengingat adanya oknum yang hanya berburu sertifikat dan mengabaikan keilmuan yang seharusnya disimak dengan baik. Adanya oknum-oknum yang tidak layak dicontoh inilah membuat penyelenggara mencari cara untuk mengurangi hal-hal seperti ini. Salah satunya adalah memberikan *link* absensi di tengah-tengah acara webinar agar banyak peserta yang menyimak semua penjelasan dan memperhatikan pemaparan narasumber sehingga acara ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan bagi banyak pihak.



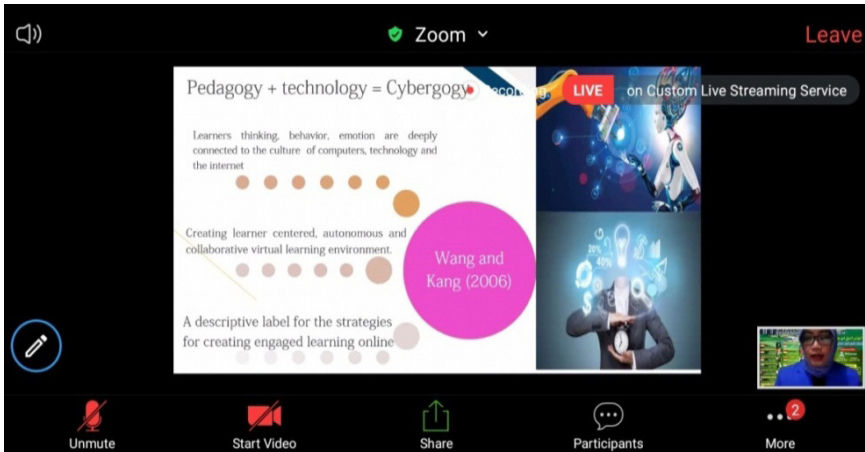
Sumber: Dokumentasi pribadi saat mengikuti International Conference “Transforming Multidimensional Aspects via Islamic And Social Education” ikhac-Mojokerto, 2020

Gambar 8. Contoh Tampilan Webinar Menggunakan Aplikasi Zoom di Smartphone

Cost atau biaya juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong banyaknya acara webinar. Jika sebelum pandemi membutuhkan biaya yang cukup besar untuk seminar nasional, kini dengan virtual kegiatan seminar menjadi jauh lebih murah. Biaya sewa tempat jika kampus tidak memiliki gedung sendiri, biaya konsumsi seluruh peserta, biaya kepanitiaan, hingga biaya untuk narasumber menjadi beberapa daftar hal-hal yang menjadi pengeluaran terbesar. Seminar Internasional yang mendatangkan narasumber dari luar negeri menjadi kegiatan seminar yang benar-benar menelan anggaran besar. Tiket pesawat pulang pergi hingga fasilitas dan penginapan narasumber selama berada di Indonesia menjadi tanggung jawab kampus dan hal tersebut sudah bukan rahasia lagi bahwa persiapan menyambut dan melayani narasumber dengan baik sejak datang hingga pulang kembali menjadi salah satu bagian tanggung jawab yang tidak murah. Namun, hal tersebut tetap harus diupayakan oleh kampus demi memberikan pendidikan dan wawasan terbaik bagi mahasiswa maupun dosen.

Di era pandemi saat ini yang semuanya dilaksanakan secara virtual, seminar menjadi salah satu kegiatan yang mendadak berubah jadi lebih murah. Jika sebelumnya untuk mengundang narasumber baik nasional maupun internasional kita harus menyiapkan tiket transportasi pulang pergi, kini penyelenggara cukup mengonfirmasi kesiapan melalui telepon dan narasumber bisa mengisi acara webinar dari rumah mereka masing-masing. Webinar pastinya tidak membutuhkan konsumsi yang semakin menekan biaya penyelenggaraan seminar. Petugas hanya mempersiapkan perangkat dan media yang dibutuhkan, menyebar *flyer* atau pengumuman registrasi pendaftaran peserta, menghubungi narasumber, moderator, pembandingan dan lainnya serta dan mengoperasikan aplikasi tertentu hingga acara bisa berjalan dengan lancar. Beberapa narasumber bahkan bersedia mengisi tanpa membebani biaya apapun karena mereka menganggap saat ini adalah momen untuk berbagi kebaikan, berbagi ilmu pengetahuan.

Webinar atau seminar *online* juga semakin banyak diburu oleh pihak-pihak, baik mulai dari mengincar sertifikatnya hingga yang benar-benar mencari ilmu. Jika sebelum pandemi, kita harus membayar sejumlah uang pendaftaran untuk mengikuti acara tersebut, belum lagi uang transport menuju lokasi seminar, kini hampir semuanya gratis. Memang ada beberapa webinar yang berbayar juga dengan sistem transfer ke rekening panitia atau penyelenggara, akan tetapi seminar yang gratis jauh lebih banyak. Gratis atau tidaknya webinar sama sekali tidak menggambarkan kualitas materi maupun narasumber seminar itu sendiri. Peserta webinar juga lebih variatif, peserta yang biasanya hanya berada pada lingkup domisili lokal, kini tidak lagi terhalang jarak. Mereka dapat mengikuti webinar lintas provinsi, bahkan lintas negara.



Sumber: Dokumentasi pribadi saat menulis mengikuti webinar/ Internasional Conference “Future Education For Long Lasting Generation” STIT-UW Jombang 2020.

Gambar 9. Contoh Tampilan Slide Materi Webinar

Seperti layaknya seminar luring, webinar juga dapat menampilkan materi dengan aplikasi Power Point. Artinya, narasumber tidak sekadar berbicara atau berceramah, akan tetapi juga menunjukkan *slide* dari Power Point yang telah disiapkan narasumber. Power Point ini biasanya dikendalikan oleh operator dan narasumber cukup memberikan isyarat pada operator untuk menunjukkan *slide* yang dibutuhkan. Kesiapan civitas akademik khususnya panitia penyelenggara adalah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan dan jaringan yang stabil serta koordinasi berulang dengan narasumber dalam memastikan jadwal acara adalah kunci dari kelancaran acara webinar ini. Peserta umum khususnya mahasiswa juga menjadi bagian dari civitas akademik yang harus mempersiapkan dirinya untuk menyimak dengan baik, tidak mengeluarkan suara-suara yang mengganggu, dan aktif saat sesi tanya jawab merupakan contoh bentuk kesiapan mahasiswa menjaga kelancaran acara suatu webinar.

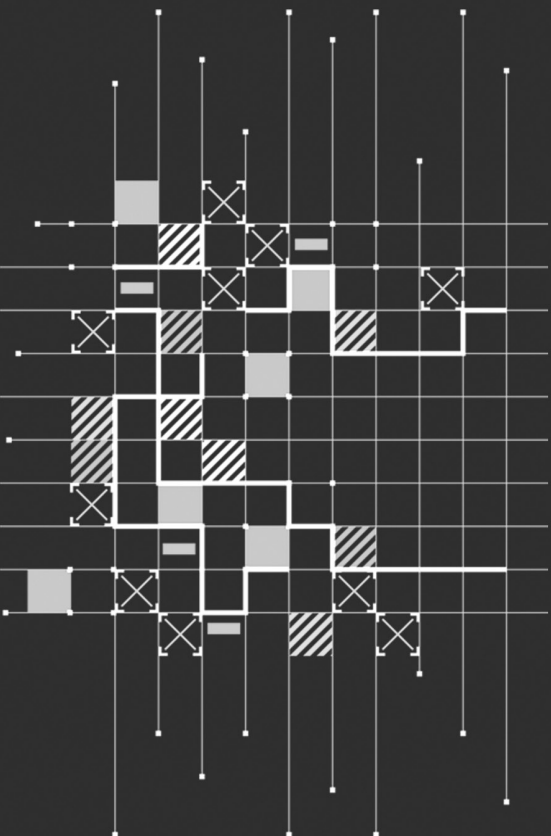
Kampus berkembang maupun kampus maju berlomba-lomba mengadakan webinar, kampus rintisan yang masih baru dan butuh banyak pengembangan seakan-akan menjadi kampus paling diberkahi untuk mengadakan acara webinar. Hanya dengan *budget* yang minim kampus rintisan pun mampu mengadakan webinar internasional selama civitas akademik, khususnya dosen memiliki relasi dengan narasumber-narasumber dari luar negeri. Mahasiswa di kampus yang biasanya hanya menyimak dan menerima dari dosen lokal atau nasional kini juga bisa menyimak dan mendapat ilmu dari narasumber internasional. Hal ini sangat bagus bagi perkembangan dan perluasan sudut pandang dan wawasan mahasiswa.

Mahasiswa kini juga bebas mengikuti webinar manapun yang diadakan oleh kampus manapun dan di manapun secara gratis. Dosen maupun mahasiswa kini bisa mengikuti webinar lintas negara, lintas perguruan tinggi, bahkan lintas keilmuan. Terkadang beberapa dosen dan mahasiswa ingin mengikuti webinar di luar konsentrasi keilmuan mereka, misalnya dosen Fakultas *Tarbiyah* mengikuti webinar dengan materi keilmuan ekonomi syariah atau mahasiswa jurusan ilmu hukum mengikuti seminar ilmu pertanian.

Bagi penulis, hal ini cukup baik untuk memperluas *khazanah* keilmuan kita. Sebab dalam kehidupan nyata terkadang kita membutuhkan wawasan-wawasan dari keilmuan lain yang dapat membantu kita dalam mengatasi permasalahan hidup, menolong orang lain, atau untuk hal bermanfaat lainnya yang mungkin akan kita temukan dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Walaupun tidak boleh dikesampingkan sebagai dosen atau mahasiswa, kita hendaknya kita juga memperdalam ilmu yang menjadi bidang keilmuan kita.

Daftar Bacaan

- Agusriandi, A. (2020). “Peningkatan Kreativitas Matematika Melalui Model Vark-Fleming pada Siswa Kelas VIII2 SMP Negeri 3 Mattiro Sompe”. *Diferensial: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(1), pp. 39–50.
- Hartono, H. (2018). “Pendidikan Karakter dalam Al Qur’an pada Kalangan Remaja di Era Digital”. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist*, 1(2), pp. 178–199.
- Hidayat, Mochammad Wayu. (2020). “Zoom Jadi Aplikasi Terpopuler pada April 2020 dengan 131 Juta Unduhan”. <<https://www.liputan6.com/teknor/read/4250920/zoom-jadi-aplikasi-terpopuler-pada-april-2020-dengan-131-juta-unduh-an>>.
- Nasrodin, Imam. (2020) “Lawan Korona, 2000 Mahasiswa UMM Ikuti ‘New KKN’ Berbasis PMM”. <<https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/08/07/2020/lawan-korona-2000-mahasiswa-umm-ikuti-new-kkn-berbasis-pmm/>>.
- Purwanti, E. dan I. Krisnadi. (2020). “Implementasi Sistem Perkuliahan Daring Berbasis ICT dalam Masa Pandemi Wabah Covid-19”. *Pascasarjana Program Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana*, 1(1), pp. 1–12.
- Sapitri, Evi. (2020). “Tak Ingin Kalah Saing dari Zoom dan Teams, Google Meet Tambahkan Fitur Baru”. <<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-06579323/tak-ingin-kalah-saing-dari-zoom-dan-teams-google-meet-tambahkan-fitur-baru>>.
- Wijaksono, A. (2020). “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Aplikasi Android”. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 7(2), pp. 165–185.



KONDISI PSIKOLOGI PESERTA DIDIK

-Dr. Titin Nurhidayati, S.Ag., M.Pd-

Jumlah kasus Covid-19 yang semakin melonjak membuat pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan demi meminimalisir penyebaran virus, seperti mengambil tindakan PSBB dan *physical quarantine* dengan menghindari kontak fisik. Akibat dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, masyarakat dari berbagai sektor turut merasakan dampak positif dan negatifnya, tidak terkecuali sektor pendidikan.

Pada Maret 2020, lebih dari 800 juta siswa di dunia melakukan pembelajaran di rumah sebagai akibat dari pandemi covid-19 (Arika, 2020). Tentu dampak negatif juga berpengaruh pada kondisi anak, baik fisik maupun mentalnya sebab terlalu lama belajar di rumah. Hal tersebut terjadi karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Begitu pula pendidik (guru dan orang tua) tidak sepenuhnya memahami pembelajaran berbasis daring. Oleh karena itu, perlahan anak mulai tertekan karena banyaknya tugas yang diberikan guru kurang memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Melalui kebijakan pembelajaran daring, Mendikbud berharap siswa memperoleh pengalaman baru dalam proses belajar (Fajar, 2020).

Secara rinci, dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan anak diuraikan sebagai berikut.

Dalam Dunia Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah proses perubahan yang terjadi pada beberapa aspek, seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam diri penguasaan prinsip kejiwaan anak. Dalam hal ini, penilaian hasil produktivitas dan efisiensi belajar anak terjadi pada keseluruhan proses perencanaan, penataan, dan pendayagunaan sumber daya. Kemudian, sekolah sebagai tempat berkumpulnya siswa juga mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangannya. Namun, perkembangan sosial anak juga berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat dan keluarga.

Sebagai tempat berinteraksi guru dan siswa, sekolah sangat memberikan peluang besar bagi anak untuk dapat mengembangkan kemampuannya secara kognitif, keterampilan sosial, dan pengetahuan tentang dunia. Juga dapat mengembangkan konsep dirinya sepanjang masa anak-anak, remaja awal, tengah, dan remaja akhir. Dalam hal ini, anak-anak lebih banyak

menghabiskan waktunya di sekolah karena mereka dapat belajar kelompok, berinteraksi, atau bergaul dengan teman sebayanya serta dapat memahami karakteristik gurunya. Dengan berinteraksi, siswa akan mengerti tentang perilaku kerja sama, persahabatan, tolong-menolong, cara berkompetisi secara sehat, dan lebih siap untuk bersosialisasi di masa depan.

Adanya kebijakan bahwa sekolah ditutup sementara membuat anak-anak tidak dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Demikian pula dengan bapak dan ibu gurunya juga tidak dapat melakukan interaksi dengan anak didiknya. Penelitian terkait pengaruh pembelajaran daring terhadap psikologis siswa terdampak *social distancing* akibat Covid-19 menunjukkan bahwa siswa yang kurang berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya, maka keefektifan belajarnya akan berkurang dan merasakan kebosanan. (Mahmudah, 2020).

Pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19 juga menimbulkan kecemasan atau tekanan bagi beberapa siswa. Kecemasan tersebut muncul karena siswa kurang memahami materi, kesulitan mengerjakan tugas dengan baik sesuai batas waktu, memiliki keterbatasan dalam mengakses internet, menghadapi berbagai kendala teknis, dan merasa khawatir menghadapi materi di tingkat selanjutnya. Untuk mengatasi masalah kecemasan tersebut, siswa disarankan untuk berusaha belajar mandiri, mengerjakan tugas semampunya, serta diskusi dengan teman dan guru agar mampu memahami materi dengan baik. Selain itu, siswa juga diharapkan untuk lebih sabar, menyemangati dirinya sendiri, dan berdoa agar mendapatkan kekuatan dalam menjalani pembelajaran daring. Aktivitas lain yang dilakukan untuk menurunkan kecemasan adalah tidur, mendengarkan musik, menonton televisi atau film, bermain *game*, makan, minum kopi, dan olahraga. (Dwi Hardani Oktawirawan, 2020).

Pada dasarnya kemampuan kognitif dan keterampilan sosial anak dibangun dengan keluarganya. Namun, faktanya akan menjadi masalah apabila interaksi antara orang tua dan anak tidak terjadi karena ketidakpahaman orang tua dengan materi pelajaran anaknya, sebab materi pelajaran disampaikan dengan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Dengan demikian, anak kesulitan meminta bantuan kepada orang tuanya dan enggan untuk belajar.

Pada Psikologi Anak

Wabah pandemi ini memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis individu serta masyarakat (Banerjee, 2020; Brooke dkk., 2020; Zhang dkk., 2020). Menurut Brooks dkk (2020), dampak psikologis selama pandemi di antaranya gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*), kebingungan, kegelisahan, frustrasi, ketakutan akan infeksi, insomnia, dan merasa

tidak berdaya. Beberapa psikater dan psikolog mencatat hampir semua jenis gangguan mental ringan hingga berat dapat terjadi pada kondisi pandemi ini. Salah kasusnya adalah *xenofobia* (ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain atau yang dianggap asing) dan kasus bunuh diri karena ketakutan terinfeksi virus. Selain itu, anak juga akan merasakan takut, cemas, khawatir yang berlebihan, panik, dan psikosomatik. Perasaan sugesti yang dibangun dari dalam pikiran sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis anak pada kondisi ini. Sedangkan gangguan psikosomatik akan timbul apabila seseorang/anak-anak merasakan stres dan kecemasan berlebihan sehingga dapat menimbulkan depresi.

Berbagai kondisi psikologi anak akibat pandemi ini membuat kesehatan jiwa menjadi hal penting untuk diperhatikan. Dengan adanya *back to basic* yaitu lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, seperti belajar, bermain, dan lain-lain untuk menjaga kesehatan, tentu orang tua ikut berperan dalam menjaga imun putra-putrinya. Sepatutnya orang tua memberikan vitamin dan minuman-minuman tradisional seperti jamu, *wedang jabe*, dan lainnya. Selain itu, orang tua dapat membantu anak untuk mengoptimalkan pembelajaran daring sehingga timbul rasa kebersamaan.

Maka muncul beberapa perubahan yang mungkin mulai dilakukan anak selama pandemi Covid-19. Dengan kekuatan psikologis masing-masing anak yang mana dalam pendampingan orang tua, pihak sekolah ikut ambil bagian dengan pendampingan secara menyeluruh walaupun secara jarak jauh. Maka diharapkan orang tua, terutama yang ikut memperhatikan kondisi kesehatan jiwa putra putrinya dan orang tua itu sendiri. Apabila tidak memperhatikan kesehatan jiwa, maka akan berdampak pada memburuknya hubungan sosial dengan sesama serta kesehatan fisiknya pun akan terganggu. Namun, apabila kita tidak dapat mengatasi persoalan psikologis, maka kita memerlukan pertolongan dari tenaga profesional. Kita dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog sehingga dapat menjaga anak-anak dan keluarga.

Berkaitan dengan kebijakan pembelajaran di rumah, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) (2020) telah melakukan survei terkait dampak belajar di rumah terhadap 15.304 anak sekolah di 32 provinsi di Indonesia, baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Survei ini dilakukan karena rasa kekhawatirannya terhadap masalah psikologis yang dialami siswa semakin meningkat dan proses pembelajaran jarak jauh yang tidak stabil. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur aspek kesehatan mental dengan cara membandingkan kondisi psikologis tiga kelompok anak sekolah yang dibedakan berdasarkan cara belajar, yaitu belajar dari rumah (BDR), tatap muka (TM), dan campuran BDR-TM. Sementara itu, pengukuran tingkat kondisi psikologis siswa dilakukan dengan menggunakan 3 skala, yaitu *Strength and Difficulties Questionnaire* (SDQ) untuk

mengukur masalah emosi dan perilaku, *Children's Revised Impact of Event Scale-13* (CRIES-13) untuk mengukur gejala trauma, dan *Psychological Well-Being Scale-18* (PWB-18) untuk mengukur kesejahteraan psikologis.

Menurut hasil survei Ikatan Psikolog Klinis, kondisi psikologis anak yang mengikuti belajar dari rumah relatif lebih baik dibandingkan mereka yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka maupun yang menggunakan keduanya. Belajar dari rumah juga tidak menimbulkan stres yang lebih tinggi dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Kemudian, berdasarkan temuan dari hasil penelitian IPK sebelumnya, kondisi psikologis siswa saat pandemi tidak berbeda dari kondisi sebelum pandemi. Ikatan Psikolog Klinis memberikan beberapa rekomendasi berikut.

1. Meminta kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menunda pembelajaran tatap muka dan melanjutkan pembelajaran belajar dari rumah (BDR) hingga tingkat infeksi Covid-19 kurang dari 5% sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan demikian dampak buruk BDR terhadap kondisi psikologis siswa tidak dapat dijadikan alasan pembukaan sekolah karena hal ini tidak terbukti.
2. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilan para guru dalam hal pengelolaan kelas dan penyampaian materi belajar yang sesuai dengan pembelajaran BDR. Guru juga perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat memberikan dukungan psikososial kepada siswa. Kemudian, guru juga dapat memberikan bantuan kepada orang tua atau pendamping belajar anak selama BDR agar lebih mudah memahami proses belajar yang sedang dijalani anak.

Kecemasan Peserta Didik

Kehadiran virus Corona telah merusak tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia. Pendidikan, ekonomi sosial, budaya, dan keberagaman terdampak akibat virus tersebut. Misalkan dari segi pendidikan, begitu banyak anak-anak dan guru tidak dapat bersekolah dengan normal akibat pembatasan interaksi sosial. Pada akhirnya, dengan fasilitas seadanya mencoba melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh yang belum direncanakan dengan matang tanpa analisis mendalam. Akibatnya tidak semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik karena alasan ketiadaan sumber belajar dan akses perangkat teknologi serta internet yang terbatas. Di sisi lain orang tua juga terbebani dengan adanya berbagai tugas dalam proses belajar yang menuntut mereka mampu menguasai berbagai mata pelajaran.

Kemudian dari sisi ekonomi, akibat kebijakan bekerja dan belajar di rumah serta pembatasan keluar rumah membuat para wirausahawan mengalami kerugian akibat banyak tempat usaha tutup karena sepi pembeli ditambah

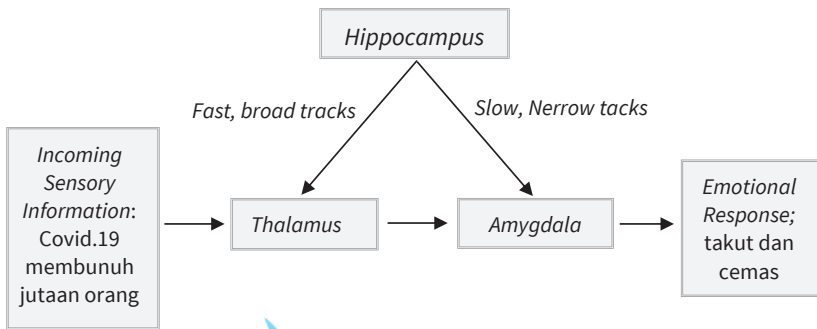
kebijakan daerah yang memberlakukan *social distancing* maupun jam malam membuat suasana semakin mencekam. Akibatnya banyak karyawan yang terpaksa diputuskan hubungan kerja. Adapun dari sudut sosial dan budaya juga mengalami gangguan dengan pemberlakuan *stay at home* dan *social distancing*, termasuk anjuran larangan mudik dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar membuat interaksi sosial sangat terbatas. Tradisi mudik ialah kembalinya para pendatang dari ibukota ke kampung halamannya untuk merayakan Lebaran Idul Fitri. Diperkirakan jutaan orang akan melakukan pergerakan ke tempat asalnya dan mengunjungi sanak keluarga setelah setahun mencari nafkah. Namun, hal ini terhambat akibat terjadinya pandemi virus Corona.

Lalu, apabila dilihat dari sisi keberagaman, pandemi juga telah mengganggu berbagai ritual ibadah, seperti shalat berjamaah, shalat Jumat, Shalat Tarawih, kiyamulail, dan menghidupkan bulan Ramadhan karena banyak masjid yang ditutup. Apabila masjid dibuka, maka wajib menerapkan standar protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan pemerintah, seperti wajib menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, membawa peralatan shalat sendiri, pengaturan jarak antar-saf satu meter, menyediakan sabun cuci tangan di pintu masuk, dan dilarang berjabat tangan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa untuk memperbolehkan shalat Jumat di rumah dan menggantikannya dengan shalat Dhuhur.

Mengutip salah satu hasil kaji cepat Survei Ketahanan Keluarga di masa pandemi yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), dari 66% responden perempuan yang sudah menikah menunjukkan bahwa gangguan psikologis yang paling banyak dialami adalah: mudah cemas dan gelisah (50,6%), mudah sedih (46,9%), dan sulit berkonsentrasi (35,5%) (Sunarti, 2020). Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat perempuan memegang peran yang sangat penting dalam mengelola rumah tangga. Anak-anak dan remaja pun tidak luput dari dampak kebijakan pembatasan penyebaran virus melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Ruang gerak yang terbatas dan minimnya interaksi dengan teman sebaya selama masa pandemi dapat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa mereka.

Pandemi ini juga melahirkan berbagai gangguan psikologis berupa stres yang berwujud dalam bentuk ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Orang yang mengalami stres menurut Nurjanah Nitura, dapat diamati melalui berbagai gejala, seperti meningkatnya ketegangan, kegelisahan, dan kecemasan. Apabila dihayati, hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi fisik, seperti timbulnya sakit kepala, mulas, diare, gatal-gatal, ketegangan otot, gangguan tidur, dan meningkatnya tekanan darah serta detak jantung. Stres dapat pula muncul dalam wujud perilaku sehingga membuat individu menjadi tidak sabar, cepat marah, perubahan pola makan, menarik diri, lesu, dan rendah

diri (W. Eda F. dan Dharma, 1999: 53). Adapun skema stres menurut J. Scott dan G. Stredling (2013: 32) yang dapat melahirkan respons emosional berupa ketakutan dan kecemasan.



Gambar 10. Skema Stres

Anxiety atau cemas maupun kegelisahan adalah perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa mendatang tanpa sebab khusus (J. P. Chaplin, 2001: 32). Selanjutnya Steven Schwartz S (2000: 139) mengemukakan bahwa:

*“Anxiety is a negative emotional state marked by foreboding and somatic signs of tension, such as racing heart, sweating, and often, difficulty breathing. (anxiety comes from the Latin word *anxius*, which means constriction or strangulation). Anxiety is similar to fear but with a less specific focus. Whereas fear is usually a response to some immediate threat, anxiety is characterized by apprehension about unpredictable dangers that lie in the future.”*

Ia juga mengemukakan kecemasan berasal dari kata Latin, yakni *anxius* yang berarti penyempitan atau pengecikan. Kecemasan ini serupa dengan rasa takut. Namun, rasa takut tidak mengerucut pada sesuatu dan biasanya merespons beberapa ancaman. Sedangkan rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga yang terletak di masa depan. Kecemasan merupakan keadaan emosional negatif yang ditandai dengan adanya firasat dan somatik ketegangan, seperti hati berdetak kencang, berkeringat, dan kesulitan bernapas. Rasa cemas ini muncul karena reaksi stres yang terjadi akibat kejadian luar biasa (stressor) datang secara tiba-tiba dan tanpa dapat diprediksi sehingga membuat korban merespons dengan melawan atau menghindari (*fight or flight*). Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan Rita L. Atkinson dkk (1998: 413) bahwa gangguan kecemasan muncul karena adanya situasi yang mengancam atau merupakan reaksi normal dari stres.

Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan cenderung mengalami serangan panik dan ketakutan. Selama serangan panik, individu akan merasa bahwa sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Perasaan ini biasanya disertai dengan gejala tertentu, seperti jantung berdebar-debar, sesak napas, berkeringat, tremor otot, pingsan, dan mual-mual. Gejala tersebut biasanya terjadi akibat aksitasi cabang simpatik dari sistem saraf otonomik dan merupakan reaksi seperti dialami oleh orang lain saat sangat ketakutan. Biasanya serangan panik yang berlebihan terjadi ketika seseorang merasa takut bahwa dirinya akan mati.

Gangguan kecemasan umum yang tampak di berbagai kultur adalah: *pertama*, sindrom tubuh yang muncul dalam bentuk keletihan, kurang konsentrasi, dan otot tegang; *kedua*, sindrom psikologis yang muncul dalam bentuk kecemasan berlarut-larut terhadap performa atau aktivitas sosial tertentu (Eric B. Shiraev dan David A. Levy, 2016: 329).

Saat situasi pandemi virus Corona, biasanya kecemasan hadir dalam beragam bentuk, di antaranya ketakutan terhadap kematian, hal ini terjadi karena melihat angka kematian akibat wabah corona yang dari hari ke hari semakin besar; ketakutan terinfeksi virus corona atau menginfeksi orang lain; ketakutan minimnya ketersediaan obat karena hingga saat ini vaksin atau antivirus covid.19 belum di temukan; khawatir kehilangan pekerjaan/pendapatan dan akibat pembatasan keluar rumah; pembatasan sosial berskala besar menyebabkan para pedagang sepi pembeli ataupun tempat kerja yang tutup, ketakutan ketiadaan bahan makanan pokok akibat kepanikan seluruh masyarakat yang memborong sembako hingga langka di pasaran; ketakutan kehilangan sanak famili, kekhawatiran situasi yang mencekam seperti jalanan sepi bahkan ada daerah yang memberlakukan jam malam; takut adanya kerusuhan; ketakutan tidak diterimanya amal ibadah akibat pelanggaran shalat Jumat dan Saf shalat yang renggang; dan merasa lebih takut pada virus (mahluk) daripada Allah (Khalik).

Ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan yang tidak beralasan pada akhirnya menghadirkan kecemasan yang tentu akan berdampak pada perubahan perilaku, seperti menarik diri dari lingkungan, sulit fokus dalam beraktivitas, susah makan, mudah tersinggung, rendahnya pengendalian emosi, sensitif, tidak logis, dan susah tidur. Terkadang rasa cemas akan lahir dalam bentuk gangguan psikosomatis berupa alergi kulit, sesak nafas, jantung berdebut kencang, berkeringat dingin, dan mual-mual. Jika gangguan-gangguan tersebut tidak cepat diatasi, maka akan merusak kehidupan seseorang dalam rangka mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Ciri-Ciri, Gejala, dan Tingkat Kecemasan

Menurut Jeffrey S. Nevid dkk (2005: 164), ciri-ciri kecemasan diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Ciri-ciri fisik
 - a. gelisah dan gugup;
 - b. tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau gemetar;
 - c. sensasi dari pita ketat yang mengikat di sekitar dahi;
 - d. kekencangan pada pori-pori kulit perut atau dada;
 - e. banyak berkeringat;
 - f. telapak tangan yang berkeringat;
 - g. pening atau pingsan;
 - h. mulut atau kerongkongan terasa kering;
 - i. sulit berbicara;
 - j. sulit bernafas;
 - k. bernafas pendek;
 - l. jantung yang berdebar keras atau berdetak kencang;
 - m. suara yang bergetar;
 - n. jari-jari atau anggota tubuh yang menjadi dingin;
 - o. pusing;
 - p. merasa lemas atau mati rasa;
 - q. sulit menelan;
 - r. kerongkongan merasa tersekat;
 - s. leher atau punggung terasa kaku;
 - t. sensasi seperti tercekik atau tertahan;
 - u. tangan yang dingin dan lembab;
 - v. terdapat gangguan sakit perut atau mual;
 - w. panas dingin;
 - x. sering buang air kecil;
 - y. wajah terasa memerah; dan
 - z. diare serta merasa sensitif atau mudah marah.
2. Ciri-ciri behavioral
 - a. perilaku menghindar;
 - b. perilaku melekat serta dependen; dan
 - c. perilaku terguncang.
3. Ciri-ciri kognitif
 - a. khawatir tentang sesuatu;
 - b. perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan;
 - c. keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi tanpa ada keterangan yang jelas;
 - d. terpaku pada sensasi ketubuhan;

- e. sangat waspada terhadap sensasi ketubuhan;
- f. merasa terancam oleh seseorang atau peristiwa yang normalnya hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian;
- g. ketakutan akan kehilangan kontrol;
- h. ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah;
- i. berpikir bahwa dunia mengalami keruntuhan;
- j. berpikir bahwa semuanya tidak lagi bisa dikendalikan;
- k. berpikir bahwa semuanya terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi;
- l. khawatir terhadap hal-hal remeh;
- m. berpikir tentang hal-hal yang mengganggu secara berulang-ulang;
- n. berpikir bahwa harus berhasil kabur dari keramaian sebab jika tidak individu akan pingsan;
- o. pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan;
- p. tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu;
- q. berpikir akan segera mati meskipun dokter tidak menemukan sesuatu yang salah secara medis;
- r. khawatir akan ditinggal; dan
- s. sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran.

Adapun Dadang Hawari (2006: 65—66) mengemukakan bahwa gejala kecemasan yang dirasakan adalah

1. cemas, khawatir, tidak tenang, ragu, dan bimbang;
2. memandang masa depan dengan rasa was-was (khawatir);
3. kurang percaya diri dan gugup apabila tampil di muka umum (demam panggung);
4. sering merasa tidak bersalah dan menyalahkan orang lain;
5. tidak mudah mengalah;
6. gerakan sering serba salah, tidak tenang apabila sedang duduk, dan gelisah;
7. sering mengeluh (keluhan-keluhan somatik) dan khawatir berlebihan terhadap penyakit;
8. mudah tersinggung dan suka membesar-besarkan masalah (dramatisasi);
9. ketika mengambil keputusan sering diliputi rasa bimbang dan ragu;
10. bila mengemukakan sesuatu atau bertanya seringkali diulang-ulang; dan
11. ketika sedang emosi sering kali bertindak histeris.

Kecemasan menurut Gail W. Stuart (2006: 144) memiliki beberapa tingkatan-tingkatan tertentu.

1. Ansietas ringan
Berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ansietas ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang

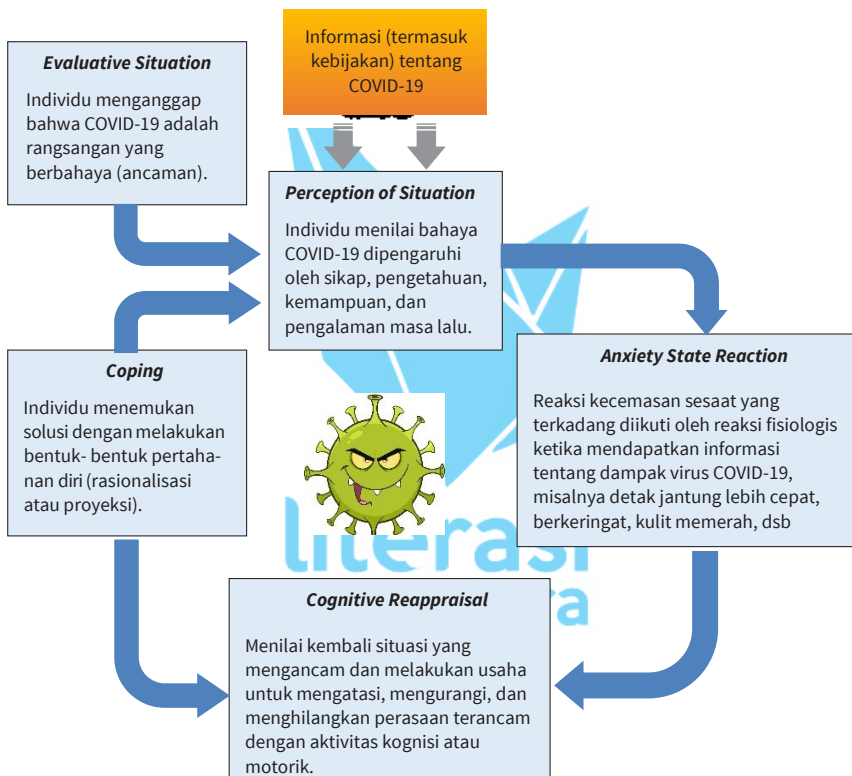
- persepsinya serta dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas.
2. **Ansietas sedang**
Memungkinkan individu untuk fokus pada hal-hal penting dan mengesampingkan yang lain. Ansietas ini mempersempit lapang persepsi individu. Dengan demikian, individu mengalami ketidakfokusan terhadap hal-hal yang kurang penting dan dapat fokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya.
 3. **Ansietas berat**
Ansietas berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Ia cenderung fokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik serta tidak berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area lain.
 4. **Tingkat panik**
Berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Hal yang rinci terpecah dari proporsinya karena mengalami kehilangan kendali, individu yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional.

Proses Terjadinya Kecemasan

Pada dasarnya semua gangguan kesehatan mental diawali oleh perasaan cemas (*anxiety*). Menurut Sadock dkk (2010), kecemasan adalah respons terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai stimulus yang berbahaya (*stressor*). Pada tingkatan tertentu, kecemasan dapat menjadikan seseorang lebih waspada (*aware*) terhadap suatu ancaman karena jika ancaman tersebut dinilai tidak membahayakan, maka seseorang tidak akan melakukan pertahanan diri (*self-defense*).

Sehubungan dengan menghadapi pandemi Covid-19 ini, kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan *awareness* tetapi tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai pada gangguan kesehatan kejiwaan yang lebih buruk. Pada dasarnya, seseorang akan melakukan *evaluative situation* yaitu menilai ancaman virus Covid-19 berdasarkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman masa lalu yang dimiliki. Jika *stressor* dinilai berbahaya, maka reaksi kecemasan akan timbul. Reaksi kecemasan ini ada yang bersifat sesaat (*state anxiety*) dan permanen (*trait anxiety*) (Lazarus, 1991).

Reaksi kecemasan akan berbeda pada setiap individu. Untuk sebagian orang reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh reaksi fisiologis. Namun pada orang-orang tertentu, kompleksitas respons dalam kecemasan dapat melibatkan reaksi fisiologis sesaat, seperti detak jantung menjadi lebih cepat, berkeringat, sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal, dan gejala lainnya. Setelah seseorang mulai merasakan kecemasan, maka sistem pertahanan diri selanjutnya akan menilai kembali ancaman diiringi dengan usaha untuk mengatasi, mengurangi, atau menghilangkan perasaan terancam tersebut. Seseorang dapat menggunakan pertahanan diri (*defence mechanism*) dengan meningkatkan aktivitas kognisi atau motorik.



Sumber: Modifikasi konsep kecemasan Spielberger dkk (1983)

Gambar 11. Proses Seseorang dalam Mengatasi Kecemasan terhadap Ancaman Virus COVID-19

Kecemasan biasanya berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali (*uncontrolled*) sehingga individu akan berfokus pada tindakan yang terkendali (Shin & Newman, 2019). Dalam konteks pandemi ini contoh

tindakan yang dapat dilakukan, antara lain berolahraga, meditasi, melukis, bermain musik, berkebun, memasak, membaca buku, menonton film, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas tersebut sesuai dengan ketertarikan dan kemampuan individu sebagai strategi yang tangguh dan protektif untuk mengatasi stres, kecemasan, dan panik (Wood dan R nger, 2016).

Tahapan terakhir dalam menghadapi kecemasan yaitu menemukan solusi (*coping*) dengan bentuk pertahanan diri seperti rasionalisasi. Rasionalisasi tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal dijadikan masuk akal, akan tetapi merasionalkan sesuatu yang dilakukan. Rasionalisasi juga tidak dimaksudkan untuk membujuk atau memanipulasi orang lain, melainkan membujuk dirinya sendiri agar dapat menerima keterbatasan diri sendiri. Sikap ini juga dianggap sebagai upaya menjaga kesehatan mental diri sendiri sehingga tidak menimbulkan frustrasi, rasa bersalah, dan perasaan tidak berdaya. Sebagai contoh, seorang pegawai yang pada masa pandemi ini melakukan kerja dari rumah (*work from home*) akan merasionalkan bahwa ia memiliki kinerja yang kurang optimal.

Pada dasarnya mengelola kecemasan agar tetap pada tingkatan yang proporsional merupakan hasil dari proses penilaian (*perception of situation*) yang terjadi berulang kali. Proses penilaian dapat berubah seiring seseorang terpapar oleh informasi. Perubahan penilaian ini kemudian berdampak pada bentuk *coping*. Pada awal masa pandemi COVID-19, tindakan membeli kebutuhan secara berlebihan (beli panik/*panic buying*) merupakan salah satu contoh penilaian individu terhadap ancaman kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Mungkin saja keputusan untuk membeli karena panik ini dilakukan karena input informasi dari media yang digabungkan dengan pengalaman masa lalu ketika ketersediaan bahan-bahan pokok menipis pada masa krisis moneter. Namun, kemungkinan kepanikan ini tidak berlangsung lama karena tidak lagi dianggap efektif.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecemasan

Blackburn dan Davidson (dalam Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, 2012: 51) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya, apakah situasi tersebut mengancam atau tidak memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan mengenai kemampuan diri untuk mengendalikan dirinya (seperti keadaan emosi serta fokus permasalahannya). Kemudian Adler dan Rodman (dalam M. Nur Ghufro dan Rini Risnawita S, 2014: 145–146) menyatakan terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan kecemasan sebagaimana berikut.

1. Pengalaman negatif pada masa lalu
Sebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang. Contohnya apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan seperti pengalaman pernah gagal dalam mengikuti tes.
2. Pikiran yang tidak rasional
Pikiran yang tidak rasional terbagi ke dalam empat bentuk, yaitu
 - a. Kegagalan katastropik ialah adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu mengalami kecemasan serta perasaan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan dalam mengatasi permasalahannya.
 - b. Kesempurnaan, individu berharap pada dirinya sendiri untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki kecacatan. Individu menjadikan ukuran kesempurnaan sebagai target dan sumber yang dapat memberikan inspirasi.
 - c. Persetujuan
 - d. Generalisasi yang tidak tepat yaitu generalisasi yang berlebihan. Hal ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman.

Upaya Mengelola dan Mengurangi Kecemasan

Menilai tingkat bahaya COVID-19 melalui penyeleksian informasi yang diterima menjadi kunci mengelola kecemasan. Informasi dan kebijakan dapat memengaruhi penilaian seseorang terhadap ancaman (COVID-19) dan kemudian memengaruhi respons kecemasan yang ditimbulkan. Cara terbaik untuk menghilangkan kecemasan ialah menghilangkan sebab-sebab kemunculannya. Menurut Zakiah Daradjat (1988: 29), cara-cara yang dapat dilakukan ialah

1. Pembelaan
Usaha yang dilakukan untuk mencari alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal dinamakan pembelaan. Pembelaan ini tidak dimaksudkan untuk membujuk atau membohongi orang lain, akan tetapi membujuk dirinya sendiri supaya tindakan yang tidak bisa diterima itu masih tetap dalam batas-batas yang diinginkan oleh dirinya.
2. Proyeksi
Proyeksi adalah menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal.

3. Identifikasi
Identifikasi ini adalah kebalikan dari proyeksi yakni seseorang turut merasakan sebagian dari tindakan atau kesuksesan yang dicapai orang lain. Apabila ia melihat seseorang berhasil dalam usahanya, maka ia merasa gembira seolah-olah ia yang sukses dan apabila ia melihat orang kecewa, maka ia pun merasa sedih.
4. Hilang hubungan (Disosiasi)
Seharusnya perbuatan, pikiran, dan perasaan seseorang itu berhubungan satu sama lain. Apabila seseorang merasa bahwa ada orang lain yang dengan sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Dalam hal ini perasaan, pikiran, dan tindakannya adalah saling berhubungan dengan harmonis. Namun, keharmonisan mungkin akan hilang akibat pengalaman-pengalaman pahit yang dilalui waktu kecil.
5. Represi
Represi adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Tindakan ini semacam usaha untuk memelihara diri supaya jangan terasa dorongan-dorongan yang tidak sesuai dengan hatinya. Proses itu terjadi secara tidak disadari.
6. Substitusi
Substitusi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Dalam substitusi, seseorang melakukan sesuatu karena tujuan-tujuan yang baik, yang berbeda sama sekali dari tujuan asli yang mudah dapat diterima, dan berusaha mencapai sukses dalam hal itu.

Beberapa cara lain dalam menjaga kesehatan mental adalah mengurangi menonton, membaca, atau mendengarkan berita yang membuat kecemasan meningkat. Carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya dan utamakan membuat rencana praktis melindungi diri dan orang-orang terdekat. Usahakan mencari berita hanya 1-2 kali dalam satu hari dan pada waktu yang spesifik. Banyaknya terpapar *misinfodemik* mengakibatkan kesalahan dalam strategi *coping* yang diambil. *Misinfodemik* adalah istilah yang digunakan untuk misinformasi yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan cukup lazim untuk COVID-19. Mencari informasi terkait menjaga kesehatan mental di masa pandemi di berbagai sumber daring juga sebagai langkah yang positif (Banerjee, 2020).

Beradaptasi dengan Kondisi Pandemi

Hingga saat ini, belum ada perkiraan yang akurat tentang berapa lama situasi COVID-19 akan bertahan, jumlah orang di seluruh dunia yang akan

terinfeksi, atau berapa lama hidup orang akan terganggu (Suicide Awareness Voices of Education, 2020; Zandifar dan Badrfam, 2020). Karena kehidupan harus tetap berjalan, maka langkah awal yang dilakukan adalah penerimaan (*acceptance*) yakni memberi ruang kesadaran yang penuh kepada diri bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah kenyataan. Jika kita sudah menerima bahwa kondisi sekarang bukanlah kondisi normal, maka kita siap untuk beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan individu agar dapat melakukan penyesuaian diri pada suatu tempat atau lingkungan yang dipandang sebagai hal baru. Adaptasi dapat juga diartikan sebagai proses penyesuaian diri dalam mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi dapat juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri (Gerungan, 1996). Namun, kemampuan setiap orang untuk beradaptasi pun berbeda-beda.

Dalam hal ini ada beberapa faktor yang memengaruhi kecepatan dan cara seseorang beradaptasi, seperti kepribadian, usia, pengalaman, proses belajar, kondisi fisik, dan lingkungan (Ali dan Asrori, 2011). Oleh karena kemampuan beradaptasi pada setiap individu berbeda, maka proses adaptasi akan berujung pada kesuksesan atau kegagalan beradaptasi. Kesuksesan beradaptasi akan melahirkan daya lenting atau resiliensi pada diri seseorang. Sedangkan kegagalan beradaptasi akan berdampak pada penurunan kondisi kesehatan mental.

Mengatasi Kecemasan di Masa Pandemi

Setiap orang hendaknya benar-benar memahami penyebab kecemasan, terlebih lagi di masa pandemi ini. Untuk itu, mereka harus tetap memperoleh informasi yang akurat, mengetahui cara pencegahan, penularan, dan pemutusan infeksi virus melalui *social distancing*, cuci tangan, dan tetap beraktivitas di rumah, serta selalu menjaga tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, berolahraga, dan beristirahat dengan cukup. Dengan memiliki pemahaman komprehensif menyangkut stressor yaitu virus Covid-19, maka diharapkan diri lebih tenang dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan di tengah wabah corona. Dengan demikian, setiap orang dapat memutuskan sumber ketidakpastian menjadi sesuatu yang pasti tanpa ada kecemasan yang berlebihan.

Selain memahami tentang corona, menyadari perilaku cemas yang timbul juga sangat diperlukan guna mengantisipasi dan menemukan jalan keluar saat perilaku tersebut muncul. Misalkan saat Anda tidak fokus atau sulit tidur, maka pilihan terapi tertentu dapat dilakukan misalnya dengan relaksasi ataupun berkonsultasi pada konselor yang berkompeten. Terapi psikologis juga dapat dilakukan untuk menstimulasi pikiran agar berpikir logis dan pikiran negatif dapat dihalau.

Adapun terapi yang cukup populer dan mudah dilakukan adalah relaksasi yang merupakan proses untuk melepaskan ketegangan yang ada secara sengaja atau disadari. Dengan melakukan relaksasi, maka diri tetap tenang dan dapat terkontrol meskipun sedang menghadapi situasi yang penuh tekanan. Relaksasi juga dapat menghindarkan perasaan cemas, gelisah, dan amarah yang dapat menjadi penghalang untuk berpikir jernih. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan para pakar, jika melakukan relaksasi selama beberapa minggu, maka akan dapat: 1) mengurangi perasaan cemas yang sering timbul; 2) mengurangi sakit kepala dan tekanan darah tinggi; 3) mengurangi munculnya penyakit sulit tidur; 4) mencegah sesak nafas; 5) membantu mengatasi serangan panik; 6) menurunkan stres; 7) merasa lebih tenang; dan 8) membuat lebih kreatif (Jarnawi. 2007: 163). Selain relaksasi, penderita cemas juga dapat melakukan *Spiritual Emotional Freedom Technique* (SEFT) (Ahmad Faiz Zainuddin: 2007) dengan cara mengetuk titik-titik saraf di seputar wajah dan tubuh yang dapat membuat rileks seraya melakukan *tune up* melalui kalimat sugesti berupa penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Adapun banyak cara lain selain terapi dan relaksasi yang dapat membantu seseorang mengatasi panik atau cemas.

Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, maka menumbuhkan rasa sakinah dalam setiap diri merupakan terapi paling komprehensif. Sakinah artinya damai/tenteram. Menghadirkan rasa sakinah dalam diri berarti diri merasa tenteram dan damai karena selalu dekat dengan Allah dan melepaskan ketergantungan pada makhluk. Pada akhirnya seseorang itu akan lebih tenang dan terhindar dari rasa kecemasan sebab telah menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, tempat berharap, dan meminta.

Allah berfirman dalam QS ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, "*Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.*" Bagian dari perjalanan ummat Islam adalah ujian dan penderitaan yang pasti dialami sepanjang hidup. Bagi seorang mukmin, menderita penyakit bukan hanya kenyataan, tetapi juga filosofi yang datang bersama berkah. Ujian dan kesengsaraan merupakan sistem yang menentukan kesempurnaan spiritual manusia atau menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan.

Keyakinan sejati diuji melalui penderitaan sehingga Allah dapat melihat siapa yang benar-benar beriman (Hussein G. Rassool, 2019: 87). Dengan demikian apapun yang sedang terjadi, termasuk wabah Covid-19 merupakan cobaan Allah. Cobaan tersebut sebenarnya adalah ujian kepada manusia agar manusia meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah karena Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar saat ditimpa musibah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt., "*Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa,*

dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS Al-Baqarah: 155)

Untuk mengapai sakinah dalam diri, maka perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas, baik itu fitrah keberimanan, shalat, zakat, puasa, dan berhaji. Kelima rukun Islam inilah menjadi terapi paripurna yang Allah siapkan bagi seluruh manusia agar senantiasa bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak, termasuk terbebasnya kecemasan pada diri. Sebagai contoh, terapi wudu dan shalat, Allah berfirman “*Jadikanlah Shalat dan Sabar sebagai penolongmu sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.” (QS Al-Baqarah, 153).*

Menurut M. Utsman Najati, wudhu yang dikerjakan sesuai aturan sebelum shalat membuat seorang mukmin merasa diri dan jiwanya menjadi bersih. Perasaan bersih tubuh dan jiwa ini mempersiapkan manusia untuk mengadakan hubungan rohaniah dengan Allah dan menghatarkannya pada keadaan tubuh dan jiwa yang tenang dalam shalat (Anwar Sutuyo, 2017: 165–166). Sehingga setelah berkomunikasi dengan Allah melalui shalat pada akhirnya akan memperoleh ketentraman dan kedamaian karena merasa selalu dekat dengan Sang Pencipta. Tak ada hujan yang tak reda dan badai pun pasti berlalu sebagaimana termaktub dalam QS Asy-Syarah ayat 6, “*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*”

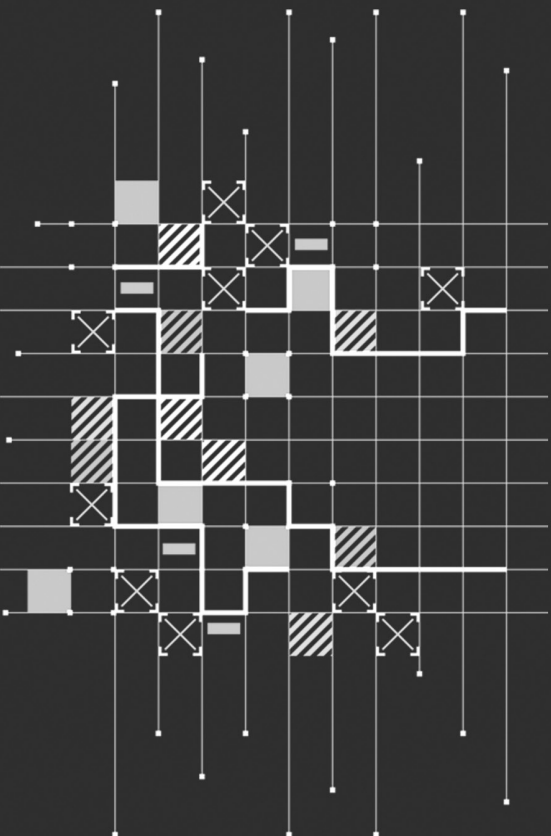
Kesimpulan

Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 secara masif dan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia telah membuat rusaknya tatanan kehidupan dan menyebabkan berbagai gangguan, baik fisik maupun psikologis dan juga rusaknya tatanan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya, agama, dan kesehatan. Rentetannya adalah muncul pula gangguan psikologis berupa ketakutan dan kecemasan di tengah-tengah masyarakat dalam situasi ini. Salah kunci penting mengelola kecemasan adalah pada penyeleksian informasi yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Informasi tersebut hendaklah berasal dari sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas di bidangnya. Jika mulai merasa memiliki gejala gangguan mental ringan, langkah awal yang harus dilakukan adalah meminta pertolongan pada orang-orang yang dapat dipercaya, seperti orang tua, kakak, adik, sahabat, atau suami/istri. Jika hal tersebut kurang berhasil, maka dapat meminta bantuan pihak yang kompeten seperti ahli kejiwaan.

Daftar Bacaan

- Ali, Muhammad dan Muhammad Asrori. (2011). *Psikologi Remaja-Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arika, Y. (2020). "Lebih dari 849 Juta Siswa di dunia Belajar di Rumah". *Kompas*. <<https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/03/18/lebih-dari-849-juta-siswa-di-dunia-belajar-di-rumah/>>
- Asmara, C. G. (2020). "Para Siswa, Simak Surat Terbaru Mendikbud Nadiem untuk kalian". *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2020032512_4101-37-147405/para-siswa-simak-surat-terbaru-mendikbud-nadiem-untuk-kalian>.
- Atkinson, Rita L. dkk. (2000). *Pengantar Psikologi Jilid 2*. Edisi Kesebelas. Batam: Interaksara.
- Banerjee, D. (2020). "The COVID-19 Outbreak: Crucial role the Psychiatrists Can Play". *Asian J. Psychiatr.*
- Brooks, S. K. dkk. (2020). "The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce it: Rapid Review of the Evidence". *Lancet*, 395(10227), pp. 912–920.
- Daradjat, Zakhiah. (1988). *Kesehatan Mental*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Fajar, T. (2020). "Arti Belajar di Rumah di Tengah Wabah Virus Corona". *Okezone News*. <<https://news.okezone.com/read/2020/03/25/65/2188872/arti-belajar-di-rumah-di-tengah-wabah-virus-corona>>
- Gerungan, W. A. (1996). *Psikologi Sosial*. Eresco
- Hawari, Dadang. (2006). *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi*. Jakarta: Gaya Baru.
- J. P. Chaplin. (2001). *Kamus Lengkap Psikologi*. Depok: Penerbit Rajawali Pres.
- Jarnawi. (2020). "Mengelola Cemas di Tengah Pandemi Corona". *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(1), Januari–Juni 2020.
- Lazarus, R. S. (1991). *Emotion and adaptation*. Britania Raya: Oxford University Press.
- Mahmudah. (2020). "Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Psikologis Siswa Terdampak Social Distancing Akibat Covid 19". *Jurnal Al-Mau'zhab*, 2(2), November 2020.
- Nevid, Jeffrey S. dkk. (2005). *Psikologi Abnormal Jilid 1*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Oktawirawan, Dwi Hardani. (2020). "Faktor Pemicu Kecemasan Siswa dalam Melakukan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, pp. 541–544.
- Rassool, Hussein G. (2019). *Konseling Islami: Sebuah Pengantar Kepada Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sadock, J. B. dan Sadock A.V. (2010). *Kaplan & Sadock Buku Ajar Psikiatri Klinis*. Edisi kedua. EGC.
- Safaria, Triantoro & Nofrans Eka Saputra. (2012). *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Schwartz, S. (2000). *Abnormal Psychology: a discovery approach*. California: Mayfield Publishing Company.
- Scott, Michael J. dan Stradling, Stephen G. (2001). *Counselling for Post-Traumatic Stress Disorder*. London: Sage Publications.
- Shin, K. E. dan Newman, M. G.(2019). “Self-And Other-Perceptions Of Interpersonal Problems: Effects Of Generalized Anxiety, Social Anxiety, And Depression”. *Anxiety Disord.* 65, pp. 1–10.
- Shirae, Eric B. dan David A. Levy. (2016). *Psikologi Lintas Kultural (Pemikiran Kritis dan Terapan Modern)*. Edisi keempat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Stuart, Gail W. (2006). *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Terjemahan Ramona P. Kapoh dan Egi Komara Yudha. Jakarta: EGC.
- Sunarti, E. (2020). “Paparan Hasil Survey Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi COVID- 19”. Webinar The 14th IPB Strategic Talks COVID-19 Series: Mencegah Krisis Keluarga Indonesia di Masa Pandemi COVID-19.
- Sutuyo, Anwar. (2017). *Bimbingan dan konseling Islam (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Peneliti Satgas Penanggulangan Covid-19 IPK Indonesia. “Gambaran Kondisi Psikologis Siswa di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19”. <<https://ipkindonesia.or.id/media/2020/12/Gambaran-Kondisi-Psikologis-Siswa-di-Masa-Pandemi-15Des2020.pdf>>.
- Wood, W. dan Runger D. (2016). “Psychology of Habit”. *Annu*, 67, pp. 289–314. <<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033417>>.
- Zainuddin, Ahmad Faiz. (2007). *Pengenalan SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)*. Jakarta: Suara Hati.
- Zandifar, A. dan Badrfam R. (2020). “Iranian Mental Health During The COVID-19 Epidemic”. *Asian Asian J. Psychiatr.* 51.
- Zhang, J. dkk. (2020). “Recommended Psychological Crisis Intervention Response to The 2019 Novel Coronavirus Pneumonia Outbreak In China: A Model Of West China Hospital”. *Precision Clinical Medicine*, 3 (1), pp. 3–8.



PENGATURAN JAM BELAJAR

-Muhaemin-

Dasar Pengaturan Jam Belajar

Kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020. Melihat kondisi pandemi yang kian parah, proses pembelajaran tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Hal ini dilakukan demi mengurangi penyebaran dan menekan jumlah korban Covid-19. Pada akhirnya, semua pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah (BDR) yang banyak mengubah proses pembelajaran. Secara umum dan luas, Covid-19 telah mendorong banyak pihak untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia dalam hitungan bulan.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran selama masa pandemi covid-19. Salah satunya mendorong pendidik untuk tidak hanya fokus mengejar target kurikulum, melainkan juga membekali siswa akan kemampuan hidup yang sarat dengan nilai-nilai penguatan karakter. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan inovasi dilakukan guna terjaminnya proses pembelajaran. Bahkan saat ini kita memasuki masa yang disebut *new normal* atau kebiasaan baru. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah mengatur waktu kegiatan belajar dan mengajar di satuan pendidikan.

Dalam menjamin proses pembelajaran, tentu ada pengaturannya. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pembelajaran di masa pandemi sebagaimana uraian berikut.

1. Kebijakan pemerintah pusat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi. Panduan ini disusun dengan tujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani kebiasaan baru.

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di masa pandemi tetap

dilakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini, satuan pendidikan yang ada di daerah zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat. Namun demikian, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap menerapkan sistem pembelajaran dari rumah.

Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Namun, proses pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. Jika terjadi ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan tersebut wajib ditutup kembali.

Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah:

- a. Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B.
- b. Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A, dan SLB.
- c. Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, dan TKLB) dan non formal.

Adapun sekolah dan madrasah berasrama yang ada di daerah zona hijau harus melaksanakan belajar dari rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa *new normal* dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama. Selanjutnya, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau. Tentu kebijakan yang diberlakukan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi.

2. Peraturan Sekjen dan Dirjen Pendis

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan surat edaran (No. 516/2020) terkait pedoman penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Surat edaran tersebut menindaklanjuti keputusan bersama di antara kementerian sebagaimana disebutkan pada poin satu. Tujuan surat edaran ini adalah memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan selama masa pandemi melalui penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran No. 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Isi surat edaran tersebut adalah

- a. Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19.
- b. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Belajar dari Rumah.

Adapun Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.B-1673.1/DJ.I/08/2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 bagi satuan pendidikan madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi keagamaan Islam di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) juga diterbitkan bagi penyelenggara satuan pendidikan madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan Islam, dan perguruan tinggi keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.

Bagi satuan pendidikan madrasah yang berada di zona hijau dan kuning dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah mendapat izin dari kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai persetujuan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat. Sedangkan bagi satuan pendidikan yang berada di daerah zona orange dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah.

Selain itu pembelajaran di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam baik berasrama maupun tidak harus menerapkan sistem pembelajaran yang diatur dalam ketentuan perubahan atas keputusan Bersama Menteri (KBM). Kemudian, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di semua zona hanya mengizinkan aktivitas mahasiswa berada di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring.

3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Penyebaran virus Corona yang meningkat, membuat pemerintah provinsi (pemprov) mengambil tindakan lain, salah satunya menutup sekolah selama dua pekan. Langkah ini diputuskan pemerintah provinsi demi mencegah penyebaran virus Corona pada anak. Pada tingkat provinsi maupun kota, pemerintah setempat telah mengeluarkan surat edaran yang salah satu poinnya adalah keputusan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Edaran Nomor 443.2/3450/Disdik memperpanjang masa belajar di rumah secara daring. Keputusan ini berlaku untuk seluruh institusi pendidikan mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Surat edaran yang dibuat oleh Gubernur Sulsel yakni Nurdin Abdullah merujuk pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan di Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembelajaran Dari Rumah Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19.

Sama halnya dengan dua peraturan sebelumnya, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.

Panduan dan Respons Satuan Pendidikan di Masa Pandemi

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada zona hijau dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan serta menjaga jarak (*physical distancing*) dengan ketentuan-ketentuan berikut.

1. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Teknologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK), Paket C, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Paket B melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan terlebih dahulu.
2. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A dan Sekolah Luar Biasa (SLB) paling cepat 2 (dua) bulan setelah SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, dan Paket B melaksanakan

- pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
3. PAUD formal (Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan TK Luar Biasa) dan non formal paling cepat 2 (dua) bulan setelah SD, MI, Paket A dan SLB melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Kemudian di masa transisi dan kebiasaan baru, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dilaksanakan melalui dua fase berikut.

1. Masa transisi
 - a. Berlangsung selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 - b. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

2. Masa kebiasaan baru

Setelah masa transisi selesai, apabila daerah yang bersangkutan tetap dikategorikan sebagai daerah zona hijau, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

Adapun ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan satuan pendidikan dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi diuraikan sebagaimana berikut.

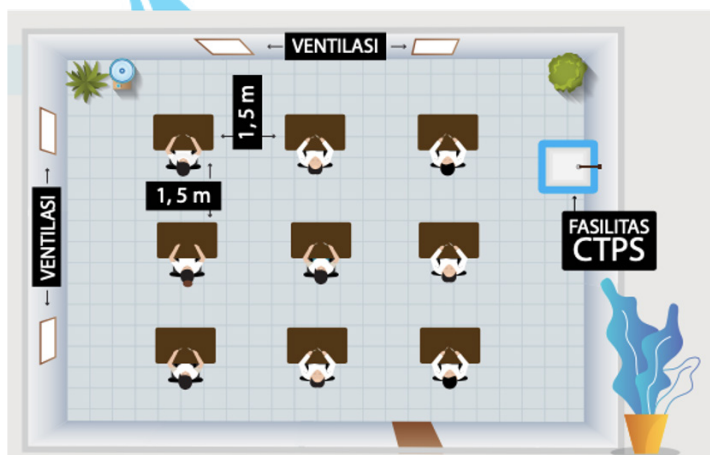
1. Sekolah dan madrasah berasrama

Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan ini.

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
≤100 Peserta didik	Tidak diperbolehkan	Bulan I: 50%
		Bulan II: 100%
>100 Peserta didik		Bulan I: 25%
Bulan II: 50%		
Bulan III: 75%		
Bulan IV: 100%		

Dalam buku saku pembelajaran di masa pandemi yang dikeluarkan oleh SKB 4 Menteri terdapat tim pembelajaran dan tata ruang yang tugasnya:

- a. Membagi kelompok belajar ke dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
- b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) Jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 m dan memberikan tanda jaga jarak di area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, serta koperasi.
 - 2) Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Satgas Covid-19.



Sumber: Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19

2. Perguruan tinggi

Satuan pendidikan perguruan tinggi di semua zona hanya memberikan izin kepada mahasiswa di luar kampus yang mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait kegiatan yang tidak dapat dikerjakan secara daring, seperti penelitian di laboratorium untuk keperluan skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Adapun model perkuliahan untuk semua mata pelajaran yang berbentuk teori dan praktik yang memungkinkan dapat dilakukan di tempat masing-masing tetap dilaksanakan secara daring. Jika terdapat pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu yang tidak dapat

dicapai dengan pembelajaran daring, maka seluruh mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, maka semua yang berkepentingan wajib menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan direktur jenderal terkait.

3. Lembaga kursus

Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan yang berada di zona hijau dilaksanakan dengan ketentuan: a) peserta didik yang boleh melakukan tatap muka di lembaga kursus dan pelatihan minimal berusia 15 tahun; dan b) materi pelatihan teori dan praktik diupayakan agar tetap bisa dilakukan secara daring. Namun, apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

4. Pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama

Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut.

a. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan berikut.

- 1) Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
- 2) Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan.
- 3) Dalam kondisi aman dari Covid-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah daerah setempat.
- 4) Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran

- 1) Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
- 2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:
 - a) Memeriksa kondisi kesehatan peserta didik agar aman dari Covid-19. Apabila ada peserta didik yang kurang sehat, maka petugas harus segera mengambil langkah

- pengamanan sesuai petunjuk fasilitas kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
- b) Memeriksa kondisi asrama. Apabila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
 - c) Menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan.
 - 4) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:
 - a) Memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan.
 - b) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.
 - 5) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:
 - a) Taat pada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa dan diperintahkan masuk.
 - b) Membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak digunakan secara bersama-sama.
 - 6) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Apabila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi Covid-19 agar segera mengambil langkah yang sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan.
- c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan keagamaan:
 - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran secara daring.

- 2) Memberi petunjuk kepada peserta didik yang ada di rumah untuk:
 - a) Menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang telah ditentukan.
 - b) Menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka akan dimulai.
- 3) Berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan. Namun, bila tidak memenuhi akan:
 - a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan
 - b) tetap melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR).
- 4) Jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3).

Metode Mengatur Jam Belajar

Pembelajaran pada tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, bahkan pesantren dan pendidikan keagamaan tetap melangsungkan proses pembelajaran di tengah-tengah pandemi. Namun, pelaku pendidikan harus menyusun dan mengatur strategi agar proses pendidikan berlangsung dengan baik dan lancar. Selain metode pembelajaran daring, ada beberapa bentuk pembelajaran yang telah dilakukan satuan pendidikan sesuai ketentuan SKB bersama Menteri dan kondisi di daerah setempat sebagaimana uraian berikut.

1. *Full daring method*

Untuk menyiasati ketidakkondusifan pembelajaran di masa pandemi, metode ini dianggap cukup efektif untuk mengatasi proses pembelajaran. Dengan merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring dapat mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi.

Metode ini membuat peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem daring. Metode ini juga tepat diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah.

Dengan menggunakan metode ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Sehingga waktu kegiatan belajar mengantar tetap sama dengan kegiatan belajar tatap muka.

2. *Home visit method*

Sebelum pandemi covid, *home visit* lebih akrab dengan konseling atau les privat. Menurut Prayitno, kunjungan rumah atau home visit bisa bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau klien yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian menurut Dewa Ketut Sukardi, *home visit* memerlukan kerja sama yang penuh dari orang tua dan keluarga lain. Namun sejak masa pandemi, metode ini dijadikan salah satu solusi untuk melangsungkan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajarannya mirip dengan *home schooling*. Guru akan mengajar di rumah peserta didik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kasturah berpendapat bahwa *home visit* dilakukan dengan cara pengajar mengunjungi rumah peserta didik dan mengumpulkan maksimal 10 peserta didik yang berdekatan tempat tinggalnya. Metode ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Fullday Daarul Qur'an, Dr. Mahfud Fauzi, M.Pd. Beliau mengungkapkan bahwa metode ini tepat untuk pelajar yang kurang dalam hal teknologi. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik.

Untuk jadwal pembelajaran *home visit* disesuaikan dengan ketentuan satuan pendidikan setempat. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di salah satu sekolah di Kabupaten Batang menjadikan pembelajaran di setiap kelompok *home visit* peserta didik akan mendapatkan mata pelajaran selama 2 kali dalam kurung 1 minggu dengan waktu pembelajaran dimulai pukul 08.00–10.00 WIB. Ada juga pendidik melakukan *home visit* secara berganti sehingga guru harus berpindah dari kelompok *home visit* yang lain dengan mengulang materi yang sama. Bagi pendidik, tantangan model pembelajaran ini adalah banyak menghabiskan waktu dan tenaga.

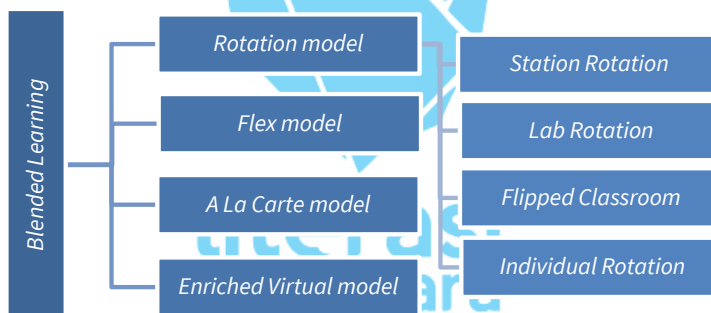
3. *Blended learning*

Jauh sebelum masa pandemi Covid-19, metode *blended learning* telah diterapkan beberapa satuan pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Metode ini sudah mulai dirancang dan diterapkan awal abad ke-21. Namun, seiring dengan merebaknya wabah Covid-19, metode ini dikaji lebih dalam lagi karena dinilai bisa menjadi salah satu metode

pembelajaran yang cocok untuk kegiatan belajar di Indonesia.

Dalam bahasa Inggris, *blended learning* terdiri dari dua kata, yaitu *blend* yang berarti ‘campuran’ dan *learn* yang berarti ‘belajar’. Secara sederhana *blended learning* dapat dimaknai dengan belajar campuran. Definisi ini sesuai dengan pernyataan Ghirardini (2011) bahwa *blended learning/hybrid learning* ialah pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan daring. Metode *blended learning* ini menggunakan dua pendekatan sekaligus. Artinya, menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui *video converence*. Jadi, meskipun peserta didik dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi. Adapun ungkapan lain menurut Yane Henadrita, metode *blended learning* adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Hal senada juga diungkapkan Yagci (2016) bahwa *blended learning* menjadi sangat cocok untuk mendorong kolaboratif dan pembelajaran konstruktif yang sangat ditekankan pada gaya belajar.

Dalam hal ini, terdapat empat model *blended learning* yang umumnya digunakan, meliputi *rotation model*, *flex model*, *a la carte model*, dan *enriched virtual model* (Brooke, 2015).



Gambar 12. *Blended learning Model*

Keterangan:

a. *Rotation model*

Pendekatan ini melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran atau pusat pembelajaran yang berbeda seperti instruksi seluruh kelompok, instruksi kelompok kecil, kegiatan *peer to peer* atau tatap muka, tugas kelompok, dan tugas individual yang dikerjakan di perangkat komputer atau telepon genggam. Menurut Brooke (2015), model rotasi dapat diklasifikasi menjadi empat, yakni *station rotation model*, *lab rotation*, *flipped classroom*, dan *individual rotation*.

b. *Flex model*

Flex model dalam pembelajaran *blended learning* menekankan pada pembelajaran individual. Sebagian besar intruksional pembelajaran dilakukan dengan media *online*. Maka, interaksi antara pendidik dengan peserta didik dilakukan secara tatap muka baik individu maupun kelompok kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tipikal lingkungan pembelajaran dengan *flex model* didasarkan pada belajar secara mandiri. Selain itu, peserta didik juga dapat belajar di luar dengan kelompok kecil dan instruksi langsung secara dinamis pada tempat-tempat terbuka.

c. *Model self-blended*

Pendekatan belajar dengan *self-blended learning* menggunakan media *online* dalam mengirimkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Materi ajar dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran dan mode pembelajaran secara tradisional/konvensional, seperti seminar, pengajaran, dan lab. Konten pembelajaran *self blended learning* bisa dilakukan bervariasi pada lokasi belajar di dalam atau di luar satuan pendidikan sesuai dengan pilihan peserta didik, waktu, dan tempat.

d. *Enriched virtual model*

Pendekatan pembelajaran dengan virtual model dilakukan secara *online* dan tatap muka. Materi pembelajaran dikirimkan oleh pengajar kepada peserta didik secara daring dan dapat pula dilakukan secara *asynchronous learning*. Pendalaman materi dilakukan dengan interaksi secara tatap muka antara kelompok peserta didik. Artinya, ruang belajar didesain secara konvensional.

Dimasa pandemi Covid-19, *blended learning* yang diterapkan secara daring memanfaatkan multimedia, baik sinkron (*synchronous*) dan asinkron (*asynchronous*). Contoh dari *synchronous learning* ialah *message* atau *video conference*. Artinya, pembelajaran berlangsung secara *real-time* dan interaksi peserta didik dan pengajar terjadi secara *live*. Pertanyaan peserta didik dapat dengan segera dijawab oleh pengajar atau biasa disebut pembelajaran sinkron. Dengan pembelajaran sinkron, peserta didik dapat berinteraksi dengan peserta didik lain layaknya pembelajaran *face to face*. Namun dalam pengaturan waktu, pembelajaran sinkron tidak begitu fleksibel karena peserta didik harus *online* mengikuti pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan sehingga apabila mereka tidak mengikuti secara *real-time* mereka akan ketinggalan materi.

Selain itu, ada juga pembelajaran asinkron atau *enriched model*. Waktu pembelajaran ini sangat fleksibel karena pembelajaran asinkron dapat dilakukan ketika peserta didik sedang tidak aktif (*offline*).

Pembelajaran ini dilakukan dengan menyampaikan atau memposting materi melalui web atau forum seperti penggunaan *e-learning*. Dalam pembelajaran ini peserta didik secara mandiri menyelesaikan kegiatan belajar yang telah diberikan. Pembelajaran asinkron cocok digunakan oleh satuan pendidikan yang lebih tinggi, misalnya perguruan ataupun sekolah menengah atas karena peserta didiknya telah mampu mengatur waktu.

4. *Luring Method*

Luring adalah kepanjangan dari “luar jaringan” sebagai pengganti kata *offline*. Kata “luring” merupakan lawan kata dari “daring”. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Menurut Syafni Ermayulis, sistem pembelajaran luring (luar jaringan) ialah pembelajaran dengan menggunakan media, seperti televisi dan radio. Jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring; dan jika siswa melakukan *offline conference* dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, hal itu adalah contoh aktivitas luring.

Pembelajaran luring dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat tepat diterapkan untuk pelajar yang berada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat *new normal*. Peserta didik akan diajar secara bergiliran (*shift model*) agar terhindar dari kerumunan. Model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi. Tujuan metode ini dirancang adalah untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran akan dapat tetap berjalan dan juga dinilai cukup baik bagi satuan pendidikan yang kurang memiliki sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan belajar secara daring.

Penyesuaian Jam Belajar

Melihat kondisi dan panduan pembelajaran tata muka di masa pandemi Covid-19 memang diharuskan untuk belajar dari rumah atau biasa disebut belajar *online*. Meskipun di wilayah zona hijau diperbolehkan pembelajaran tata muka langsung tetapi akan sangat sulit dilakukan, selain karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan juga membutuhkan banyak waktu untuk melakukan semua rutinitas sebelum melakukan pembelajaran serta akan mengurangi jam belajar siswa. Bacow (2020) menyatakan bahwa

tindakan pencegahan luar biasa yang telah diambil sebagian besar institusi pendidikan tinggi untuk membatasi paparan pandemi pada dasarnya akan mengubah kebiasaan di kelas yang selama ini dilakukan. Senada dengan itu, Blumenstyk (2020) berpendapat bahwa krisis global seperti pandemi Covid-19 akan membuat perguruan tinggi dan universitas berhenti membedakan antara program dan program *online*.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui SKB 4 menteri, Direktur Pendidikan, Sesjen Kemendikbud, Pemprov, dan Pemda sering kali tidak dapat diterapkan di sekolah karena kondisi yang tidak memungkinkan. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah merumahkan semua siswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Nomor 36962/MPK.A/HK/2020. Situasi ini menuntut guru untuk mengadakan pembelajaran secara daring. Namun, beberapa sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran daring karena permasalahan jaringan internet, selain beberapa siswa juga belum memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran. Alternatif yang dilakukan sekolah adalah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sehingga secara bergiliran melakukan pembelajaran. Permasalahan yang timbul menyebabkan guru menjelaskan atau mengajarkan kembali kepada siswa secara berulang sesuai jumlah kelompok siswa sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak.

Sistem pembelajaran dengan metode daring dan luring yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 berdampak pada jam belajar siswa. Namun, sejauh ini jam belajar siswa masih seperti biasa, artinya tanpa pengurangan jam belajar. Peserta didik tetap memperoleh jam belajar yang sesuai dengan metode ini karena kita tidak dapat membiarkan peserta didik libur panjang tanpa belajar hingga virus Covid-19 berakhir. Namun metode ini sering kali mendapat kesulitan ketika diterapkan di sekolah. Kesulitan-kesulitan itu dialami oleh peserta didik dan pendidik.

Kesulitan pertama, jaringan internet kurang stabil. Sistem pembelajaran daring dan luring akan berjalan maksimal dan efektif jika jaringan internet cepat. Begipun sebaliknya, jika jaringan internet lambat dan kurang stabil, maka proses pembelajaran daring akan terhambat sehingga waktu belajar siswa akan berkurang dan tidak sesuai lagi. Bahkan di beberapa daerah belum tersedia jangkauan jaringan internet sehingga tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring.

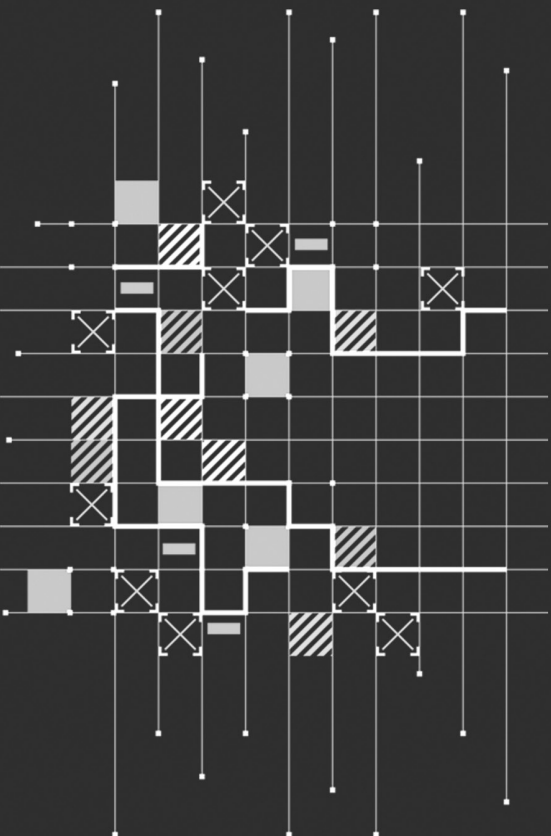
Kesulitan kedua, fasilitas peserta didik seperti telepon genggam atau komputer dan kuota internet. Orang tua yang terkena dampak Covid-19 mengalami kesulitan untuk memenuhi fasilitas tersebut, terutama mereka yang keadaan ekonominya kurang memadai. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bukti dukungan pemerintah terhadap kebijakan pembelajaran daring adalah memberikan bantuan kuota untuk peserta didik dan tenaga pengajar sehingga kuota internet tidak lagi menjadi kendala dalam kegiatan belajar.

Dengan kondisi dan berbagai kendala yang dihadapi satuan pendidikan dalam kegiatan belajar, beberapa sekolah terpaksa melakukan proses pembelajaran tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan menyesuaikan kembali metode pembelajaran yang digunakan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Misalnya peserta didik yang tidak memiliki akses internet dan telepon genggam membuat para guru melakukan proses pembelajaran dengan *visit method* demi berjalanya proses pembelajaran. Jika memang diharuskan tetap menggunakan sistem pembelajaran daring, maka pendidik akan melakukan pengurangan jam belajar yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah menjadi satu jam. Dampaknya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi jika berhadapan dengan mata pelajaran eksakta, seperti Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang membutuhkan waktu lebih banyak karena penurunan rumus yang panjang, terlebih lagi apabila jaringan kurang stabil tentu akan berpengaruh terhadap jam belajar.

Daftar Bacaan

- Bacow, L. 2020. "COVID-19—Moving Classes Online, Other Updates". <<https://www.harvard.edu/covid-19-moving-classes-online-other-updates>>.
- Blumenstyk, G. 2020. "Why Coronavirus Looks like a 'Black Swan' *Moment for Higher Ed*". Chronicle of Higher Education. <<https://www.chronicle.com/article/Why-Coronavirus-Looks-Like-a/248219?cid=cp275>>.
- Brooke, E. 2015. *Learning and Rosetta Stone Four Keys To Success Using Blended Learning*. Lexia Learning. <www.lexialearning.com>.
- Sukardi, Dewa Ketut. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tohirin. 2014. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Yagci, M. 2016. *Blended Learning Experience in a Programming Language Course and the Effect of the Thinking Style of the Students on Success and Motivation*. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology.



KETERBATASAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

-Rikawati Ginting-

Pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan bahkan nyawa manusia menyerang semua orang di seluruh belahan negeri. Setiap aspek kehidupan mengalami perubahan, termasuk di bidang pendidikan. Sekolah, perkuliahan, bahkan pegawai dianjurkan untuk melakukan pekerjaannya dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet. Adapun pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di sekolah dalam rangka membatasi pertemuan tatap muka yang dapat menjadi tempat penyebaran virus corona.

Pembelajaran jarak jauh tidak dipersiapkan oleh sekolah-sekolah yang memang pada dasarnya melakukan pembelajaran tatap muka, berbeda halnya dengan kampus yang selama ini sudah menggunakan sistem pembelajaran *e-learning* seperti yang dilakukan Universitas Terbuka (UT). Pada dasarnya, perangkat pembelajaran yang dipersiapkan guru dan dosen sebagai pendidik adalah perangkat pembelajaran tatap muka. Hal tersebut tentu menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. Bagi guru, mempersiapkan perangkat pembelajaran saja sudah menjadi kesulitan tersendiri, apalagi ditambah dengan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan.

Oleh karena itu, dengan perangkat pembelajaran yang sudah dipersiapkan, diharapkan pendidik dapat menyesuaikan dengan situasi yang terjadi yaitu pembelajaran jarak jauh. Tidak mudah mempersiapkan apalagi menyesuaikan dengan situasi pandemi ini karena peserta didik pun belum siap menghadapi pembelajaran jarak jauh bahkan cenderung kurang serius dan tidak antusias sehingga pembelajaran jarak jauh kurang dapat dilaksanakan sebagaimana dengan yang diinginkan.

Pengertian

Perangkat pembelajaran adalah serangkaian perangkat yang harus dipersiapkan seorang dosen dalam menghadapi pembelajaran di kelas yang meliputi Silabus/GBPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan kontrak perkuliahan. Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan referensi (sumber belajar). Sedangkan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Sementara kontrak perkuliahan adalah tata aturan atau regulasi perkuliahan selama berlangsungnya proses pembelajaran (Unimed, 2019).

Definisi lain perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran. Sementara KBBI (2007: 17) mengartikan perangkat sebagai alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Adapun menurut Zuhdan dkk (2011: 16), perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, di laboratorium, ataupun di luar kelas.

Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran.

Pada pendidikan tinggi, perlengkapan pembelajaran sebagai perlengkapan pembelajaran diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pasal 12. Perencanaan proses pembelajaran disajikan dalam RPS dan disusun oleh dosen baik secara mandiri ataupun berkelompok sesuai dengan keahlian masing-masing. Adapun komponen-komponen yang wajib ada di dalam RPS mencakup (Wicaksono, 2017): 1) identitas program studi dan penyusun RPS; 2) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); 3) kemampuan akhir yang diharapkan (KAD); 4) Bahan Kajian (BK); 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan akhir; 7) pengalaman belajar; 8) kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan 9) referensi yang diacu.

Tujuan

Perangkat pembelajaran dibuat untuk mempermudah peserta didik mendapatkan pemahaman atas materi yang diberikan guru. Dengan kata lain, perangkat pembelajaran digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di era pandemi Covid-19 ini perangkat pembelajaran yang sudah dipersiapkan tidak dapat dieksekusi dengan maksimal sebab pendidik tidak melakukan pertemuan tatap muka dengan peserta didik. Pertemuan daring yang dilakukan tidak memungkinkan untuk menerapkan perangkat pembelajaran yang sudah dipersiapkan untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik.

Saat ini, masih banyak dosen/guru yang kebingungan menghadapi proses pembelajaran di masa pandemi. Oleh karena itu, perangkat pembelajaran bertujuan memberi panduan dan teknik mengajar kepada guru. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan perangkat pembelajaran dan mengevaluasi sejauh mana perangkat pembelajaran yang sudah dirancang dapat diaplikasikan.

Perangkat pembelajaran juga meningkatkan profesionalisme seorang pendidik karena mereka harus mengembangkan serta menggunakan perangkat pembelajarannya semaksimal mungkin dan memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran melalui perangkatnya. Kemudian, perangkat pembelajaran juga akan mempermudah tenaga pendidik dalam proses fasilitasi pembelajaran karena mereka dapat menyampaikan materi tanpa banyak mengingat dan hanya perlu melihat perangkat yang sudah dipersiapkan.

Karakteristik dan Jenisnya

Perangkat pembelajaran yang baik harus memenuhi kriteria di bawah ini.

1. Valid adalah sifat benar menurut bahan bukti, logika berpikir, atau kekuatan hukum. Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika sudah sesuai dengan subjek ilmu dan semua komponen saling berkaitan.
2. Praktis ialah jika perangkat tersebut dapat digunakan dengan mudah bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan keinginan pengembang perangkat. Nilai praktis ini berkaitan dengan mudah atau tidaknya perangkat tersebut diimplementasikan.
3. Efektif merupakan sifat yang mendeskripsikan bahwa mahasiswa akan memberi respons positif terhadap program pembelajaran dan proses belajar berlangsung sesuai dengan harapan pengembang serta hasil belajar mahasiswa (berpikir kritis) meningkat (Nieveen, 2007).

Jenis-jenis perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 akan dijelaskan sebagaimana berikut.

1. Kalender pendidikan

Kalender pendidikan adalah acuan alokasi waktu satu tahun pembelajaran yang digunakan sebagai pembuatan program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Kalender pendidikan ini wajib dimiliki guru setiap awal tahun pembelajaran (umumnya disebut tahun ajaran atau tahun akademik baru). Tahun pembelajaran berisikan data terkait hari efektif pembelajaran dan waktu libur pendidikan maupun libur nasional. Selain itu, dalam kalender pendidikan memuat tanggal penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, hingga penilaian akhir sekolah maupun ujian nasional, kalender ini dijadikan dasar untuk merancang

pembelajaran mulai dari program tahunan, program semester, silabus hingga RPP.

Program tahunan adalah langkah awal menyusun pembelajaran dalam satu tahun. Isi program tahunan adalah alokasi waktu yang digunakan pada setiap mata pelajaran atau tema yang akan dijabarkan secara terperinci dalam program-program lain, seperti program semester, silabus, hingga rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Program tahunan ini dibuat agar guru mengetahui hal-hal yang menjadi cakupan bab dalam mata pelajaran/cakupan sub-sub tema dalam suatu tema yang harus dipelajari selama satu tahun pelajaran. Dengan guru mengetahui rincian dalam program tahunan ini, diharapkan pembelajaran yang diterapkan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap tahunnya.

Adapun program semester yang merupakan penjabaran dari program tahunan. Program ini dijabarkan menjadi program bulanan dan harian. Guru membuat apa saja yang akan diajarkan kepada anak didik dan dievaluasi setiap materi selesai dibahas.

2. Silabus
Silabus merupakan rincian tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen yang ada dalam silabus, antara lain Kompetensi Inti/Standar Kompetensi (KI/SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator/indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar yang digunakan.
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP adalah dokumen wajib yang harus dipegang guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Isi dari RPP adalah prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu atau beberapa kompetensi dasar. Lingkup RPP mencakup satu atau beberapa kompetensi dasar yang terdiri dari satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar.
4. Lembar kerja siswa (LKS) memotivasi siswa lebih kreatif
Guru memberikan lembar kerja siswa agar ia dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan dapat diserap dan diterima dengan baik oleh siswa. LKS dapat berupa buku atau kertas lembaran yang harus dikerjakan siswa.
5. Instrumen penilaian sikap
Instrumen ini berbentuk rekapitulasi penilaian sikap siswa selama proses pembelajaran. Buku ini hampir mirip dengan buku jurnal harian guru,

hanya saja instrumen ini berisi sikap-sikap menonjol yang ditunjukkan siswa pada hari itu. Nantinya instrumen penilaian sikap ini digunakan guru sebagai acuan ketika memberi nilai sikap setiap anak di laporan hasil belajar siswa (rapor) pada kurikulum 2013.

6. Buku materi ajar acuan untuk siswa dan guru
Buku ini adalah penunjang bagi siswa untuk mempelajari hal-hal yang telah diberikan guru. Materi-materi di dalam buku disusun dengan cermat berdasarkan tingkat pendidikan dan jenjang kelas agar mudah dipahami siswa.
7. Buku absensi untuk melihat persentase kehadiran
Buku ini berisi daftar hadir peserta didik dan diisi setiap hari. Nantinya, absensi ini akan direkapitulasi setiap minggu. Tujuannya untuk melihat berapa persen kehadiran masing-masing siswa dan kehadiran dari keseluruhan siswa.
8. Buku jurnal mengajar untuk melihat evaluasi para pendidik
Buku jurnal mengajar sangat diperlukan bagi para guru sebagai panduan mengajar. Dalam hal ini, guru dapat mengevaluasi dirinya sendiri apakah materi yang diberikan mudah dipahami dan apakah tercapai atau apa yang menjadi kekurangan, apakah pada pertemuan berikut materi hari ini bisa diberikan lagi.
9. Bundel portofolio sebagai bahan evaluasi
Portofolio merupakan kumpulan dari berbagai tugas yang diberikan guru kepada siswa. Hasil dari tugas ini kemudian dievaluasi dan hasilnya dibicarakan kepada orang tua sebagai bahan evaluasi. Portofolio dapat dilihat secara fisik yang dinilai secara objektif serta sebagai bahan evaluasi yang positif.
10. Bank soal untuk mengukur kemampuan siswa
Bank soal adalah kumpulan beberapa soal dari berbagai sumber, baik dari tes-tes sebelumnya atau dari buku-buku yang berisi soal-soal pilihan. Pada dasarnya bank soal ini berisi soal-soal berkualitas tinggi yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai soal tes. Bank soal bisa hanya terdiri dari satu mata pelajaran atau kumpulan dari berbagai mata pelajaran.
11. Media pembelajaran untuk mendukung model dan metode pembelajaran yang tepat
Media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat merangsang pikiran dan perasaan siswa sehingga lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Dukungan media dan metode pembelajaran yang tepat akan mendorong tercapainya hasil belajar siswa yang maksimal. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan media dengan cara mengombinasikan beberapa media yang disesuaikan dengan masing-masing mata pelajaran.

12. Daftar laporan penilaian kelas

Hasil dari kegiatan belajar mengajar siswa dikemas dalam bentuk laporan penilaian. Laporan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Daftar laporan ini berisi data siswa serta nilai-nilai yang dicapai apakah sudah memenuhi Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) atau belum. Jika dalam penilaian harian ada siswa yang nilainya masih di bawah KKM, maka guru dapat memberikan kegiatan remedial.

Terdapat perbedaan perangkat pembelajaran di pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi, perangkat pembelajarannya berupa kontrak perkuliahan, tetapi secara kompleks terdiri atas peta konsep, silabus mata kuliah, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Proses Pembelajaran (RPP), Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM), Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), dan lembar penilaian hasil belajar. Semua perangkat tersebut harus dipersiapkan dosen sebelum proses pembelajaran.

Persoalan Keterbatasan Perangkat Pembelajaran

Sebelum masa pandemi, Arum (2017) dalam penelitiannya menemukan keterbatasan yang dihadapi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, antara lain: (1) terdapat guru yang tidak menyusun RPP secara mandiri; guru-guru memerlukan bantuan dari orang lain karena tidak mampu menyusun RPP sesuai materi yang diajarkan; keterbatasan pemahaman guru karena sebelumnya mengajar tanpa menggunakan RPP; (2) guru mengalami kesulitan dalam menentukan alokasi waktu, metode pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Maka, pendidik perlu mendapatkan pelatihan untuk merancang; (3) guru kesulitan menyusun instrumen soal yang berbentuk pilihan ganda; (4) Guru jarang membuat dan memanfaatkan media pembelajaran.

Keterbatasan lain yang dihadapi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, antara lain: (1) kendala waktu dan kesibukan guru; (2) kondisi peserta didik yang beragam; (3) faktor pengalaman mengajar dan masa kerja; (4) guru merasa kesulitan mengoperasikan media pembelajaran; (5) lingkungan dan media pembelajaran yang tersedia di sekolah jumlahnya terbatas; dan (6) kendala ruang atau laboratorium. Tentu keterbatasan-keterbatasan ini menjadi masalah utama dalam menyusun perangkat pembelajaran.

Penelitian lain yang telah dilakukan Soewarno dkk (2016) juga mendapati kendala yang dialami guru dalam memanfaatkan media berbasis komputer untuk mempersiapkan dan menerapkan perangkat pembelajaran adalah usia yang lanjut, biaya media yang mahal yaitu komputer dan infokus, keterbatasan fasilitas yang dimiliki sekolah, jumlah siswa yang terlalu besar

di setiap kelas, tidak pernah diberikan pelatihan penggunaan komputer di sekolah, dan tidak semua guru mampu mengoperasikan komputer. Kendala-kendala tersebut tentu akan menyulitkan guru dan siswa jika pihak sekolah tidak bersinergi memberikan pelatihan dan melengkapi peralatan yang diperlukan.

Keterbatasan perangkat pembelajaran semakin terasa saat bidang pendidikan terdampak pandemi sebab proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dalam hal ini, para guru mengalami kendala saat mempersiapkan metode pembelajaran yang efektif dengan model pembelajaran daring. Pendidik juga harus menyesuaikan metode sesuai jenjang pendidikan siswa agar mereka mampu mengembangkan pengetahuannya. Namun kenyataannya, perangkat pembelajaran yang kompleks pun (terdapat silabus, RPS/RPP, dsb) tidak dapat mewujudkan keinginan pendidik untuk memaksimalkan pemberian pembelajaran yang direncanakan kepada peserta didik. Hal ini diakibatkan karena perhatian dan konsentrasi siswa tidak sepenuhnya fokus terhadap pembelajaran sebab aktivitas pendidikan dilakukan di rumah, bukan di sekolah/kampus.

Sebagai contoh, alat pembelajaran instrumen penilaian sikap tidak sempurna jika dilakukan tanpa tatap muka, sekalipun ada pertemuan secara virtual. Dalam pembelajaran daring, pendidik hanya memberikan tugas dan siswa mengerjakannya. Proses pembelajaran seperti ini tidak dapat memperlihatkan bagaimana sikap peserta didik, apakah rajin, mandiri, inisiatif, bekerja keras, mendengar dengan saksama, dan sikap-sikap lainnya yang harus dinilai dan diberikan contoh jika sikap peserta didik masih belum terbentuk. Contoh lainnya adalah media yang dipersiapkan guru/dosen terkadang tidak tepat jika diaplikasikan untuk pembelajaran daring. Misalnya pada pelajaran *science* yang terkadang membutuhkan bahan-bahan untuk praktik tidak dimiliki peserta didik di rumah dan jika contoh praktik tersebut hanya diberikan dalam bentuk video, maka hasilnya tidak akan sejelas dengan praktik yang dilihat secara langsung di laboratorium atau di di ruang kelas. Konsekuensinya, tujuan praktik dari mata pelajaran tersebut tidak dapat dicapai dengan maksimal.

Jika merujuk pada penjelasan yang diberikan oleh Kemendikbud, metode pembelajaran jarak jauh adalah seperti

“Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan dilakukan dengan secara tatap muka virtual dengan menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, Webex, Teams, dll, menggunakan Learning Management System (LMS), seperti Rumah Belajar, Ruang Guru, Kelas Pintar, Sekolahmu, Zenius.net, dll serta menggunakan media sosial dan web, seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan sebagainya.”

Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring) dilaksanakan dengan menggunakan buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar, menggunakan media televisi nasional atau lokal (Program BDR melalui TVRI, TV Edukasi), dan memanfaatkan radio nasional atau daerah (Program BDR melalui RRI, Suara Edukasi). Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini adalah ketersediaan jaringan internet, terutama daerah yang termasuk kategori 3T yaitu daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia.

Kesulitan memahami pelajaran menjadi keluhan mayoritas siswa pada hampir semua jenis satuan pendidikan, kecuali SD di mana keluhan utama mereka adalah kurangnya kesempatan bertanya pada guru terutama mereka yang tidak dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan secara virtual. Adapun keluhan peserta didik yang lainnya adalah kurang konsentrasi, bosan dan jenuh, jaringan internet yang kurang memadai, tidak dapat bertanya langsung kepada teman-teman, tidak ada yang mendampingi belajar di rumah, tidak memiliki perangkat digital, dan jaringan listrik kurang memadai pun menjadi kesulitan dalam pembelajaran. Selanjutnya dari sisi pengajar, kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan atau melaksanakan perangkat pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat digital, terlebih lagi bagi guru dan dosen senior.

Keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki peserta didik seperti perangkat digital dan sarana internet juga menjadi hambatan dalam menerapkan perangkat pembelajaran yang sudah dipersiapkan tenaga pendidik. Faktor dukungan internal siswa yaitu komitmen, motivasi, dan kedisiplinan pun sangat berpengaruh dalam implementasi perangkat pembelajaran. Demikian pula dukungan lingkungan siswa/mahasiswa yaitu orang tua dan anggota keluarga lain dalam proses pembelajaran menjadi tantangan dalam penerapan perangkat pembelajaran yang menjadi terbatas.

Solusi Keterbatasan Perangkat Pembelajaran

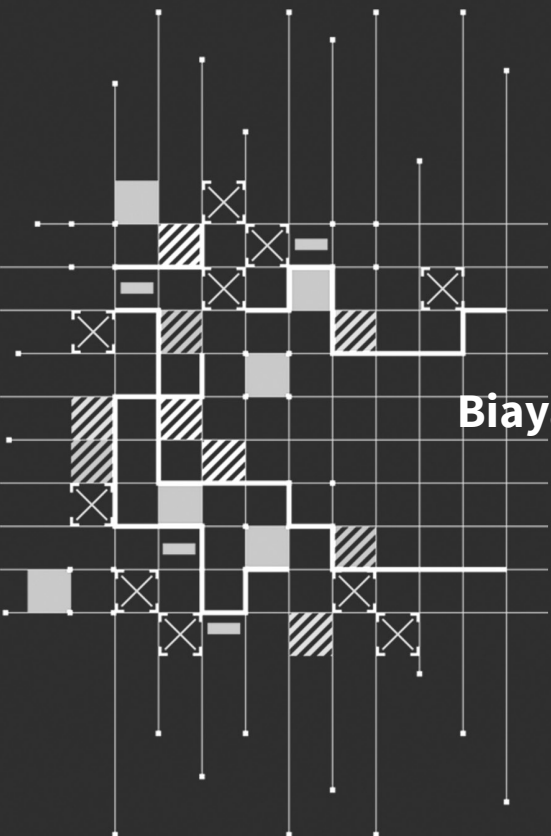
Arum (2017) dalam penelitiannya menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan ketika penyusunan perangkat pembelajaran, antara lain: (1) mencari informasi dari internet; (2) melakukan diskusi dengan teman sejawat; (3) belajar secara mandiri; (4) menyusun RPP untuk beberapa pertemuan sekaligus; (4) menggunakan media pembelajaran yang sederhana seperti media gambar atau benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekitar; dan (5) guru menggunakan media pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah seperti kotak KIT.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan perangkat pembelajaran adalah pendidik memberikan soal-soal kepada peserta

didik dan mereka diminta untuk menjawab soal-soal tersebut di rumah. Peserta didik juga dapat belajar dari radio atau televisi melalui program-program belajar di TV, belajar dari buku teks pelajaran yang sudah disediakan sekolah dan atau dibeli oleh peserta didik, belajar interaktif bersama guru/dosen melalui telepon seluler atau ruang pertemuan virtual, belajar dari sumber belajar digital yang saat ini menjadi minat peserta didik seperti YouTube, Google, dan lainnya, membuat proyek sederhana misalnya riset mini bagi mahasiswa dengan metode survei ke pustakaan atau proyek menanam tanaman dan melihat perkembangan tanaman bagi siswa Biologi dan atau proyek membuat kreativitas dari kertas bekas, dan lain-lain. Selain itu, cara belajar dari rumah juga dapat dilakukan dengan belajar dari aplikasi sumber belajar daring seperti Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius, dan lainnya.

Daftar Bacaan

- Kinasih, Arum Mawar. 2017. “Problematika Guru dalam Penyusunan Perangkat Pembelajaran di SD Muhammadiyah 14 Surakarta”. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Kusumaningrum, Sih. 2015. “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik dengan Model Pembelajaran Pjbl untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains dan Kreativitas Siswa Kelas X”. Tesis pada UNY.
- Rullyanda, Dodi. 2015. “Tujuan, Manfaat, Macam, dan Jenis Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD”. <dodirullyandapgsd.blogspot.com>.
- Soewarno, Hasmiana, Faiza. 2016. “Kendala-Kendala yang Dihadapi Guru dalam Memanfaatkan Media Berbasis Komputer di SD Negeri 10 Banda Aceh”. *Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala*, 2(4), April 2016, pp. 28–39.
- Wicaksono, Galih Wasis, Hari Windu Asrini, dan Muhammad Andi Al-Rizki. 2017. “Desain Perangkat Pembelajaran Pendidikan Tinggi dengan Sistem Lective Gegulang”. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, 6(4).



Biaya Operasional Sekolah dan Perguruan Tinggi

-Arie Ambarwati-

Lembaga pendidikan merupakan entitas organisasi yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan akan pembelajaran dan pembentukan karakter personal serta kemampuan untuk bersosialisasi dengan sesama. Sebagai entitas organisasi, maka lembaga pendidikan mulai dari tingkat pendidikan usia dini (PAUD) sampai dengan perguruan tinggi memerlukan uang (*money*) dalam operasionalnya untuk menggerakkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya (*resources*) yang dimilikinya. Uang merupakan sumber daya yang langka dan terbatas sehingga penggunaannya harus efektif dan efisien agar tujuan pendidikan dan lembaga pendidikan dapat tercapai. Untuk mempelajari dan memahami permasalahan pembiayaan pendidikan dan biaya operasional sekolah dan perguruan tinggi, maka kita akan mengkaji beberapa konsep yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan.

Konsep Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Pembahasan tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari beberapa konsep, antara lain (1) manajemen keuangan pendidikan (*financial education management*), (2) anggaran pendidikan (*education budget*), (3) pendanaan pendidikan (*education funding*), dan (4) pembiayaan pendidikan (*financing education*). Keempat konsep tersebut merupakan satu kesatuan dalam konsep manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan beserta turunannya baik konsep, strategi, taktik, teknis, maupun operasional (Arwildayanto dkk, 2017). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsep berpikir secara umum, global, dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program yang berkaitan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, dan pembiayaan pendidikan dengan sumber daya pendidikan lain yang secara langsung menunjang layanan pendidikan. Sumber daya yang dipandang sebagai instrumen produksi atau proses yang menentukan berlangsung dan tidaknya proses pendidikan adalah faktor uang.

Konsep manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tidak lepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan fungsi manajemen, yaitu perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan (pengeluaran/pencairan, penggunaan, pencatatan), pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang dimiliki oleh institusi (organisasi), termasuk lembaga yang memberikan layanan pendidikan. Inti dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan adalah mengelola uang yang ada, menyiapkan serta melaksanakan instrumen administrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien (Hoy dan Miskel, 2013). Kajian manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tidak hanya memfokuskan pada pengelolaan uang pada lembaga pendidikan. Uang dalam lembaga pendidikan tidak datang dengan sendirinya atau dengan kata lain dana harus digali dan dicari sumbernya yaitu negara dan masyarakat.

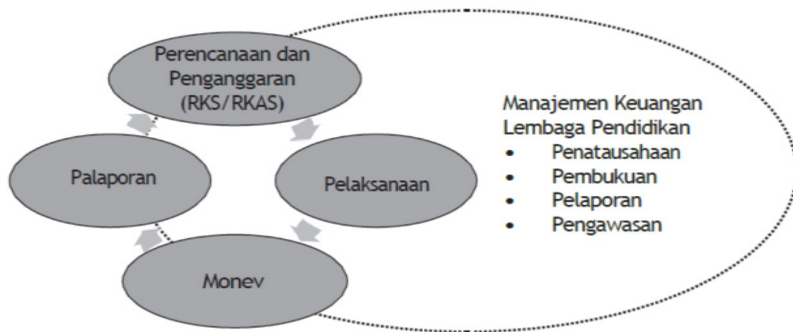
Kehadiran negara dalam kegiatan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 yakni negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam keuangan negara dan keuangan daerah, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan diistilahkan sebagai anggaran pendidikan (*education budget*). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (39) mendefinisikan anggaran pendidikan sebagai alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedisiplinan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan juga diistilahkan sebagai pendanaan pendidikan. Istilah ini tersurat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII Pasal 46 sampai 49 yang secara terperinci diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dana dan Pendanaan Pendidikan tersurat pada Pasal 1 ayat (3) yang didefinisikan sebagai sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk istilah dana pendidikan. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan pendanaan pendidikan sebagai penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Di luar istilah anggaran pendidikan dan pendanaan pendidikan, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan juga identik dengan

istilah pembiayaan pendidikan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pembahasan operasional tentang pembiayaan pendidikan terdapat pada Bab IX Standar Pembiayaan Pasal 62 ayat (1) sampai (5). Pembiayaan pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting keberadaannya untuk diaplikasikan karena secara normatif dan sosiologis entitas sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit sehingga memberikan tanggung jawab bagi masyarakat dan setiap orang tua siswa, di mana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Hal ini dilandasi oleh: 1) adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, 3) meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun, 4) kreatif menggali sumber-sumber pendanaan, dan 4) menempatkan bendahara yang kompeten dan profesional (Martono, 2017). Dari uraian di atas disadari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya (*resource*) yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut juga lebih terasa dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) di tengah hiruk-pikuk otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang menuntut kemampuan lembaga pendidikan untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diperoleh lembaga pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Setiap layanan yang dilakukan lembaga pendidikan tentu memerlukan biaya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 13. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Kegiatan, manajemen keuangan pendidikan, penganggaran, dan pembiayaan pendidikan meliputi upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban (Bakry, 2010). Hal senada juga disampaikan oleh Jack (2015) yang mendefinisikan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan sebagai kegiatan mengatur sumber keuangan pendidikan, mengalokasikan, dan mengandalkan uang pendidikan sedemikian rupa sehingga dicapai maksimalisasi dan efektivitas penggunaan dana atau uang untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi. Lebih operasional, Misbah (2009) menjelaskan uraian kerja dalam kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berupa tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pada lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik gambaran umum bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penggalan sumber daya biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan lembaga pendidikan agar organisasi atau institusi pendidikan berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi.

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Berkaitan dengan kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga, pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa

puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan. Uraian ini sekaligus memperkuat tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan untuk: (1) meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan, (2) menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan, (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan, (4) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan, (5) meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan, (6) mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran, (7) membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dan (8) meningkatkan partisipasi *stakeholders* pendidikan dalam pembiayaan pendidikan (Arwildayanto dkk, 2017).

Aktivitas manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan perlu memerhatikan sejumlah prinsip, antara lain: (1) hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan lembaga pendidikan, (3) keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri jika memang memungkinkan, (4) transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik, dan (5) penguatan partisipasi publik atau masyarakat. Prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hubungan di antara prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan dapat dijelaskan pada gambar 14.

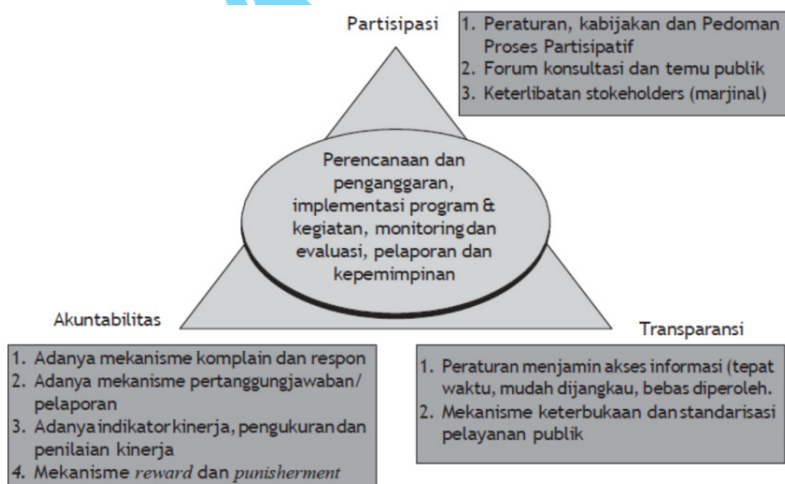
Untuk memahami berbagai prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas, maka penulis menjelaskan beberapa prinsip yang dikutip dari Fattah (2008) sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Transparansi

Prinsip transparan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan. Dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan atau partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program di lembaga pendidikan. Di

samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan (*trust*) timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua *stakeholders* pendidikan dan orang tua peserta didik misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dipajang di papan pengumuman sekolah serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di perguruan tinggi yang dapat di akses secara *online* (Ningrum, 2021). Dengan sistem keuangan yang transparan ini membuat pihak-pihak berkepentingan (seperti orang tua siswa atau mahasiswa dan peserta didik itu sendiri) yang membutuhkan informasi manajemen keuangan pendidikan dapat dengan mudah mengetahui jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan.



Sumber: Diadaptasi dari Kemendiknas-DBE1-USAID from the American People

Gambar 14. Relasi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi (Diadaptasi dari)

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan berarti penggunaan uang lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan akuntabilitas pembiayaan lembaga pendidikan adalah menilai kinerja lembaga pendidikan dan kepuasan

stakeholder-nya terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen penyelenggara pendidikan kepada *stakeholder*-nya atas dana yang dihimpun dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat (Aisyiah dkk, 2020). Dengan akuntabilitas ini, pengelola lembaga pendidikan dapat membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Adapun pihak-pihak yang menuntut terbangunnya akuntabilitas ialah orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Kepada stakeholders pendidikan itulah pengelola pendidikan perlu menyampaikan laporan keuangannya secara periodik.

Terdapat empat pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas manajemen keuangan lembaga pendidikan, yakni (a) adanya transparansi penyelenggara manajemen keuangan lembaga pendidikan dalam menerima sumber pembiayaan pendidikan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola dana lembaga pendidikan tersebut, (b) adanya standar kinerja pengelolaan keuangan di setiap lembaga pendidikan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya antara lain sebagai otorisator, ordonator, dan bendaharawan, (c) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan pelayanan yang cepat, dan (d) regulasi pengelolaan keuangan yang memberikan kepastian hukum maupun tata kelola sebagai rambu-rambu dalam menjalankan berbagai kebijakan publik memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal (Setyawan, 2020). Pelaksana akuntabilitas dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat (yayasan), orang tua siswa (wali murid), dan pemerintah.

Akuntabilitas pembiayaan pendidikan menimbulkan resonansi kepercayaan (*trust*) dari donator dalam derasnya arus politik pendidikan gratis saat ini. Masyarakat sangat sensitif dengan berbagai iuran, kontribusi, maupun pembiayaan lainnya yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Keberhasilan akuntabilitas pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari perspektif: (1) peningkatan kepercayaan (*trust*) dan kepuasan publik (*public satisfaction*) terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan, (2) peningkatan peran serta dan partisipasi aktif publik dalam pembangunan, pengawasan, dan memberikan pertimbangan bagi kemajuan lembaga pendidikan, (3) berkurangnya intensitas kesalahan dan ketidakefektif-efisien penggunaan dana lembaga pendidikan, dan (4) pro aktif dalam menyampaikan laporan pengelolaan dana secara periodik (Mubin, 2018). Dengan indikator

keberhasilan akuntabilitas pembiayaan pendidikan, maka cita-cita mewujudkan generasi Indonesia berkualitas, kompetitif, dan berkarakter dapat dicapai dengan mudah.

3. Efektivitas

Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Suditha (2012) menjelaskan bahwa keefektifan merupakan derajat di mana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Keefektifan itu merupakan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Keefektifan juga dapat menjadi konsep kausal secara esensial di mana ada hubungan maksud-tujuan (*means-to-end relationship*) dan hubungan sebab-akibat (*cause-effect relationship*). Pada intinya terdapat tiga komponen utama yang diperhatikan manajer pendidikan dalam mengukur efektivitas pembiayaan pendidikan, yaitu (a) cakupan pengaruh biaya; (b) kesempatan tindakan yang digunakan untuk mencapai pengaruh pembiayaan ditandai sebagai mode pendidikan; dan (c) mekanisme yang mendasari mengapa pembiayaan tertentu mendorong ke arah pencapaian tujuan.

Efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tentu mempunyai makna tersendiri karena efektivitas tidak hanya berhenti sampai pada pencapaian tujuan pendidikan, melainkan juga secara kualitatif hasil diraih dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri. Treviño, Brown, dan Hartman dalam Ferdi (2013) mendefinisikan bahwa, "*Effectiveness is characterized by qualitative outcomes.*" Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa efektivitas lembaga pendidikan merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan, beradaptasi dengan lingkungan, dan mampu bertahan agar tetap eksis/ hidup. Dengan demikian, organisasi dikatakan efektif jika mampu menciptakan suasana kerja yakni para pekerja tidak hanya melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, tetapi juga membuat suasana agar pekerja lebih bertanggung jawab dan bertindak kreatif demi peningkatan efisiensi dalam mencapai tujuan

Barometer terhadap efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari kualitas program yang dibiayai, ketepatan pembiayaan, kepuasan pembiayaan, keluwesan proses pembiayaan, adaptasi dengan regulasi, dan kebijakan yang memungkinkan penggalan dana yang lebih maksimal, pembiayaan memberikan efek semangat kerja dan motivasi, ketercapaian tujuan yang dibiayai, ketepatan

waktu, dan ketepatan pendayagunaan biaya dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dalam setiap tingkatannya berproses atas dasar tataran *das sollen* dan *das sein* dengan indikator: (a) input yang meliputi karakteristik sumber biaya pendidikan; (b) proses yang meliputi perilaku administratif, bendaharawan dalam mengalokasikan keuangan; (c) *output* berupa hasil yang berbentuk perolehan prestasi belajar, sikap, keadilan, dan persamaan, (d) *outcome* yang meliputi jumlah lulusan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan prestasi belajar yang gemilang dan bereputasi (Imron, 2016).

Efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan satu dimensi tujuan manajemen yang berfokus pada hasil, sasaran, dan target yang diharapkan. Lembaga pendidikan yang efektif adalah yang menetapkan keberhasilan pada input, proses, *output*, dan *outcome* yang ditandai dengan berkualitaskannya indikator-indikator tersebut. Uraian di atas memberikan kesan kajian bahwa efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan harus dilihat secara sistematis mulai dari input hingga *outcome*, indikator tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif.

1. Efisiensi

Konsep efisiensi merupakan gambaran hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Golany, B. dan Roll Y. (dalam Hoy dan Miskel, 2013) menjelaskan bahwa efisiensi adalah *characterized by quantitative outputs*. Namun tidak jarang, efisiensi juga terkait dengan kualitas layanan dan keluaran dari aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Efisiensi pendidikan memiliki hubungan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Begitu pula efisiensi dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tentu berkaitan dengan kuantitas hasil kegiatan yang dibiayai sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan. Sementara Idris (2010) menjelaskan bahwa efisien manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan mengacu pada perbandingan antara input/sumber daya dengan output.

Maka, kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Fattah (2008) juga memahami efisiensi pembiayaan pendidikan berkaitan dengan pendayagunaan sumber pembiayaan pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimal penyelenggaraan layanan pendidikan yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan saat mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa dan perluasan layanan pendidikan bagi

semua orang (*education for all*). Dengan demikian, efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan merupakan perbandingan antara *input* dengan *output*, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi pendidikan juga dapat diketahui dengan menggunakan metode analisis keefektifan biaya (*cost effectiveness analysis*) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar (Prapliyati dan Margunani, 2019). Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi internal dan eksternal.

Efisiensi internal dapat dinilai melalui sistem pendidikan yang menghasilkan *output* dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input tertentu dapat memaksimalkan *output* yang diharapkan. *Output* sering kali diukur dengan indikator-indikator seperti angka kohort yaitu proporsi siswa yang dapat bertahan hingga akhir tingkatan (level) pendidikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah

a. Rata-rata lama belajar (*average study time*)

Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang lulusan menggunakan waktu belajarnya dengan statistik kohort (kelompok belajar). Perhitungannya adalah jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu kohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam kohort tersebut.

b. Rasio *input-output* (*input-output ratio*/IOR)

Cara ini dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta didik yang lulus dengan peserta didik yang masuk awal dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya, membandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran (Arwildayanto dkk, 2017).

Keberhasilan efisiensi internal atau *cost effectiveness* sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu 1) faktor institusional; dan 2) faktor manajerial. Sedangkan *cost benefit* dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi (pembiayaan) pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan peserta didik.

Sementara efisiensi eksternal pembiayaan pendidikan sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*. Efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari proses dan hasil pendidikan. Pada tingkat makro, individu yang berpendidikan tinggi cenderung lebih baik dalam memperoleh pendapatan lebih tinggi dan kesehatan

yang baik. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran pendidikan kepada seluruh sub-sub sektor pendidikan (Kemendikbud maupun kementerian yang melaksanakan pendidikan kedinasan). Efisiensi eksternal juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Analisis efisiensi eksternal pada bidang pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, yakni

- a. Keuntungan perorangan (*private rate of return*) ialah perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya pendidikan dari individu yang bersangkutan.
- b. Keuntungan masyarakat (*social rate of return*) adalah perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya pendidikan masyarakat (Jack, 2015).

Efisiensi eksternal juga berkaitan dengan investasi (pembiayaan) pendidikan, maka diharapkan: (1) pembiayaan (investasi) pendidikan hendaknya menghasilkan nilai ekonomi di luar kemampuan intrinsik peserta didik, dan (2) nilai guna dari kemampuan sebagai upaya meningkatkan efisiensi eksternal pembiayaan pendidikan. Adapun menurut Fattah (2008) perlu diarahkan pada: a) pemerataan kesempatan memasuki sekolah (*equality of access*), b) pemerataan bertahan di sekolah (*equality of survival*), c) pemerataan kesempatan memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equality of output*), dan d) pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat (*equality of outcome*). Secara konseptual efisiensi pembiayaan pendidikan meliputi *cost-effectiveness* (efisiensi internal serta *cost benefit* (efisiensi eksternal).

Biaya Operasional Sekolah

Pendidikan merupakan proses dalam rangka meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna pendidikan berimplikasi terhadap pentingnya pendidikan bagi semua orang (*education for all*). Maka, untuk mendapatkan hasil pendidikan yang memadai bagi semua orang secara berkualitas, dibutuhkan pengeluaran atau yang disebut dengan investasi atau biaya pendidikan. Mulyono (2008) dalam Pasaribu (2017) mengemukakan bahwa dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai tidak akan berjalan sesuai harapan. Hal senada juga dijelaskan oleh Setiowati (2016) bahwa hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan

biaya yang memadai. Untuk itu dalam pengelolaan pendidikan instrumen, biaya menjadi urat nadi organisasi/institusi/lembaga pendidikan yang perlu dikelola dengan baik dan profesional. Para pengelola tentu diharapkan memahami pembiayaan pendidikan secara menyeluruh (*holistic*).

Al-Kadri (2011) dalam Aulia (2012) pelaksanaan, dan pembuatan kebijakan pendidikan di wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di lima sekolah menengah dan kejuruan yang ada di Surabaya, dengan sumber data dinas pendidikan kota Surabaya, pengamat pendidikan, kepala sekolah dan guru di sekolah menengah dan kejuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1 menjelaskan biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input biaya pendidikan identik dengan semua pengorbanan yang diperlukan untuk proses penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang sedang berlaku menjadi tanggung jawab pemerintah (*public cost*), masyarakat, dan orang tua peserta didik (*private cost*). *Public cost* adalah biaya pendidikan dari pemerintah yang secara umum bersumber dari pajak, pinjaman, dan penerimaan lainnya (hibah) baik dalam maupun luar negeri. Sementara *private cost* adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik dan masyarakat, seperti biaya sekolah, pembelian buku, dan peralatan sekolah lainnya.

Berkaitan dengan konsep pembiayaan pendidikan dasar, terdapat dua hal penting yang perlu dianalisis, yakni biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Pembiayaan pendidikan dasar identik dengan pendidikan tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas/kejuruan. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan *aggregate* biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Sementara biaya satuan per siswa adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan (Imron, 2016).

Jika dikaitkan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka peserta didik di tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Biaya tersebut langsung dikelola oleh sekolah dan yang termasuk di dalamnya adalah biaya pendaftaran, iuran bulanan, biaya ujian, bahan dan biaya praktik. Termasuk pula biaya investasi seperti pengadaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu guru. Selain itu, penerimaan dana BOS juga diharapkan mampu meningkatkan proses pembelajaran.

Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Regina (2015) bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis yakni pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Panduan tersebut menjelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal dari re-alokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya bagi siswa lain. Dengan dan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu hingga tamat sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut juga telah di atur dalam Permendiknas No. 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2013 dan Panduan Dana BOS di Era Pandemi Covid-19 (Eksantoso, 2020).

Tujuan lain diadakannya program BOS agar seluruh siswa SD dan SMP negeri bebas dari pungutan biaya operasional sekolah, terutama mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Adapun bagi siswa sekolah swasta, dana BOS diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya operasional sekolah. Pembebasan ataupun peringanan biaya operasional sekolah tentunya mutlak perlu dinikmati oleh para pelajar tanpa hambatan prosedural dan kejahatan korupsi. Setiap tahun, pemerintah berusaha memberikan dana BOS tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta yang dianggap tidak bisa memenuhi biaya operasionalnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Kemudian, untuk siswa SMA/SMK biaya operasional sekolah berasal dari anggaran pemerintah provinsi sebagaimana adanya pengalihan wewenang dari pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun problematika yang terjadi saat ini terkait dengan penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS mulai dari pengalokasian dana yang tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, tetapi pada ketersediaan anggaran, penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri, pelaporan keuangan yang penuh manipulasi, dan pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Maka, persoalan

ini adalah tantangan bagi para *stakeholder* sekolah untuk selalu mengawasi dan mengawal pemanfaatan dan BOS agar tepat sasaran dan berguna dalam menuntaskan program pendidikan dasar sembilan tahun serta memperkecil angka buta aksara di Indonesia.

Biaya Operasional Perguruan Tinggi

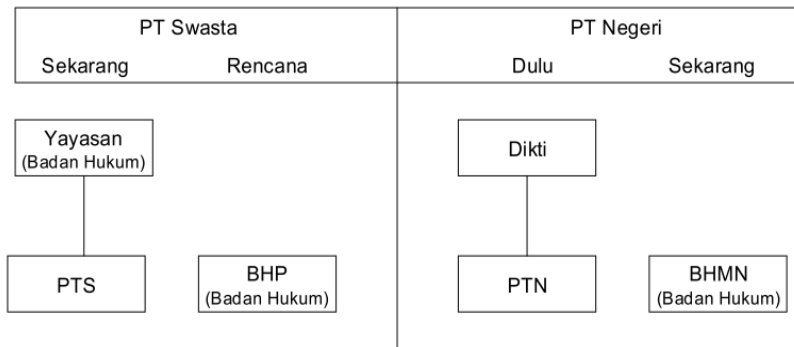
Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan pada dasarnya memiliki arti berbeda. Pendidikan tinggi adalah jalur pendidikan sekolah yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademis dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Kedua jenis pendidikan ini masing-masing dibagi menjadi: (1) Pendidikan Akademik (Sarjana dan Pascasarjana), dan (2) Pendidikan Profesional (Diploma I–IV). Sementara perguruan tinggi fokus menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi adalah upaya untuk mendidik manusia agar memperoleh pengetahuan yang luas. Sedangkan penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Adapun pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Perguruan tinggi ini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggara perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggara pendidikan tinggi. Jadi ada semacam penjenjangan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yaitu jenjang pertama adalah universitas dan jenjang kedua adalah yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi itu sendiri sudah merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang bersifat nirlaba atau dengan kata lain sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang didirikan oleh lembaga penyelenggara perguruan tinggi. Motivasi ini didorong oleh penilaian bahwa dengan adanya dua jenjang penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, terdapat birokrasi yang tinggi sehingga menghambat kelincahan

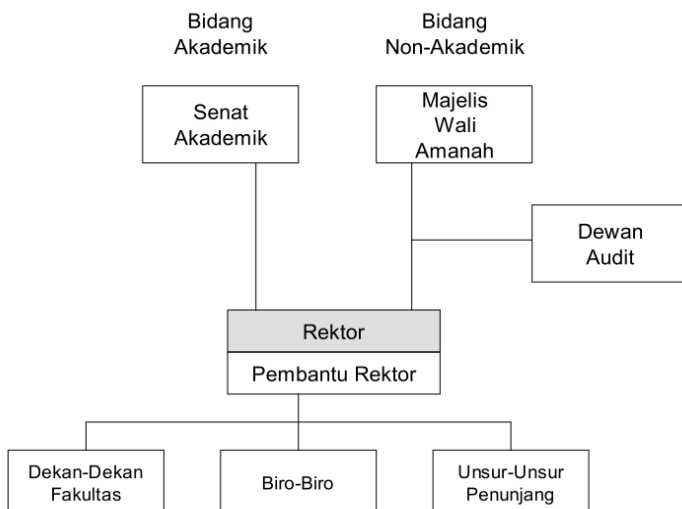
gerak perguruan tinggi swasta. Dengan dijadikannya perguruan tinggi swasta menjadi badan hukum sendiri, maka sebagai badan hukum dapat bertindak lebih mandiri dan otonom dan tidak lagi memerlukan badan hukum lain sebagai pengikutnya. Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti subjek hukum orang. Adanya perbedaan badan penyelenggara perguruan tinggi memungkinkan terbentuknya dua macam perguruan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang akan berdampak pula pada pembiayaan pendidikan yang dilakukan.



Sumber: Djokopranoto dan Indrajit, 2004

Gambar 15. Penyelenggara Perguruan Tinggi

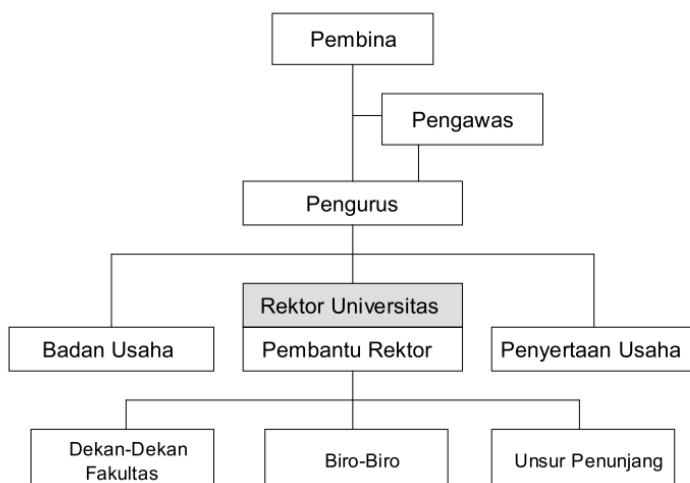
Peraturan tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. Dalam peraturan ini, perguruan tinggi milik negara adalah badan hukum milik negara yang bersifat nirlaba. Artinya, perguruan tinggi milik negara adalah badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana layaknya badan hukum. Walaupun bersifat nirlaba, perguruan tinggi milik negara tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama perguruan tinggi. Sebagai langkah pertama, perguruan tinggi yang telah diubah statusnya menjadi perguruan tinggi BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor, dan tentunya akan diikuti PTN lainnya.



Sumber: Djokopranoto dan Indrajit, 2004

Gambar 16. Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara

Berdasarkan hasil penelitian penulis, hampir semua penyelenggara PTS masih berbentuk yayasan sebelum dikeluarkannya undang-undang yayasan yang baru. Yayasan merupakan bentuk badan hukum yang paling populer digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial karena cukup sederhana dan belum ada peraturan yang ketat untuk mengaturnya. Kemudian pada 2001, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai diberlakukan sejak 6 Agustus 2002. Dengan adanya undang-undang baru tersebut, ditegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum dan sebelum dikeluarkannya undang-undang itu, tidak semua yayasan berbentuk badan hukum. Model penyelenggaraan perguruan tinggi oleh yayasan ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: Djokopranoto dan Indrajit, 2004

Gambar 17. Perguruan Tinggi di bawah Yayasan

Perbedaan badan penyelenggara perguruan tinggi akan secara langsung berdampak pada model, prosedur, dan proses pembiayaannya. Pembiayaan untuk pendidikan tinggi lebih kompleks dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini karena pendidikan tinggi memiliki sub sistem yang lebih banyak. Pendidikan tinggi memiliki bidang dan birokrasi yang lebih banyak. Salah satu bidang pembiayaan pada pendidikan tinggi adalah pembiayaan bidang kemahasiswaan yang juga melibatkan mahasiswa karena program kemahasiswaan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh mahasiswa yang dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh administrator program studi, fakultas, dan universitas. Oleh karena itu, mahasiswa harus memahami jumlah dan sumber keuangan untuk program kemahasiswaan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Jones (1985) dalam Ningrum (2021), salah satu hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Setiap perguruan tinggi perlu menyusun penganggaran (*budgeting*) Rencana Anggaran Perbelanjaan Biaya Perguruan Tinggi (RAPBPT) untuk memutuskan strategi dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi karena *budgeting* merupakan rencana terperinci untuk pemerolehan dan pemakaian sumber daya keuangan dan lain-lain selama periode tertentu. RAPBPT tersebut harus selaras dengan visi misi perguruan tinggi tersebut yang telah dituangkan dalam statuta, dicanangkan pada Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah dan tujuan akan dibawa ke mana perguruan tinggi tersebut.

Biaya Operasional Pendidikan di Era Pandemi Covid-19

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan (biaya operasional) di sekolah pada masa pandemi Covid-19 sangat berat. Di mana seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring yang membutuhkan sarana dan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi dengan satuan pembelajaran. Di sisi lain, dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutuskan rantai penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya mata pencaharian dari sebagian orang tua murid. Biaya pulsa internet dan kebutuhan akan telepon pintar sebagai media pembelajaran sangat menyusahakan bagi orang tua murid dengan status ekonomi rendah.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada level pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan perguruan tinggi juga mengalami problematika yang sama dalam pembiayaan operasional pendidikan. Pandemi Covid-19 menyebabkan model pembelajaran tatap muka menjadi sistem daring sampai pandemi dinyatakan aman. Bagi perguruan tinggi yang bersifat badan hukum milik negara memang tidak banyak mengalami kesulitan karena kesiapan dan dukungan keuangan yang luas. Masalah pembelajaran daring akan memberatkan perguruan tinggi yang belum didukung oleh kemampuan keuangan dari badan penyelenggara perguruan tingginya (yayasan) karena biaya operasional tetap berjalan seperti sebelum pandemi.

Biaya operasional sekolah dan perguruan tinggi mempunyai kesamaan yang disebut dengan biaya tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan persoalan pendanaan pembiayaan pendidikan telah mengalami perubahan yang mendasar setelah melihat ada berbagai model pembiayaan, misalnya tanggung jawab dan sumber biaya pendidikan ditanggung secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Ini adalah tugas kita untuk senantiasa menemukan cara terbaik agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Indonesia dengan selalu menemukan model, cara, dan metode biaya operasional pendidikan yang dapat menjawab semua tantangan baik di masa pandemi atau jika terdampak oleh bencana alam dan lain sebagainya.

Daftar Bacaan

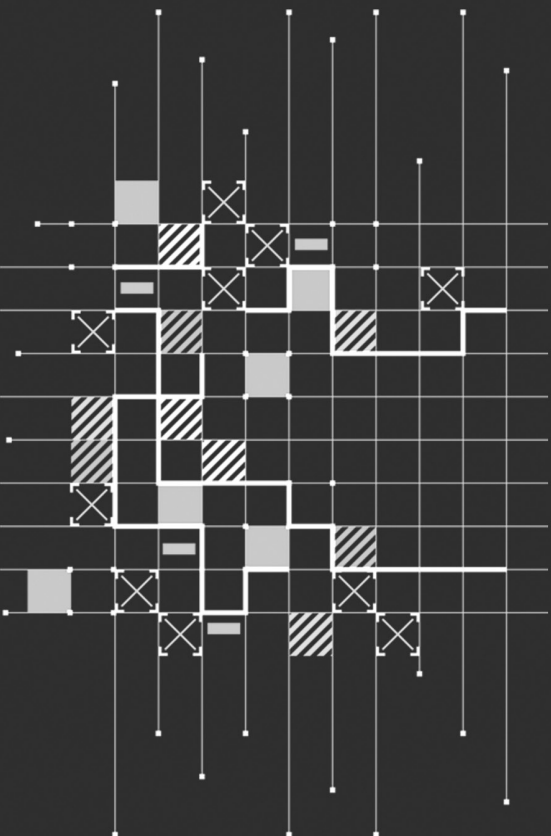
- Aisyiah, S., Marsidin, S., dan Sabandi, A. (2020). “Kebijakan Standar Pembiayaan di Sekolah Dasar”. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 153–157.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., dan Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Aulia, S. (2012). “Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)”. *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 204–216.
- Bakry, A. (2010). “Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik”. *Jurnal Medtek*, 2(1).
- Djokopranoto, R., & Indrajit, R. E. (2004). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: Andi.
- Eksantoso, S. (2020). “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)”. *Jurnal Ilmiah Adikara Cendekia*, 1(1), 1–11.
- Fattah, N. (2008). “Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris”. *Jurnal Pendidikan Dasar*, (9).
- Hoy, W. K., dan Miskel, C. G. (2013). *Educational Administration, Theory, Research and Practice*. Edisi Kesembilan. New York: McGraw Hill Inc.
- Idris, R. (2010). “APBN Pendidikan dan Mahalnya Biaya Pendidikan”. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 13(1), 92–110.
- Imron, M. J. (2016). “Manajemen Pembiayaan Sekolah”. *Jurnal AL - IBRAH*, 1(1), 69–93.
- Jack, H. (2015). “Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah: Kajian di Sekolah Kota Banda Aceh”. *Jurnal Pencerahan*, 9(2), 83–93.
- Martono, N. (2017). *Sekolah Publik vs Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obar Indonesia.
- Misbah, M. (2009). “Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14(1), 1–15.
- Mubin, N. (2018). “Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah”. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2 SE-Articles), 80–92.
- Ningrum, T. A. (2021). “Transparansi Pembiayaan Program Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi”. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 9(2), 65–70.
- Pasaribu, A. (2017). “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah”. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3, 12–34.

- Prapliyati, P., & Margunani, M. (2019). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Sekolah terhadap Produktivitas Sekolah”. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 1030–1044.
- Regina, B. (2015). “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 61–66.
- Setiowati, N. E. (2016). “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiiq Cirebon”. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 167–189.
- Setyawan, S. (2020). “Manajemen Pengelolaan Anggaran Keuangan Dan Aset SD Muhammadiyah 08 Dan SMP 06 Dau”. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 1(1), 18–31.
- Suditha, I. W. (2012). “Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada SMP Saraswati 1 Tabanan”. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, II(2), 1–12.
- WP, F. (2013). “Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Zulfa, U. (2012). “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy”. *Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 239–254.



literasi
nusantara





TENTANG PENULIS



Suprapno, lahir di Sungai Benteng pada 2 Desember 1991 sebagai putra kelima dari Bpk H. Supino dan Ibu Hj. Marsih. Saat ini, penulis mengajar di beberapa lembaga di Jambi, yaitu di Kampus STAI Ma'arif Sarolangun, Kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan Pondok Pesantren Tahfiz An-Nur Singkut. Penulis telah menikahi seorang putri dari Bpk Samija, S.Pd dan Ibu Iti Sawati yang bernama Ide Ayu Nursholeh, S.Pd serta telah dikaruni seorang anak sholeh yang

bernama Sayyid Muhammad Yusuf Al-Mumtaz.

Jenjang pendidikan yang telah dilalui: (1) SDN 57 Singkut 1, Kab. Sarolangun, 2004; (2) Madrasah Tsanawiyah Negeri Singkut Kab. Sarolangun, 2007; (3) MAN MODEL Jambi, 2010; (4) S-1 Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014 (5) dan S-2 Prodi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Penulis pernah nyantri di: Ponpes Ar-Rohmah Singkut Sarolangun Jambi (2004—2007) dan Ponpes Darul Falah Batu-Malang (2014—2016). Pernah pula menjalani hidup di Asrama MAK Model Jambi (2007—2010) dan di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2010—2014). Saat di bangku sekolah, penulis aktif menjadi: pengurus OSIS MAN MODEL Jambi dari 2007 hingga 2009; pengurus di anggota kepramukaan MAN Model Jambi (2008—2010); anggota PMR MAN MODEL Jambi (2007—2008); pengurus LMJ Jurusan Pendidikan Agama Islam dari 2011 hingga 2013; pengurus Ma'had Al-Jambi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2011—2013); pembimbing kepengurusan di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2013—2014); dan aktif membantu para Asatidz/ah di Ma'had Darul Falah Al-Islami kota Batu pada 2014.

Penulis juga pernah mengabdikan diri menjadi: Mu'allim Al-Qur'an di Ma'had Aly Sunan Ampel UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015—2016); wakil pengasuh Ponpes Darul Falah Putra Batu-Malang (2015—2016); guru di MAN MODEL JAMBI (2017—2019); pengajar di Universitas Batanghari (2018—sekarang), di STAI Ma'arif Sarolangun (2016—sekarang), di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2016—sekarang), dan di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019—sekarang); kepala MA An-Nur Singkut.

Beberapa karya Ilmiah yang pernah penulis terbitkan adalah “Strategi Ustadz dalam Memotivasi Berbahasa Arab” (Jurnal Studi Pendekatan Islam, 2017), “Kecerdasan Spiritual” (Jurnal Studi Pendekatan Islam, 2017), “Implementasi Budaya Religius” (Jurnal Studi Pendekatan Islam, 2018), “Menangkal Konflik Antar Umat Beragama Melalui Pendekatan Sosiologis” (Jurnal Tarbawi, 2018), “Budaya Religius Sebagai Sarana Kecerdasan Spiritual” (Penerbit Litnus, 2019), “Implementasi Kurikulum Pesantren dalam Meningkatkan Kompetensi Santri di Pondok Pesantren Darul Al-Falah Batu Malang” (Jurnal Al-Hasani, 2020), dan “Filsafat Pendidikan Islam (Kajian Tokoh-Tokoh Pemikiran Islam)” (Penerbit Litnus, 2020).

Penulis dapat dihubungi melalui surel: Suprapno91@yahoo.co.id dan nomor telepon: 085269302975



Fadqur adalah seorang laboran di Unit Laboratorium Bahasa dan Komputer STIKES Widyagama Husada. Selain mengajar mata kuliah *English for Specific Purposes* di program sarjana Keperawatan dan Kesehatan Lingkungan, ia juga aktif mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme, seperti webinar, *workshop*, dan *conferences*. Penulis dapat dihubungi melalui surel fadqur@widyagamahusada.ac.id



Totok Haryanto, S.E., M.M. berasal dari Surakarta yang lahir pada 5 Januari 1980. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Saat ini, penulis menjabat sebagai dosen tetap di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berbagai jabatan di sana pernah penulis tempati, antara lain sebagai Anggota Pengelola Kantor Urusan Dalam Negeri, Kepala Bidang Publikasi di Biro Publikasi dan Admisi, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang UMP Press dan Repository. Saat ini penulis juga tercatat sebagai anggota Bidang Halal Tourism di MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) Banyumas dan juga sebagai Asesor LSP UMP di bawah BNSP serta fasilitator dan *business consultant*.

Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga aktif diberbagai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama beberapa *stakeholder* terkait. Pengalaman profesionalnya adalah sebagai *manager* hingga level *vice general manager* di beberapa perusahaan.

Tua itu pasti akan tetapi usia muda itu harus berkarya



Moh. Nur Hidayatullah, M.Pd.I, dilahirkan di Surabaya pada 13 Januari 1989 dan merupakan putra ketiga dari Bapak Dr. H. Moh. Zaini Dahlan, M.Pd.I dan Hj. Hayinah M.Pd.I. Pekerjaannya saat ini adalah dosen tetap di STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo.

Pengalaman pendidikan yang telah ditempuh adalah: SDN 8 Mimbaan (2001), MTsN Situbondo tahun (2004), MAN 2 Situbondo (2007), S-1 IAINurulJadid Probolinggo (2011), S-2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember (2014).

Kariernya di dunia pendidikan diawali dengan menjadi guru tingkat MTsN di Situbondo pada 2012. Kemudian saat ini menjadi dosen luar biasa di UNARS Situbondo mulai 2014 dan dosen tetap di STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo mulai 2015.

Penulis juga telah menulis beberapa karya, antara lain *Menjadi Kepala Sekolah Ideal, Efektif, dan Efisien* (2019) dan *Strategi Guru dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Prestasi Belajar* (2019).



Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd. lahir di Ujung Pandang pada 6 September 1985. Ia merupakan alumnus sarjana Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makasar (2007); alumnus pascasarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Ekonomi (2009); dan pada 2020, memperoleh gelar doktor bidang ilmu pendidikan ekonomi di universitas yang sama.

Ia merupakan penulis buku dan artikel pada berbagai jurnal nasional maupun internasional. Saat ini, penulis adalah dosen tetap Program Studi

Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar periode 2020—2024.



Agung Wijaksono, lahir di Situbondo, 04 November 1990. Pada 2009, ia menamatkan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian melanjutkan S-1 Pendidikan Ekonomi di STKIP Situbondo, tetapi di tengah-tengah perkuliahan-nya harus terputus karena masalah ekonomi. Namun setelahnya, ia berhasil mendapatkan beasiswa S-1 Pendidikan Bahasa Arab (PBA) di IAI Ibrahimy Situbondo dan lulus pada 2017. Pada tahun tersebut, penulis juga mendapatkan beasiswa untuk jenjang S-2 Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Program Kemenag Pusat di UIN Malang dan lulus pada 2019.

Saat ini, penulis beraktivitas sebagai dosen di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAINH Kapongan Situbondo dan pendiri sekaligus wakil pengasuh Pondok Pesantren Al fatih As Syafii Prajekan Bondowoso, Jawa Timur.

Karya ilmiah yang pernah ia terbitkan adalah *Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Aplikasi Android* (2020) dan *Meningkatkan Kekayaan Mufrodlat Siswa Melalui Metode Hypnoteaching* (2020).



Dr. Titin Nurhidayati, S.Ag., M.Pd. lahir di Lamongan pada 20 Agustus 1977. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah (INAI FAS) Kencong, Jember. Pendidikan terakhirnya diselesaikan di strata 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada 2019. Penulis dapat dihubungi di nomor telepon: 081553639549 dan juga 085210001773.

Karya tulis yang telah dihasilkan dalam 10 tahun terakhir adalah: 1) “Kehidupan Keagamaan Kaum Santri Waria (Studi Kasus di Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis Notoyudan Yogyakarta)” (*Jurnal Falasifa* Vol. 1 No. 1, Maret 2010 ISSN: 2085—3815; 2) “Meretas Pola Hubungan Orang Tua

dan Anak dalam Membentuk & Mengembangkan Karakter Anak” (*Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 2 No. 2, Agustus 2010 ISSN 2085—8515); 3) “Proses Penyebaran Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Masyarakat Jawa” (*Jurnal Falasifa* Vol. 1 No. 2 September 2010 ISSN: 2085—3815); 4) “Pergeseran Nilai Jilbab: Fenomena Bentuk dan Model Jilbab Muslimah di Jember” (*Jurnal Fenomena STAIN Jember* Vol. 9 No. 2, Oktober 2010, ISSN: 1412—5420); 5) “Membangun Karakter Anak Melalui Pendidikan Nilai” (*Jurnal al-Adalah STAIN Jember* Vol. 13 No. 2 Desember 2010 ISSN 1410—7406); 6) “Meretas Pola Hubungan Orang Tua dan Anak”, (*Tabloid Kemenag Jember Fathonah* edisi 12 2010); 7) “Bagaimana Emosi Mempengaruhi Penyesuaian Pribadi dan Sosial Anak”. (*Tabloid Kemenag Jember Fathonah* edisi 15/Th. II/2010); 8) “Pengembangan Karakter Anak Didik Melalui Pendekatan Kasih Sayang”, (*Jurnal “Academia”* Vo. 6, No. 1, Maret 2011 ISSN: 1907—1078); 9) “Implementasi Teori Belajar Gestalt pada Proses Pembelajaran” (*Jurnal Falasifa* Vol. 1 No. 1, Maret 2011 ISSN: 2085—3815); 10) “Pendekatan Kasih Sayang: Solusi Pengembangan Karakter Terpuji dan Akhlak Mulia dalam Diri Anak Didik” (*Jurnal Falasifa* Vol. 2 No. 2, September 2011 ISSN: 2085—3815); 11) “Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak” (*Jurnal Ta'allum* Vol. 21 No. 02, November 2011 ISSN: 1410-4889); 12) “Prinsip Kualitas dalam Pendidikan: Solusi Peningkatan Mutu Terpadu Sekolah” (*Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 2 No. 2, Februari 2012, ISSN 2085-8515); 13) “Implementasi Teori Belajar Ivan Petrovich Pavlov (Classical Conditioning) dalam Pendidikan” (*Jurnal Falasifa* Vol. 3 No. 1 Maret 2012 ISSN: 2085-3815); 14) “Urgensi Lingkungan Pendidikan Islam dalam Pembentukan Moral Remaja” (*Jurnal Episteme* Vol. 7 No. 1, Juni 2012 ISSN: 1907-7491); 15) “Keterkaitan Belajar dengan Gaya Belajar Siswa” (*Jurnal Kajian Keislaman Sunan Giri* Vol. 1 No. 1, Juni 2012 ISSN: 2302-125x); 16) “Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan” (*Jurnal Falasifa* Vol. 3 No. 2, September 2012 ISSN: 2085-3815); 17) “Empati dan Munculnya Perilaku Altruistik Pada Masa Remaja. Edu-Islamika” (*The Indonesian Journal of Education and Islamic Sciencies* Vol. 4 No. 2, September 2012 ISSN: 2035-3645); 18) “Penerapan Strategi Belajar Aktif (Active Learning Strategy) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” (*Jurnal Al-Adalah* Vol. 16, No. 2 November 2012 ISSN: 1410-7406); 19) *Pesantren Waria: Menguak Kehidupan Keagamaan Kaum Santri Waria* (Penerbit Tangga Ilmu Yogyakarta, 2012); 20) *Potret Kebijakan Pendidikan Diniyah: Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah*. (Penerbit: Absolute Media, Yogyakarta, 2012); 21) “Membangun Karakter dan Kecerdasan Anak melalui Pendidikan Nilai” (Prosiding Seminar Nasional Peringatan Hari Ibu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 21 Desember 2013); 22) “Inovasi Pembelajaran PAI Berbasis Multiple Inteligences”. (*Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 3 No. 1 2015 P-ISSN: 2089-1946 E-ISSN: 2527-4511; 23); 23) “Menguak Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tentang Konsep Pendidikan Akhlak” (*Jurnal Edukasi* Vo. 5 No. 01, 2016; 24) “Penerapan Strategi Belajar Aktif (Active Learning Strategy) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” (*Jurnal ALAdalah* Vol. 16 No. 02, 2016, E-ISSN: 2684-8368 P-ISSN: 1410-7406); 25) “Meretas Pola Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Membentuk dan Mengembangkan Karakter Anak” (*FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 2, September 2018, 49-60. P-ISSN: 2085-3815 E-ISSN: 2527-8717); 26) “Pemikiran Seyyed Hossein Nasr: Konsep Keindahan dan Seni Islami dalam Dunia Pendidikan Islam” (*FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 1 Maret 2019, 27—44. P-ISSN: 2085-3815 E-ISSN: 2527-8717); 27) “Latar Belakang Pemikiran dan Kiprah Seyyed Hossein Nasr” (*FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2 September 2019, 132-146. P-ISSN: 2085-3815 E-ISSN: 2527-8717); 28) *Inovasi Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multiple Intelligences System pada Siswa Sekolah Dasar* (Penerbit: Literasi Nusantara, Batu); 29) “Kebahagiaan Pemimpin Perempuan dalam Menjalani Peran Ganda Perspektif Psikologi” (*FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 1 Maret 2020, 35-61. P-ISSN: 2085-3815 E-ISSN: 2527-8717); dan 30) “*Implikasi Hijab terhadap Pendidikan Akhlaq Anak*” (*FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11 No. 2, September 2020 P-ISSN: 2085-3815 E-ISSN: 2527-8717).



Muhammad Rafi'i lahir 13 Maret 1995 di Baringin, Tapanulis Selatan, anak dari Ali Jabbar Ritonga dan Nurida Rambe yang menetap di Desa Pinang Gading, Kec. Merlung, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi. Penulis adalah alumnus SDN 175/V desa Pinang Gading (2006). Kemudian pada 2006—2013 belajar di Pondok Pesantren Dzulhijjah sembari menempuh SMP S dan SMA S. Lalu, penulis melanjutkan Studi Sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (2013—2017). Selanjutnya, menempuh Studi Pascasarjana pada Jurusan Studi Ilmu Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017—2019). Ketika menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi PMII. Saat ini, penulis aktif mengajar di Institut Agama Islam Muhammad Azim dan UIN STS Jambi.



Fridiyanto adalah dosen yang pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi yakni: pada 2009—2020 mengajar di UIN Sumatera Utara; pada 2008—2009 di Fakultas Bahasa Universitas Muara Bungo; pada 2007—2009 di Akademi Sekretaris Manajemen Jambi; pada 2004—2009 di IAIN STS Jambi; pada 2007—2009 Akademi Bahasa Asing Jambi; dan pada 2007—2009 mengajar di Universitas Terbuka (2007-2009).

Penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis berbentuk buku, artikel, dan majalah yang dipresentasikan diberbagai forum. Buku-buku yang telah dihasilkan berjudul: 1) *Tan Malaka Guru Revolusioner Penggagas Pendidikan Kritis* (Gre Publishing, 2016); 2) *Membangkitkan Batang Tarandam: Reaktualisasi Visi Kebangsaan Bung Hatta dan Bung Sjahrir* (Gre Publishing, 2016); 3) *Menjadi Indonesia di Negeri Belanda: sebuah Catatan Etnografis* (Garuda Waca, 2015); 4) *Pembelajaran Pendidikan Multikultural Berbasis Penelitian: Suku, Agama, Ras, Gender, Urban* (GRE Publishing, 2018); 5) *Manajemen Strategik: Konsep Bisnis di Lembaga Pendidikan Islam* (Literasi Nusantara, 2018); 6) *Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi di Lembaga Pendidikan Islam, Dilengkapi Hasil Penelitian* (Literasi Nusantara, 2020); 7) *Kaum Intelektual dalam Catatan Kaki Kekuasaan* (GRE Publishing, 2018); 8) *Ideologi, Politik, dan Kebijakan Pendidikan* (Literasi Nusantara, 2020); 9) *The Hand Book Manajemen Pendidikan Islam* (Scientific Corner Publishing, 2020); 10) *Supervisi Pendidikan* (Scientific Corner Publishing, 2020); 11) *Manajemen Sumber Daya Insani dan Supervisi Pendidikan* (Literasi Nusantara, 2020); 12) *Paradigma Wahdatul Ulum* (Literasi Nusantara, 2020); 13) *Menjadi Guru Profesional* (Literasi Nusantara, 2020).

Penulis pernah mengikuti kegiatan dialog antar-agama pada Program Young Moslem Leader Exchange di Australia (2007). Kemudian, di tahun yang sama, ia mempresentasikan disertasinya di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Adapun selama tiga bulan pernah mengikuti program Research Assistance di Belanda. Selain itu, penulis juga aktif terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, sebagai pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul dan pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Wilayah Sumatera Utara.



Rikawati Ginting Munthe, S.E., M.Si. dilahirkan di Medan pada 14 Februari 1980 dan merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Penulis sekolah di: SD Negeri 064033 (lulus tahun 1992); SMP Negeri 8 Medan (lulus tahun 1995); SMU Negeri 17 Medan (lulus tahun 1998); S-1 Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1998); dan S-2 Psikologi Sains Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (2012).

Penulis telah menikah dengan Gema Helelu Isa dan dikarunia seorang anak laki-laki dengan nama panggilan Evan. Sejak 2016 hingga saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen di Program Studi Manajemen Universitas Quality di Medan.



Muhaemin, Lahir di Camming pada 3 Februari 1979 dari pasangan Drs. H. Muhammadiyah dan Hj. Harming, S.Pd. Ia telah memiliki istri bernama dr. Nurhasanah Sabir yang selalu memberikan motivasi dalam kehidupan penulis dan memiliki sepasang anak bernama M. Hanif Muhaemin dan Nurul Iffah.

Penulis menamatkan Pendidikan SD di Camming pada 1991, kemudian melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Ma'had Hadits Biru Bone selama 6 tahun (1991–1997) untuk jenjang MTs dan Aliyah. Setelah menyelesaikan Pendidikan S-1 (2002) di program studi Pendidikan Bahasa Arab STAIN Watampone dengan predikat *cum laude*, ia menempuh pendidikan pascasarjana Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah dan lulus tahun 2004. Pada 2009, ia mengikuti *Short Course for Academic Writing*, Asia Research Institute National University of Singapore. Kemudian pada 2010, ia meraih gelar Doktor Pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Pendidikan Islam di bawah promotor Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Prof. Dr. Abuddin Nata.

Beberapa buku yang telah ditulis berjudul: 1) *Lembaga Kemahasiswaan, Sejarah, Aksi dan Perannya* (2002); 2) *Sistem Pendidikan Nasional dan Kecenderungan Lokalitas* (2006); 3) *Bina Aqidah Akhlak Jilid III, V, dan VI* (2006); 4) *Bina Aqidah Akhlak jilid IV dan jilid V* (2009); 5) *Komponen Pendidikan dalam Perspektif Islam* (2010); dan 6) *Ilmu Pendidikan Islam* (2014). Selain itu, penulis juga menjadi editor buku *Perjalanan Madrasah 2004–2009* yang ditulis oleh Ditjen Pendis Depag RI (2009) dan buku *Kebijakan Pembinaan Madrasah 2004–2009* yang ditulis oleh Direktorat

Mapenda Depag RI (2009). Ada pula artikel-artikel yang telah dimuat di jurnal nasional maupun internasional.

Pengabdianya sebagai dosen dimulai sejak 2003 di Universitas Muslim Asia Afrika Jakarta dan tercatat sebagai dosen tetap sejak 1 Januari 2005 hingga sekarang di IAIN Palopo. Mulai 2019 hingga saat ini, penulis menjabat sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama IAIN Palopo. Pada 2010—2015, penulis mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala pusat penjaminan Mutu STAIN Palopo. Kemudian pada 2015—2019 menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Sejak 2019 hingga saat ini telah menjabat sebagai Pimpinan redaksi *Journal of Teaching and Learning Research*. Selain itu, penulis juga aktif sebagai *reviewer* diberbagai jurnal nasional baik yang terindeks nasional maupun internasional. Saat ini, penulis juga menduduki jabatan sebagai Lektor Kepala Ilmu Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Palopo dan Ketua Yayasan Bait Fitrah Al Insani Palopo.

Kontak yang dapat dihubungi: 081342077397 atau melalui surel: muhaemin@iainpalopo.ac.id

